

# KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya yang tak terhingga bagi bangsa dan tanah air tercinta ini, karena sampai saat ini kita masih diberi kesehatan yang prima sehingga dapat mengemban tugas untuk mewujudkan cita-cita bangsa ke arah kemajuan, kesejahteraan dan keadilan di segala bidang.

Pembangunan tahun anggaran 2012 merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD DIY Tahun 2009-2013 yang telah menunjukkan keberhasilan. Hal tersebut berkat buah pikiran dan kerja sama seluruh *stakeholders* pembangunan di DIY. Namun demikian, kami menyadari bahwa masih dijumpai tantangan dan masalah, sehingga masih ada sasaran yang belum sesuai target yang direncanakan. Optimisme yang tinggi senantiasa tetap dimiliki untuk lebih meningkatkan kinerja pada tahun-tahun mendatang.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta disusun berdasarkan pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 dengan komitmen dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pemda DIY tahun 2012.

Akhirnya laporan ini dapat menjadi sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek

perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Yogyakarta, Maret 2013

**GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**HAMENGKU BUWONO X**

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Visi pembangunan jangka menengah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2013 adalah *“Pemerintah daerah yang katalistik dan masyarakat mandiri yang berbasis keunggulan daerah serta sumberdaya manusia yang berkualitas unggul dan beretika.”* Untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui empat misi pembangunan daerah, yaitu (a) Mengembangkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, profesional, humanis dan beretika dalam mendukung terwujudnya budaya yang adiluhung; (b) Memperkuat fondasi kelembagaan dan memantapkan struktur ekonomi daerah berbasis pariwisata yang didukung potensi lokal dengan semangat kerakyatan menuju masyarakat yang sejahtera; (c) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola pemerintahan yang berbasis *Good Governance*; dan (d) Memantapkan prasarana dan sarana daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik.

Tema pembangunan tahun 2012 yang merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD Tahun 2009-2013 adalah *“Perluasan Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan kembali akibat bencana guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.”* Adapun prioritas pembangunan DIY Tahun 2012 adalah: (1) Pendidikan dan Kebudayaan; (2) Kesehatan; (3) Pariwisata; (4) Ketahanan Pangan dan Agro Industri; (5) Iklim Investasi dan Usaha; (6) Infrastruktur; (7) Penanggulangan Kemiskinan; (8) Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana; (9) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; dan (10) Pengarusutamaan Gender. Untuk mendukung pelaksanaan tema pembangunan 2012 guna mewujudkan visi, misi, dan tujuan Pemda DIY jangka menengah ditetapkan sasaran-sasaran pembangunan dan indikator kinerja sebagai tolak ukur capaiannya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Pemda DIY ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah yang memuat rencana pembangunan, tingkat capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran-sasaran pembangunan. Sasaran dan indikator kinerja yang dipilih termuat dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur Tahun 2009-2013 yang telah mengacu pada RPJMD Pemda DIY Tahun

2009-2013, di mana indikator yang digunakan adalah indikator kinerja utama yang dianggap mampu mengukur pencapaian sasaran yang dimaksud. Untuk mencapai sasaran pembangunan tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, dan program pembangunan seperti telah dirumuskan dalam rencana jangka menengah.

Dari analisis 17 sasaran pembangunan, terdapat 112 indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolak ukur. Pada tahun 2012, 76 indikator yang telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar 67,86% dari total indikator. Sementara itu, sebanyak 36 indikator atau sebesar 32,14% belum memenuhi target. Tidak tercapainya target disebabkan oleh berbagai faktor kendala. Selanjutnya, ada 2 indikator yang pada tahun 2012 tidak ada realisasinya yaitu indikator pada sasaran peningkatan prestasi olahraga. Indikator tersebut adalah prestasi olahraga POPNAS dan POSPENAS yang keduanya tidak diselenggarakan pada tahun 2012.

Hal tersebut disebabkan berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Kondisi ini akan menjadi perhatian dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang dan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>9</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>13</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 PEMERINTAHAN .....	1
1.1.1 Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta .....	1
1.1.2 Kepegawaian .....	6
1.2 KONDISI GEOGRAFIS DAERAH .....	7
1.2.1 Batas Administrasi .....	7
1.2.2 Luas Wilayah .....	8
1.2.3 Topografi .....	9
1.3 GAMBARAN UMUM DEMOGRAFI .....	11
1.3.1 Jumlah Penduduk .....	11
1.3.2 Angkatan Kerja dan Ketenagakerjaan .....	15
1.3.3 Pendidikan .....	20
1.3.4 Penduduk Miskin .....	23
1.4 KONDISI PEREKONOMIAN DAERAH .....	24
1.5 SISTEMATIKA .....	28
<b>BAB 2 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b> .....	<b>31</b>
2.1 PERENCANAAN DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) 2009-2013 .....	32
2.1.1 Visi dan Misi .....	32
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Strategis .....	33
2.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi Daerah .....	43
2.1.3.1 Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Misi Pertama: .....	43

2.1.3.2	Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Misi Kedua:.....	48
2.1.3.3	Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Misi Ketiga:.....	53
2.1.3.4	Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Misi Keempat:.....	55
2.2	RENCANA KINERJA PEMBANGUNAN TAHUNAN PEMDA DIY TAHUN 2012.....	58
2.3	PENETAPAN KINERJA .....	73
2.4	RENCANA ANGGARAN TAHUN 2012 .....	82
2.5	INSTRUMEN PENDUKUNG.....	84
<b>BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>		<b>91</b>
3.1	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2012 .....	91
3.2	EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	101
3.2.1	Sasaran Terwujudnya Peningkatan Kualitas Lulusan di Semua Jenjang dan Jalur Pendidikan .....	101
3.2.1.1	Persentase Kinerja Peningkatan Mutu Pendidikan SD/MI .....	102
3.2.1.2	Persentase Kinerja Peningkatan Mutu Pendidikan SMP/MTs .....	107
3.2.1.3	Persentase Kinerja Peningkatan Mutu Pendidikan SM (SMA/MA/SMK) .....	112
3.2.2	Sasaran Terwujudnya Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Pendidikan Kepada Seluruh Masyarakat dalam Suasana Lingkungan yang Kondusif .....	118
3.2.2.1	Persentase Kinerja Pemerataan dan Perluasan Pendidikan SD/MI .....	119
3.2.2.2	Persentase Kinerja Pemerataan dan Perluasan Pendidikan SMP/MTs .....	122
3.2.2.3	Persentase Kinerja Pemerataan dan Perluasan Pendidikan SM (SMA/MA/SMK) .....	124
3.2.3	Sasaran Terwujudnya Peningkatan Budaya Baca Masyarakat.....	128
3.2.4	Sasaran Terwujudnya Peningkatan Prestasi Olahraga .....	133
3.2.5	Sasaran Berkembang Dan Lestarinya Budaya Lokal, Kawasan Budaya, dan Benda Cagar Budaya (BCB) .....	136
3.2.6	Sasaran Terwujudnya Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat.....	142
3.2.7	Sasaran Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Kesehatan bagi Seluruh Masyarakat.....	149

3.2.8	Sasaran Terwujudnya Kepariwisata yang Berdaya Saing Tinggi.....	158
3.2.9	Sasaran Terwujudnya Peningkatan Ketahanan Ekonomi Masyarakat .....	165
3.2.10	Sasaran Terwujudnya Ketersediaan dan Kecukupan Konsumsi Pangan yang meliputi Energi dan Protein untuk Masyarakat.....	172
3.2.11	Sasaran Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pengelolaan Ketenagakerjaan.....	179
3.2.12	Sasaran Terwujudnya Pemerintahan yang Responsif, Transparan, dan Akuntabel .....	185
3.2.13	Sasaran Terwujudnya Kesetaraan Gender.....	189
3.2.14	Sasaran Terwujudnya Ketersediaan Infrastruktur yang Memadai baik Kuantitas dan Kualitas .....	193
3.2.15	Sasaran Terwujudnya Pemerataan Sarana dan Prasarana Publik	199
3.2.16	Sasaran Terwujudnya Ketahanan Masyarakat terhadap Bencana	212
3.2.17	Sasaran Terwujudnya Pembangunan Daerah yang Berwawasan Lingkungan.....	215
	3.2.17.1 Kualitas Udara .....	217
	3.2.17.2 Kualitas Air Tanah/Sungai.....	218
3.3	AKUNTABILITAS ANGGARAN.....	222
<b>BAB 4 PENUTUP .....</b>		<b>225</b>
4.1	KESIMPULAN.....	225
4.2	SARAN .....	226
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>228</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah PNS di DIY Menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan Tahun 2012 .....	6
Tabel 1.2	Rata-rata Suhu Udara, Kelembaban, Tekanan Udara, Kecepatan Angin, Arah Angin, Curah Hujan dan Hari Hujan di DIY Tahun 2012.....	10
Tabel 1.3	Jumlah Penduduk DIY Hasil Sensus Penduduk 2010 .....	11
Tabel 1.4	Estimasi Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2011.....	11
Tabel 1.5	Proyeksi Penduduk Tahun 2012 (berdasarkan SP 2000) Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di DIY (x 1.000).....	13
Tabel 1.6	Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Kegiatan di DIY.....	15
Tabel 1.7	Prosentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Februari 2010-Agustus 2012.....	16
Tabel 1.8	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama Februari 2010-Agustus 2012.....	17
Tabel 1.9	IPM Menurut Komponen dan Kabupaten/Kota di DIY, 2011 .....	21
Tabel 1.10	Jumlah Penduduk Usia Sekolah Menurut Wilayah di DIY 2011 .....	21
Tabel 1.11	Jumlah Penduduk Miskin di DIY Menurut Wilayah, 2005-2012.....	23
Tabel 1.12	Pertumbuhan PDRB DIY Menurut Lapangan Usaha, 2012 .....	24
Tabel 1.13	Nilai PDRB DIY Menurut Lapangan Usaha, 2011-2012 (Miliar Rp) .....	25
Tabel 1.14	Kontribusi Sektor Terhadap PDRB di DIY, 2009-2012 .....	26

Tabel 1.15	Nilai dan Laju Pertumbuhan PDRB DIY Menurut Penggunaan, 2011-2012 .....	26
Tabel 1.16	Nilai PDRB per Kapita DIY, 2009-2012 (Rupiah) .....	27
Tabel 1.17	Laju Inflasi Kota Yogyakarta Tahun 2012 Menurut Kelompok Pengeluaran.....	27
Tabel 2.1	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja .....	35
Tabel 2.2	Prioritas dan Sasaran Strategis Pembangunan DIY Tahun 2012 .....	59
Tabel 2.3	Penetapan Kinerja Pemerintah DIY Tahun 2012 .....	75
Tabel 2.4	Target Belanja Daerah .....	82
Tabel 2.5	Alokasi Anggaran per Sasaran Pembangunan Tahun Anggaran 2012.....	82
Tabel 3.1	Capaian Kinerja DIY Tahun 2012 .....	92
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Indikator Persentase Kinerja Peningkatan Mutu Pendidikan SD/MI di DIY Tahun 2012.....	102
Tabel 3.3	Capaian Komponen Indikator Kinerja Peningkatan Mutu Pendidikan SD/MI di DIY, 2010-2012 .....	103
Tabel 3.4	Jumlah Guru Bersertifikat SD/MI di DIY, 2011-2012.....	107
Tabel 3.5	Capaian Kinerja Indikator Persentase Kinerja Peningkatan Mutu Pendidikan SMP/MTs di DIY.....	108
Tabel 3.6	Capaian Komponen Indikator Kinerja Peningkatan Mutu Pendidikan SMP/MTs di DIY, 2010-2012 .....	108
Tabel 3.7	Jumlah Guru Bersertifikasi SMP/MTs di DIY, 2011-2012.....	111
Tabel 3.8	Capaian Kinerja Indikator Persentase Kinerja Peningkatan Mutu Pendidikan SM (SMA/MA/SMK) di DIY .....	112
Tabel 3.9	Capaian Komponen Indikator Kinerja Mutu Pendidikan SM 9SMA/MA/SMK) di DIY, 2010-2012 .....	112
Tabel 3.10	Jumlah Guru Bersertifikasi SM (SMA/MA/SMK) di DIY, 2011-2012 .....	116
Tabel 3.11	Jumlah Sekolah Standar Nasional (SSN), Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) dan Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal di DIY, 2011-2012.....	116
Tabel 3.12	Capaian Kinerja Indikator Persentase Kinerja Pemerataan dan Perluasan Pendidikan SD/MI di DIY .....	119
Tabel 3.13	Capaian Komponen Indikator Kinerja Pemerataan dan Perluasan Pendidikan SD/MI di DIY, 2010-2012.....	120

Tabel 3.14	Capaian Kinerja Indikator Persentase Kinerja Pemerataan dan Perluasan Pendidikan SMP/MTs di DIY .....	122
Tabel 3.15	Capaian Komponen Indikator Kinerja Pemerataan dan Perluasan Pendidikan SMP/MTs di DIY, 2011-2012 .....	123
Tabel 3.16	Capaian Kinerja Persentase Kinerja Pemerataan dan Perluasan Pendidikan SM (SMA/MA/SMK) di DIY .....	124
Tabel 3.17	Capaian Komponen Indikator Kinerja Pemerataan dan Perluasan Pendidikan SM (SMA/MA/SMK) di DIY, 2011-2012.....	125
Tabel 3.18	Capaian Kinerja Sasara Terwujudnya Peningkatan Budaya Baca Masyarakat.....	128
Tabel 3.19	Jumlah Perpustakaan di DIY Tahun 2011 .....	129
Tabel 3.20	Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Peningkatan Prestasi Olahraga.....	134
Tabel 3.21	Capaian Kinerja Sasaran Berkembang dan Lestarinya Budaya Lokal, Kawasan Budaya, dan Benda Cagar Budaya (BCB) .....	137
Tabel 3.22	Capaian Kinerja Sasara Terwujudnya Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat .....	143
Tabel 3.23	Tabulasi Data PMKS di DIY, 2011-2012 .....	145
Tabel 3.24	Realisasi Pemberdayaan PSKS di DIY Tahun 2008-2012....	146
Tabel 3.25	Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Kesehatan Bagi Seluruh Masyarakat .....	149
Tabel 3.26	Jumlah Obyek Wisata dan Sarana Pendukung Pariwisata di DIY .....	159
Tabel 3.27	Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Kepariwisataaan yang Berdaya Saing Tinggi, 2011-2012.....	160
Tabel 3.28	Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan Tahun 2009-2012.....	162
Tabel 3.29	Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Peningkatan Ketahanan Ekonomi Masyarakat .....	165
Tabel 3.30	Realisasi Investasi PMA/PMDN Provinsi DIY Tahun 2007-2012.....	169
Tabel 3.31	Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Ketersediaan dan Kecukupan Konsumsi Pangan yang Meliputi Energi dan Protein untuk Masyarakat .....	173
Tabel 3.32	Hasil Survei Pola Pangan Harapan Tahun 2012 .....	174

Tabel 3.33	Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pengelolaan Ketenagakerjaan.....	182
Tabel 3.34	Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Pemerintahan yang Responsif, Transparan, dan Akuntabel, 2011-2012 ....	187
Tabel 3.35	Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Kesetaraan Gender Tahun 2011-2012 .....	189
Tabel 3.36	Capaian Kinerja Sasaran Ketersediaan Infrastruktur yang Memadai Baik Secara Kuantitas dan Kualitas .....	193
Tabel 3.37	Luas Daerah Irigasi yang Terlayani Air Tahun 2011-2012.....	195
Tabel 3.38	Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Pemerataan Sarana dan Prasarana Publik.....	201
Tabel 3.39	Rasio Elektrifikasi di DIY .....	208
Tabel 3.40	Kapasitas Energi Listrik di DIY Tahun 2011-2012.....	210
Tabel 3.41	Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Ketahanan Masyarakat Terhadap Bencana .....	213
Tabel 3.42	Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Pembangunan Daerah yang Berwawasan Lingkungan .....	216
Tabel 3.43	Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2012 .....	223

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Administrasi .....	7
Gambar 1.2	Luas Wilayah DIY Menurut Kabupaten/Kota.....	9
Gambar 1.3	Luas Wilayah DIY Menurut Jenis Tanah .....	10
Gambar 1.4	Persebaran Jumlah Penduduk DIY Menurut Kabupaten/Kota (%), 2011 .....	12
Gambar 1.5	Laju Pertumbuhan Penduduk DIY Menurut Kabupaten/Kota (%), 2010-2011 .....	14
Gambar 1.6	Kepadatan Penduduk di DIY Menurut Kabupaten/Kota (Jiwa/Km <sup>2</sup> ), 2010-2011.....	15
Gambar 1.7	TPAK di DIY, Agustus 2011-Agustus 2012 .....	18
Gambar 1.8	Tingkat Pengangguran Terbuka di DIY dan di Tingkat Nasional Februari 2009-Agustus 2012 (%).....	19
Gambar 1.9	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota di DIY, Agustus 2011 dan Agustus 2012 (%) .....	20
Gambar 1.10	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia, 2005- 2011 .....	20
Gambar 1.11	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi DIY, 2008-2012 .....	24
Gambar 2.1	Tampilan Kalender Perencanaan .....	85
Gambar 2.2	Tampilan Halaman Muka Jogjaplan.....	86
Gambar 2.3	Tampilan Menu Jogjaplan .....	86
Gambar 2.4	Tampilan Halaman GIS Perencanaan Pada Jogjaplan .....	87
Gambar 2.5	Tampilan Halaman Muka Web Monev DIY.....	88
Gambar 2.6	Tampilan Menu Web Monev DIY.....	89
Gambar 2.7	Tampilan Menu Monev Tiap Tahun dan Tiap SKPD DIY .....	89
Gambar 2.8	Tampilan Pilihan Menu Jenis Laporan Yang Akan Disajikan Pada Web Monev DIY.....	90
Gambar 3.1	Peningkatan Kualitas Lulusan Siswa .....	102

Gambar 3.2	Capaian Angka Mengulang, Angka Lulusan, dan Angka Putus Sekolah SD/MI DIY (%), 2010-2012 .....	104
Gambar 3.3	Ketersediaan Fasilitas Sekolah SD/MI di DIY (unit), 2010-2012 .....	106
Gambar 3.4	Capaian Angka Mengulang, Angka Lulusan, dan Angka Putus Sekolah SMP/MTs di DIY (%), 2010-2012.....	109
Gambar 3.5	Ketersediaan Fasilitas Sekolah SMP/MTs di DIY, 2010-2012.....	110
Gambar 3.6	Capaian Angka Putus Sekolah, Angka Lulusan, dan Angka Mengulang SM di DIY (%), 2010-2012 .....	113
Gambar 3.7	Ketersediaan Fasilitas Sekolah SM di DIY (Unit), 2010-2012.....	115
Gambar 3.8	Suasana Belajar dan Mengajar .....	118
Gambar 3.9	Capaian Komponen Indikator Kinerja Pemerataan dan Perluasan Pendidikan SD/MI di DIY, 2010-2012.....	121
Gambar 3.10	Target dan Capaian Presentase Angka Melek Huruf di DIY, 2010-2012 .....	127
Gambar 3.11	Aktivitas Membaca Siswa .....	128
Gambar 3.12	Pelepasan Kontingen PON .....	133
Gambar 3.13	Kawasan Benteng Vredeborg.....	137
Gambar 3.14	PKL Pada Kawasan Malioboro .....	142
Gambar 3.15	Target dan realisasi Cakupan Penanganan PMKS, 2009-2013 dalam Persen (%).....	145
Gambar 3.16	Kualitas dan akses Kesehatan Masyarakat .....	149
Gambar 3.17	Grafik Umur Harapan Hidup Penduduk DIY Hasil Sensus Penduduk.....	151
Gambar 3.18	Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran .....	152
Gambar 3.19	Angka Kematian Bayi (IMR) per 1000 Kelahiran Hidup di DIY SP 1971 (1967) s/d. 2012 .....	153
Gambar 3.20	Angka Kematian Ibu DIY dan Nasional Tahun 2004-2011.....	154
Gambar 3.21	Prevalensi Gizi Buruk di DIY Tahun 2004-2012 .....	155
Gambar 3.22	Tamansari Pendukung Pariwisata Yogyakarta .....	158
Gambar 3.23	Jumlah Kunjungan Wisatawan Tahun 2009-2012 .....	161
Gambar 3.24	Penyelenggaraan MICE Tahun 2009-2012.....	163
Gambar 3.25	Kerajinan Pendukung Pertumbuhan Ekonomi .....	165
Gambar 3.26	Panen Inpari di Gunungkidul.....	173

Gambar 3.27 Pembatik DIY Pendukung Penyediaan Lapangan Kerja Untuk Sektor Strategis Berbasis Budaya.....	179
Gambar 3.28 Tingkat Pengangguran Terbuka di DIY, 2009-2012.....	180
Gambar 3.29 Peresmian Gerai Pelayanan Perizinan.....	186
Gambar 3.30 Anak Bantul Sadar Gender .....	189
Gambar 3.31 Perkembangan Target dan Realisasi IPG DIY, 2009-2012 ..	190
Gambar 3.32 Perkembangan Target dan Realisasi GEM DIY, 2009- 2012 .....	191
Gambar 3.33 Transjogja Sebagai Icon DIY .....	193
Gambar 3.34 Kereta Api Pendukung Aksesibilitas Antar Wilayah .....	200
Gambar 3.35 Ketahanan Masyarakat Terhadap Bencana .....	212
Gambar 3.36 Kondisi Sungai Code Yogyakarta .....	215



# BAB 1

## PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun 2012 dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan disusunnya LAKIP Pemerintah Daerah DIY ini, diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Mendorong Pemerintah Daerah DIY untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat DIY.
2. Menjadikan Pemerintah Daerah DIY yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan.
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah DIY.
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat di DIY terhadap penyelenggara Pemerintah Daerah DIY.

### 1.1 PEMERINTAHAN

---

#### 1.1.1 Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta

Keberadaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam konteks historis yuridis bermula pada sejarah berdirinya Kasultanan Ngayogyakarta

Hadiningrat berdasarkan Perjanjian Giyanti 1755. Berawal dari sinilah muncul suatu sistem pemerintahan yang teratur dan kemudian berkembang, hingga akhirnya eksis sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta (setingkat provinsi) yang merupakan suatu bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat didirikan pada tahun 1755 oleh Pangeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengku Buwono I, sedangkan Kadipaten Pakualaman didirikan pada tahun 1813 oleh Pangeran Notokusumo (saudara Sultan Hamengku Buwono II) yang bergelar Adipati Paku Alam I.

Sejak berdirinya, baik Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat maupun Kadipaten adalah pemerintahan kerajaan yang diakui kedaulatannya. Pada masa kolonial Belanda, pemerintahan di Kasultanan Yogyakarta diatur kontrak politik yang dilakukan pada tahun 1877, 1921, dan 1940, antara Sultan dengan Pemerintah Kolonial Belanda. Hal ini menunjukkan bahwa Keraton tidak tunduk begitu saja kepada Belanda. Pemerintah Hindia Belanda mengakui Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman sebagai kerajaan yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintahannya sendiri yang dikenal dengan istilah *zifbesturende landschappen*. Kontrak politik terakhir Kasultanan Ngayogyakarta tercantum dalam *Staatsblaad* 1941 Nomor 47, sedangkan kontrak politik Kadipaten Pakualaman dalam *Staatsblaad* 1941 Nomor 577.

Pada masa pendudukan Jepang, Yogyakarta diakui sebagai Daerah Istimewa atau *Kooti* dengan *Koo* sebagai kepalanya, yakni Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Di bawah *Kooti*, secara struktural ada wilayah-wilayah pemerintahan tertentu dengan para pejabatnya.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia (RI), Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII menyatakan kepada Presiden RI bahwa Daerah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Daerah Kadipaten Pakualaman menjadi wilayah Negara RI, bergabung menjadi satu kesatuan yang dinyatakan sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI. Hal tersebut dinyatakan dalam:

1. Piagam Kedudukan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 19 Agustus 1945 dari Presiden RI;
2. Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 5 September 1945 (dibuat secara terpisah);

3. Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 30 Oktober 1945 (dibuat dalam satu naskah).

Amanat tersebut merupakan terobosan yang berani dan strategis bagi perjuangan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Pada tanggal 6 September 1945 Pemerintah Pusat menyampaikan Piagam Kedudukan yang merupakan pengakuan dan penetapan sebagai jawaban atas amanat tersebut.

Keunikan pengalaman Yogyakarta merupakan salah satu fakta yang menjadikannya sebagai daerah istimewa. Dalam proses perkembangan pemerintahannya, Yogyakarta berproses dari tipe pemerintahan yang paling feodal dan tradisional menjadi suatu pemerintahan dengan struktur dan penyelenggaraannya yang lebih dekat dengan demokrasi barat dibanding dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Perkembangan ini berlangsung dalam waktu yang relatif cepat.

Dalam sejarah kedudukan keistimewaan DIY, terdapat suatu masa yang strategis, yaitu pada masa awal kemerdekaan yang menunjukkan adanya perhatian, komitmen, dan dukungan yang besar dari penguasa atas berdirinya Negara Republik Indonesia sebagai tonggak sejarah Indonesia secara keseluruhan. Sejarah telah memberikan pemahaman dan bukti bahwa DIY merupakan pusat perjuangan, bahkan pernah menjadi Ibukota Negara (4 Januari 1946–27 Desember 1949) serta tempat terjadinya berbagai peristiwa besar terkait perintisan dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan republik ini.

Dalam perkembangan dan dinamika negara bangsa terdapat keterkaitan yang erat antara Republik Indonesia dan DIY. Entitas DIY mempunyai aspek politis-yuridis berkaitan dengan sejarah berdirinya yang merupakan wujud pengintegrasian diri dari sebuah “negara” (kerajaan) ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, secara sadar melalui amanat Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII. Tidak dapat dimungkiri, dalam pembinaan semangat nasionalisme, pergerakan, dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan NKRI, DIY mempunyai peranan yang penting.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan respons atas eksistensi DIY dan juga merupakan pengakuan kewenangan untuk menangani berbagai urusan dalam menjalankan pemerintahan serta urusan yang bersifat khusus. Undang-undang ini telah diubah dan ditambah, terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1819) yang sampai saat ini masih berlaku. Dalam Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa DIY merupakan daerah setingkat provinsi dan meliputi bekas

Daerah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Daerah Kadipaten Pakualaman. Pada setiap undang-undang yang mengatur Pemerintahan Daerah, dinyatakan keistimewaan DIY tetap diakui, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.

Berdasarkan Amandemen Kedua UUD 1945, eksistensi DIY juga diakui dan dihormati sebagaimana tercantum dalam Pasal 18B ayat 1 dan (2). Dalam sejarah perkembangan undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah, keberadaan DIY juga tetap diakui. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur hal ini sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (8) dan (9). Pengaturan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tersebut secara redaksi sama dengan Pasal 18B Amandemen Kedua UUD 1945.

#### *Pasal 18B*

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang.*
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang.*

Dalam rangka perubahan dan penyesuaian serta penegasan Keistimewaan DIY Pemerintah Pusat telah mengesahkan UU No.13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan DIY yang disahkan 31 Agustus 2012 dan diundangkan pada tanggal 3 September 2012, yang dimaksud dengan Keistimewaan sesuai dengan pasal 1 angka 2 adalah keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki DIY berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa. Selanjutnya yang dimaksud dengan Kewenangan Istimewa sesuai dengan pasal 1 angka 3 adalah wewenang tambahan tertentu yang dimiliki DIY selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tentang pemerintah daerah.

Pengaturan Keistimewaan DIY bertujuan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan demokratis, ketentraman dan kesejahteraan masyarakat, menjamin ke-bhineka-tunggal-ika-an, dan melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa. Pengaturan tersebut berlandaskan atas pengakuan atas hak asal-usul, kerakyatan, demokrasi, kebhineka-tunggal-ika-an efektivitas

pemerintahan, kepentingan nasional dan pendayagunaan kearifan lokal. Oleh karenanya dengan memperhatikan aspek historis, sosiologis, dan yuridis substansi Keistimewaan DIY diletakkan pada tingkatan pemerintah provinsi.

Kewenangan dalam urusan Kestimewaan seperti yang tertuang dalam Undang-undang 13 Tahun 2012 Pasal 7 ayat 2 meliputi : tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; kelembagaan Pemerintah Daerah DIY ; kebudayaan ; pertanahan; dan tata ruang. Dengan demikian, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang meliputi kewenangan istimewa berdasarkan Undang-undang 13 Tahun 2012 dan kewenangan berdasarkan Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Pada saat ini, Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dipimpin oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Kadipaten Pakualaman dipimpin oleh Sri Paduka Paku Alam IX, yang sekaligus menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. Keduanya memainkan peran yang menentukan dalam memelihara nilai-nilai budaya dan adat istiadat Jawa, serta merupakan pemersatu masyarakat Yogyakarta. Dengan demikian pula, keduanya merupakan dwi-tunggal yang menjunjung kepemimpinan *hamemayu hayuning bawana*.

*Hamemayu Hayuning Bawana* mengandung makna sebagai kewajiban melindungi, memelihara, serta membina keselamatan dunia dan lebih mementingkan berkarya untuk masyarakat daripada memenuhi ambisi pribadi. Dunia yang dimaksud mencakup seluruh perikehidupan, baik dalam skala kecil (keluarga) maupun dalam skala lebih besar mencakup masyarakat dan lingkungan hidupnya, dengan mengutamakan darma bakti untuk kehidupan orang banyak, tidak mementingkan diri sendiri.

Sebagai tindak lanjut dari disahkannya Undang-undang nomor 13 tahun 2012 tentang keistimewaan DIY sudah dilakukan penyusunan Naskah Akademik Perda Istimewa yang meliputi :

1. Naskah Akademik Induk;
2. Naskah Akademik Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
3. Naskah Akademik Kelembagaan Pemerintah DIY;
4. Naskah Akademik Kebudayaan;
5. Naskah Akademik Pertanahan;
6. Naskah Akademik Tata Ruang

Selanjutnya lima Naskah Akademik (kecuali Naskah Akademik Induk) saat ini sedang disusun dan dibahas *legal draftingnya* atau Rancangan Peraturan Daerah Istimewa dan dalam tahap penyempurnaan, selanjutnya setelah final akan dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta. Merujuk pada Undang-undang Keistimewaan No 13 Tahun 2012, pasal 37 ayat (4) dalam penyiapan dan pembahasan rancangan Perdais, DPRD DIY dan Gubernur mendayagunakan nilai-nilai, norma, adat istiadat dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat dan memperhatikan masukan dari masyarakat DIY.

### 1.1.2 Kepegawaian

Pegawai sebagai aset dan unsur utama dalam organisasi memegang peranan yang sangat menentukan dalam pencapaian tujuan organisasi. Semua unsur sumber daya organisasi tidak akan berfungsi tanpa ditangani oleh manusia yang merupakan penggerak utama jalannya organisasi. Tanpa didukung dengan kinerja yang baik atau tinggi dari aparatur, suatu organisasi akan mengalami kesulitan dalam proses pencapaian tujuannya. Peningkatan profesionalisme pegawai dimaksudkan untuk mewujudkan sumber daya aparatur yang handal dan berkompeten dengan bidang tugasnya.

Jumlah pegawai negeri sipil (PNS) di DIY pada 31 Desember 2012 sebanyak 7.347 orang, terdiri dari 4.421 orang atau 60,17% berjenis kelamin laki-laki dan 2.926 orang atau 39,83% merupakan pegawai perempuan. Dilihat dari jenjang pendidikan PNS di DIY, sebagian besar merupakan pegawai dengan tingkat pendidikan S1 dan SLTA. Jumlah PNS dengan pendidikan S1 sebanyak 2.936 orang atau 39,96% dari total PNS, sedangkan PNS dengan pendidikan SLTA sebanyak 2.414 orang atau 32,86% dari total PNS di DIY.

**Tabel 1.1 Jumlah PNS di DIY Menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan Tahun 2012**

Keterangan	S3	S2	S1	SM	D3	D2/D1	SLT A	SLT P	SD	Jumlah
Laki-Laki	2	291	1.578	77	222	133	1.660	293	165	4.421
Perempuan	1	161	1.358	91	275	254	754	23	9	2.926
Jumlah	3	452	2.936	168	497	387	2.414	316	174	7.347
Persen thd total (%)	0,04	6,15	39,96	2,29	6,76	5,27	32,86	4,30	2,37	100

Sumber: BKD DIY

## 1.2 KONDISI GEOGRAFIS DAERAH

### 1.2.1 Batas Administrasi

Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di Pulau Jawa bagian tengah. DIY di bagian selatan dibatasi Lautan Indonesia, sedangkan di bagian timur laut, tenggara, barat, dan barat laut dibatasi oleh wilayah provinsi Jawa Tengah yang meliputi:

- Kabupaten Klaten di sebelah Timur Laut
- Kabupaten Wonogiri di sebelah Tenggara
- Kabupaten Purworejo di sebelah Barat
- Kabupaten Magelang di sebelah Barat Laut



Sumber: Bappeda DIY, 2012

### Gambar 1.1 Peta Administrasi

Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri atas empat kabupaten dan satu kota dengan 78 kecamatan dan 438 desa/kelurahan, dengan perincian:

1. Kota Yogyakarta terdiri atas 14 kecamatan dan 45 kelurahan/desa;
1. Kabupaten Bantul terdiri atas 17 kecamatan dan 75

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013

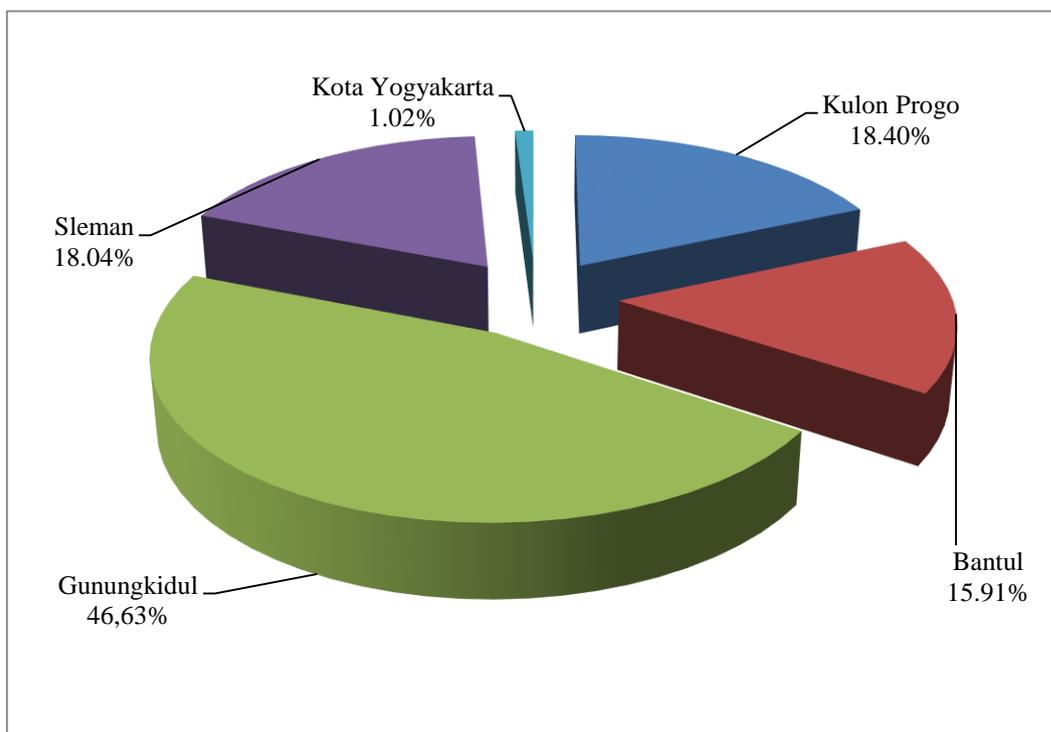
kelurahan/desa;

2. Kabupaten Kulon Progo terdiri atas 12 kecamatan, 88 kelurahan/desa;
3. Kabupaten Sleman terdiri atas 17 kecamatan dan 86 kelurahan/desa;
4. Kabupaten Gunungkidul terdiri atas 18 kecamatan dan 144 kelurahan/desa.

### 1.2.2 Luas Wilayah

Posisi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak antara 7°.33'-8°.12' Lintang Selatan dan 110°.00'- 110°.50' Bujur Timur, tercatat memiliki luas 3.185,80 km<sup>2</sup> atau 0,17% dari luas Indonesia (1.860.359,67 km<sup>2</sup>). DIY merupakan provinsi terkecil setelah Provinsi DKI Jakarta, yang terdiri atas:

1. Kota Yogyakarta, dengan luas 32,50 km<sup>2</sup> (1,02%);
2. Kabupaten Bantul, dengan luas 506,85 km<sup>2</sup> (15,91%);
3. Kabupaten Kulon Progo, dengan luas 586,27 km<sup>2</sup> (18,40%);
4. Kabupaten Sleman, dengan luas 574,82 km<sup>2</sup> (18,04%);
5. Kabupaten Gunungkidul, dengan luas 1.485,36 km<sup>2</sup> (46,63%).



Sumber: DIY Dalam Angka 2012, BPS DIY

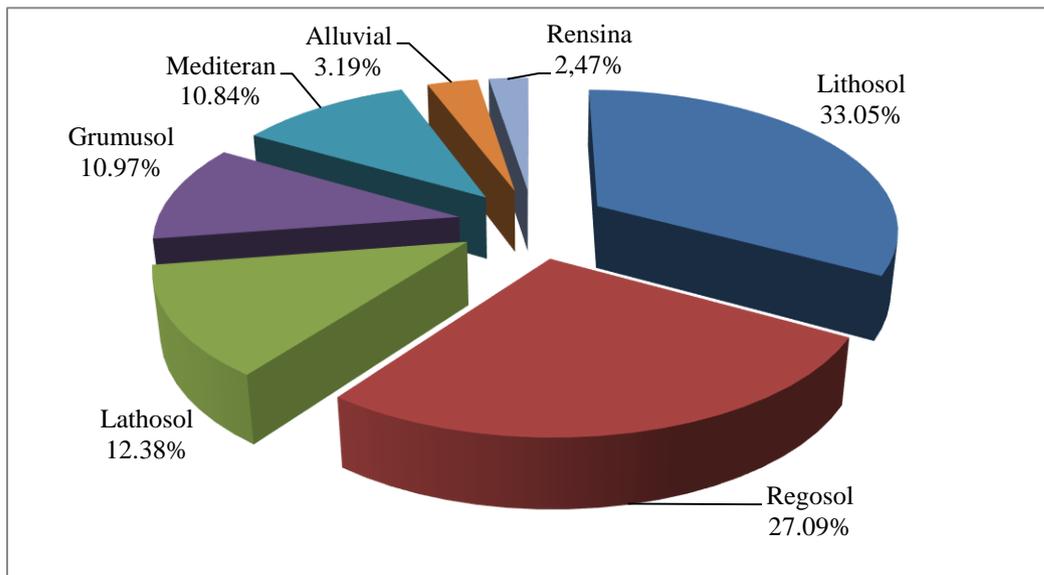
## Gambar 1.2 Luas Wilayah DIY Menurut Kabupaten/Kota

### 1.2.3 Topografi

Sebagian besar wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta atau sebesar 65,65% wilayah terletak pada ketinggian antara 100–499 m dari permukaan laut, 28,84% wilayah dengan ketinggian kurang dari 100 meter, 5,04% wilayah dengan ketinggian antara 500–999 m, dan 0,47% wilayah dengan ketinggian di atas 1000 m. Berdasarkan satuan fisiografis, Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri atas:

1. Satuan Pegunungan Selatan, seluas  $\pm 1.656,25$  km<sup>2</sup>, ketinggian 150 – 700 m, terletak di Kabupaten Gunungkidul (Pegunungan Seribu), yang merupakan wilayah perbukitan batu gamping (*limestone*) yang kritis, tandus, dan selalu kekurangan air. Pada bagian tengah berupa dataran Wonosari basin. Wilayah ini merupakan bentang alam solusional dengan bahan batuan induk batu gamping, yang mempunyai karakteristik lapisan tanah dangkal dan vegetasi penutup yang relatif jarang;
2. Satuan Gunung Berapi Merapi, seluas  $\pm 582,81$  km<sup>2</sup>, ketinggian 80 – 2.911 m, terbentang mulai dari kerucut gunung api hingga dataran fluvial Gunung Merapi, meliputi daerah Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan sebagian Kabupaten Bantul, serta termasuk bentang alam vulkanik. Daerah kerucut dan lereng Gunung Merapi merupakan hutan lindung dan sebagai kawasan resapan air;
3. Dataran rendah antara Pegunungan Selatan dan Pegunungan Kulon Progo seluas  $\pm 215,62$  km<sup>2</sup>, ketinggian 0 – 80 m, merupakan bentang alam fluvial yang didominasi oleh dataran Alluvial. Membentang di bagian selatan DIY mulai Kabupaten Kulon Progo sampai Kabupaten Bantul yang berbatasan dengan Pegunungan Seribu. Daerah ini merupakan wilayah yang subur. Bentang alam lain yang belum digunakan adalah bentang alam marine dan aeolin yang merupakan satuan wilayah pantai yang terbentang dari Kabupaten Kulon Progo sampai Bantul. Khusus Pantai Parangtritis, terkenal dengan laboratorium alamnya berupa gumuk pasir. Pegunungan Kulon Progo dan Dataran Rendah Selatan seluas  $\pm 706,25$  km<sup>2</sup>, ketinggian 0–572 m, terletak di Kabupaten Kulon Progo. Bagian utara merupakan lahan struktural denudasional dengan topografi berbukit yang mempunyai kendala lereng yang curam dan potensi air tanah yang kecil.

Dilihat dari jenis tanah, dari 3.185,80 km<sup>2</sup> luas Daerah Istimewa Yogyakarta, 33,05% merupakan jenis tanah Lithosol, 27,09% merupakan tanah Regosol, 12,38% tanah Lathosol, 10,97% tanah Grumusol, 10,84% tanah Mediteran, 3,19% Alluvial dan 2,47% adalah tanah jenis Rensina.



Sumber: DIY Dalam Angka 2012, BPS DIY

### Gambar 1.3 Luas Wilayah DIY Menurut Jenis Tanah

Menurut data dari Stasiun Geofisika Klas I Yogyakarta, suhu di DIY pada tahun 2012 berkisar antara 17,4<sup>o</sup> C - 35,4<sup>o</sup> C. Kelembaban udara pada tahun yang sama minimum 46% dan maksimum 97%, sedangkan tekanan udara berkisar antara 987,0 mb - 998,3 mb. Sementara itu, kecepatan angin mencapai maksimum 49,27 Km/jam dengan arah angindi Bulan Oktober-Maret bertiup dari arah barat dan di Bulan April-September bertiup dari arah timur. Curah hujan per hari pada tahun 2012 mencapai maksimum 118 mm dengan hari hujan per bulan sebanyak 23kali.

**Tabel 1.2 Rata-rata Suhu Udara, Kelembaban, Tekanan Udara, Kecepatan Angin, Arah Angin, Curah Hujan dan Hari Hujan di DIY Tahun 2012**

No	Uraian	Minimum	Maksimum
1	Suhu Udara (° C)	17,4	35,4
2	Kelembaban Udara (%)	46	97
3	Tekanan Udara (mBar)	987,0	998,3

No	Uraian	Minimum	Maksimum
4	Kecepatan Angin (Km/jam)	0	49,27
5	Curah Hujan per Hari (mm)	0	118
6	Hari Hujan per Bulan (kali)	0	23
7	Arah Angin	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Arah angin terbanyak di Bulan Oktober - Maret bertiup dari Arah Barat</li> <li>- Arah angin terbanyak di Bulan April-September bertiup dari Arah Timur</li> </ul>	

Sumber: Stasiun Geofisika Klas I Yogyakarta, 2013

## 1.3 GAMBARAN UMUM DEMOGRAFI

### 1.3.1 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk DIY pada tahun 2010 menurut hasil Sensus Penduduk (SP) 2010 sebanyak 3.457.491 jiwa dengan komposisi jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 1.708.910 jiwa dan perempuan sebanyak 1.748.581 jiwa. *Sex ratio* penduduk DIY sebesar 97,73.

Tabel 1.3 Jumlah Penduduk DIY Hasil Sensus Penduduk 2010

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Sex Ratio
Kulon Progo	190.694	198.175	388.869	96,23
Bantul	454.491	457.012	911.503	99,45
Gunungkidul	326.703	348.679	675.382	93,70
Sleman	547.885	545.225	1.093.110	100,49
Kota Yogyakarta	189.137	199.490	388.627	94,81
<b>DIY</b>	<b>1.708.910</b>	<b>1.748.581</b>	<b>3.457.491</b>	<b>97,73</b>

Sumber: DIY Dalam Angka 2011, BPSDIY

Tabel 1.4 Estimasi Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2011

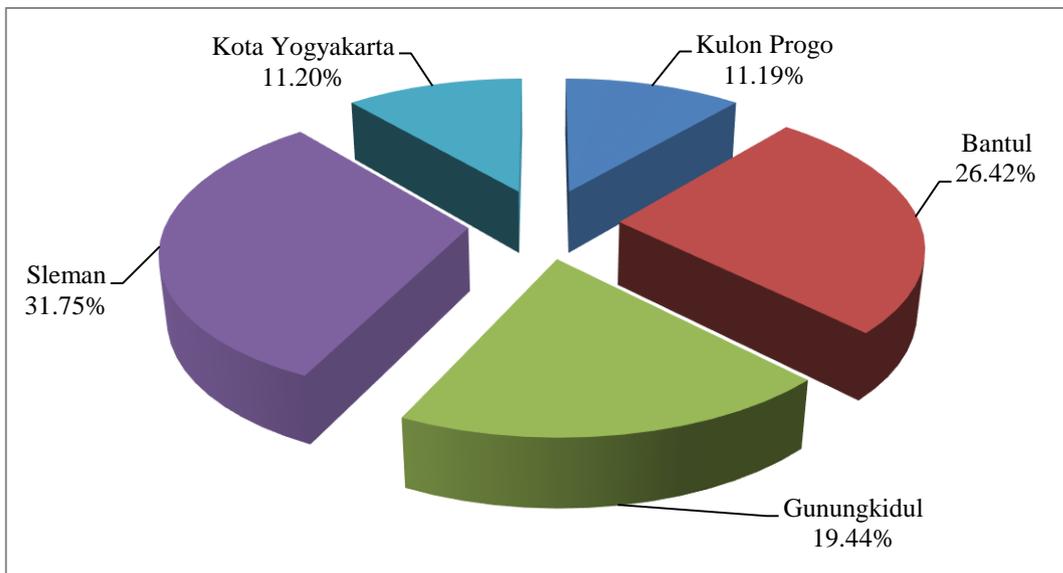
Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Sex Ratio
Kulon Progo	190.761	199.446	390.207	95,65
Bantul	461.524	459.739	921.263	100,39
Gunungkidul	320.006	357.992	677.998	89,39

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Sex Ratio
Sleman	534.644	572.660	1.107.304	93,36
Kota Yogyakarta	189.375	201.178	390.553	94,13
<b>DIY</b>	<b>1.696.310</b>	<b>1.791.015</b>	<b>3.487.325</b>	<b>94,71</b>

Sumber: DIY Dalam Angka 2012, BPS DIY

Estimasi jumlah penduduk DIY pada tahun 2011 menurut BPS sebanyak 3.487.325 jiwa dengan komposisi penduduk laki-laki sebanyak 1.696.310 jiwa dan perempuan sebanyak 1.791.015 jiwa. Dari tabel di atas, persebaran penduduk DIY menurut Kabupaten/Kota tahun 2011 terbanyak berada di Kabupaten Sleman yaitu sebanyak 1.107.304 jiwa atau sebesar 31,75%. Wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak kedua yaitu Kabupaten Bantul sebanyak 921.263 jiwa atau sebesar 26,42%, disusul oleh Kabupaten Gunungkidul pada urutan ketiga dengan jumlah penduduk sebanyak 677.998 jiwa atau sebesar 19,44%. Selanjutnya, wilayah dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulon Progo dengan jumlah penduduk masing-masing sebanyak 390.553 jiwa dan 390.207 jiwa atau sebesar 11,20% dan 11,19%.



Sumber: DIY Dalam Angka 2012, BPS DIY

**Gambar 1.4** Persebaran Jumlah Penduduk DIY Menurut Kabupaten/Kota (%), 2011

Sementara itu, proyeksi penduduk DIY tahun 2012 yang dilakukan oleh BPS dengan berdasarkan SP 2000, jumlah penduduk DIY tahun 2012 sebanyak 3.496.100 jiwa dengan komposisi penduduk laki-laki sebanyak

1.757.100 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 1.739.000 jiwa. Jumlah penduduk DIY masih didominasi oleh penduduk usia produktif.

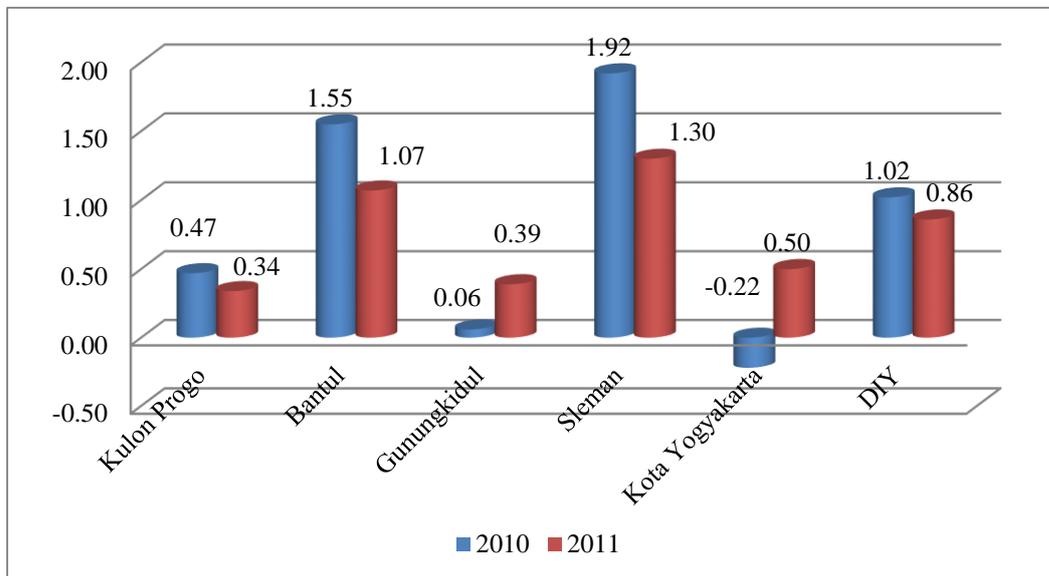
**Tabel 1.5** Proyeksi Penduduk Tahun 2012 (berdasarkan SP 2000)  
Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di DIY (x  
1.000)

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	109,0	104,1	213,1
4-9	104,5	100,6	205,1
10-14	100,3	96,6	196,9
15-19	121,1	113,3	234,4
20-24	155,9	139,2	295,1
25-29	191,6	162,4	354,0
30-34	193,4	168,8	362,2
35-39	148,7	142,4	291,1
40-44	121,0	127,5	248,5
45-49	113,6	123,5	237,1
50-54	103,5	110,5	214,0
55-59	86,3	90,4	176,7
60-64	65,0	71,2	136,2
65-69	49,9	59,0	108,9
70-74	42,0	52,8	94,8
75+	51,3	76,7	128,0
Jumlah	<b>1.757,1</b>	<b>1.739,0</b>	<b>3.496,1</b>

Sumber: DIY Dalam Angka 2012, BPS DIY

Berdasarkan data BPS, laju pertumbuhan penduduk DIY tahun 2011 sebesar 0,86% mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2010 sebesar 1,02. Dua wilayah dengan laju pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi pada tahun 2011 yaitu Kabupaten Sleman (1,30%) dan Kabupaten Bantul (1,07%). Namun demikian, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya laju pertumbuhan penduduk di dua wilayah tersebut mengalami penurunan. Tiga daerah lainnya memiliki laju pertumbuhan penduduk yang relatif rendah yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Kulon Progo. Untuk Kota Yogyakarta dan Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2011 justru mengalami kenaikan laju pertumbuhan penduduk, yaitu untuk Kota Yogyakarta sebesar -0,22% pada tahun 2010 menjadi 0,50% pada tahun 2011, sedangkan Kabupaten Gunungkidul dari 0,06% pada tahun 2010 menjadi 0,39% pada tahun 2011. Sementara itu, Kabupaten Kulon

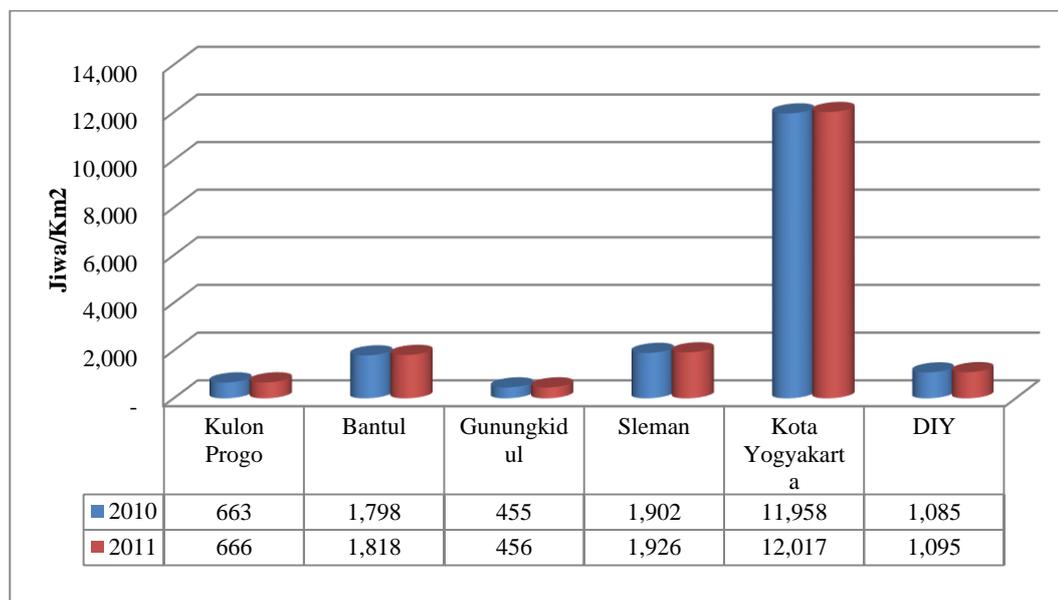
Progo mengalami penurunan laju pertumbuhan penduduk dari 0,47% pada tahun 2010 menjadi 0,34% pada tahun 2011.



Sumber: DIY Dalam Angka 2012, BPS DIY

**Gambar 1.5 Laju Pertumbuhan Penduduk DIY Menurut Kabupaten/Kota (%), 2010-2011**

Kepadatan penduduk di DIY pada tahun 2010 sebesar 1.085 jiwa/Km<sup>2</sup>, pada tahun 2011 mengalami kenaikan menjadi 1.095 jiwa/Km<sup>2</sup>. Kenaikan kepadatan penduduk terjadi pada seluruh kabupaten/kota di DIY. Daerah terpadat adalah Kota Yogyakarta yaitu 12.017 jiwa/Km<sup>2</sup>, sedangkan kepadatan terendah adalah Kabupaten Gunungkidul yaitu 456 jiwa/Km<sup>2</sup>. Secara umum, kepadatan penduduk berada pada wilayah yang relatif maju yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul.



Sumber: DIY Dalam Angka 2012, BPS DIY

**Gambar 1.6** Kepadatan Penduduk di DIY Menurut Kabupaten/Kota (Jiwa/Km<sup>2</sup>), 2010-2011

### 1.3.2 Angkatan Kerja dan Ketenagakerjaan

Jumlah angkatan kerja DIY menurut data BPS pada Agustus 2012 sebanyak 1.944.858 orang atau sebesar 70,85% dari total penduduk DIY berumur 15 tahun keatas. Jumlah angkatan kerja pada tahun 2012 ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2011 yang sebanyak 1.872.912 orang. Dari total penduduk berumur 15 tahun ke atas di DIY tahun 2012, 68,04%-nya merupakan penduduk bekerja sedangkan 2,81% merupakan pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka diperoleh dengan membandingkan antara jumlah pengangguran dengan angkatan kerja. Pada tahun 2012 tingkat pengangguran terbuka DIY sama dengan tahun 2011 yaitu sebesar 3,97%.

**Tabel 1.6** Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Kegiatan di DIY

Kegiatan	2010 (Agustus)		2011 (Agustus)		2012 (Agustus)	
	Orang	%	Orang	%	Orang	%
<b>Angkatan Kerja</b>	<b>1.882.296</b>	<b>69,76</b>	<b>1.872.912</b>	<b>68,77</b>	<b>1.944.858</b>	<b>70,85</b>
1. Bekerja	1.775.148	65,79	1.798.595	66,04	1.867.708	68,04
2. Pengangguran	107.148	3,97	74.317	2,73	77.150	2,81
<b>Bukan Angkatan Kerja</b>	<b>815.838</b>	<b>30,24</b>	<b>850.717</b>	<b>31,23</b>	<b>800.214</b>	<b>29,15</b>

Kegiatan	2010 (Agustus)		2011 (Agustus)		2012 (Agustus)	
	Orang	%	Orang	%	Orang	%
1. Sekolah	279.420	10,36	282.226	10,36	279.521	10,18
2. Mengurus RumahTangga	437.630	16,22	429.555	15,77	412.624	15,03
3. Lainnya	98.788	3,66	138.936	5,10	108.069	3,94
<b>Jumlah</b>	<b>2.698.134</b>	<b>100,00</b>	<b>2.723.629</b>	<b>100,00</b>	<b>2.745.072</b>	<b>100,00</b>

Sumber: DIY Dalam Angka, beberapa edisi, BPS DIY

Selama periode 2010-2012 komposisi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utamanya tidak banyak mengalami perubahan. Empat sektor yang relatif banyak menyerap tenaga kerja di DIY adalah sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor jasa-jasa dan sektor industri pengolahan. Sementara itu, sektor dengan jumlah tenaga kerja yang relatif rendah yaitu sektor konstruksi, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, real estate dan jasa perusahaan dan sektor lainnya (pertambangan, penggalian, listrik, gas dan air).

Data Bulan Agustus tahun 2012, sebagian besar penduduk DIY bekerja di sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor jasa-jasa dan sektor industri pengolahan. Penduduk yang bekerja di sektor pertanian sebanyak 26,91%, sedangkan di sektor perdagangan, hotel dan restoran sebanyak 24,87%, sektor jasa-jasa sebanyak 18,76% dan sektor industri pengolahan sebanyak 15,13%. Sementara itu, sektor dengan jumlah pekerja yang relatif rendah yaitu sektor konstruksi (7,11%), sektor pengangkutan dan komunikasi (3,28%), sektor keuangan, real estate dan jasa perusahaan (3,06%) dan terendah di sektor lainnya (pertambangan, penggalian, listrik, gas dan air) (0,87%).

**Tabel 1.7 Prosentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Februari 2010- Agustus 2012**

Lapangan Pekerjaan Utama	2010		2011		2012	
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus
Pertanian	32,21	30,40	24,31	23,97	24,24	26,91
Industri Pengolahan	15,06	13,92	14,17	14,83	15,65	15,13
Konstruksi	4,73	6,19	5,61	7,40	5,88	7,11
Perdagangan, Hotel dan Restoran	22,93	24,69	25,97	26,70	27,00	24,87
Pengangkutan dan Komunikasi	4,45	3,80	4,71	3,79	3,94	3,28

Lapangan Pekerjaan Utama	2010		2011		2012	
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus
Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	2,18	2,18	2,18	2,78	2,75	3,06
Jasa - jasa	17,43	17,93	21,76	19,60	20,33	18,76
Lainnya (Pertambangan, Penggalan, Listrik, Gas dan Air)	1,01	0,89	1,30	0,93	0,21	0,87
<b>Total</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Berita Resmi Statistik (BRS) 5 November 2012, BPS DIY

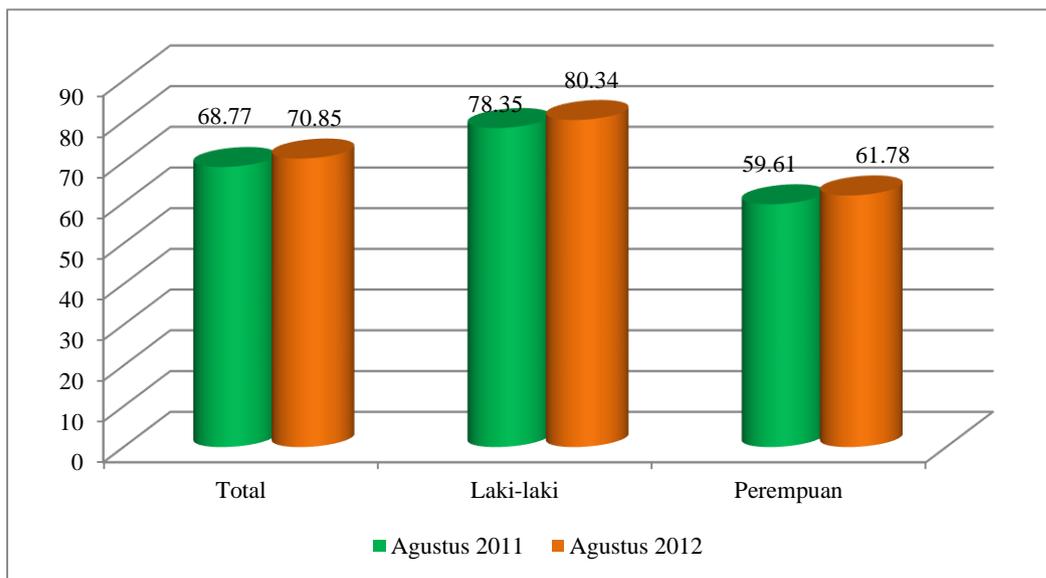
Menurut status pekerjaan utamanya, penduduk yang bekerja di DIY sebagian bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai. Hal ini terlihat pada data Agustus tahun 2012, dimana sebesar 39,06% penduduk bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai. Selanjutnya sebanyak 18,78% penduduk bekerja buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, 16,38% merupakan pekerja keluarga/tidak dibayar, 12,69% berusaha sendiri, 8,70% merupakan pekerja bebas, dan sebanyak 4,38% merupakan penduduk yang berusaha dibantu buruh tetap.

**Tabel 1.8 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama Februari 2010-Agustus 2012**

Status Pekerjaan Utama	2010		2011		2012	
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus
Berusaha Sendiri	14,55	13,75	15,29	13,91	13,80	12,69
Berusaha dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tidak Dibayar	24,54	24,35	17,49	19,35	20,51	18,78
Berusaha dibantu Buruh Tetap	3,49	3,90	4,27	4,27	3,96	4,38
Buruh/Karyawan/Pegawai	31,20	30,57	39,34	40,12	38,61	39,06
Pekerja Bebas	7,50	8,56	8,59	8,40	7,38	8,70
Pekerja Keluarga/tak Dibayar	18,73	18,87	15,02	13,95	15,73	16,38
<b>Total</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BRS 5 November 2012, BPS DIY

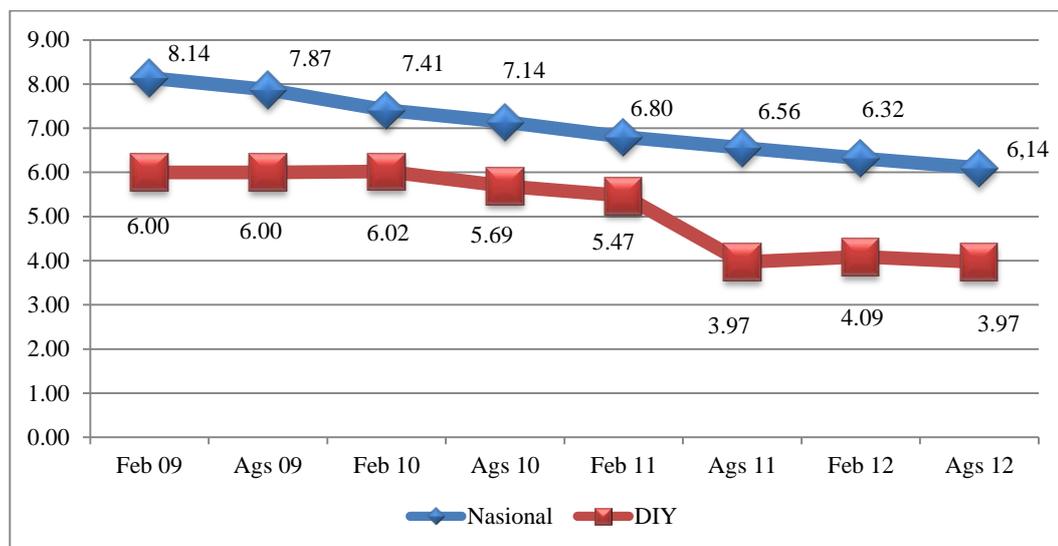
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan perbandingan antara angkatan kerja dengan penduduk usia kerja. TPAK di DIY pada Agustus 2012 sekitar 70,85%, meningkat sekitar 2,08% bila dibandingkan keadaan Agustus 2011 (68,77%). TPAK dibedakan menurut jenis kelamin, TPAK laki-laki lebih tinggi daripada TPAK perempuan. TPAK laki-laki pada Agustus 2012 di DIY mencapai sekitar 80,34%, sementara TPAK perempuan sebesar 61,78%. Baik TPAK laki-laki maupun TPAK perempuan di DIY pada tahun 2012 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2011.



Sumber: BRS 5 November 2012, BPS DIY

### Gambar 1.7 TPAK di DIY, Agustus 2011-Agustus 2012

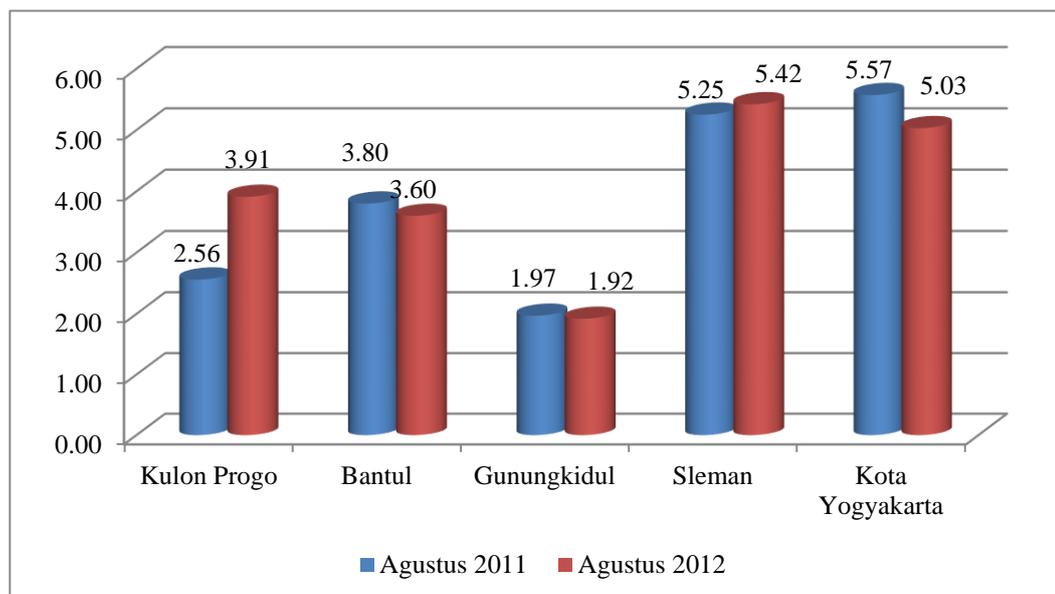
Selama periode 2009-2012 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di DIY cenderung mengalami penurunan. Pada Agustus 2009 TPT di DIY sebesar 6,00%, kemudian pada Agustus 2010 menurun menjadi 5,69%, pada Agustus tahun 2011 dan 2012 angka TPT DIY turun menjadi 3,97%. Angka TPT DIY jika dibandingkan dengan nasional masih lebih baik, hal ini dapat dilihat selama periode 2009-2012 nilai TPT DIY selalu lebih rendah dari TPT nasional.



Sumber: BRS 5 November 2012, BPS DIY

**Gambar 1.8 Tingkat Pengangguran Terbuka di DIY dan di Tingkat Nasional Februari 2009-Agustus 2012 (%)**

TPT menurut Kabupaten/Kota pada Agustus tahun 2012 menunjukkan TPT tertinggi ada di Kabupaten Sleman sebesar 5,42% disusul kemudian Kota Yogyakarta sebesar 5,03%. Kedua wilayah ini memiliki TPT relatif lebih tinggi dibandingkan DIY. Sementara itu, Kabupaten Kulon Progo dan Bantul angka TPT-nya tidak jauh berbeda dengan DIY yaitu masing-masing sebesar 3,91% dan 3,60%. Kabupaten Gunungkidul merupakan kabupaten dengan TPT terendah yaitu 1,92%.

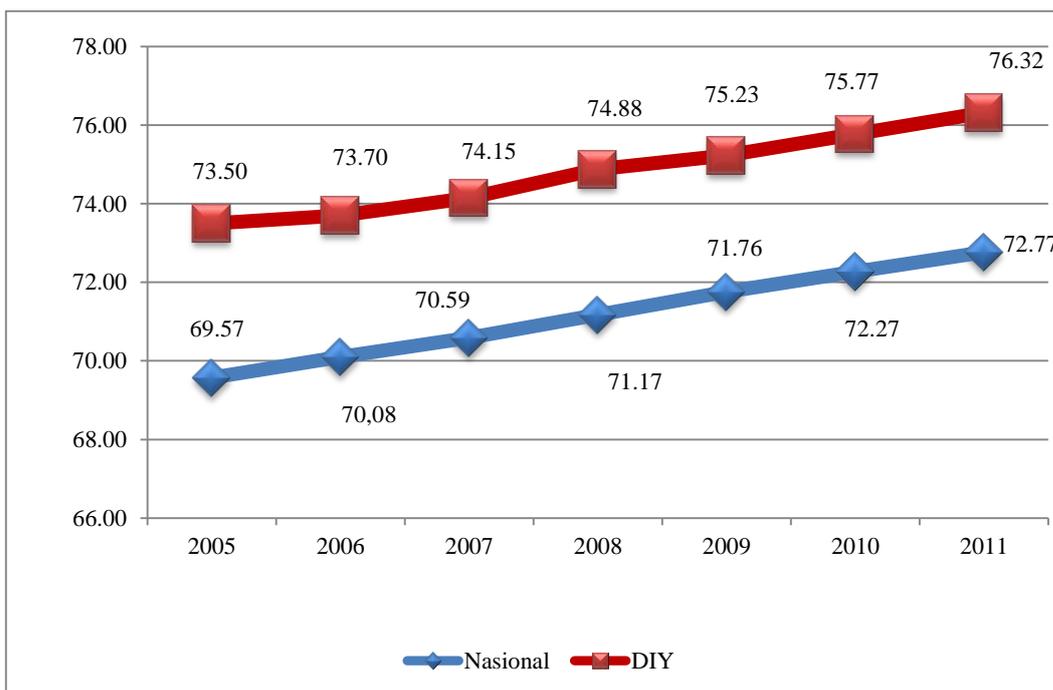


Sumber: BRS 5 November 2012, BPS DIY

**Gambar 1.9 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota di DIY, Agustus 2011 dan Agustus 2012 (%)**

### 1.3.3 Pendidikan

Untuk mengukur kualitas sumberdaya manusia digunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dalam pengukurannya mencakup kualitas bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan penduduk (pendapatan penduduk). Trend dari tahun 2005 sampai dengan 2011 menunjukkan bahwa IPM baik di tingkat nasional maupun DIY cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 IPM DIY sebesar 75,23 sedangkan nasional sebesar 71,76. Untuk DIY baik pada tahun 2009 maupun 2010 menduduki posisi keempat nasional. Pada tahun 2010, IPM DIY sebesar 75,77, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2009, sedangkan IPM nasional 72,27. Sementara itu IPM DIY tahun 2011 sebesar 76,32, masih lebih tinggi dibandingkan capaian nasional pada tahun yang sama sebesar 72,77.



Sumber: Statistik Indonesia 2012, BPS, diolah

**Gambar 1.10 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia, 2005-2011**

IPM menurut Kabupaten/Kota di DIY tahun 2011 menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta masih menduduki peringkat ke-1 nasional dengan nilai 79,89. Kabupaten dengan nilai IPM yang relatif tinggi yaitu Kabupaten

Sleman dengan nilai 78,79. Sementara itu, tiga kabupaten dengan nilai IPM yang relatif masih rendah adalah Kabupaten Kulon Progo (75,04), Bantul (75,05) dan Kabupaten Gunungkidul (70,84).

**Tabel 1.9 IPM Menurut Komponen dan Kabupaten/Kota di DIY, 2011**

Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup (tahun)	Angka Melek Huruf (%)	Rata - rata Lama Sekolah (tahun)	Pengeluaran Riil Per Kapita yang Disesuaikan (000 Rp)	IPM	Peringkat IPM
Kulon Progo	74,48	92,00	8,37	631,42	75,04	4
Bantul	71,33	91,23	8,92	651,17	75,05	3
Gunungkidul	71,01	84,94	7,70	628,73	70,84	5
Sleman	75,18	93,44	10,51	650,27	78,79	2
Kota Yogyakarta	73,48	98,07	11,52	653,79	79,89	1
<b>DIY</b>	<b>73,27</b>	<b>91,49</b>	<b>9,20</b>	<b>650,16</b>	<b>76,32</b>	<b>4</b>

Sumber: DIY Dalam Angka 2011, BPS Provinsi DIY

Jumlah penduduk menurut usia sekolah di DIY pada tahun 2012 adalah sebanyak 567.834 orang. Berdasarkan wilayahnya, penduduk usia sekolah terbanyak terdapat di Kabupaten Sleman dan Bantul, yaitu masing-masing sebanyak 159.255 orang (28,05%) dan 140.965 orang (24,83%). Sedangkan wilayah dengan penduduk usia sekolah paling sedikit adalah Kabupaten Kulon Progo dengan jumlah 67.267 orang atau 11,85% dari total jumlah penduduk usia sekolah di DIY tahun 2012.

**Tabel 1.10 Jumlah Penduduk Usia Sekolah Menurut Wilayah di DIY 2011**

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Seluruhnya	Penduduk Menurut Usia Sekolah				
			7 - 12	13 - 15	16 - 18	Jumlah	%
1	Bantul	921.263	70.494	34.829	35.642	140.965	24,83
2	Sleman	1.107.304	77.399	36.737	45.119	159.255	28,05
3	Gunungkidul	677.998	61.119	29.012	32.136	122.267	21,53
4	Kulon Progo	390.207	33.765	15.804	17.698	67.267	11,85
5	Yogyakarta	390.553	32.269	16.781	29.030	78.080	13,75
	<b>DIY</b>	<b>3.487.325</b>	<b>275.046</b>	<b>133.163</b>	<b>159.625</b>	<b>567.834</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Profil Pendidikan Tahun 2012/2013, Disdikpora DIY

Tolok ukur bidang pendidikan adalah indikator mutu pendidikan dapat dilihat dari tingginya angka partisipasi. Angka partisipasi tersebut terdiri atas angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM). APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) DIY pada tahun 2011 menunjukkan angka sebesar 65,73% dan pada tahun 2012 menunjukkan angka 79,55%. APK SD/MI pada tahun 2012 sebesar 111,78% lebih besar 0,32% dari tahun 2011 yaitu sebesar 111,43%. Sedangkan APM SD/MI tahun 2012 sebesar 97,54% terjadi kenaikan meskipun kecil dari tahun 2011 yang sebesar 97,53%. Besaran angka APK dan APM yang hampir sama tersebut atau hanya menunjukkan kenaikan yang kecil menggambarkan bahwa tidak ada perubahan yang signifikan pada data jumlah siswa dan penduduk yang bersekolah antara tahun 2011 dan 2012.

APK SMP/MTs pada tahun 2011 sebesar 115,50%, dan di tahun 2012 mengalami penurunan menjadi 115,43%. Sedangkan APM SMP/MTs tahun 2012 sebesar 81,13%, mengalami kenaikan dibanding dengan tahun 2011 yang menunjukkan angka sebesar 81,08%. Menurut catatan angka putus sekolah SMP/MTs di DIY saat ini sangat kecil yakni hanya 0,16%. Masih adanya anak yang putus sekolah tersebut pada umumnya disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah faktor pendidikan, faktor sosial ekonomi dari orang tua/masyarakat dan faktor lingkungan

Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SM/MA), pada tahun 2011 APK menunjukkan angka sebesar 88,79% sedangkan tahun 2012 mengalami penurunan menjadi 88,04%. APM SM/MA pada tahun 2011 sebesar 63,45%, mengalami kenaikan di tahun 2012 yang menunjukkan angka sebesar 63,65%. Rasio Siswa SMA terhadap SMK adalah 1:2, hal ini menunjukkan bahwa perbandingan siswa SMK lebih banyak daripada siswa SMA sehingga keberadaan SMK di DIY mendapatkan minat yang baik dari masyarakat/siswa. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan minat menyekolahkan anaknya di SMK maka diperlukan pengembangan SMK yang telah ada. Dilihat dari kebutuhan daerah dipandang dari sektor ekonomi, maka SMK yang perlu dikembangkan di DIY ini adalah kelompok/bidang pariwisata dan pertanian.

Pendukung akses dan kualitas pendidikan adalah infrastruktur pendidikan. Infrastruktur pendidikan berupa sekolah telah merata tersebar di seluruh DIY. Jumlah SD/MI negeri maupun swasta yang ada di DIY adalah 2.009. Sedangkan jumlah SMP/MTs negeri maupun swasta adalah 517, jumlah SMA/MA sebanyak 203 baik negeri dan swasta, SMK 208 sekolah negeri dan swasta, TK sejumlah 2.224 sekolah negeri dan swasta, dan 71 SLB baik negeri maupun swasta. Pada jenjang perguruan tinggi, DIY pada tahun 2012 terdapat 4 perguruan tinggi negeri.

Sedangkan jumlah perguruan tinggi swasta sebanyak 126 institusi, dengan rincian 35,38% merupakan akademi, 38,46% sekolah tinggi, 16,92% universitas, 5,38% politeknik dan 3,85% institut.

### 1.3.4 Penduduk Miskin

Jumlah penduduk miskin di DIY pada tahun 2012 menurut data BPS sebanyak 562,11 ribu orang atau sebesar 15,88% dari total penduduk DIY. Jumlah penduduk miskin di DIY pada tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 0,2% dari tahun 2011 yang sebesar 16,08%.

Jumlah penduduk miskin tahun 2012 di wilayah kota/urban sebanyak 306,51 ribu orang atau 13,10%, sedangkan penduduk miskin di wilayah desa/rural sebanyak 255,60 ribu orang atau sebesar 21,29%.

**Tabel 1.11 Jumlah Penduduk Miskin di DIY Menurut Wilayah, 2005-2012**

Tahun	Kota/Urban		Desa/Rural		Jumlah Total	
	Jumlah (000)	% thd penduduk Kota	Jumlah (000)	% thd penduduk Desa	Jumlah (000)	% thd penduduk Provinsi
2005	340,30	16,02	285,50	24,23	625,80	18,95
2006	346,00	17,85	302,70	27,64	648,70	19,15
2007	335,30	15,63	298,20	25,03	633,50	18,99
2008	324,16	14,99	292,12	24,32	616,28	18,32
2009	311,47	14,25	274,31	22,60	585,78	17,23
2010	308,36	13,38	268,94	21,95	577,30	16,83
2011	304,34	13,16	256,55	21,82	560,88	16,08
2012*	306,51	13,10	255,60	21,29	562,11	15,88

Keterangan : \* data September 2012

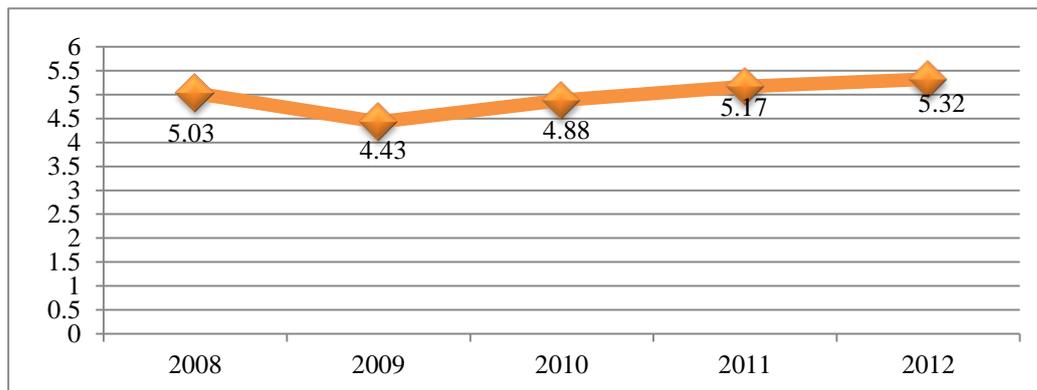
Sumber : DIY Dalam Angka 2012, BPS Provinsi DIY

Jumlah penduduk miskin di wilayah desa lebih tinggi dibanding di kota. Hal ini menunjukkan bahwa konsentrasi penduduk miskin masih berada di wilayah perdesaan, dimana sebagian besar penduduk perdesaan merupakan penduduk dengan tingkat pendidikan yang relatif masih rendah dan bekerja di sektor pertanian. Dengan karakteristik demikian, pada umumnya penduduk perdesaan memiliki pendapatan yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan penduduk perkotaan. Namun demikian, jika dilihat trendnya selama periode 2006-2011, jumlah

penduduk miskin cenderung mengalami penurunan, baik itu di wilayah kota maupun desa.

## 1.4 KONDISI PEREKONOMIAN DAERAH

Laju pertumbuhan ekonomi DIY selama 2008-2012 cenderung mengalami kenaikan. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2012 sebesar 5,32% mengalami peningkatan dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2011 yang sebesar 5,17%.



Sumber: BPS Provinsi DIY

### Gambar 1.11 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi DIY, 2008-2012

Laju pertumbuhan ekonomi DIY tahun 2012 menurut lapangan usaha menunjukkan bahwa sektor dengan laju pertumbuhan tertinggi pada tahun 2012 adalah sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 9,95%. Sektor lain dengan laju pertumbuhan yang relatif cukup tinggi yaitu sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 7,13% dan sektor jasa-jasa sebesar 7,09%. Sementara itu, sektor dengan laju pertumbuhan terkecil pada tahun 2012 adalah sektor industri pengolahan dengan laju pertumbuhan minus 2,26%.

Tabel 1.12 Pertumbuhan PDRB DIY Menurut Lapangan Usaha, 2012

Sektor	Pertumbuhan (%)
Pertanian	4,19
Pertambangan dan Penggalian	1,98
Industri Pengolahan	-2,26
Listrik, Gas dan Air Bersih	7,13
Bangunan	5,97
Perdagangan, Hotel-Restoran	6,69
Pengangkutan dan Komunikasi	6,21

Sektor	Pertumbuhan (%)
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	9,95
Jasa-jasa	7,09
DIY	5,32

Sumber: BPS Provinsi DIY

Nilai PDRB di DIY tahun 2012 mencapai Rp57,03 trilyun atas harga berlaku atau sebesar Rp23,30 trilyun atas harga konstan. Nilai tersebut meningkat sebesar Rp5,25 trilyun (atas harga berlaku) atau sebesar Rp1,17 trilyun (atas harga konstan). Empat sektor dengan kontribusi terbesar terhadap nilai PDRB DIY tahun 2012 adalah sektor jasa, perdagangan, pertanian dan sektor industri pengolahan.

**Tabel 1.13 Nilai PDRB DIY Menurut Lapangan Usaha, 2011-2012 (Miliar Rp)**

Lapangan Usaha	ADH Berlaku		ADH Konstan	
	2011	2012	2011	2012
Pertanian	7.373,85	8.355,33	3.557,86	3.706,92
Pertambangan dan Penggalian	361,79	379,95	156,71	159,81
Industri Pengolahan	7.434,02	7.611,83	2.983,17	2.915,72
Listrik, Gas dan Air Bersih	675,91	727,71	201,24	215,60
Bangunan	5.580,60	6.186,32	2.187,80	2.318,45
Perdagangan, Hotel-Restoran	10.246,58	11.457,20	4.611,40	4.920,05
Pengangkutan dan Komunikasi	4.572,93	4.903,52	2.430,70	2.581,62
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	5.158,23	5.876,20	2.185,22	2.402,72
Jasa-jasa	10.381,24	11.536,32	3.817,67	4.088,34
PDRB DIY	51.785,15	57.034,38	22.131,77	23.309,22

Sumber: BPS Provinsi DIY

Kontribusi sektor pembentuk PDRB tahun 2012 di DIY tidak mengalami perubahan signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2011. Meskipun kontribusi beberapa sektor mengalami perubahan, namun masih didominasi oleh sektor jasa-jasa, perdagangan, pertanian dan industri pengolahan. Pada tahun 2012 kontribusi sektor jasa masih menempati urutan tertinggi dengan nilai kontribusi sebesar 20,23%, kemudian diikuti oleh sektor perdagangan, hotel-restoran 20,09%, sektor pertanian 14,65%, industri pengolahan 13,35%, sektor bangunan 10,85%, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 10,30%, sektor pengangkutan dan komunikasi 8,60%, sektor listrik, gas dan air bersih

1,28% dan kontribusi paling kecil adalah sektor pertambangan dan penggalian dengan nilai kontribusi 0,67%.

**Tabel 1.14 Kontribusi Sektor Terhadap PDRB di DIY, 2009-2012**

Lapangan Usaha	2009	2010	2011	2012
Pertanian	15,38	14,56	14,24	14,65
Pertambangan dan Penggalian	0,71	0,67	0,70	0,67
Industri Pengolahan	13,35	14,02	14,36	13,35
Listrik, Gas dan Air Bersih	1,35	1,33	1,31	1,28
Bangunan	10,70	10,59	10,78	10,85
Perdagangan, Hotel-Restoran	19,72	19,74	19,79	20,09
Pengangkutan dan Komunikasi	9,20	9,03	8,83	8,60
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	9,88	9,98	9,96	10,30
<b>Jasa-jasa</b>	<b>19,71</b>	<b>20,07</b>	<b>20,05</b>	<b>20,23</b>

Sumber: BPS Provinsi DIY

Sementara itu, nilai dan laju pertumbuhan PDRB menurut penggunaan tahun 2012 menunjukkan kontribusi terbesar berasal dari konsumsi rumah tangga. Nilai PDRB dari konsumsi rumah tangga pada tahun 2012 sebesar Rp29.350,92 milyar atas dasar harga berlaku atau sebesar Rp11.281,01 milyar atas dasar harga konstan. Dengan nilai tersebut, kontribusi sektor rumah tangga terhadap PDRB DIY tahun 2012 sebesar 51,46%. Sementara itu konsumsi pemerintah sebesar Rp13.056,33 milyar atas dasar harga berlaku atau Rp4.437,72 milyar atas dasar harga konstan, atau tingkat kontribusinya sebesar 25,90%. Pembentukan Modal Tetap Bruto pada tahun 2012 berkontribusi sebesar 31,33% yaitu sebesar Rp17.868,28 milyar atas dasar harga berlaku atau Rp6.106,98 milyar atas dasar harga konstan.

Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2012 banyak disumbang oleh konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah dengan laju pertumbuhan masing-masing sebesar 6,74% dan 5,26%.

**Tabel 1.15 Nilai dan Laju Pertumbuhan PDRB DIY Menurut Penggunaan, 2011-2012**

No	Lapangan Usaha	Atas Dasar Harga Berlaku (Milyar Rp)		Atas Dasar Harga Konstan (Milyar Rp)		Laju Pertumbuhan 2012 (%)
		2011	2012	2011	2012	
1	Konsumsi Rumah Tangga	26.319,42	29.350,92	10.568,42	11.281,01	6,74
2	Konsumsi Pemerintah	13.066,88	14.773,18	4.441,36	4.675,09	5,26

No	Lapangan Usaha	Atas Dasar Harga Berlaku (Milyar Rp)		Atas Dasar Harga Konstan (Milyar Rp)		Laju Pertumbuhan 2012 (%)
		2011	2012	2011	2012	
3	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	16.466,55	17.868,28	5.818,32	6.106,98	4,96
4	Lainnya *)	(4.067,70)	(4.957,99)	1.303,68	1.246,14	-4,41
	<b>PDRB</b>	<b>51.785,15</b>	<b>57.034,38</b>	<b>22.131,77</b>	<b>23.309,22</b>	<b>5,32</b>

Sumber: BPS DIY

\*)termasuk ekspor, impor, konsumsi lembaga nirlaba, perubahan inventori dan diskrepansi statistik (residual)

Nilai PDRB per kapita di DIY tahun 2012 sebesar Rp15.905.082,-atas dasar harga berlaku atau Rp6.500.202,- atas dasar harga konstan. Sementara itu, nilai PDRB per kapita tahun 2011 adalah Rp14.613.135,- atas dasar harga berlaku atau sebesar Rp6.245.315,- atas dasar harga konstan. Dengan demikian, nilai PDRB per kapita tahun 2012 mengalami peningkatan dari tahun 2011.

**Tabel 1.16 Nilai PDRB per Kapita DIY, 2009-2012 (Rupiah)**

Tahun	Atas Dasar Harga Berlaku	Atas Dasar Harga Konstan
2009	12.083.874	5.855.379
2010	13.030.767	6.010.224
2011	14.613.135	6.245.315
2012	15.905.082	6.500.202

Sumber: BPS DIY

Laju inflasi di DIY yang diwakili Kota Yogyakarta pada tahun 2012 sebesar 4,31%. Angka inflasi tahun 2011 ini lebih tinggi dibandingkan inflasi tahun 2011 sebesar 3,88% atau naik 0,43%. Laju inflasi yang relatif tinggi berasal dari kelompok bahan makanan dan kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau dengan laju inflasi masing-masing sebesar 8,10% dan 6,90%. Laju inflasi kelompok sandang sebesar 3,56% sedangkan untuk kelompok perumahan sebesar 2,99%, selanjutnya untuk kelompok pengeluaran lainnya relatif rendah.

**Tabel 1.17 Laju Inflasi Kota Yogyakarta Tahun 2012 Menurut Kelompok Pengeluaran**

No	Kelompok Pengeluaran	Laju Inflasi (%)
	<b>Umum</b>	<b>4,31</b>
1	Bahan Makanan	8,10

No	Kelompok Pengeluaran	Laju Inflasi (%)
2	Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau	6,90
3	Perumahan	2,99
4	Sandang	3,56
5	Kesehatan	1,93
6	Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga	1,43
7	Transpor dan Komunikasi	1,30

Sumber: Berita Resmi Statistik 2 Januari 2013, BPS DIY

## 1.5 SISTEMATIKA

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menyajikan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah DIY selama tahun 2012. Dalam Laporan ini, pencapaian kinerja diukur dari pencapaian sasaran, yaitu dengan melakukan pengukuran atas indikator-indikator yang dianggap mampu mengukur pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012 Pemerintah Daerah DIY.

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah DIY Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

**Bab I : Pendahuluan**

Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekilas pengantar lainnya.

**Bab II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja**

Memuat perencanaan kinerja dalam RPJMD, visi dan misi daerah, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan daerah serta program-program pembangunan dan Perjanjian Kinerja

**Bab III : Akuntabilitas Kinerja**

Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dengan mengungkapkan dan menyajikan hasil pengukuran kinerja.

**Bab IV : Penutup**

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari akuntabilitas kinerja

**LAMPIR**

A  
N





# BAB 2

## PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Reformasi yang dimulai pada tahun 1998 telah memberikan pengaruh pada pergeseran nilai, pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Perubahan nilai yang terjadi setelah reformasi meliputi pergeseran dari sentralistik menjadi desentralistik, dari pendekatan *top down* menjadi *bottom up* sudah jelas dampak langsungnya adalah diberikannya kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Kewenangan tersebut dijamin dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan diikuti Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Sejak diterbitkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka substansi dan esensi dari sistem perencanaan pembangunan di tingkat nasional dan daerah menjadi semakin perlu untuk dimantapkan dan disempurnakan, guna lebih menjamin penyelenggaraan pembangunan di pusat dan daerah yang lebih berhasil guna dan berdayaguna. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan (Pasal 2 ayat 2), dengan jenjang perencanaan jangka panjang (25 tahun), jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek atau tahunan (1 tahun). Setiap daerah (provinsi/kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

## 2.1 PERENCANAAN DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) 2009-2013

---

Perencanaan kinerja merupakan dokumentasi rencana pembangunan daerah yang ditentukan dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan kinerja Tahun 2009-2013 Provinsi DIY telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 4 Tahun 2009 tentang RPJMD Tahun 2009-2013. Adapun dokumen rencana kinerja akan dijabarkan dalam sub bab berikut.

### 2.1.1 Visi dan Misi

Visi Pembangunan Provinsi DIY yang ingin dicapai selama lima tahun yaitu periode 2009 sampai dengan 2013 adalah:

**“Pemerintah daerah yang katalistik dan masyarakat mandiri yang berbasis keunggulan daerah serta sumberdaya manusia yang berkualitas unggul dan beretika”.**

Pemerintah daerah yang katalistik adalah pemerintah daerah yang mampu mendorong masyarakatnya untuk melaksanakan sendiri hal-hal yang dianggap penting bagi lingkungannya sehingga pemerintah lebih berperan sebagai pengatur dan pendorong daripada sebagai pelaksana langsung suatu urusan masyarakat. Pemerintah daerah lebih banyak memberi peluang kepada swasta, memberdayakan masyarakat dan non pemerintah lainnya untuk bersama-sama memikul tanggung jawab atau urusan dengan cara memberikan kesempatan dan mendorong masyarakat serta dunia usaha melalui regulasi, fasilitasi, dan pelayanan agar masyarakat dapat mengembangkan kemampuan dan kemandiriannya.

Masyarakat Mandiri adalah kondisi masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhannya, mampu mengambil keputusan dan tindakan dalam penanganan masalahnya, mampu merespon dan berkontribusi terhadap upaya pembangunan dan tantangan zaman secara otonom dengan mengandalkan potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Masyarakat sudah tidak bergantung sepenuhnya kepada pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahannya dan dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya.

Keunggulan daerah adalah segenap potensi dan sumberdaya daerah yang mempunyai daya saing kuat dan berkontribusi besar terhadap daerah dalam mendukung pertumbuhan dan kemajuan daerah, terutama bidang pariwisata, pendidikan dan budaya.

Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Beretika adalah sumberdaya manusia yang memiliki keahlian atau keterampilan yang tinggi sehingga mampu menawarkan dan melaksanakan jasa atau layanan sesuai dengan aturan dalam bidang yang dijalaninya, serta mempunyai sikap, sopan santun atau aturan lainnya yang mengatur hubungan antara kelompok manusia yang beradab dalam pergaulan. Sumberdaya manusia tidak hanya menyangkut kuantitas tetapi juga kualitas. Kualitas sumberdaya manusia menyangkut kemampuan bekerja, berpikir, dan keterampilan. Dalam hal ini kesehatan dan pendidikan merupakan aspek penting dalam membangun sumberdaya manusia. Oleh karena itu, pendidikan dan kesehatan merupakan modal dasar untuk membina dan mengembangkan karakter serta perilaku manusia di dalam menata hidup dan kehidupannya.

Untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui empat misi pembangunan daerah sebagai berikut:

- a. Mengembangkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, profesional, humanis dan beretika dalam mendukung terwujudnya budaya yang adiluhung.
- b. Memperkuat fondasi kelembagaan dan memantapkan struktur ekonomi daerah berbasis pariwisata yang didukung potensi lokal dengan semangat kerakyatan menuju masyarakat yang sejahtera.
- c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola pemerintahan yang berbasis *Good Governance*.
- d. Memantapkan prasarana dan sarana daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik.

### 2.1.2 Tujuan dan Sasaran Strategis

Mengacu kepada visi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah:

1. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas.
2. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan mandiri.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
4. Mengoptimalkan fungsi prasarana dan sarana pelayanan publik.

Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:



Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR 2013	
1	Terwujudnya peningkatan kualitas lulusan di semua jenjang dan jalur pendidikan	a	Persentase kinerja peningkatan mutu pendidikan SD/MI	Persen	51,82	79
			1. Angka putus sekolah	Persen	0,17	0,02
			2. Angka Lulusan	Persen	99,70	99,70
			3. Angka mengulang	Persen	3,76	3,67
			4. Persentase guru layak mengajar	Persen	11,82	62,67
			5. Persentase ruang kelas berkondisi baik	Persen	79,22	79,34
		6. Ketersediaan fasilitas sekolah	- Memiliki perpustakaan	Persen	71,15	74,32
			- Memiliki lap. Olahraga	Persen	72,48	78,8
			- Memiliki ruang UKS	Persen	73,33	75,71
		b	Persentase kinerja peningkatan mutu pendidikan SMP/MTs	Persen	76,63	85
			1. Angka putus sekolah	Persen	0,22	0,16
			2. Angka Lulusan	Persen	90,62	97,60
			3. Angka mengulang	Persen	0,39	0,35
			4. Persentase guru layak mengajar	Persen	20,66	85,68
			5. Persentase ruang kelas berkondisi baik	Persen	88,52	89,49

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR 2013
		6. Ketersediaan fasilitas sekolah			
		- Memiliki perpustakaan	Persen	75,74	76,40
		- Memiliki lap. Olahraga	Persen	11,64	11,99
		- Memiliki ruang laboratorium	Persen	100	100
		<b>c</b> Persentase kinerja peningkatan mutu pendidikan SM (SMA, MA, SMK)	persen	81,51	83
		1. Angka putus sekolah	persen	0,44	0,14
		2. Angka Lulusan	persen	92,35	98,40
		3. Angka mengulang	persen	0,40	0,25
		4. Persentase guru layak mengajar	persen	21,75	92,30
		5. Persentase ruang kelas berkondisi baik	persen	94,82	94,89
		6. Ketersediaan fasilitas sekolah			
		- Memiliki perpustakaan	Persen	80,79	81,02
		- Memiliki lap. Olahraga	Persen	13,79	13,63
		- Memiliki Lab SMA/SM	Persen	100	100
		- Memiliki ruang praktek (SMK)	persen	100	100
2	<b>Terwujudnya peningkatan aksesibilitas pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif</b>	<b>a</b> Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan SD/MI	persen	79,13	79
		1. Angka Partisipasi Murni	Persen	94,73	95,40
		2. Angka Masuk Kasar	Persen	50,54	109,32
		3. Rasio Siswa per Sekolah	Siswa/sekolah	153	153
		4. Rasio Siswa per Kelas	Siswa/kelas	23	21

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR 2013
		5. Rasio Kelas per Ruang Kelas	Kelas/ruang kelas	0,97	1,01
		<b>b</b> Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan SMP/MTs	persen	89,3	85
		1. Angka Partisipasi Murni	Persen	84,64	86,00
		2. Angka Melanjutkan	Persen	105,68	105,63
		3. Rasio Siswa per Sekolah	Siswa/sekolah	295	283
		4. Rasio Siswa per Kelas	Siswa/kelas	35	29
		5. Rasio Kelas per Ruang Kelas	Kelas/ruang kelas	1,03	1,01
		<b>c</b> Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan SM (SMA, MA, SMK)	Persen	77,14	83
		1. Angka Partisipasi Murni	Persen	59,12	65,00
		2. Angka Melanjutkan	Persen	82,63	105,4
		3. Rasio Siswa per Sekolah	Siswa/sekolah	336	339
		4. Rasio Siswa per Kelas	Siswa/kelas	31	29
		5. Rasio Kelas per Ruang Kelas	Kelas/ruang kelas	0,84	1,1
3	<b>Terwujudnya peningkatan budaya baca masyarakat</b>	<b>a</b> Rasio jumlah perpustakaan terhadap jumlah penduduk	unit/orang	1/5000	1/3000
		<b>b</b> Rasio jumlah pemustaka terhadap	Orang	1/2500	1/1000

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR 2013
		jumlah penduduk			
		c Jumlah anggota jaringan <i>Jogja Library</i>	PT	13	20
4	Terwujudnya peningkatan prestasi olahraga	<b>Prestasi Olahraga Tingkat Nasional:</b>			
		a Peringkat pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS)	Peringkat	24	10
		b Peringkat pada Pekan Olahraga dan Seni Antar Pondok Pesantren Nasional (POSPENAS)	Peringkat	18	3
		c PON	Peringkat	13	10
5	Berkembang dan lestari budaya lokal, kawasan budaya, dan Benda Cagar Budaya (BCB)	a Persentase kunjungan ke museum terhadap Objek Daya Tarik Wisata (ODTW)	persen	6,18	13,64
		b Jumlah peristiwa budaya	event	735	1060
		c Persentase desa budaya berkategori maju	persen	21,95	36,59
		d Persentase BCB tidak bergerak berkategori kondisi baik	persen	37,67	44,47
		e Persentase organisasi budaya berkategori maju	persen	0,85	1,03
6	Terwujudnya peningkatan kualitas kehidupan sosial masyarakat	a Persentase cakupan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	persen	3,16	5

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR 2013
		<b>b</b> Persentase cakupan peningkatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	persen	18,23	55,67
7	<b>Terwujudnya peningkatan kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat</b>	<b>a</b> Umur harapan hidup	tahun	74,1	74,6
		<b>b</b> Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran Hidup	per 1000 KH	19	16
		<b>c</b> Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran Hidup	per 1000 KH	17	16
		<b>d</b> Angka Kematian Ibu melahirkan per 100.000 kelahiran Hidup	per 100000 KH	104	100
		<b>e</b> Prevalensi Gizi Buruk	persen	0,69	0,79
8	<b>Terwujudnya kepariwisataan yang berdaya saing tinggi</b>	<b>a</b> Jumlah wisatawan nusantara	orang	1.286.565	1.861.906
		<b>b</b> Jumlah wisatawan asing	orang	139.492	207.205
		<b>c</b> Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara	hari	1,735	1,85
		<b>d</b> Rata-rata lama tinggal wisatawan asing	hari	1,895	2,2
		<b>e</b> Jumlah <i>Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition</i> (MICE)	kali/thn	4500	6588
9	<b>Terwujudnya peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat</b>	<b>a</b> Persentase Pertumbuhan PDRB	persen	4,39	5,40
		<b>b</b> Indeks Ketimpangan Regional	angka indeks	0,322	0,306
		<b>c</b> Rata-rata PDRB per kapita	Juta	11,83	16,07
		<b>d</b> Persentase pertumbuhan investasi PMDN	Persen	4,21	5,74

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR 2013
		e Persentase pertumbuhan investasi PMA	Persen	3,84	4,83
10	Terwujudnya ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat	a Konsumsi Energi	Kkal/kap/hr	1.803	2.000
		b Konsumsi Protein	Gr/kap/hr	51,35	52
		c Ketersediaan Energi	Kkal/kap/hr	3.664	3.664
		d Ketersediaan Protein	Gr/kap/hr	94,59	94,59
		e Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Persen	77	88
11	Terwujudnya peningkatan kualitas pengelolaan ketenagakerjaan	a Jumlah angkatan kerja	Orang	2.048.602	2.047.422
		b Jumlah kesempatan kerja	Orang	1.925.630	2.115.830
		c Jumlah penempatan tenaga kerja	Orang	6.000	17.900
12	Terwujudnya pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel	a Jumlah lembaga yang memberikan layanan berbasis <i>citizen centris</i>	Unit	2	20
13	Terwujudnya kesetaraan gender	a Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Persen	70,6	71
		b Indeks Pemberdayaan Gender (GEM)	Persen	62,87	77,84
14	Terwujudnya ketersediaan infrastruktur yang memadai baik kuantitas dan kualitas	a Persentase proporsi jaringan jalan berkondisi mantap (baik dan sedang)	Persen	54	85
		b Persentase luasan Daerah Irigasi (DI) yang terlayani air irigasi	Persen	60	80
		c Persentase peningkatan penanganan banjir terhadap daerah potensi banjir	Persen	55	75
		d Persentase penduduk berakses air minum	Persen	60	75

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR 2013	
		e	Persentase penurunan alih fungsi lahan terhadap total luas lahan	persen	5	9
		f	Persentase ketersediaan rumah layak huni	persen	61	70,11
		g	Persentase fasilitas keselamatan lalu lintas	persen	57	80
15	Terwujudnya pemerataan sarana dan prasarana publik	a	Persentase pengembangan kawasan strategis	persen	16,67	64,93
		b	Persentase layanan jaringan air limbah terpusat (APY)	persen	10	50
		c	Persentase penduduk yang terlayani pengelolaan sampah	persen	55	75
		d	Jumlah TPA sampah menggunakan sistem <i>sanitary landfill</i>	unit	1	2
		e	V/C rasio kendaraan yang melintas di perkotaan	rasio	0,77	0,60
		f	<i>Load factor</i> penumpang angkutan umum	persen	20	40
		g	Persentase peningkatan penumpang angkutan KA jarak pendek	persen	5	5
		h	Persentase peningkatan rasio elektrifikasi	persen	0,02	0,09
		i	Persentase peningkatan kapasitas energi listrik	persen	0,3	0,3
16	Terwujudnya ketahanan	a	Jumlah lembaga penanggulangan	unit	6	6

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR 2013	
	masyarakat terhadap bencana		bencana dalam masyarakat			
		b	Jumlah regulasi tentang pengurangan resiko bencana	buah	2	9
17	Terwujudnya pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan	Kualitas Udara:				
		a	Konsentrasi CO	ppm	10	<13
		b	Konsentrasi HC	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	95	<140
		c	Konsentrasi Pb	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	0,94	<2
		d	Konsentrasi Nox	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	51,20	<400
		e	Konsentrasi partikulat	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	31,14	<150
		Kualitas Air:				
		a	Konsentrasi BOD	mg/lt	8	<8
		b	Konsentrasi COD	mg/lt	17	<40
		c	Konsentrasi Bakteri Coli	MPN/100 ml	91.681	<75.000
	d	Fluktuasi muka air tanah	Cm	188	248	

### 2.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi Daerah

Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan strategi, arah kebijakan, dan program. Selain itu, untuk mengukur capaian kinerja maka dirumuskan pula indikator sebagai tolok ukur kinerja.

Adapun strategi, arah kebijakan, program serta indikator berdasarkan masing-masing misi diuraikan sebagai berikut:

#### 2.1.3.1 Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Misi Pertama:

“Mengembangkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, profesional, humanis, dan beretika dalam mendukung terwujudnya budaya yang adiluhung”

##### 1. Strategi

Strategi untuk mencapai sasaran misi pertama sebagai berikut:

- a. Peningkatan mutu pendidikan untuk mencapai standar nasional dan internasional.
- b. Perluasan lembaga pendidikan formal dan non formal serta pendidikan informal yang bermutu di berbagai daerah dibarengi dengan perluasan subsidi pendidikan bagi seluruh peserta didik dalam usia wajib belajar.
- c. Peningkatan kualitas dan profesionalisme pendidik, tenaga kependidikan dan lembaga pendidikan yang mampu meningkatkan wawasan, keterbukaan dan toleransi.
- d. Peningkatan ketersediaan informasi, sarana dan prasarana penunjang minat dan budaya baca masyarakat.
- e. Peningkatan peranserta lembaga pendidikan dan masyarakat dalam pemasyarakatan dan peningkatan prestasi olahraga.
- f. Peningkatan peranserta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya lokal, kawasan budaya, dan benda cagar budaya.
- g. Peningkatan penanganan masalah kesejahteraan lokal dan potensi sumber kesejahteraan lokal.
- h. Peningkatan dan pemerataan infrastruktur/fasilitas kesehatan dengan dilengkapi sarana pendukung kesehatan serta peningkatan kualitas manajemen kesehatan.
- i. Pengurangan risiko terjadinya penyakit, kecelakaan, dan dampak bencana.
- j. Peningkatan akses dan mutu kesehatan masyarakat.

- k. Peningkatan infrastruktur dan manajemen kesehatan.
- l. Pemasaran pelayanan dan pendidikan kesehatan.
- m. Penggerakan dan pemberdayaan masyarakat.
- n. Peningkatan kualitas kehidupan keluarga, perempuan, dan anak.

## 2. Kebijakan

Kebijakan dari strategi untuk mencapai sasaran misi pertama sebagai berikut:

- a. Meningkatkan standar manajemen mutu lembaga pendidikan dan kualitas tenaga pendidik secara merata.
- b. Melestarikan penuntasan wajib belajar 9 tahun dan mengembangkan wajib belajar 12 tahun secara merata terutama di wilayah perdesaan dan perbatasan dengan daerah lain.
- c. Meningkatkan standar mutu kurikulum pendidikan yang terkini, berbudaya, agamis, dan anti narkoba dalam rangka membentuk SDM berkarakter unggul.
- d. Mengembangkan kualitas dan kuantitas layanan, SDM keputakaan, dan sarana prasarana perpustakaan secara merata.
- e. Mengembangkan kerjasama dan jejaring dengan pendidikan tinggi, lembaga-lembaga riset, dunia usaha, dan pemerintah pusat untuk mewujudkan berdirinya pusat teknologi dan industri (*Techno-Industrial Park*).
- f. Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik bersertifikasi.
- g. Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat.
- h. Menyelenggarakan dan meningkatkan pembelajaran berbasis penelitian pada semua jenjang pendidikan.
- i. Meningkatkan kapasitas lembaga pendidikan dalam mengembangkan proses belajar mengajar berbasis multikultur dan nilai-nilai budaya luhur.
- j. Mendorong kegiatan olahraga andalan daerah yang disertai peningkatan kualitas dan kuantitas sarana olahraga serta peningkatan peran pemuda dalam pembangunan.
- k. Memperkuat dan memperluas jejaring dan kerjasama dengan semua pihak dalam mengelola dan melestarikan lokal budaya secara berkesinambungan.

- l. Memberdayakan dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya guna menghadapi globalisasi.
- m. Meningkatkan dan memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam mengelola dan melestarikan aset budaya.
- n. Meningkatkan pengelolaan data dan sistem informasi kebudayaan daerah yang akurat dan terkini dan mudah diakses oleh masyarakat.
- o. Meningkatkan perlindungan dan mendukung upaya penghargaan dan hak atas hasil karya budaya.
- p. Meningkatkan dan menjunjung tinggi keluhuran budi dan nilai-nilai religiusitas dalam gaya hidup dan penciptaan iklim budaya yang bernilai luhur di masyarakat.
- q. Meningkatkan peran pemerintah dan masyarakat dalam penyelesaian masalah lokal di lingkungannya.
- r. Menjalin fasilitasi dan koordinasi dengan jaringan sukarelawan baik nasional maupun internasional.
- s. Meningkatkan kualitas SDM, kesejahteraan dan peran aktif para pengabdian kesejahteraan lokal.
- t. Menumbuhkembangkan pola dan bentuk jaminan lokal kepada masyarakat khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan.
- u. Menyediakan prasarana dan sarana untuk meningkatkan kapasitas dan aksesibilitas kesehatan.
- v. Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin.
- w. Mengembangkan lokal surveilans, lokal informasi, manajemen, dan administrasi kesehatan.
- x. Meningkatkan mutu dan akses pelayanan serta informasi kesehatan oleh lembaga pemerintah maupun non pemerintah termasuk perbaikan gizi dan kesehatan lingkungan serta yang mendukung pembangunan kesehatan.
- y. Meningkatkan kualitas dan pemahaman SDM bidang kesehatan terhadap pelayanan yang berkualitas dan beretika.
- z. Meningkatkan sumberdaya meliputi ketersediaan obat dan perbekalan, kualitas dan kuantitas SDM, fasilitas pendidikan dan pelayanan, serta pengembangan asuransi.
- aa. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan upaya kesehatan, pemenuhan kebutuhan dan kesinambungan pelayanan kesehatan.
- bb. Membuka seluas-luasnya informasi yang dapat diakses oleh ibu, calon ibu terhadap kesehatan reproduksi, keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

- cc. Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi ancaman penyakit dan dampak bencana.
- dd. Meningkatkan pengetahuan dan pengembangan diri perempuan.

### 3. Program

Program dari masing-masing urusan yang melaksanakan kebijakan dan strategi guna mencapai sasaran dan tujuan dari misi pertama sebagai berikut:

- a. Pendidikan
  - 1) Program Pendidikan Anak Usia Dini.
  - 2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.
  - 3) Program Pendidikan Menengah.
  - 4) Program Pendidikan Tinggi.
  - 5) Program Pendidikan Luar Biasa.
  - 6) Program Pendidikan Nonformal.
  - 7) Program Pendidikan Informal.
  - 8) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
  - 9) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.
  - 10) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.
  - 11) Program Akselerasi Pengembangan Pendidikan Terkemuka.
- b. Pemuda dan Olahraga
  - 1) Program Peningkatan Peranserta Kepemudaan.
  - 2) Program Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda.
  - 3) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga.
- c. Komunikasi dan Informatika
  - 1) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa.
- d. Kebudayaan
  - 1) Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya.
  - 2) Program Pengembangan Nilai Budaya.
  - 3) Program Pengelolaan Keragaman Budaya.
  - 4) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya.
- e. Sosial
  - 1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.
  - 2) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.

- 3) Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, narkoba, dan penyakit sosial lainnya).
- 4) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.
- 5) Program Pembinaan Anak Terlantar.
- 6) Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma.
- 7) Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo.
- f. Perencanaan Pembangunan
  - 1) Program Perencanaan Sosial dan Budaya.
- g. Kesehatan
  - 1) Program Sediaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan, dan Makanan
  - 2) Program Pelayanan Kesehatan.
  - 3) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
  - 4) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular.
  - 5) Program Kesehatan Keluarga.
  - 6) Program Penanganan Pembiayaan Kesehatan Penduduk Miskin.
  - 7) Program Perbaikan Gizi Masyarakat.
  - 8) Program Pengembangan Lingkungan Sehat.
  - 9) Program Pendidikan Kesehatan dan Sumberdaya Kesehatan.
  - 10) Program Pengembangan Manajemen Kesehatan.
  - 11) Program Sistem Informasi Kesehatan.
  - 12) Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- h. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
  - 1) Program Keluarga Berencana.
  - 2) Program Pelayanan Kontrasepsi.
  - 3) Program Kesehatan Reproduksi Remaja.
  - 4) Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, Penyakit Menular Seksual termasuk HIV/ AIDS.
  - 5) Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR.
- i. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
  - 1) Program Pendidikan Politik Masyarakat.
  - 2) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
- j. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  - 1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan.
- k. Pemberdayaan Perempuan
  - 1) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan.

- 2) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.
- l. Kelautan dan Perikanan
  - 1) Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut.
  - 2) Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan.
- m. Pertanian
  - 1) Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Petani.
- n. Ketahanan Pangan
  - 1) Program Pemberdayaan Penyuluhan.

### 2.1.3.2 Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Misi Kedua:

“Memperkuat fondasi kelembagaan dan memantapkan struktur ekonomi daerah berbasis pariwisata yang didukung potensi lokal dengan semangat kerakyatan menuju masyarakat yang sejahtera”

#### 1. Strategi

Strategi untuk mencapai sasaran misi kedua sebagai berikut:

- a. Penciptaan lingkungan yang kondusif bagi kepariwisataan.
- b. Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- c. Peningkatan iklim usaha bagi sektor-sektor unggulan sebagai faktor penggerak utama perekonomian.
- d. Pembangunan perdesaan.
- e. Pemberdayaan masyarakat dan perempuan.
- f. Perbaikan iklim ketenagakerjaan dan transmigrasi.
- g. Revitalisasi pertanian.
- h. Pengembangan ketersediaan bahan pangan, distribusi, akses, mutu, dan keamanan pangan.
- i. Pengembangan eksplorasi dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan pesisir.

#### 2. Kebijakan

Kebijakan dari strategi untuk mencapai sasaran misi kedua sebagai berikut:

- a. Menyediakan aturan hukum yang mendukung terciptanya iklim usaha kepariwisataan yang sehat.
- b. Meningkatkan fasilitasi terhadap pengembangan usaha pariwisata.
- c. Meningkatkan fasilitasi pengembangan pariwisata berbasis komunitas.

- d. Meningkatkan peranserta masyarakat dalam pengelolaan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif.
- e. Meningkatkan fasilitasi pengembangan permodalan dan inovasi industri pendukung pariwisata serta mengutamakan produk lokal.
- f. Meningkatkan upaya promosi terpadu Trade, Tourism, Investment (TTI) dan kebudayaan.
- g. Mengembangkan jejaring dan kemitraan pariwisata yang berkualitas dan berkesinambungan.
- h. Mengembangkan data dan informasi pariwisata yang akurat dan terkini.
- i. Meningkatkan iklim usaha yang mendukung Yogyakarta sebagai pusat pendidikan dan pariwisata.
- j. Memfasilitasi model pelatihan dan dukungan modal kepada masyarakat.
- k. Memberdayakan dan meningkatkan industri kecil dan kerajinan rakyat yang memberi nilai tambah daya tarik wisata.
- l. Mengembangkan budaya daerah sebagai sentra-sentra industri pariwisata yang mendukung kunjungan dan atraksi wisata.
- m. Meningkatkan partisipasi masyarakat/swasta dalam penyediaan dan pengelolaan infrastruktur ekonomi.
- n. Meningkatkan daya saing dan daya tarik investasi melalui promosi kemudahan prosedur dan fasilitas pendukung.
- o. Menguatkan kapasitas kelembagaan pasar dalam menjamin berkembangnya aktivitas usaha khususnya industri kreatif.
- p. Meningkatkan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan semua pihak.
- q. Membangun sistem informasi yang mudah diakses oleh stakeholder ketenagakerjaan dan masyarakat secara luas.
- r. Membangun tata kelola hubungan kerja antara pemerintah, pengusaha dan pekerja yang lebih saling menguntungkan dan manusiawi.
- s. Memperbaiki pola kerjasama dan kemitraan pemerintah, dan antar pemerintah daerah.
- t. Meningkatkan penyelenggaraan transmigrasi yang menjamin keberhasilan usaha dan perbaikan ekonomi transmigran di daerah penempatan.
- u. Mengembangkan pusat perbenihan dalam mewujudkan pertanian berkelanjutan guna meningkatkan pendapatan petani.
- v. Menguatkan peranserta pemerintah dalam pengaturan, pembinaan dan penguatan modal masyarakat dalam industri pengolahan hasil pertanian.

- w. Meningkatkan peran masyarakat dalam industri pengolahan hasil pertanian.
- x. Mempertahankan lahan abadi dalam rangka ketahanan pangan dan konservasi sumberdaya air.
- y. Mengembangkan ketahanan pangan dan agribisnis pertanian guna mewujudkan kedaulatan pangan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan dalam jumlah yang memadai, tersedia di setiap waktu, beragam, bergizi seimbang, bermutu, aman, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.
- z. Meningkatkan dan mengembangkan produk unggulan hasil hutan.
- aa. Memanfaatkan lahan hutan dan kebun secara optimal dengan menanam jenis produk unggulan serta melibatkan peran aktif masyarakat.
- bb. Membuka jejaring dan kemitraan untuk meningkatkan distribusi dan pemasaran hasil perkebunan.
- cc. Meningkatkan keterampilan dan pemberian stimulan usaha pengolahan produk ikan.
- dd. Meningkatkan peran sumberdaya kelautan dan pesisir.
- ee. Meningkatkan tata niaga produk perikanan.
- ff. Mempromosikan 'Gemar Makan Ikan' di masyarakat.
- gg. Mengembangkan perikanan budidaya dan perikanan tangkap.
- hh. Meningkatkan kegiatan usaha ekonomi produktif bagi perempuan.

### 3. Program

Program dari masing-masing urusan yang melaksanakan kebijakan dan strategi guna mencapai sasaran dan tujuan dari Misi Kedua sebagai berikut:

- a. Pariwisata
  - 1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.
  - 2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.
  - 3) Program Pengembangan Kemitraan.
- b. Koperasi dan UKM
  - 1) Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Kondusif.
  - 2) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah.
  - 3) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah.
  - 4) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.
- c. Perindustrian

- 1) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.
  - 2) Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial.
  - 3) Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi.
  - 4) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri.
  - 5) Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Kreatif.
  - 6) Program Penataan Struktur Industri.
- d. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 1) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan.
  - 2) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan.
- e. Pemberdayaan Perempuan
- 1) Program Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan *Gender* dalam Pembangunan.
- f. Penanaman Modal
- 1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.
  - 2) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.
- g. Perdagangan
- 1) Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional.
  - 2) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor.
  - 3) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.
  - 4) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.
- h. Tenaga Kerja
- 1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.
  - 2) Program Peningkatan Kesempatan Kerja.
  - 3) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.
- i. Transmigrasi
- 1) Program Transmigrasi Regional.
  - 2) Program Transmigrasi Lokal.
  - 3) Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi.
- j. Pemuda dan Olahraga
- 1) Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda.
- k. Pertanian
- 1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.
  - 2) Program Peningkatan Ketahanan Pangan.
  - 3) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan.
  - 4) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan.

- 5) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan.
- 6) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak.
- 7) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.
- l. Ketahanan Pangan
  - 1) Program Pemberdayaan dan Pengembangan Ketahanan Pangan.
- m. Kehutanan dan Perkebunan
  - 1) Program Pengembangan Agribisnis.
  - 2) Program Peningkatan Pemasaran dan Distribusi Hasil Perkebunan.
  - 3) Program Pemanfaatan Teknologi dan Peningkatan Produksi Perkebunan
  - 4) Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan.
  - 5) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
  - 6) Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan.
  - 7) Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan.
  - 8) Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan.
- n. Kelautan dan Perikanan
  - 1) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir.
  - 2) Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan.
  - 3) Program Pengembangan Budidaya Perikanan.
  - 4) Program Pengembangan Perikanan Tangkap.
  - 5) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan.
  - 6) Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, dan Air Tawar.
  - 7) Program Rehabilitasi Ekosistem dan Cadangan Sumberdaya Alam.
- o. Perencanaan Pembangunan
  - 1) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi.
- p. Pemerintahan Umum
  - 1) Program Pengembangan Investasi dan Aset Daerah.
  - 2) Program Pengembangan dan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga Keuangan Mikro.
  - 3) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah.

### 2.1.3.3 Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Misi Ketiga:

“Meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola pemerintahan yang berbasis *Good Governance*”

#### 1. Strategi

Strategi untuk mencapai sasaran misi ketiga sebagai berikut:

- a. Revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah.
- b. Transformasi birokrasi.
- c. Peningkatan peranserta masyarakat dalam pembangunan.
- d. Peningkatan perlindungan perempuan disertai dengan peningkatan peran perempuan.

#### 2. Kebijakan

Kebijakan dari strategi untuk mencapai sasaran misi ketiga sebagai berikut:

- a. Menjalin jejaring yang lebih efektif secara teknis antar lembaga pemerintah.
- b. Melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengawasan melekat terhadap hasil pembangunan dan perbaikan regulasi.
- c. Memantapkan dan mengembangkan penerapan *E-Gov* (DGS).
- d. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan pelayanan berbasis *digital government services* pada semua sektor pemerintah daerah.
- e. Meningkatkan kapasitas kebijakan publik yang proporsional dengan melibatkan peranserta swasta, perguruan tinggi, dan partisipasi masyarakat.
- f. Meningkatkan peran masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan publik, fungsi kontrol, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.
- g. Mengimplementasikan manajemen penanggulangan bencana untuk mengurangi resiko bencana.
- h. Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pembangunan di semua sektor.

#### 3. Program

Program dari masing-masing urusan yang melaksanakan kebijakan dan strategi guna mencapai sasaran dan tujuan dari Misi Ketiga sebagai berikut:

- a. Pemerintahan Umum
  - 1) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

- 2) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota.
  - 3) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.
  - 4) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.
  - 5) Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah.
  - 6) Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan.
  - 7) Program Pemantapan Reformasi Birokrasi.
  - 8) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.
  - 9) Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.
  - 10) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.
  - 11) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
  - 12) Program Fasilitasi dan Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintah.
  - 13) Program Pemeliharaan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.
  - 14) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah.
  - 15) Program Analisis Kebijakan Pembangunan.
  - 16) Program Penelitian dan Pengembangan.
  - 17) Program Pendidikan Kedinasan.
  - 18) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.
  - 19) Program Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana.
  - 20) Program Pengembangan Persandian.
  - 21) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur.
- b. Pertanahan
- 1) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah.
  - 2) Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan.
- c. Kependudukan dan Catatan Sipil
- 1) Program Penataan Administrasi Kependudukan.
- d. Statistik
- 1) Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah.
- e. Kearsipan
- 1) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan.
  - 2) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah.
  - 3) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi.
- f. Komunikasi dan Informatika

- 1) Program Kerjasama Informasi dengan Massmedia.
- 2) Program Fasilitasi Pembinaan, Pengendalian, Pos Telekomunikasi dan Frekuensi.
- g. Perencanaan Pembangunan
  - 1) Program Pengembangan Data/Informasi.
  - 2) Program Perencanaan Pembangunan Daerah.
  - 3) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- h. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
  - 1) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam.
  - 2) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.
  - 3) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
  - 4) Program Kewaspadaan Dini dan Pembinaan Masyarakat.
- i. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  - 1) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa.
- j. Pemberdayaan Perempuan
  - 1) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan *Gender* dan Anak.

#### 2.1.3.4 Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Misi Keempat:

“Memantapkan prasarana dan sarana daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik”

##### 1. Strategi

Strategi untuk mencapai sasaran misi keempat sebagai berikut:

- a. Peningkatan dan pengembangan infrastruktur.
- b. Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan publik.
- c. Pengurangan ketimpangan pembangunan antar-wilayah.
- d. Penanganan dan pengurangan resiko bencana.
- e. Perbaikan pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- f. Penciptaan energi terbarukan dan efisiensi penggunaan energi.

##### 2. Kebijakan

Kebijakan dari strategi untuk mencapai sasaran misi keempat sebagai berikut:

- a. Meningkatkan sarana dan prasarana daerah untuk meningkatkan pelayanan publik secara berkesinambungan.
- b. Meningkatkan kapasitas dan aksesibilitas infrastruktur ekonomi dalam pelayanan publik.

- c. Menata struktur ruang sesuai RTRW.
- d. Mensosialisasikan dan melaksanakan struktur ruang sesuai RTRW.
- e. Meningkatkan pembangunan sistem jaringan transportasi yang terpadu.
- f. Memantapkan manajemen dan sosialisasi penanggulangan bencana untuk mengurangi resiko bencana.
- g. Meningkatkan pendayagunaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup untuk meningkatkan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan.
- h. Menata kembali dan mengembangkan hutan taman kota.

### 3. Program

Program dari masing-masing urusan yang melaksanakan kebijakan dan strategi guna mencapai sasaran dan tujuan dari misi keempat sebagai berikut:

- a. Pekerjaan Umum
  - 1) Program Peningkatan Jalan dan Jembatan.
  - 2) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
  - 3) Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumberdaya Air lainnya.
  - 4) Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku.
  - 5) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah.
  - 6) Program Pengendalian Banjir.
  - 7) Program Pengelolaan Persampahan.
  - 8) Program Pengembangan Kawasan.
  - 9) Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong.
  - 10) Program Pembangunan, Pengelolaan Bangunan Gedung dan Lingkungan.
  - 11) Program Pengaturan Jasa Konstruksi.
  - 12) Program Pelayanan Jasa Pengujian.
- b. Perumahan
  - 1) Program Pengembangan Perumahan.
  - 2) Program Lingkungan Sehat Perumahan.
  - 3) Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan.
  - 4) Program Penataan Kawasan Padat Penduduk dan Kumuh.
- c. Penataan Ruang
  - 1) Program Perencanaan Tata Ruang.
  - 2) Program Pemanfaatan Ruang.
  - 3) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- d. Perhubungan

- 1) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan.
  - 2) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan.
  - 3) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan.
  - 4) Program Peningkatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
  - 5) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor.
  - 6) Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas.
- e. Lingkungan Hidup
- 1) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.
  - 2) Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam.
  - 3) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup.
  - 4) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.
- f. Energi dan Sumberdaya Mineral
- 1) Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Ketenagalistrikan.
  - 2) Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Bahan Bakar.
  - 3) Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan.
  - 4) Program Pengelolaan Air Tanah Berwawasan Konservasi.
- g. Perencanaan Pembangunan
- 1) Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar
  - 2) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam
- h. Kesehatan
- 1) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringan.
  - 2) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata.
- i. Pendidikan
- 1) Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perpustakaan.
- j. Pemuda dan Olahraga
- 1) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga.
- k. Kebudayaan
- 1) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan.
- l. Penanaman Modal
- 1) Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah

- m. Kelautan dan Perikanan
  - 1) Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut.

## 2.2 RENCANA KINERJA PEMBANGUNAN TAHUNAN PEMDA DIY TAHUN 2012

---

Rencana kinerja tahun 2012 ditunjukkan dengan RKPD DIY tahun 2012. Dokumen RKPD 2012 ditetapkan sebagai dokumen resmi dalam Peraturan Gubernur No. 11 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2012. RKPD tahun 2012 merupakan turunan RPJMD 2009-2013 dengan prioritas pembangunan pada tahun 2012 meliputi:

1. Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Kesehatan;
3. Pariwisata;
4. Ketahanan Pangan dan Agro Industri;
5. Iklim Investasi dan Usaha;
6. Infrastruktur;
7. Penanggulangan Kemiskinan;
8. Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana;
9. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;
10. Pengarusutamaan Gender.

Sementara itu, sasaran-sasaran strategis pembangunan yang ditetapkan untuk tiap prioritas disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.2 Prioritas dan Sasaran Strategis Pembangunan DIY Tahun 2012

No	Prioritas	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	
1.	Pendidikan dan Kebudayaan	Terwujudnya peningkatan kualitas lulusan di semua jenjang dan jalur pendidikan	a	Persentase kinerja peningkatan mutu pendidikan SD/MI	persen	78,00
			1. Angka putus sekolah	persen	0,03	
			2. Angka Lulusan	persen	99,07	
			3. Angka mengulang	persen	0,90	
			4. Persentase guru layak mengajar	persen	54,36	
			5. Persentase ruang kelas berkondisi baik	persen	79,22	
			6. Ketersediaan fasilitas sekolah			
			- Memiliki perpustakaan	Persen	71,15	
			- Memiliki lap. Olahraga	Persen	72,48	
			- Memiliki ruang UKS	persen	73,33	
			b	Persentase kinerja peningkatan mutu pendidikan SMP/MTs	persen	84,00
			1. Angka putus sekolah	persen	0,18	
			2. Angka Lulusan	persen	97,20	
			3. Angka mengulang	persen	0,18	
			4. Persentase guru layak mengajar	persen	83,31	
			5. Persentase ruang kelas berkondisi baik	persen	87,66	
			6. Ketersediaan fasilitas sekolah			
			- Memiliki perpustakaan	Persen	75,74	
			- Memiliki lap. Olahraga	Persen	11,64	
			- Memiliki ruang laboratorium	Persen	85,60	
c	Persentase kinerja peningkatan mutu	Persen	80,00			

No	Prioritas	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target		
			pendidikan SM (SMA, MA, SMK)				
			1. Angka putus sekolah	Persen	0,44		
			2. Angka Lulusan	Persen	98,35		
			3. Angka mengulang	Persen	0,22		
			4. Persentase guru layak mengajar	Persen	90,75		
			5. Persentase ruang kelas berkondisi baik	Persen	82,78		
			6. Ketersediaan fasilitas sekolah	Persen	80,79		
			- Memiliki perpustakaan	Persen	13,79		
			- Memiliki lap. Olahraga	Persen	90,64		
			- Memiliki Lab SMA/SM	Persen	83,25		
			- Memiliki ruang praktek (SMK)				
		Terwujudnya peningkatan aksesibilitas pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif	a	Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan SD/MI	Persen	64,00	
				1. Angka Partisipasi Murni	Persen	95,35	
				2. Angka Masuk Kasar	Persen	66,03	
				3. Rasio Siswa per Sekolah	Siswa/sekolah	153	
				4. Rasio Siswa per Kelas	Siswa/kelas	20	
				5. Rasio Kelas per Ruang Kelas	Kelas/ruang kelas	1	
				b	Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan SMP/MTs	persen	77,00
					1. Angka Partisipasi Murni	Persen	84,50
					2. Angka Melanjutkan	Persen	104,75
					3. Rasio Siswa per Sekolah	Siswa/sekolah	284

No	Prioritas	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
			4. Rasio Siswa per Kelas	Siswa/kelas	28
			5. Rasio Kelas per Ruang Kelas	Kelas/ruang kelas	1
			c Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan SM (SMA, MA, SMK)	persen	82,00
			1. Angka Partisipasi Murni	Persen	63,50
			2. Angka Melanjutkan	Persen	104,38
			3. Rasio Siswa per Sekolah	Siswa/sekolah	343
			4. Rasio Siswa per Kelas	Siswa/kelas	28
			5. Rasio Kelas per Ruang Kelas	Kelas/ruang kelas	1
		Terwujudnya peningkatan budaya baca masyarakat	a Rasio jumlah perpustakaan terhadap jumlah penduduk	unit/orang	1 : 3.000
			b Rasio jumlah pemustaka terhadap jumlah penduduk	orang	1 : 1.000
			c Jumlah anggota jaringan <i>Jogja Library</i>	PT	18
		Terwujudnya peningkatan prestasi olahraga	Prestasi olahraga tingkat nasional:		
			a Peringkat pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS)	Peringkat	5
			b Peringkat pada Pekan Olahraga dan Seni Antar Pondok Pesantren Nasional (POSPENAS)	Peringkat	3
			c PON	Peringkat	10
		Berkembang dan lestariannya	a Persentase kunjungan ke museum	persen	13,42

No	Prioritas	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	
		budaya lokal, kawasan budaya, dan Benda Cagar Budaya (BCB)		terhadap Objek Daya Tarik Wisata (ODTW)		
			b	Jumlah peristiwa budaya	event	960
			c	Persentase desa budaya berkategori maju	persen	29,27
			d	Persentase BCB tidak bergerak berkategori kondisi baik	persen	43,70
			e	Persentase organisasi budaya berkategori maju	persen	0,98
2.	Kesehatan	Terwujudnya peningkatan kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat	a	Umur harapan hidup	tahun	74,40
			b	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran Hidup	per 1000 KH	16
			c	Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran Hidup	per 1000 KH	16
			d	Angka Kematian Ibu melahirkan per 100.000 kelahiran Hidup	per 100000 KH	101
			e	Prevalensi Gizi Buruk	persen	0,81
3.	Pariwisata	Terwujudnya kepariwisataan yang berdaya saing tinggi	a	Jumlah wisatawan nusantara	orang	1.692.642
			b	Jumlah wisatawan asing	orang	188.369
			c	Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara	hari	2,40
			d	Rata-rata lama tinggal wisatawan asing	hari	2,80
			e	Jumlah <i>Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition</i> (MICE)	kali/thn	5.990
4.	Ketahanan Pangan dan	Terwujudnya ketersediaan dan kecukupan konsumsi	a	Konsumsi Energi	Kkal/kap/hr	2.000
			b	Konsumsi Protein	Gr/kap/hr	52

No	Prioritas	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target
	Argo industri	pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat	c	Ketersediaan Energi	Kkal/kap/hr	3.664
			d	Ketersediaan Protein	Gr/kap/hr	94,59
			e	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Persen	88,60
5.	Iklim Investasi dan Usaha	Terwujudnya peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat	a	Persentase Pertumbuhan PDRB	persen	5,2 - 5,7
			b	Indeks Ketimpangan Regional	angka indeks	0,310
			c	Rata-rata PDRB per kapita	juta	14,61
			d	Persentase pertumbuhan investasi PMDN	persen	25,45
			e	Persentase pertumbuhan investasi PMA	persen	1,55
6.	Infrastruktur	Terwujudnya ketersediaan infrastruktur yang memadai baik kuantitas dan kualitas	a	Persentase proporsi jaringan jalan berkondisi mantap (baik dan sedang)	persen	80,00
			b	Persentase luasan Daerah Irigasi (DI) yang terlayani air irigasi	persen	75,00
			c	Persentase peningkatan penanganan banjir terhadap daerah potensi banjir	persen	70,00
			d	Persentase penduduk berakses air minum	persen	70,00
			e	Persentase penurunan alih fungsi lahan terhadap total luas lahan	persen	8,00
			f	Persentase ketersediaan rumah layak huni	persen	68,89
			g	Persentase fasilitas keselamatan lalulintas	persen	75,00
		Terwujudnya pemerataan sarana dan prasarana publik	a	Persentase pengembangan kawasan strategis	persen	10,53
			b	Persentase layanan jaringan air limbah terpusat (APY)	persen	40,00
			c	Persentase penduduk yang terlayani pengelolaan sampah	persen	70,00

No	Prioritas	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
			d Jumlah TPA sampah menggunakan sistem <i>sanitary landfill</i>	unit	2
			e V/C rasio kendaraan yang melintas di perkotaan	rasio	0,65
			f <i>Load factor</i> penumpang angkutan umum	persen	35,00
			g Persentase peningkatan penumpang angkutan KA jarak pendek	persen	5,00
			h Persentase peningkatan rasio elektrifikasi	persen	0,015
			i Persentase peningkatan kapasitas energi listrik	persen	0,30
7.	Penanggulangan Kemiskinan	Terwujudnya peningkatan kualitas pengelolaan ketenagakerjaan	a Jumlah angkatan kerja	orang	2.006.337
			b Jumlah kesempatan kerja	orang	2.038.278
			c Jumlah penempatan tenaga kerja	orang	2.000
		Terwujudnya peningkatan kualitas kehidupan sosial masyarakat	a Persentase cakupan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	persen	5,00
			b Persentase cakupan peningkatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	persen	55,67
8.	Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	Terwujudnya pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan	Kualitas Udara:		
			a Konsentrasi CO	ppm	< 14
			b Konsentrasi HC	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	< 145
			c Konsentrasi Pb	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	<2
			d Konsentrasi Nox	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	<400
			e Konsentrasi partikulat	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	<150
			Kualitas air:		

No	Prioritas	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target
			a	Konsentrasi BOD	mg/lt	< 9
			b	Konsentrasi COD	mg/lt	< 45
			c	Konsentrasi Bakteri Coli	MPN/100 ml	<75.000
			d	Fluktuasi muka air tanah	cm	<253
		Terwujudnya ketahanan masyarakat terhadap bencana	a	Jumlah lembaga penanggulangan bencana dalam masyarakat	unit	2
			b	Jumlah regulasi tentang pengurangan resiko bencana	buah	2
9.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Terwujudnya pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel	a	Jumlah lembaga yang memberikan layanan berbasis <i>citizen centris</i>	unit	15
10.	Pengarusutamaan Gender	Terwujudnya kesetaraan gender	a	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	persen	70,90
			b	Indeks Pemberdayaan Gender (GEM)	persen	62,50

Untuk mencapai target kinerja sasaran pembangunan pada tahun 2012 dicapai melalui program prioritas yaitu:

1. Pendidikan
  - a. Program Peningkatan Mutu Wajib Belajar 9 Tahun Pendidikan Dasar TK & SD
  - b. Program Peningkatan Mutu Wajib Belajar 9 Tahun Pendidikan Dasar SMP
  - c. Program Peningkatan Mutu Pendidikan SM
  - d. Program Peningkatan Mutu PNFI
  - e. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD & PNFI
  - f. Program Pemerataan dan Perluasan Wajib Belajar 9 Tahun Pendidikan SD
  - g. Program Pemerataan dan Perluasan Wajib Belajar 9 Tahun Pendidikan SMP
  - h. Program Pemerataan dan Perluasan Pendidikan SM
  - i. Program Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan
  - j. Program Pendidikan Anak Usia Dini
  - k. Program Pendidikan Luar Biasa
  - l. Program Pendidikan Tinggi
  - m. Program peningkatan mutu layanan pendidikan di semua jenjang
  - n. Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan pada BLUD
2. Kepemudaan dan Olahraga
  - a. Program peningkatan peran serta kepemudaan
  - b. Program Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda
  - c. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda
  - d. Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
  - e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
3. Komunikasi dan Informatika
  - a. Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa
  - b. Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa
  - c. Program Fasilitasi, Pembinaan, Pengendalian Pos, Telekomunikasi dan Frekuensi
4. Kebudayaan
  - a. Program Pengembangan dan Pembinaan Museum
  - b. Program Pengembangan Kesenian dan Budaya Daerah
  - c. Program Pengembangan dan Pembinaan Desa Budaya
  - d. Program Pengelolaan Cagar Budaya
  - e. Program Pengembangan dan pembinaan organisasi budaya
  - f. Program Penatagunaan Bahan Pustaka, Karya Seni dan Budaya
  - g. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Budaya

- h. Program Pengelolaan Sumber Sejarah Lokal
- i. Program Pengembangan Nilai Budaya
- 5. Sosial
  - a. Program Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT), dan Penyandang masalah kesejahteraan
  - b. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
  - c. Program Pembinaan Anak terlantar
  - d. Program Pembinaan para penyandang cacat dan trauma
  - e. Program pembinaan panti asuhan/ jompo
  - f. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba) dan penyakit sosial
  - g. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
  - h. Program pembinaan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial (K3S)
- 6. Kesehatan
  - a. Program Penanganan Pembiayaan Kesehatan Penduduk Miskin
  - b. Program Kesehatan Lansia dalam Keluarga
  - c. Program Pelayanan Kesehatan
  - d. Program pengembangan lingkungan sehat
  - e. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
  - f. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD
  - g. Program Sediaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan dan Pengawasan Makanan
  - h. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
  - i. Program Pendidikan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan
  - j. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru/RS Mata
  - k. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru/RS Mata
  - l. Program Pengembangan Manajemen Kesehatan
  - m. Program Sistem Informasi Kesehatan
  - n. Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
  - o. Program Kesehatan Balita dalam Keluarga
  - p. Program Kesehatan Bayi dalam Keluarga
  - q. Program Kesehatan Ibu dalam Keluarga
  - r. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
  - s. Program pelayanan kesehatan anak dan remaja
- 7. Keluarga Berencana
  - a. Program Keluarga Berencana
  - b. Program Kesehatan Reproduksi Remaja
  - c. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja

- d. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS, termasuk HIV/AIDS
- e. Program Pelayanan Kontrasepsi
- 8. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
  - a. Program Pencegahan Dini Bencana
  - b. Program Penanggulangan Korban Bencana
  - c. Program Pemeliharaan Kam-tramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
  - d. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
  - e. Program Peningkatan keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
  - f. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat
  - g. Program Pendidikan Politik Masyarakat
  - h. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
  - i. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
  - j. Program Kewaspadaan Dini dan Pembinaan Masyarakat
- 9. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  - a. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi perdesaan
  - b. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
  - c. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Masyarakat Desa Program peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
  - d. Program peningkatan Prasarana/Sarana dan Penataan Administrasi Pemerintah Desa
- 10. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
  - a. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
  - b. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
  - c. Program Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
  - d. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
- 11. Kelautan dan Perikanan
  - a. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Laut, Air Payau dan Air Tawar
  - b. Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Perikanan dan Kelautan
  - c. Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut
  - d. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
  - e. Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan

- f. Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat
  - g. Program Rehabilitasi Ekosistem dan Cadangan Sumberdaya Alam
  - Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Biota Laut
  - h. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
  - i. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
  - j. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
12. Pertanian
- a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
  - b. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
  - c. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian
  - d. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian
  - e. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
  - f. Program Peningkatan Produksi Pertanian
  - g. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Strategis
  - h. Program Peningkatan Produksi Peternakan
  - i. Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Petani
  - j. Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan
13. Ketahanan Pangan
- a. Program Pemberdayaan dan Pengembangan Ketahanan Pangan
  - b. Program Pemberdayaan Penyuluhan
14. Pariwisata
- a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
  - b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
  - c. Program Pengembangan Kemitraan
15. Koperasi dan UKM
- a. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif
  - b. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif
  - c. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UKM
16. Industri
- a. Program Pengembangan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi
  - b. Program Pengembangan IKM
  - c. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
  - d. Program Penataan Struktur industri
  - e. Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial
  - f. Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Kreatif
17. Penanaman Modal
- a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
  - b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

- c. Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah
- 18. Perdagangan
  - a. Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional
  - b. Program Peningkatan Pengembangan Ekspor
  - c. Program Perlindungan konsumen dan Pengamanan Perdagangan
  - d. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
  - e. Program Persaingan Usaha
- 19. Ketenagakerjaan
  - a. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja berbasis kompetensi
  - b. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja berbasis masyarakat
  - c. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja berbasis kewirausahaan
  - d. Program peningkatan kesempatan kerja
  - e. Program pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial
  - f. Program pelayanan pengawasan lembaga ketenagakerjaan
  - g. Program peningkatan mutu pelayanan lembaga ketenagakerjaan
- 20. Ketransmigrasian
  - a. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
  - b. Program Transmigrasi Regional
- 21. Kehutanan
  - a. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
  - b. Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan
  - c. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
  - d. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
  - e. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan
- 22. Perencanaan Pembangunan
  - a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
  - b. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
  - c. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
  - d. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Sarana Prasarana
  - e. Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan
  - f. Program Pengembangan Data/Informasi
  - g. Program Pengendalian Pembangunan Daerah
- 23. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
  - a. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah
  - b. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

- c. Program peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
  - d. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
  - e. Program Penataan Daerah Otonomi Baru
  - f. Program Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan
  - g. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
  - h. Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah
  - i. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
  - j. Program Perbaikan Kearsipan
  - k. Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media
  - l. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kada/Wakada
  - m. Program Analisis Kebijakan Pembangunan
  - n. Program Penelitian dan Pengembangan
  - o. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
  - p. Program Pengembangan Kehidupan Beragama
  - q. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Kepegawaian
  - r. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
  - s. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
  - t. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Kepegawaian
  - u. Program Pendidikan Kedinasan
  - v. Program Penelitian dan Pengembangan Kediklatan
  - w. Program Peningkatan Kerjasama Kediklatan Antara Daerah
  - x. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
  - y. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
  - z. Program Pengawasan Produk Hukum
  - aa. Program Bantuan dan Layanan Hukum
  - bb. Program Pemanfaatan Teknologi Informasi
  - cc. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
  - dd. Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
  - ee. Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah
  - ff. Program Pengembangan investasi dan aset daerah
  - gg. Program Pengembangan dan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga Keuangan Mikro
  - hh. Program Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
24. Energi dan Sumberdaya Mineral
- a. Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Bahan Bakar
  - b. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Ketenagalistrikan
  - c. Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Energi

- d. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
- e. Program Pengelolaan Air Tanah Berwawasan Konservasi
- 25. Kearsipan
  - a. Program Perbaikan Sistem Kearsipan
  - b. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip
  - c. Program Peningkatan Kualitas Layanan Informasi
- 26. Statistik
  - Program Pengembangan Statistik Daerah
- 27. Kependudukan dan Catatan Sipil
  - Program Penataan Administrasi Kependudukan
- 28. Pertanahan
  - a. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan
  - b. Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
  - c. Program Sistem Pendaftaran Pertanahan
  - d. Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
- 29. Pekerjaan Umum
  - a. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
  - b. Program Peningkatan Jalan dan Jembatan
  - c. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
  - d. Program Pengadaan Tanah untuk Infrastruktur Jalan
  - e. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya
  - f. Program Pengendalian Banjir
  - g. Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum
  - h. Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya
  - i. Program Pelayanan Jasa Pengujian
  - j. Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi Bidang Pekerjaan Umum
  - k. Program Pengembangan Manajemen Laboratorium
  - l. Program Pengaturan Jasa Konstruksi
  - m. Program Pengawasan Jasa Konstruksi
  - n. Program Pengembangan Pengelolaan Air Limbah
  - o. Program Pengelolaan Persampahan
  - p. Program Pengembangan Kawasan Perkotaan
  - q. Program Pengembangan Kawasan Perdesaan
  - r. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
  - s. Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi
- 30. Perumahan
  - a. Program Pengembangan Perumahan

- b. Program Lingkungan Sehat Perumahan
  - c. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
  - d. Program Penataan Kawasan Padat Penduduk dan Kumuh
  - e. Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam
31. Penataan Ruang
- a. Program Perencanaan Tata Ruang
  - b. Program Pemanfaatan Ruang
  - c. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
32. Perhubungan
- a. Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas
  - b. Program Peningkatan Manajemen dan Rekayasa Lalulintas
  - c. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
  - d. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan
  - e. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
  - f. Program Penurunan Pelanggaran Muatan Lebih
  - g. Program Peningkatan Layanan Sertifikasi Kelaikan Transportasi
33. Lingkungan Hidup
- a. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
  - b. Program Peningkatan Pengendalian Polusi
  - c. Program Pengembangan Kinerja Persampahan
  - d. Program Pengelolaan RTH
  - e. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
  - f. Program Peningkatan Kualitas dan Akses informasi Sumber Daya Alam dan LH
34. Perpustakaan
- a. Program Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan
  - b. Program Pengembangan Budaya Baca
  - c. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perpustakaan

## 2.3 PENETAPAN KINERJA

---

Dokumen Penetapan Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan penetapan kinerja mengacu pada RPJMD, RKPD tahunan, IKU, dan anggaran atau APBD. Pemerintah Daerah DIY

telah menetapkan PK secara berjenjang yaitu di tingkat provinsi dan SKPD. PK pada tabel berikut merupakan PK tahun 2012 tingkat provinsi:

Tabel 2.3 Penetapan Kinerja Pemerintah DIY Tahun 2012

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
1	Terwujudnya peningkatan kualitas lulusan di semua jenjang dan jalur pendidikan	<b>a</b>	<b>Persentase kinerja peningkatan mutu pendidikan SD/MI</b>	<b>persen</b>	<b>78,00</b>
			1. Angka putus sekolah	persen	0,03
			2. Angka Lulusan	persen	99,07
			3. Angka mengulang	persen	0,90
			4. Persentase guru layak mengajar	persen	54,36
			5. Persentase ruang kelas berkondisi baik	persen	79,22
			6. Ketersediaan fasilitas sekolah		
			- Memiliki perpustakaan	Persen	71,15
			- Memiliki lap. Olahraga	Persen	72,48
			- Memiliki ruang UKS	persen	73,33
		<b>b</b>	<b>Persentase kinerja peningkatan mutu pendidikan SMP/MTs</b>	<b>persen</b>	<b>84,00</b>
			1. Angka putus sekolah	persen	0,18
			2. Angka Lulusan	persen	97,20
			3. Angka mengulang	persen	0,18
	4. Persentase guru layak mengajar	persen	83,31		
	5. Persentase ruang kelas berkondisi baik	persen	87,66		
	6. Ketersediaan fasilitas sekolah				
	- Memiliki perpustakaan	Persen	75,74		
	- Memiliki lap. Olahraga	Persen	11,64		
	- Memiliki ruang laboratorium	persen	85,60		

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
		<b>c</b> <b>Persentase kinerja peningkatan mutu pendidikan SM (SMA, MA, SMK)</b>	<b>persen</b>	<b>80,00</b>
		1. Angka putus sekolah	persen	0,44
		2. Angka Lulusan	persen	98,35
		3. Angka mengulang	persen	0,22
		4. Persentase guru layak mengajar	persen	90,75
		5. Persentase ruang kelas berkondisi baik	persen	82,78
		6. Ketersediaan fasilitas sekolah	Persen	80,79
		- Memiliki perpustakaan	Persen	13,79
		- Memiliki lap. Olahraga	Persen	90,64
		- Memiliki Lab SMA/SM	persen	83,25
		- Memiliki ruang praktek (SMK)		
2	<b>Terwujudnya peningkatan aksesibilitas pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif</b>	<b>a</b> <b>Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan SD/MI</b>	<b>persen</b>	<b>64,00</b>
		1. Angka Partisipasi Murni	Persen	95,35
		2. Angka Masuk Kasar	Persen	66,03
		3. Rasio Siswa per Sekolah	Siswa/sekolah	153
		4. Rasio Siswa per Kelas	Siswa/kelas	20
		5. Rasio Kelas per Ruang Kelas	Kelas/ruang kelas	1
		<b>b</b> <b>Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan SMP/MTs</b>	<b>persen</b>	<b>77,00</b>
		1. Angka Partisipasi Murni	Persen	84,50
		2. Angka Melanjutkan	Persen	104,75
		3. Rasio Siswa per Sekolah	Siswa/sekolah	284

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
		4. Rasio Siswa per Kelas	Siswa/kelas	28
		5. Rasio Kelas per Ruang Kelas	Kelas/ruang kelas	1
		<b>c Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan SM (SMA, MA, SMK)</b>	<b>persen</b>	<b>82,00</b>
		1. Angka Partisipasi Murni	Persen	63,50
		2. Angka Melanjutkan	Persen	104,38
		3. Rasio Siswa per Sekolah	Siswa/sekolah	343
		4. Rasio Siswa per Kelas	Siswa/kelas	28
		5. Rasio Kelas per Ruang Kelas	Kelas/ruang kelas	1
3	<b>Terwujudnya peningkatan budaya baca masyarakat</b>	<b>a</b> Rasio jumlah perpustakaan terhadap jumlah penduduk	unit/orang	1 : 3.000
		<b>b</b> Rasio jumlah pemustaka terhadap jumlah penduduk	orang	1 : 1.000
		<b>c</b> Jumlah anggota jaringan <i>Jogja Library</i>	PT	18
4	<b>Terwujudnya peningkatan prestasi olahraga</b>	<b>Prestasi Olahraga Tingkat Nasional:</b>		
		<b>a</b> Peringkat pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS)	Peringkat	5
		<b>b</b> Peringkat pada Pekan Olahraga dan Seni Antar Pondok Pesantren Nasional (POSPENAS)	Peringkat	3
		<b>c</b> PON	Peringkat	10
5	<b>Berkembang dan lestarnya budaya lokal, kawasan budaya, dan Benda Cagar Budaya (BCB)</b>	<b>a</b> Persentase kunjungan ke museum terhadap Objek Daya Tarik Wisata (ODTW)	persen	13,42
		<b>b</b> Jumlah peristiwa budaya	event	960

NO.	SASARAN	INDIKATOR		SATUAN	TARGET
		c	Persentase desa budaya berkategori maju	persen	29,27
		d	Persentase BCB tidak bergerak berkategori kondisi baik	persen	43,70
		e	Persentase organisasi budaya berkategori maju	persen	0,98
6	Terwujudnya peningkatan kualitas kehidupan sosial masyarakat	a	Persentase cakupan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	persen	5,00
		b	Persentase cakupan peningkatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	persen	55,67
7	Terwujudnya peningkatan kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat	a	Umur harapan hidup	tahun	74,40
		b	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran Hidup	per 1000 KH	16
		c	Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran Hidup	per 1000 KH	16
		d	Angka Kematian Ibu melahirkan per 100.000 kelahiran Hidup	per 100000 KH	101
		e	Prevalensi Gizi Buruk	persen	0,81
8	Terwujudnya kepariwisataan yang berdaya saing tinggi	a	Jumlah wisatawan nusantara	orang	1.692.642
		b	Jumlah wisatawan asing	orang	188.369
		c	Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara	hari	2,40
		d	Rata-rata lama tinggal wisatawan asing	hari	2,80
		e	Jumlah <i>Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition</i> (MICE)	kali/thn	5.990
9	Terwujudnya peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat	a	Persentase Pertumbuhan PDRB	persen	5,2 - 5,7
		b	Indeks Ketimpangan Regional	angka indeks	0,310
		c	Rata-rata PDRB per kapita	juta	14,61
		d	Persentase pertumbuhan investasi PMDN	persen	25,45
		e	Persentase pertumbuhan investasi PMA	persen	1,55

NO.	SASARAN	INDIKATOR		SATUAN	TARGET
10	Terwujudnya ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat	a	Konsumsi Energi	Kkal/kap/hr	2.000
		b	Konsumsi Protein	Gr/kap/hr	52
		c	Ketersediaan Energi	Kkal/kap/hr	3.664
		d	Ketersediaan Protein	Gr/kap/hr	94,59
		e	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Persen	88,60
11	Terwujudnya peningkatan kualitas pengelolaan ketenagakerjaan	a	Jumlah angkatan kerja	orang	2.006.337
		b	Jumlah kesempatan kerja	orang	2.038.278
		c	Jumlah penempatan tenaga kerja	orang	2.000
12	Terwujudnya pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel	a	Jumlah lembaga yang memberikan layanan berbasis <i>citizen centris</i>	unit	15
13	Terwujudnya kesetaraan gender	a	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	persen	70,90
		b	Indeks Pemberdayaan Gender (GEM)	persen	62,50
14	Terwujudnya ketersediaan infrastruktur yang memadai baik kuantitas dan kualitas	a	Persentase proporsi jaringan jalan berkondisi mantap (baik dan sedang)	persen	80,00
		b	Persentase luasan Daerah Irigasi (DI) yang terlayani air irigasi	persen	75,00
		c	Persentase peningkatan penanganan banjir terhadap daerah potensi banjir	persen	70,00
		d	Persentase penduduk berakses air minum	persen	70,00
		e	Persentase penurunan alih fungsi lahan terhadap total luas lahan	persen	8,00
		f	Persentase ketersediaan rumah layak huni	persen	68,89
		g	Persentase fasilitas keselamatan lalulintas	persen	75,00
15	Terwujudnya pemerataan sarana	a	Persentase pengembangan kawasan strategis	persen	10,53

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
	dan prasarana publik	b	Persentase layanan jaringan air limbah terpusat (APY)	persen	40,00
		c	Persentase penduduk yang terlayani pengelolaan sampah	persen	70,00
		d	Jumlah TPA sampah menggunakan sistem <i>sanitary landfill</i>	unit	2
		e	V/C rasio kendaraan yang melintas di perkotaan	rasio	0,65
		f	<i>Load factor</i> penumpang angkutan umum	persen	35,00
		g	Persentase peningkatan penumpang angkutan KA jarak pendek	persen	5,00
		h	Persentase peningkatan rasio elektrifikasi	persen	0,015
		i	Persentase peningkatan kapasitas energi listrik	persen	0,30
16		Terwujudnya ketahanan masyarakat terhadap bencana	a	Jumlah lembaga penanggulangan bencana dalam masyarakat	unit
	b		Jumlah regulasi tentang pengurangan resiko bencana	buah	2
17	Terwujudnya pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan	Kualitas Udara:			
		a	Konsentrasi CO	ppm	< 14
		b	Konsentrasi HC	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	< 145
		c	Konsentrasi Pb	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	< 2
		d	Konsentrasi Nox	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	< 400
		e	Konsentrasi partikulat	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	< 150
		Kualitas Air:			
		a	Konsentrasi BOD	mg/lt	< 9
		b	Konsentrasi COD	mg/lt	< 45

NO.	SASARAN	INDIKATOR		SATUAN	TARGET
		c	Konsentrasi Bakteri Coli	MPN/100 ml	<75.000
		d	Fluktuasi muka air tanah	cm	<253

## 2.4 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2012

Sebagaimana yang telah dituangkan dalam dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) dan dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2012, belanja daerah diprioritaskan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan dasar yang sesuai dengan kewenangan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Mengingat kondisi kemampuan keuangan daerah yang sangat terbatas, Belanja Daerah Tahun 2012 sebesar Rp2.285.140.075.734,60 terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp1.310.184.282.987,00 (atau 57,33% dari total anggaran) dan Belanja Langsung sebesar Rp974.955.792.747,60 (atau 42,67% dari total anggaran 2012).

**Tabel 2.4 Target Belanja Daerah**

No	Uraian	Target (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	1.310.184.282.987,00	57,33
2	Belanja Langsung	974.955.792.747,60	42,67
Jumlah		2.285.140.075.734,60	100

Sumber: Data DPPKA DIY

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2012 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran-sasaran pembangunan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.5 Alokasi Anggaran per Sasaran Pembangunan Tahun Anggaran 2012**

No	Sasaran	Anggaran	Persentase Anggaran (%)
1	Terwujudnya peningkatan kualitas lulusan di semua jenjang dan jalur pendidikan	93.731.276.591	9,61
2	Terwujudnya peningkatan aksesibilitas pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif		
3	Terwujudnya peningkatan budaya baca masyarakat	57.310.050.350	5,88
4	Terwujudnya peningkatan prestasi olahraga	11.945.687.000	1,23

No	Sasaran	Anggaran	Persentase Anggaran (%)
5	Berkembang dan lestarnya budaya lokal. kawasan budaya dan Benda Cagar Budaya (BCB)	31.424.893.575	3,22
6	Terwujudnya peningkatan kualitas kehidupan sosial masyarakat	11.253.687.235	1,15
7	Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Kesehatan bagi Seluruh Masyarakat	88.996.538.667	9,13
8	Terwujudnya Kepariwisataaan yang Berdaya Saing Tinggi	6.789.579.377	0,70
9	Terwujudnya Peningkatan Ketahanan Ekonomi Masyarakat	31.550.566.930	3,24
10	Terwujudnya Ketersediaan dan Kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat	2.577.968.400	0,26
11	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pengelolaan Ketenagakerjaan	14.710.619.025	1,51
12	Terwujudnya Pemerintahan yang Responsif. Transparan dan Akuntabel	74.243.999.490	7,62
13	Terwujudnya kesetaraan gender	2.323.681.600	0,24
14	Terwujudnya ketersediaan infrastruktur yang memadai baik kuantitas dan kualitas	214.395.020.641	21,99
15	Terwujudnya pemerataan sarana dan prasarana publik	71.041.948.103	7,29
16	Terwujudnya ketahanan masyarakat terhadap bencana	3.594.088.690	0,37
17	Terwujudnya pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan	5.682.372.850	0,58
<b>Jumlah</b>		721.571.978.524	74,01
<b>Belanja Langsung Pendukung</b>		253.383.814.223	25,99
<b>Total Belanja Langsung</b>		974.955.792.747	100,00

Pada tabel di atas, pada pos belanja langsung dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama dan anggaran untuk belanja langsung program/kegiatan pendukung. Jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp721.571.978.524,- atau sebesar 74,01% dari total belanja langsung,

sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp253.383.814.223 atau 25,99% dari total anggaran belanja langsung.

Pada anggaran untuk program/kegiatan utama, sasaran pembangunan dengan anggaran paling besar adalah sasaran terwujudnya ketersediaan infrastruktur yang memadai baik kuantitas dan kualitas dengan besaran anggaran 21,99% dari total belanja langsung. Sasaran lain dengan anggaran yang relatif besar adalah sasaran di bidang pendidikan yaitu Terwujudnya peningkatan kualitas lulusan di semua jenjang dan jalur pendidikan dan Terwujudnya peningkatan aksesibilitas pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif yaitu sebesar 9,61 serta sasaran Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Kesehatan bagi Seluruh Masyarakat sebesar 9,13 dari total anggaran belanja langsung. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relatif sedikit adalah sasaran Terwujudnya kesetaraan gender sebesar 0,24% dari total anggaran belanja langsung.

## 2.5 INSTRUMEN PENDUKUNG

---

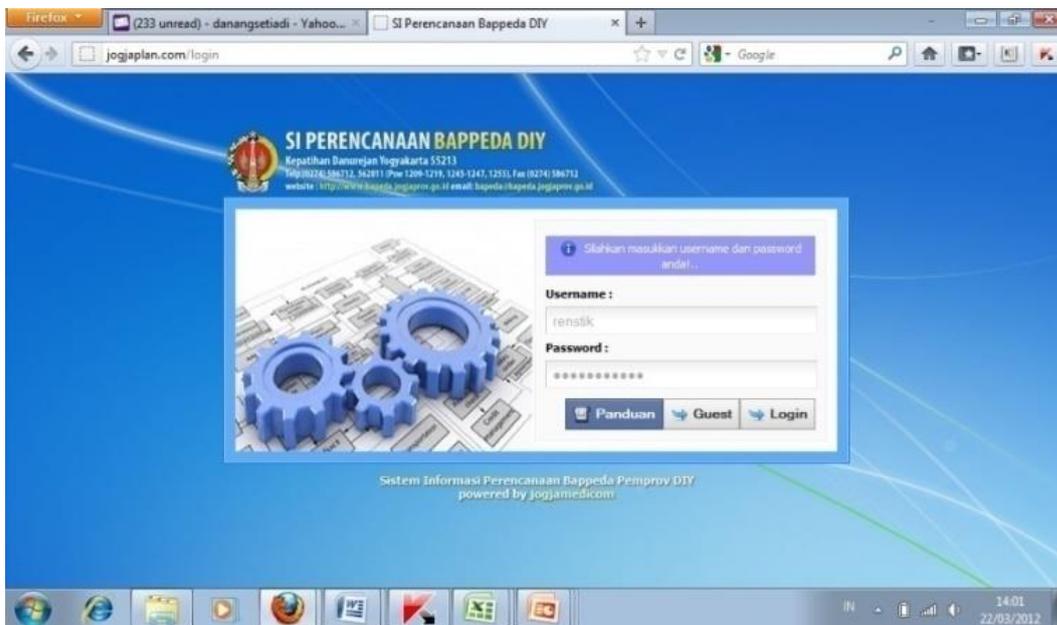
Di dalam melaksanakan pembangunan, setiap Pemerintah Daerah memerlukan perencanaan yang akurat serta diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap pembangunan yang dilakukannya. Implementasi otonomi daerah dan desentralisasi di Indonesia menuntut perubahan paradigma perencanaan dan keuangan daerah yang bersifat komprehensif mengarah kepada transparansi, akuntabilitas, demokratisasi, desentralisasi dan partisipasi masyarakat.

Dengan maksud untuk semakin menajamkan perencanaan pembangunan di daerah itulah maka Pemerintah Daerah DIY telah melakukan inovasi-inovasi dalam hal perencanaan dan pengendalian pembangunan. Beberapa hal yang telah dilakukan adalah dengan menyiapkan perangkat-perangkat pembantu untuk mempermudah pelaksanaan fungsi perencanaan dan pengendalian adalah pembuatan kalender perencanaan, penganggaran dan pengendalian pembangunan, penyediaan sistem informasi perencanaan daerah dan sistem informasi web monev.

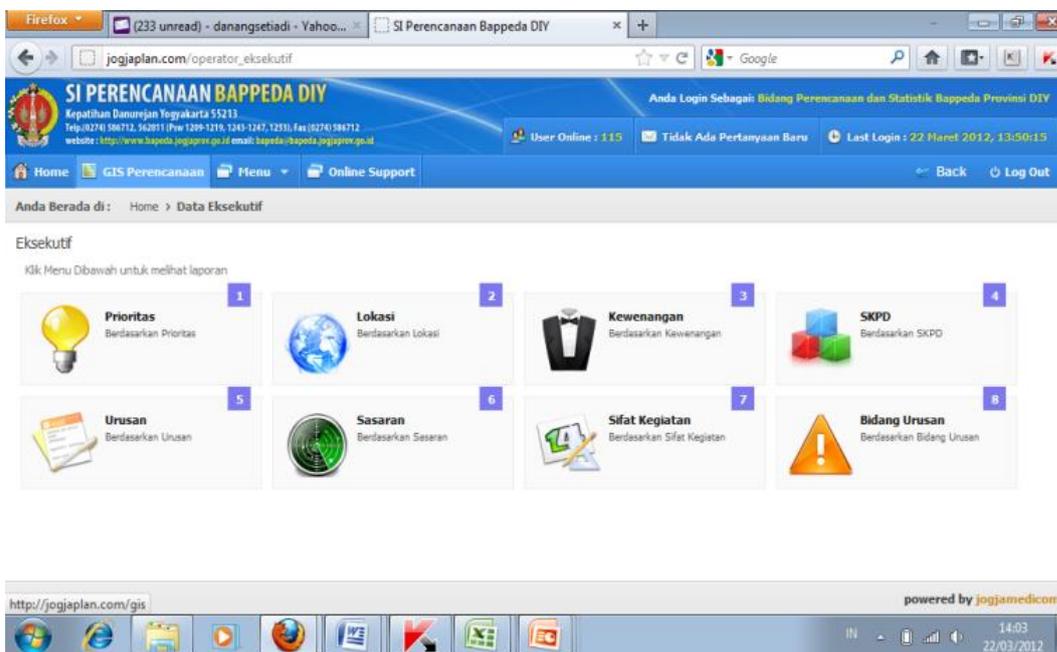
### 1. Kalender Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan

Kalender ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran kerangka waktu pelaksanaan proses perencanaan, penganggaran dan pengendalian. Dari kalender ini bisa diketahui "siapa melakukan apa" dan waktu pelaksanaan dari masing-masing proses tersebut.

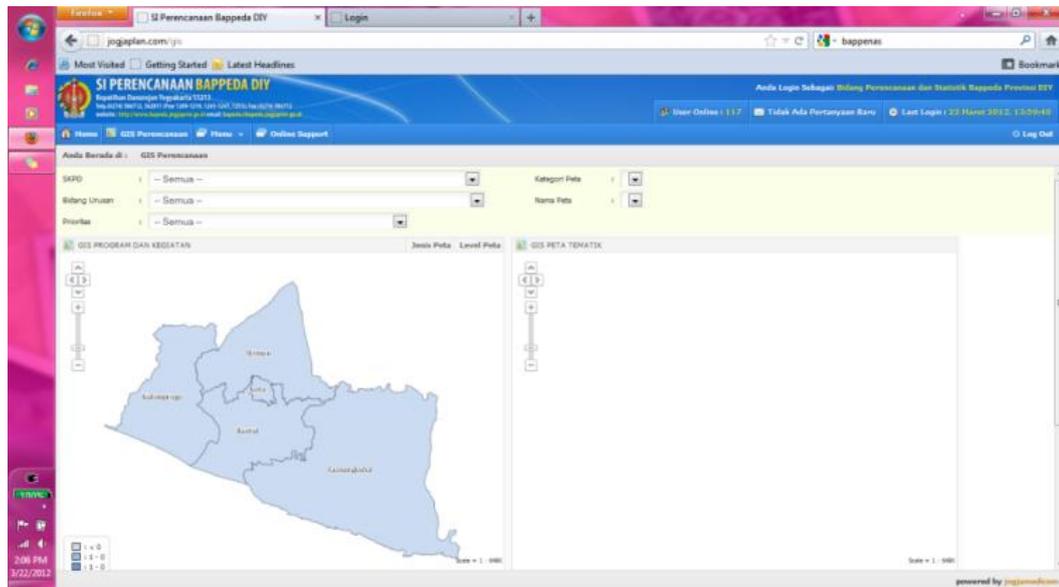




Gambar 2.2 Tampilan Halaman Muka Jogjaplan



Gambar 2.3 Tampilan Menu Jogjaplan

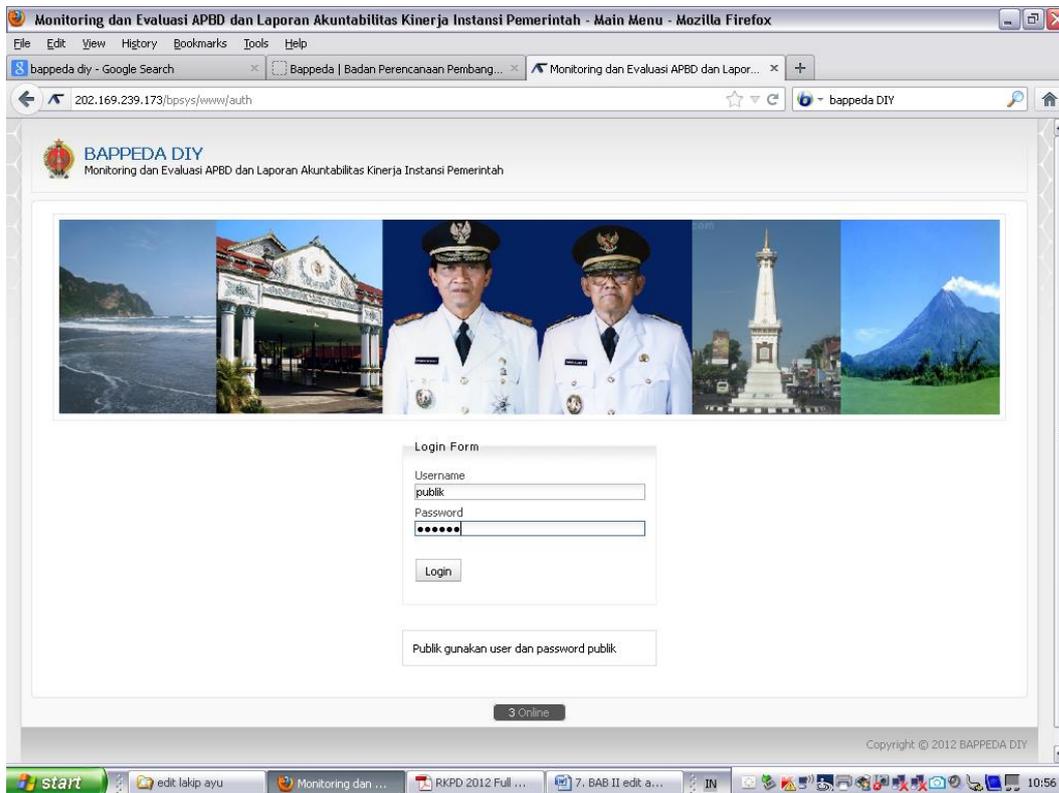


**Gambar 2.4 Tampilan Halaman GIS Perencanaan Pada Jogjakplan**

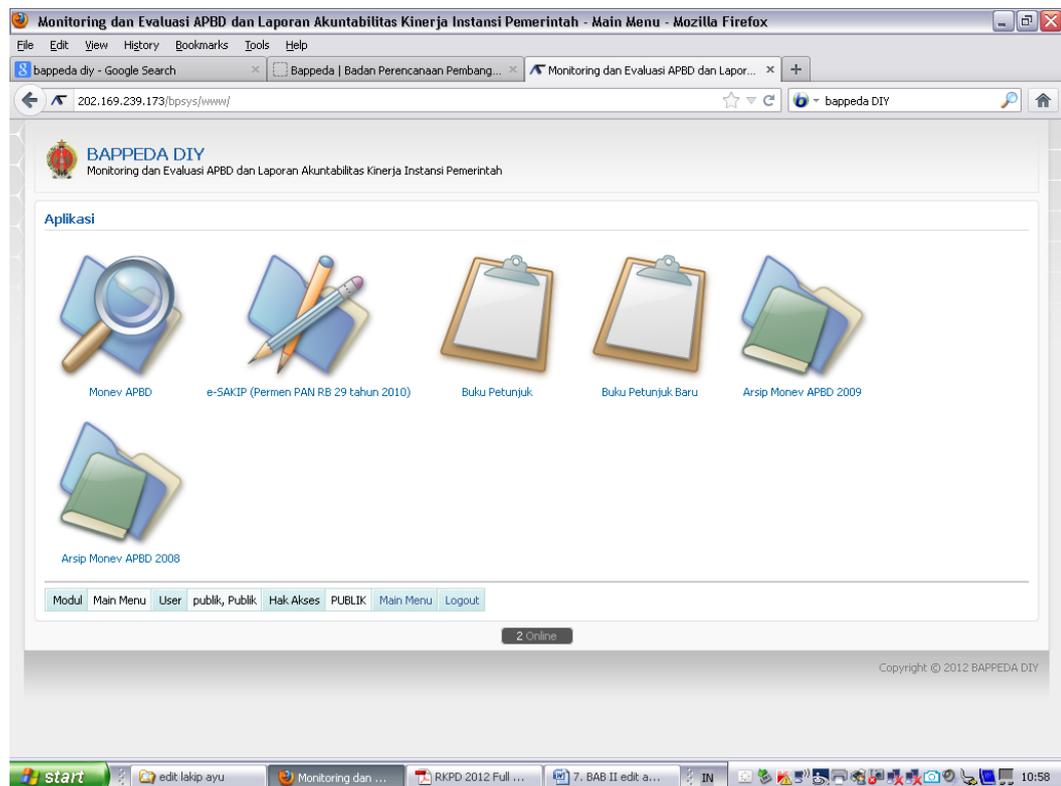
### 3. Sistem Informasi Web Monev

Sistem Informasi Web Monev (Simonev) merupakan sistem aplikasi pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah, yang dimaksudkan untuk mendukung terwujudnya evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan secara maksimal sesuai dengan perencanaan. Sistem ini merupakan sarana untuk mengendalikan pelaksanaan program/kegiatan dan juga sistem pelaporan yang akurat. Simonev sangat bermanfaat bagi pengambil kebijakan dalam menentukan kinerja dari pelaksanaan program/kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, Satuan Kerja dan Kabupaten/Kota sekaligus mempersingkat/memperpendek proses pengisian dokumen yang diperlukan untuk menyusun laporan kinerja baik melalui anggaran daerah, anggaran pemerintah pusat, dan anggaran bantuan kepada kabupaten/kota.

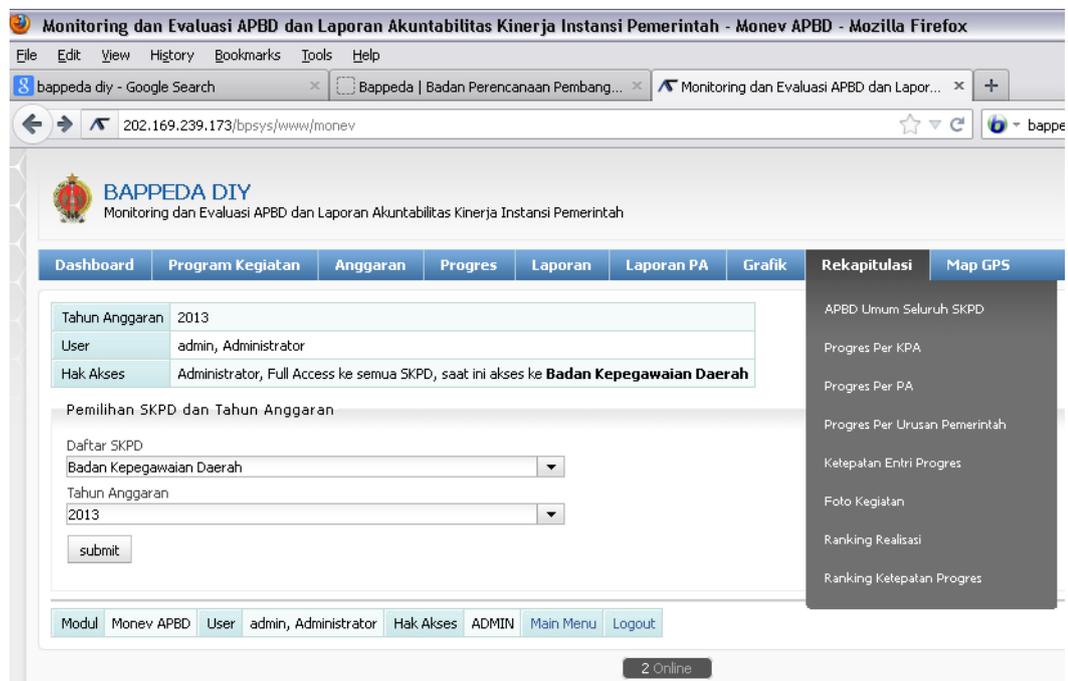
Simonev DIY terdiri dari sistem pelaporan LAKIP dan sistem pelaporan pelaksanaan program/kegiatan APBD. Sistem laporan LAKIP berisikan Renstra, RKT, PK dan PPS yang dimaksudkan untuk mempermudah dalam menyusun LAKIP, baik LAKIP SKPD maupun LAKIP Provinsi. Selanjutnya sistem monev APBD berisikan laporan pelaksanaan program/kegiatan yang didanai dari APBD Provinsi yang dilaporkan secara periodik yaitu bulanan, triwulanan, semesteran dan laporan akhir tahun.



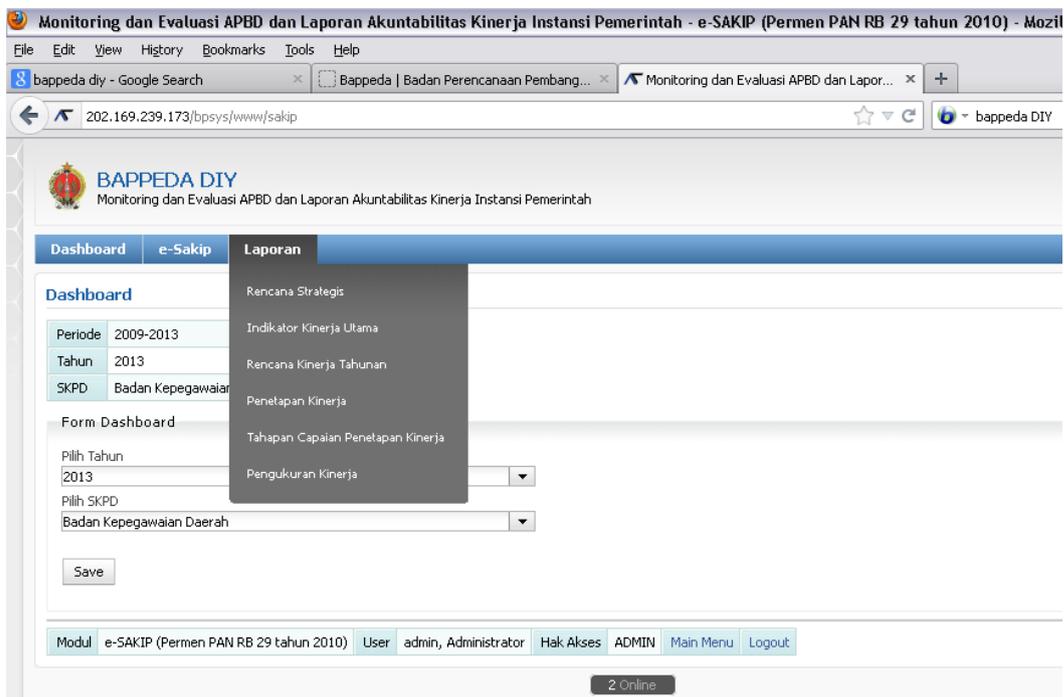
Gambar 2.5 Tampilan Halaman Muka Web Money DIY



Gambar 2.6 Tampilan Menu Web Monev DIY



Gambar 2.7 Tampilan Menu Monev Tiap Tahun dan Tiap SKPD DIY



**Gambar 2.8** Tampilan Pilihan Menu Jenis Laporan Yang Akan Disajikan Pada Web Monev DIY

# BAB 3

## AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2012

---

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah DIY dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja utama sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Pemerintah DIY beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.1 Capaian Kinerja DIY Tahun 2012

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		2012			
		Uraian	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian	
1	Terwujudnya peningkatan kualitas lulusan di semua jenjang dan jalur pendidikan	<b>a</b>	<b>Persentase kinerja peningkatan mutu pendidikan SD/MI</b>	<b>persen</b>	<b>78,00</b>	<b>67,37</b>	<b>87,20</b>
			1. Angka putus sekolah	persen	0,03	0,07	42,85
			2. Angka Lulusan	persen	99,07	98,45	98,45
			3. Angka mengulang	persen	0,90	3,67	24,52
			4. Persentase guru layak mengajar	persen	54,36	62,67	115,28
			5. Persentase ruang kelas berkondisi baik	persen	79,22	79,34	100,15
			6. Ketersediaan fasilitas sekolah				
		- Memiliki perpustakaan	Persen	71,15	74,32	104,45	
		- Memiliki lap. Olahraga	Persen	72,48	78,80	108,71	
		- Memiliki ruang UKS	persen	73,33	75,71	103,24	
		<b>b</b>	<b>Persentase kinerja peningkatan mutu pendidikan SMP/MTs</b>	<b>Persen</b>	<b>84,00</b>	<b>77,60</b>	<b>92,38</b>
			1. Angka putus sekolah	Persen	0,18	0,16	112,5
			2. Angka Lulusan	Persen	97,20	96,83	99,61
			3. Angka mengulang	Persen	0,18	0,35	51,42
4. Persentase guru layak mengajar	Persen		83,31	85,08	102,12		
5. Persentase ruang kelas berkondisi baik	Persen		87,66	89,49	102,08		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		2012			
		Uraian	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian	
		6. Ketersediaan fasilitas sekolah - Memiliki perpustakaan - Memiliki lap. Olahraga - Memiliki ruang laboratorium	Persen	75,74	76,40	100,87	
			Persen	11,64	11,99	103	
			Persen	85,60	229,01	267,53	
		<b>c</b>	<b>Persentase kinerja peningkatan mutu pendidikan SM (SMA, MA, SMK)</b>	<b>Persen</b>	<b>80,00</b>	<b>94,09</b>	<b>135,48</b>
		1. Angka putus sekolah	Persen	0,44	0,51	86,27	
		2. Angka Lulusan	Persen	98,35	97,74	99,37	
		3. Angka mengulang	Persen	0,22	0,25	88,00	
		4. Persentase guru layak mengajar	Persen	90,75	92,30	101,70	
		5. Persentase ruang kelas berkondisi baik	Persen	82,78	94,89	114,62	
		6. Ketersediaan fasilitas sekolah - Memiliki perpustakaan - Memiliki lap. Olahraga - Memiliki Lab SMA/SM - Memiliki ruang praktek (SMK)	Persen	80,79	81,02	100,28	
			Persen	13,79	13,63	98,83	
			Persen	90,64	314,84	347,35	
			Persen	83,25	152,31	182,95	
		<b>2</b>	Terwujudnya peningkatan aksesibilitas pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat dalam suasana	<b>a</b>	<b>Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan SD/MI</b>	<b>Persen</b>	<b>64,00</b>
1. Angka Partisipasi Murni	Persen	95,35		97,54	102,29		
2. Angka Masuk Kasar	Persen	63,03		109,32	173,44		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		2012			
		Uraian	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian	
	lingkungan yang kondusif	3. Rasio Siswa per Sekolah	Siswa/sekolah	153	153	100	
		4. Rasio Siswa per Kelas	Siswa/kelas	20	21	105	
		5. Rasio Kelas per Ruang Kelas	Kelas/ruang kelas	1	1,01	101	
		<b>b</b>	<b>Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan SMP/MTs</b>	<b>Persen</b>	<b>77,00</b>	<b>87,54</b>	<b>113,68</b>
		1. Angka Partisipasi Murni	Persen	84,50	81,13	96,01	
		2. Angka Melanjutkan	Persen	104,75	105,63	100,84	
		3. Rasio Siswa per Sekolah	Siswa/sekolah	284	283	99,64	
		4. Rasio Siswa per Kelas	Siswa/kelas	28	29	103,57	
		5. Rasio Kelas per Ruang Kelas	Kelas/ruang kelas	1	1,01	101	
		<b>c</b>	<b>Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan SM (SMA, MA, SMK)</b>	<b>persen</b>	<b>82,00</b>	<b>78,33</b>	<b>95,52</b>
		1. Angka Partisipasi Murni	Persen	63,50	63,65	100,24	
		2. Angka Melanjutkan	Persen	104,38	105,40	100,23	
		3. Rasio Siswa per Sekolah	Siswa/sekolah	343	339	98,83	
		4. Rasio Siswa per Kelas	Siswa/kelas	28	29	103,57	
		5. Rasio Kelas per Ruang Kelas	Kelas/ruang	1	1,1	110	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		2012			
		Uraian	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian	
			kelas				
3	Terwujudnya peningkatan budaya baca masyarakat	a	Rasio jumlah perpustakaan terhadap jumlah penduduk	unit/orang	1 : 3000	1 : 2500	120
		b	Rasio jumlah pemustaka terhadap jumlah penduduk	orang	1 : 1000	1 : 1000	100
		c	Jumlah anggota jaringan <i>Jogja Library</i>	PT	18	28	155,55
4	Terwujudnya peningkatan prestasi olahraga	Prestasi olahraga tingkat nasional:					
		a	Peringkat pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS)	peringkat	5	-	-
		b	Peringkat pada Pekan Olahraga dan Seni Antar Pondok Pesantren Nasional (POSPENAS)	peringkat	3	-	-
		c	PON	peringkat	10	14	71,42
5	Berkembang dan lestarnya budaya lokal, kawasan budaya, dan Benda Cagar Budaya (BCB)	a	Persentase kunjungan ke museum terhadap Objek Daya Tarik Wisata (ODTW)	persen	13,42	16,66	124,14
		b	Jumlah peristiwa budaya	event	960	960	100
		c	Persentase desa budaya berkategori maju	persen	29,27	30,23	103
		d	Persentase BCB tidak bergerak berkategori kondisi baik	persen	43,70	72,73	166,43
		e	Persentase organisasi budaya berkategori maju	persen	0,98	0,93	94,89

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		2012			
		Uraian	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian	
6	Terwujudnya peningkatan kualitas kehidupan sosial masyarakat	a	Persentase cakupan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	persen	5,00	6,54	130,80
		b	Persentase cakupan peningkatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persen	55,67	69,95	125,65
7	Terwujudnya peningkatan kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat	a	Umur harapan hidup	Tahun	74,40	74	99,46
		b	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran Hidup	per 1000 KH	16	19	84,24
		c	Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran Hidup	per 1000 KH	16	17	94,12
		d	Angka Kematian Ibu melahirkan per 100.000 kelahiran Hidup	per 100000 KH	101	103	98,06
		e	Prevalensi Gizi Buruk	Persen	0,81	0,59	137,29
8	Terwujudnya kepariwisataan yang berdaya saing tinggi	a	Jumlah wisatawan nusantara	Orang	1.692.642	2.013.314	118,9
		b	Jumlah wisatawan asing	Orang	188.369	202.518	107,5
		c	Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara	Hari	2,40	1,90	79,2
		d	Rata-rata lama tinggal wisatawan asing	Hari	2,80	2,03	72,5
		e	Jumlah <i>Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition</i> (MICE)	kali/thn	5.990	12.904	215,43
9	Terwujudnya peningkatan ketahanan ekonomi	a	Persentase Pertumbuhan PDRB	Persen	5,2-5,7	5,32	102,31
		b	Indeks Ketimpangan Regional	angka indeks	0,310	0,314	98

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		2012			
		Uraian	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian	
	masyarakat	c	Rata-rata PDRB per kapita	Juta	14,61	16,31	111,64
		d	Persentase pertumbuhan investasi PMDN	Persen	25,45	21,3	83,69
		e	Persentase pertumbuhan investasi PMA	Persen	1,55	3,4	219,35
10	Terwujudnya ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat	a	Konsumsi Energi	Kkal/kap/hr	2.000	1.938	96,9
		b	Konsumsi Protein	Gr/kap/hr	52	49,7	95,57
		c	Ketersediaan Energi	Kkal/kap/hr	3.664	3.689	100,68
		d	Ketersediaan Protein	Gr/kap/hr	94,59	100,63	106,38
		e	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Persen	88,6	78,7	88,82
11	Terwujudnya peningkatan kualitas pengelolaan ketenagakerjaan	a	Jumlah angkatan kerja	Orang	2.006.337	1.944.858	96,94
		b	Jumlah kesempatan kerja	Orang	2.038.278	1.867.708	91,63
		c	Jumlah penempatan tenaga kerja	Orang	2.000	2.000	100
12	Terwujudnya pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel	a	Jumlah lembaga yang memberikan layanan berbasis <i>citizen centris</i>	Unit	15	15	100
13	Terwujudnya kesetaraan gender	a	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	persen	70,90	73,03	103,00
		b	Indeks Pemberdayaan Gender (GEM)	persen	62,50	77,84	124,54
14	Terwujudnya ketersediaan infrastruktur yang memadai baik kuantitas dan kualitas	a	Persentase proporsi jaringan jalan berkondisi mantap (baik dan sedang)	persen	80,00	84,32	105,4

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		2012			
		Uraian	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian	
		b	Persentase luasan Daerah Irigasi (DI) yang terlayani air irigasi	persen	75,00	75,06	100,08
		c	Persentase peningkatan penanganan banjir terhadap daerah potensi banjir	persen	70,00	70,06	100,08
		d	Persentase penduduk berakses air minum	persen	70,00	70,38	100,54
		e	Persentase penurunan alih fungsi lahan terhadap total luas lahan	persen	8,00	8,00	100
		f	Persentase ketersediaan rumah layak huni	persen	68,89	91,22	132,41
		g	Persentase fasilitas keselamatan lalu lintas	persen	75,00	75,00	100
15	Terwujudnya pemerataan sarana dan prasarana publik	a	Persentase pengembangan kawasan strategis	persen	10,53	10,53	100
		b	Persentase layanan jaringan air limbah terpusat (APY)	persen	40,00	53,3	133
		c	Persentase penduduk yang terlayani pengelolaan sampah	persen	70,00	71,40	102
		d	Jumlah TPA sampah menggunakan sistem <i>sanitary landfill</i>	Unit	2	2	100
		e	V/C rasio kendaraan yang melintas di perkotaan	Rasio	0,65	0,69	94,20

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		2012				
		Uraian	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian		
		f	Load factor penumpang angkutan umum	persen	35,00	30,66	87,60	
		g	Persentase peningkatan penumpang angkutan KA jarak pendek	persen	5,00	-26,73	-267,3	
		h	Persentase rasio elektrifikasi	persen	0,015	0,587	3.913,33	
		i	Persentase peningkatan kapasitas energi listrik	persen	0,30	1,33	443,30	
16	Terwujudnya ketahanan masyarakat terhadap bencana	a	Jumlah lembaga penanggulangan bencana dalam masyarakat	Unit	2	2	100	
		b	Jumlah regulasi tentang pengurangan resiko bencana	Buah	2	3	150	
17	Terwujudnya pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan	Kualitas Udara:						
		a	Konsentrasi CO	Ppm	<14	7	100	
		b	Konsentrasi HC	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	<145	64,31	100	
		c	Konsentrasi Pb	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	<2	0,28	100	
		d	Konsentrasi Nox	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	<400	27,82	100	
		e	Konsentrasi partikulat	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	<150	29,50	100	
		Kualitas air:						
		a	Konsentrasi BOD	mg/lt	<9	6,935	100	
		b	Konsentrasi COD	mg/lt	<45	15,599	100	
		c	Konsentrasi Bakteri Coli (air sungai)	MPN/100 ml	<75.000	626.689,8	-835,59	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		2012			
		Uraian	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian	
		d	Fluktuasi muka air tanah	Cm	<253	186,5	123,60

Dari tabel di atas, terdapat 112 indikator yang terbagi ke dalam 17 sasaran pembangunan. Pada tahun 2012, 76 indikator telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar 67,86% dari total indikator. Sementara itu, sebanyak 36 indikator atau sebesar 32,14% belum memenuhi target. Tidak tercapainya target disebabkan oleh berbagai faktor kendala. Selanjutnya, ada 2 indikator pada sasaran terwujudnya peningkatan prestasi olahraga yang belum terealisasi yaitu prestasi olahraga POPNAS dan POSPENAS, dimana keduanya tidak diselenggarakan pada tahun 2012. Capaian yang tertinggi pada indikator Persentase rasio elektrifikasi. Sementara indikator yang mengalami capaian yang rendah adalah indikator Konsentrasi Bakteri Coli pada sungai.

## **3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA**

---

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Pemda DIY yang dicerminkan dalam capaian IKU. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci indikator kinerja utama menurut sasaran pembangunan diuraikan sebagai berikut:

### **3.2.1 Sasaran Terwujudnya Peningkatan Kualitas Lulusan di Semua Jenjang dan Jalur Pendidikan**

Tolok ukur capaian sasaran terwujudnya peningkatan kualitas lulusan di semua jenjang dan jalur pendidikan terdiri dari 3 indikator yaitu indikator persentase kinerja peningkatan mutu pendidikan di tingkat SD/MI, SMP/MTs, dan Sekolah Menengah (SM). Indikator persentase kinerja peningkatan mutu pendidikan di semua jenjang pendidikan ditentukan oleh indikator-indikator yaitu persentase angka mengulang, angka putus sekolah, angka lulusan, persentase guru layak mengajar, persentase ruang kelas kondisi baik, dan persentase ketersediaan fasilitas sekolah.



**Gambar 3.1 Peningkatan Kualitas Lulusan Siswa**

Secara keseluruhan capaian indikator kinerja peningkatan mutu pendidikan hasilnya baik. Capaian pada tahun 2012 menunjukkan bahwa indikator kinerja peningkatan mutu pendidikan pada jenjang SMA/K/MA telah memenuhi target yang ditetapkan, bahkan melebihi 100 %, sedangkan untuk jenjang SD/MI dan SMP/MTS masih belum mencapai target yang diharapkan. Adapun capaian indikator kinerja peningkatan mutu pendidikan di masing-masing jenjang pendidikan diuraikan sebagai berikut.

### 3.2.1.1 Persentase Kinerja Peningkatan Mutu Pendidikan SD/MI

Realisasi capaian indikator kinerja peningkatan mutu pendidikan SD/MI tahun 2012 sebesar 67,37 % atau 87,20 % dari target yang ditentukan. Capaian tersebut lebih tinggi dari capaian tahun 2011 yaitu sebesar 63,40 %. Target akhir yang ditetapkan pada tahun 2013 sebesar 79%. Tahun 2013 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan RPJMD DIY Tahun 2009-2013. Perbandingan capaian peningkatan mutu pendidikan SD/MI tahun 2012 terhadap target akhir 2013 sebesar 85,28%. Oleh karena itu kinerja peningkatan mutu pendidikan SD/MI harus terus ditingkatkan hingga capaian 100 % untuk mendukung DIY sebagai pusat pendidikan.

**Tabel 3.2 Capaian Kinerja Indikator Persentase Kinerja Peningkatan Mutu Pendidikan SD/MI di DIY Tahun 2012**

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian 2011	2012			Target Akhir RPJMD (2013)	Capaian s/d. 2012 terhadap 2013 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		

<b>Persentase kinerja peningkatan mutu pendidikan SD/MI</b>	Persen	63,40	78,00	67,37	87,20	79	85,28
---	--------	-------	-------	-------	-------	----	-------

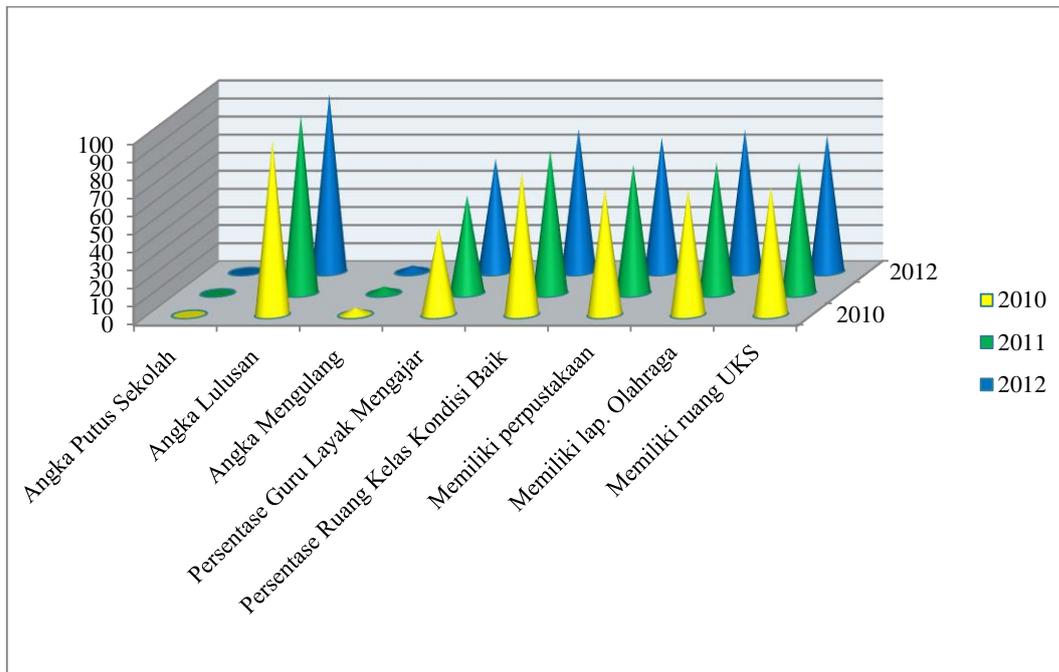
Sumber: Dinas Dikpora DIY

Capaian target indikator persentase kinerja peningkatan mutu pendidikan SD/MI tahun 2012 lebih baik dari tahun 2011 karena capaian indikator persentase ruang kelas berkondisi baik, serta persentase guru layak mengajar pada jenjang SD/MI membaik dari tahun sebelumnya. Adapun indikator-indikator pembentuk angka capaian indikator kinerja peningkatan mutu pendidikan pada jenjang SD/MI tersebut disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 3.3 Capaian Komponen Indikator Kinerja Peningkatan Mutu Pendidikan SD/MI di DIY, 2010-2012**

Indikator	Satuan	2010	2011	2012	
				Target	Realisasi
Angka Putus Sekolah	Persen	0,07	0,07	0,03	0,07
Angka Lulusan	Persen	96,47	98,53	99,07	98,45
Angka Mengulang	Persen	3,93	3,87	0,90	3,67
Persentase Guru Layak Mengajar	Persen	48,09	54,36	54,36	62,67
Persentase Ruang Kelas Kondisi Baik	Persen	78,71	79,22	79,22	79,34
Persentase Ketersediaan Fasilitas Sekolah	Persen				
- Memiliki perpustakaan	Persen	69,64	71,15	71,15	74,32
- Memiliki lap. Olahraga		69,19	72,48	72,48	78,80
- Memiliki ruang UKS		70,98	73,33	73,33	75,71

Sumber: Dinas Dikpora DIY



Sumber: Dinas Dikpora DIY

**Gambar 3.2** Capaian Angka Mengulang, Angka Lulusan, dan Angka Putus Sekolah SD/MI DIY (%), 2010-2012

Capaian angka putus sekolah SD/MI tahun 2012 masih jauh dari target yang ditetapkan, yaitu sebesar 0,07% atau 42,86 % dari target sebesar 0,03%. Capaian 0,07% tahun 2012 tersebut berarti terdapat 214 siswa putus sekolah dari total 309.433 siswa SD/MI. Jika dibandingkan dengan tahun 2011, capaian angka putus sekolah tahun 2012 tersebut sama dengan capaian tahun 2011, yaitu sebesar 0,07%.

Tidak tercapainya target tahun 2012 tersebut disebabkan oleh faktor ekonomi dan non ekonomi. Untuk angka putus sekolah tingkat SD/MI banyak terjadi di sekolah-sekolah SD dengan kelas kecil dan minim siswa, terutama di daerah pedesaan, sehingga ada penggabungan/*regrouping*. Adanya *regrouping* tersebut menyebabkan jarak siswa ke sekolah menjadi jauh, sehingga rentan putus sekolah. Bagi anak yang berasal dari keluarga miskin lebih memilih bekerja membantu orang tua bekerja daripada melanjutkan sekolah yang lebih jauh. Terdapat juga anak putus sekolah dan memilih untuk menjadi anak jalanan, hal ini disebabkan oleh faktor ekonomi keluarga dan juga semangat bersekolah dari anak tersebut yang relatif rendah.

Angka lulusan SD tahun 2012 sebesar 98,73% atau terdapat 46.633 siswa lulus dari total 47.231 siswa SD pada tahun tersebut. Angka lulusan tahun 2012 mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2011. Angka

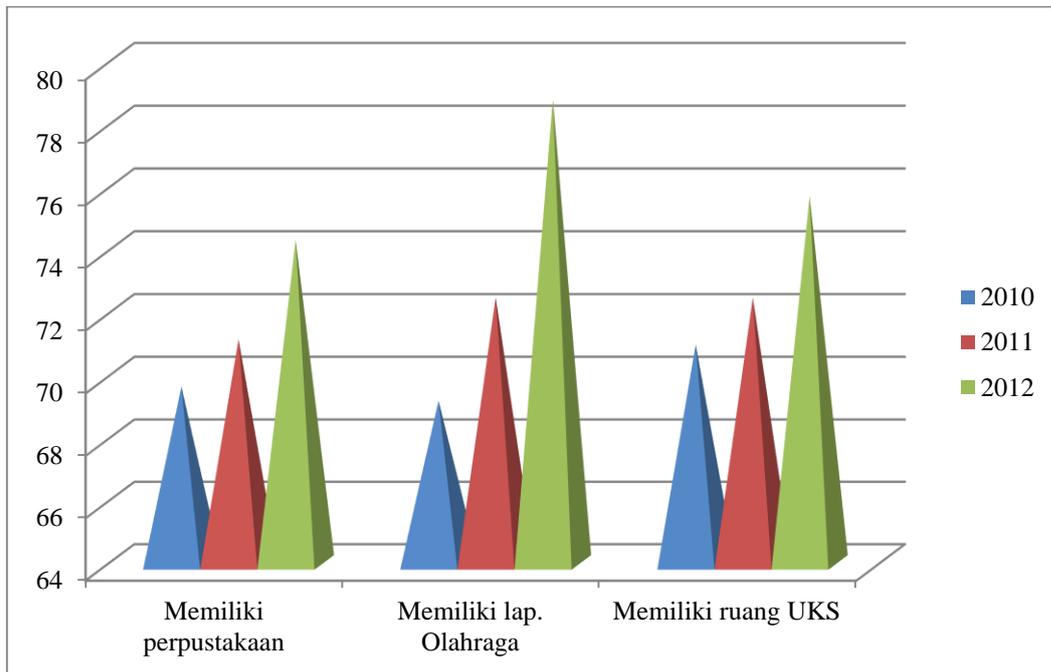
lulusan tahun 2011 sebesar 98,83% atau terdapat 44.047 siswa lulus dari total 44.568 siswa tingkat VI SD.

Angka lulusan MI tahun 2011 sebesar 91,33 atau terdapat 1.707 siswa dari 1869 siswa kelas VI yang mengikuti ujian. Angka lulusan tahun 2012 mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun 2011. Angka lulusan tahun 2012 terdapat 91,74 % atau 1.857 dari semua siswa sebanyak 2.024 siswa yang mengikuti ujian.

Angka lulusan pada tahun 2012 untuk SD/MI kurang dari target sebesar 100%. Angka kelulusan tidak dapat tercapai sesuai target dikarenakan ada beberapa hal yang mempengaruhi antara lain kekurangsiapan mental peserta ujian seperti grogi, tidak percaya diri, dan ada rasa takut salah dalam mengerjakan soal ujian sehingga tidak dapat berkonsentrasi secara penuh. Hal-hal tersebut yang menjadi salah satu penyebab ketidakberhasilan dalam mengerjakan soal-soal ujian nasional.

Angka mengulang SD/MI tahun 2012 sebesar 3,66 % atau terdapat 10.834 siswa mengulang dari total 295.345 siswa SD/MI. Angka mengulang tahun 2012 tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian tahun 2011 namun lebih rendah. Angka mengulang SD/MI tahun 2011 sebesar 3,86% atau sebanyak 11.360 siswa mengulang dari total 294.171 siswa SD/MI.

Persentase ruang kelas SD/MI berkondisi baik pada tahun 2011 sebesar 79,22% atau sebanyak 11.514 ruang kelas dari total 14.535. Jumlah ruang kelas yang rusak ringan 2205 atau 15,17 %, dan rusak berat 816 atau 5,61 % buah. Capaian tahun 2012 relatif lebih baik dari tahun 2011. Persentase ruang kelas SD/MI berkondisi baik tahun 2012 sebesar 79,34 % atau terdapat 11.515 ruang kelas dari total 14.538.



Sumber: Dinas Dikpora DIY

**Gambar 3.3 Ketersediaan Fasilitas Sekolah SD/MI di DIY (unit), 2010-2012**

Fasilitas sekolah mencakup perpustakaan, lapangan olahraga, dan UKS. Ketersediaan fasilitas SD/MI tahun 2012 terdiri dari 1.493 perpustakaan, 1.583 lapangan olahraga, 1.521 UKS, 3141 kamar kecil dan 1426 tempat ibadah. Jumlah ketersediaan fasilitas sekolah tersebut masing-masing meningkat apabila dibandingkan dengan tahun 2011 dan 2010. Ketersediaan fasilitas SD/MI tahun 2011 terdiri dari 1.435 perpustakaan, 1.462 lapangan olahraga, 1347 tempat ibadah, 3093 toilet dan 1.479 UKS.

Indikator ketersediaan fasilitas sekolah yang membentuk kinerja mutu pendidikan dicerminkan dari persentase jumlah lembaga SD/MI memiliki perpustakaan, memiliki lapangan olahraga, dan memiliki ruang UKS. Persentase jumlah perpustakaan SD/MI tahun 2011 sebesar 71,15% naik menjadi 74,32% tahun 2012. Persentase jumlah SD/MI yang memiliki lapangan olahraga tahun 2011 sebesar 72,48% naik menjadi 78,80 % di tahun 2012. Persentase jumlah SD/MI memiliki ruang UKS tahun 2011 sebesar 73,33% naik menjadi 75,71 % di tahun 2012.

Kategori guru layak mengajar SD/MI, yaitu guru SD/MI yang berijazah minimal Diploma 4 (D4) atau Sarjana 1 (S1) ke atas. Persentase guru layak mengajar SD/MI tahun 2012 sebesar 62,46 % atau terdapat 13.424 guru dari total 23.282 guru (total guru berijazah <SLTA hingga S2

atau lebih). Jumlah guru layak tahun 2012 tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2011. Persentase guru layak mengajar SD/MI tahun 2011 sebesar 54,11% atau terdapat 11.929 guru dari total 23.835 guru SD/MI.

Sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab XI Pasal 42 ayat (2) menyatakan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pemerintah DIY terus mengupayakan peningkatan kualitas guru dengan sertifikasi standar kompetensi pada semua jenjang pendidikan. Sampai dengan akhir tahun 2011 jumlah guru yang telah bersertifikasi adalah sebesar 24,08% dari 23.835 guru pada jenjang pendidikan SD/MI dan tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi 24,22% dari 23.282 guru yang ada. Angka persentase guru bersertifikasi pada jenjang SD/MI masih rendah, kurang dari 50% total guru yang ada. Hal ini perlu mendapat perhatian karena mutu lulusan yang berkualitas salah satunya adalah dengan dibimbing dan diajar oleh guru-guru yang berkualitas.

**Tabel 3.4 Jumlah Guru Bersertifikat SD/MI di DIY, 2011-2012**

Uraian	Satuan	2011	2012
Jumlah Guru	Orang	23.835	23.282
Jumlah Guru Bersertifikasi	Orang	5.641	5.641
Jumlah Guru Bersertifikasi terhadap Jumlah Guru	Persen	24,08	24,22

*Sumber: Dinas Dikpora DIY*

Persentase jumlah guru bersertifikasi meningkat padahal jumlah guru yang bersertifikat tetap, hal ini dikarenakan jumlah guru tahun 2012 berkurang dibandingkan tahun 2011. Belum ada guru dan kepala sekolah di MI yang bersertifikat.

### 3.2.1.2 Persentase Kinerja Peningkatan Mutu Pendidikan SMP/MTs

Realisasi capaian indikator kinerja peningkatan mutu pendidikan SMP/MTs tahun 2012 sebesar 77,60 % atau 92,38 % dari target sebesar 84,00 %. Capaian tahun 2012 tersebut lebih tinggi dari capaian tahun 2011 yang sebesar 76,97%. Target capaian indikator kinerja peningkatan mutu pendidikan SMP/MTs pada akhir RPJMD tahun 2013 sebesar 85%. Perbandingan capaian tahun 2012 terhadap target akhir RPJMD tersebut sebesar 91,29%, yang berarti bahwa Pemerintah DIY masih harus

meningkatkan capaian realisasi tahun 2012 dan 2013 agar target akhir RPJMD tercapai dan kinerja mutu mencapai 100 %.

**Tabel 3.5** Capaian Kinerja Indikator Persentase Kinerja Peningkatan Mutu Pendidikan SMP/MTs di DIY

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian 2011	2012			Target Akhir RPJMD (2013)	Capaian s/d. 2012 terhadap 2013 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase kinerja peningkatan mutu pendidikan SMP/MTs	Persen	76,97	84,00	77,60	92,38	85	91,29

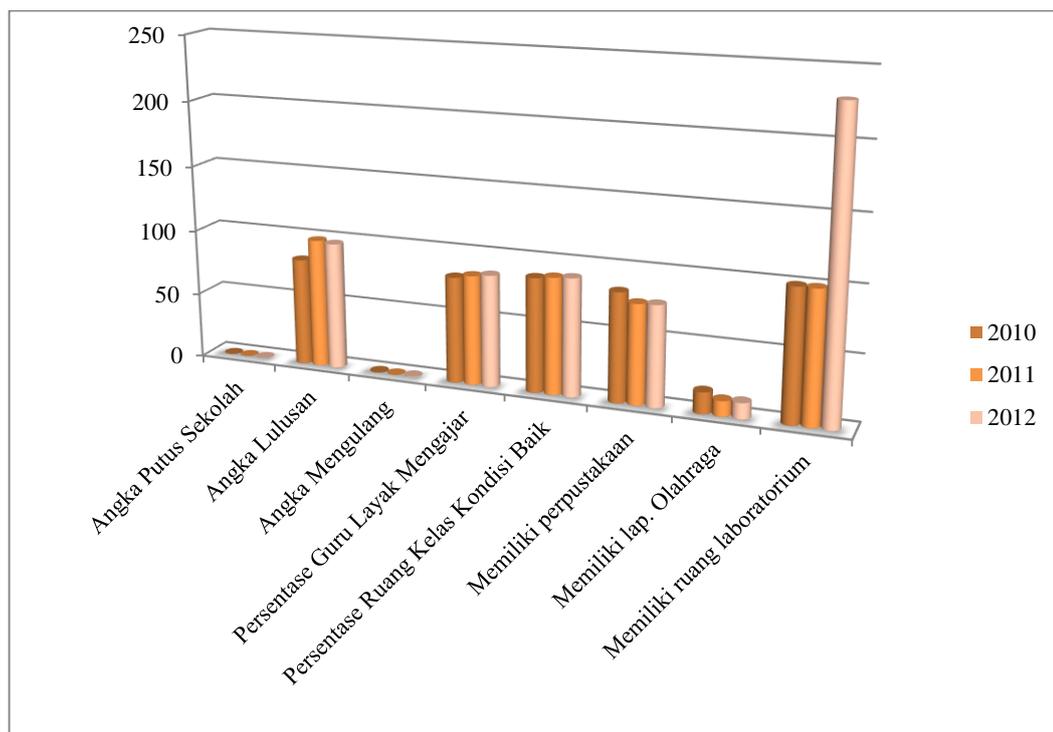
Sumber: Dinas Dikpora DIY

Indikator persentase kinerja peningkatan mutu pendidikan SMP/MTs tahun 2012 belum mencapai target yang ditetapkan karena capaian indikator persentase ketersediaan angka mengulang naik dari target 0,18 % menjadi 0,35 %. Adapun capaian indikator-indikator pembentuk angka capaian indikator kinerja peningkatan mutu pendidikan pada jenjang SMP/MTs tersebut disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 3.6** Capaian Komponen Indikator Kinerja Peningkatan Mutu Pendidikan SMP/MTs di DIY, 2010-2012

Indikator	Satuan	2010	2011	2012	
				Target	Realisasi
Angka Putus Sekolah	Persen	0,17	0,09	0,18	0,16
Angka Lulusan	Persen	81,84	98,28	97,20	96,83
Angka Mengulang	Persen	0,53	0,18	0,18	0,35
Persentase Guru Layak Mengajar	Persen	80,82	83,31	83,31	85,08
Persentase Ruang Kelas Kondisi Baik	Persen	86,79	88,52	87,66	89,49
Persentase Ketersediaan Fasilitas sekolah	Persen	82,84	75,74	75,74	76,40
- Memiliki perpustakaan	Persen	16,37	11,64	11,64	11,99
- Memiliki lap. Olahraga	Persen	100,00	100,00	85,60	229,01
- Memiliki ruang laboratorium					

Sumber: Dinas Dikpora DIY



Sumber: Dinas Dikpora DIY

**Gambar 3.4** Capaian Angka Mengulang, Angka Lulusan, dan Angka Putus Sekolah SMP/MTs di DIY (%), 2010-2012

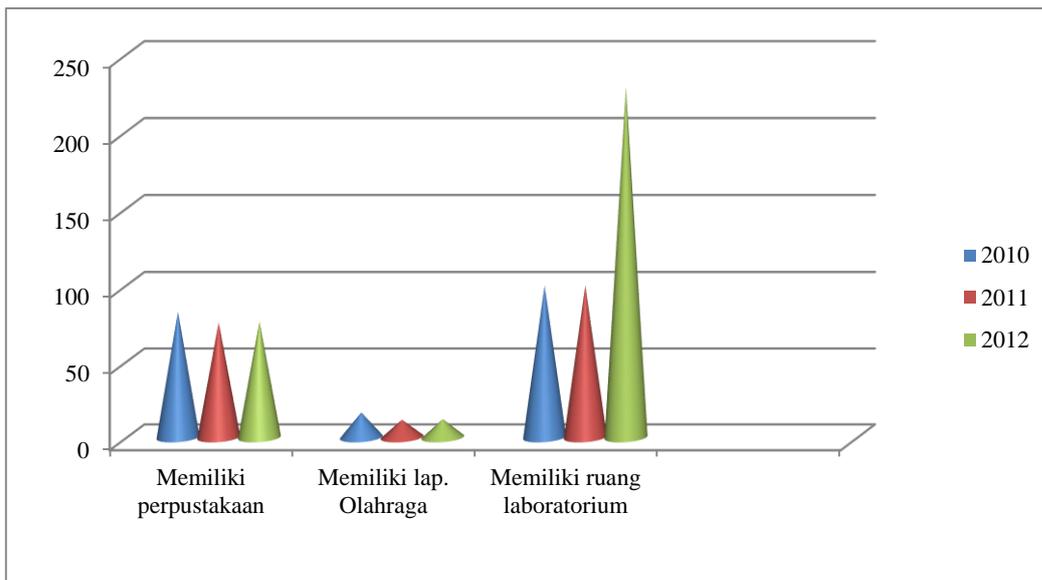
Capaian angka putus sekolah SMP/MTs tahun 2012 tercatat 0,16 % atau sebesar 203 siswa dari total siswa 136.456. Capaian angka putus sekolah SMP/MTs tahun 2011 tercatat sebesar 0,09% atau sebesar 155,00% dari target sebesar 0,2%. Capaian sebesar 0,09% berarti terdapat 241 siswa putus sekolah dari total 254.428 siswa SMP/MTs tahun 2011. Capaian angka putus sekolah SMP/MTs tahun 2012 tersebut membaik dari tahun 2011.

Angka lulusan SMP/MTs tahun 2012 sebesar 97,11 % atau 46.229 siswa dari total siswa 47.601 lulusan SMP/MTs. Angka lulusan tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun 2011 sebesar 1,11 %. Angka lulusan SMP/MTs tahun 2011 sebesar 98,28% atau terdapat 48.022 siswa lulus dari total 48.861 siswa tingkat III SMP/MTs. Angka lulusan SMP/MTs tahun 2010 sebesar 81,84% atau sebanyak 40.354 siswa lulus dari total 49.306 siswa tingkat III SMP/MTs.

Angka Mengulang SMP/MTs tahun 2012 sebesar 0,34 % atau 507 siswa dari total siswa sebanyak 146.454 anak. Capaian tersebut mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Angka Mengulang SMP/MTs tahun 2011 sebesar 0,18% atau terdapat sebanyak 464 siswa dari total 254.428

siswa SMP/MTs. Angka Mengulang tahun 2010 sebesar 0,53% atau sebanyak 800 siswa dari total 150.038 siswa SMP/MTs. Sementara, Angka Mengulang tahun 2009 sebesar 0,38% atau sebanyak 564 siswa dari total 149.375 siswa SMP/MTs.

Persentase ruang kelas SMP/MTs berkondisi baik tahun 2012 sebesar 89,49% atau sebanyak 4.481 ruang kelas dari 5.007 ruang kelas SMP/MTs. Capaian tersebut mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Persentase ruang kelas SMP/MTs berkondisi baik tahun 2011 sebesar 88,52% atau sebanyak 3.061 ruang kelas dari 3.458 ruang kelas SMP/MTs. Ruang kelas kondisi baik tahun 2010 sebesar 86,79% atau sebanyak 4.630 ruang kelas dari total 5.335 ruang kelas SMP/MTs. Sementara tahun 2009 terdapat 86,47% atau sebanyak 4.223 ruang kelas berkondisi baik dari total 4.884 ruang kelas SMP/MTs. Persentase ruang kelas SMP/MTs berkondisi rusak ringan sebanyak 7,63% atau 382 buah dari total 5.007 ruang kelas yang ada.



Sumber: Dinas Dikpora DIY

### Gambar 3.5 Ketersediaan Fasilitas Sekolah SMP/MTs di DIY, 2010-2012

Ketersediaan fasilitas sekolah SMP/MTs tahun 2012 terdiri dari 395 perpustakaan atau 76,40% dari semua sekolah yang ada, 62 lapangan olahraga atau 11,99% dari sekolah yang ada, 441 UKS atau 85,30% dari semua sekolah yang ada dan 1.184 laboratorium atau 229,01% dari semua sekolah yang ada. Laboratorium sekolah ada yang lebih dari satu buah, sehingga persentasenya melebihi 100%. Ketersediaan fasilitas sekolah SMP/MTs tahun 2011 terdiri dari 384 perpustakaan, 59 lapangan

olahraga, dan 1.059 laboratorium. Sementara, tahun 2010 fasilitas sekolah milik SMP/MTs terdiri dari 420 perpustakaan, 83 lapangan olahraga, dan 1.381 laboratorium.

Indikator ketersediaan fasilitas sekolah yang membentuk kinerja mutu pendidikan dicerminkan dari persentase jumlah perpustakaan, persentase jumlah lapangan olahraga, dan persentase jumlah laboratorium. Persentase jumlah perpustakaan SMP/MTs tahun 2011 sebesar 75,74 % naik menjadi 76,40% tahun 2012 sebesar 0,66 %. Persentase sekolah SMP/MTs yang memiliki perpustakaan sebesar 76,40 % lebih rendah dari target sebesar 82,84%. ? Hal ini disebabkan banyak sekolah yang lebih memprioritaskan untuk memperbanyak ruang kelas dibandingkan fasilitas pendukung seperti perpustakaan. Selain itu, bantuan dari pemerintah pusat selama ini berupa bantuan Ruang Kelas Baru (RKB).

Persentase jumlah lapangan olahraga tahun 2011 sebesar 11,64 % mengalami kenaikan menjadi 11,99% di tahun 2012. Persentase jumlah laboratorium tahun 2012 sebesar 229,01%, lebih besar dengan capaian di tahun 2011. Persentase sekolah yang memiliki lapangan olahraga pada tahun 2012 sebesar 11,99 % tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar 16,37%. Pada dasarnya setiap sekolah tidak harus memiliki lapangan olahraga, karena bukan merupakan hal yang mudah mengingat ketersediaan lahan. Kedepan kriteria akan diperbaiki dari sekolah yang memiliki lapangan olahraga menjadi ketersediaan lapangan olahraga (dimana sewa lapangan juga akan dimasukkan dalam kriteria).

Kategori guru layak mengajar SMP/MTs adalah guru SMP/MTs yang minimal memiliki ijazah D4 atau S1. Guru layak mengajar SMP/MTs tahun 2012 sebesar 85,08 % atau 102,12 % dari target yang ditetapkan atau sebanyak 10.567 guru dari total 12.684 guru (guru berijazah SLTA sampai S3). Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan capaian tahun 2011 dan 2010. Guru layak mengajar SMP/MTs tahun 2011 sebesar 83,31 % atau 103,08 dari target yang ditetapkan yaitu 80,82. Pada tahun 2011 Guru layak mengajar terdapat 10.567 guru dari total 12.684 guru SMP/MTs (guru berijazah SMA s.d S3). Sementara dilihat dari jumlah guru bersertifikasi tahun 2011 sebesar 42,79% atau sebanyak 5.427 guru dari 12.684 guru SMP/MTs.

**Tabel 3.7 Jumlah Guru Bersertifikasi SMP/MTs di DIY, 2011-2012**

Uraian	Satuan	2011	2012
Jumlah Guru	Orang	12.684	12.634
Jumlah Guru Bersertifikasi	Orang	5.427	4.309

Uraian	Satuan	2011	2012
Jumlah Guru Bersertifikasi terhadap Jumlah Guru	Persen	42,79	34,10

Sumber: Dinas Dikpora DIY

### 3.2.1.3 Persentase Kinerja Peningkatan Mutu Pendidikan SM (SMA/MA/SMK)

Jenjang pendidikan Sekolah Menengah (SM) terdiri dari Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Realisasi indikator kinerja peningkatan mutu pendidikan untuk jenjang SM tahun 2012 sebesar 94,09 % atau 135,48 % dari target 80,00 %. Capaian tahun 2012 tersebut lebih tinggi dari capaian tahun 2011 yang sebesar 81,82%. Realisasi indikator kinerja peningkatan mutu pendidikan untuk jenjang SM tahun 2011 sebesar 81,82% atau 99,77% dari target 82,01%. Target capaian indikator kinerja peningkatan mutu pendidikan SM pada akhir RPJMD tahun 2013 sebesar 83%. Perbandingan capaian tahun 2012 terhadap target akhir RPJMD sebesar 113,36 %, yang berarti bahwa Pemerintah DIY masih harus mempertahankan capaian realisasi tahun 2012 dan 2013 agar target akhir RPJMD tercapai.

**Tabel 3.8** Capaian Kinerja Indikator Persentase Kinerja Peningkatan Mutu Pendidikan SM (SMA/MA/SMK) di DIY

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian 2011	2012			Target Akhir RPJMD (2013)	Capaian s/d. 2011 terhadap 2013 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase kinerja peningkatan mutu pendidikan SM (SMA, MA, SMK)	persen	81,82	80,00	94,09	135,48	83	113,36

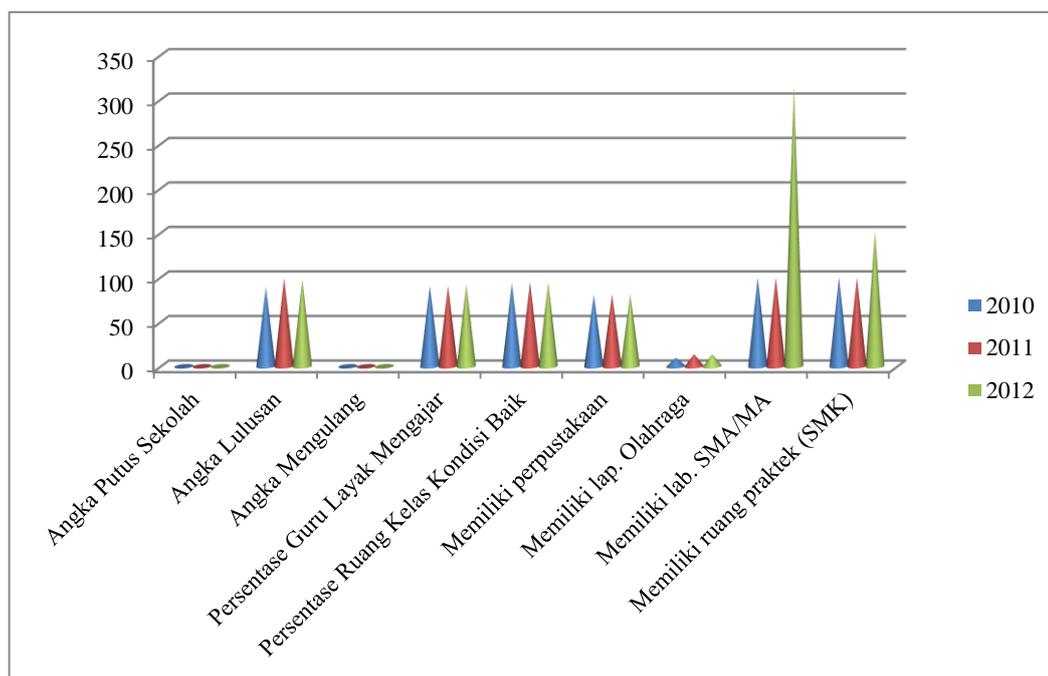
Sumber: Dinas Dikpora DIY

Indikator yang mempengaruhi belum tercapainya target kinerja peningkatan mutu pendidikan pada tingkat SM adalah adanya kenaikan angka putus sekolah dari 0,44 menjadi 0,51 atau hanya sekitar 86,27 % dari target. Masing-masing indikator pembentuk indikator kinerja peningkatan mutu pendidikan SM disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 3.9** Capaian Komponen Indikator Kinerja Mutu Pendidikan SM 9SMA/MA/SMK) di DIY, 2010-2012

Indikator	Satuan	2010	2011	2012	
				Target	Realisasi
Angka Putus Sekolah	Persen	0,44	0,57	0,44	0,51
Angka Lulusan	Persen	88,98	99,61	98,35	97,74
Angka Mengulang	Persen	0,28	0,22	0,22	0,25
Persentase Guru Layak Mengajar	Persen	90,25	90,75	90,75	92,30
Persentase Ruang Kelas Kondisi Baik	Persen	93,55	94,82	82,78	94,89
Persentase Ketersediaan Fasilitas Sekolah					
- Memiliki perpustakaan	Persen	80,45	80,79	80,79	81,02
- Memiliki lap. Olahraga	Persen	9,77	13,79	13,79	13,63
- Memiliki lab. SMA/MA	Persen	100,00	100,00	90,64	314,84
- Memiliki ruang praktek (SMK)	Persen	100,00	100,00	83,25	152,31

Sumber: Dinas Dikpora DIY



Sumber: Dinas Dikpora DIY

### Gambar 3.6 Capaian Angka Putus Sekolah, Angka Lulusan, dan Angka Mengulang SM di DIY (%), 2010-2012

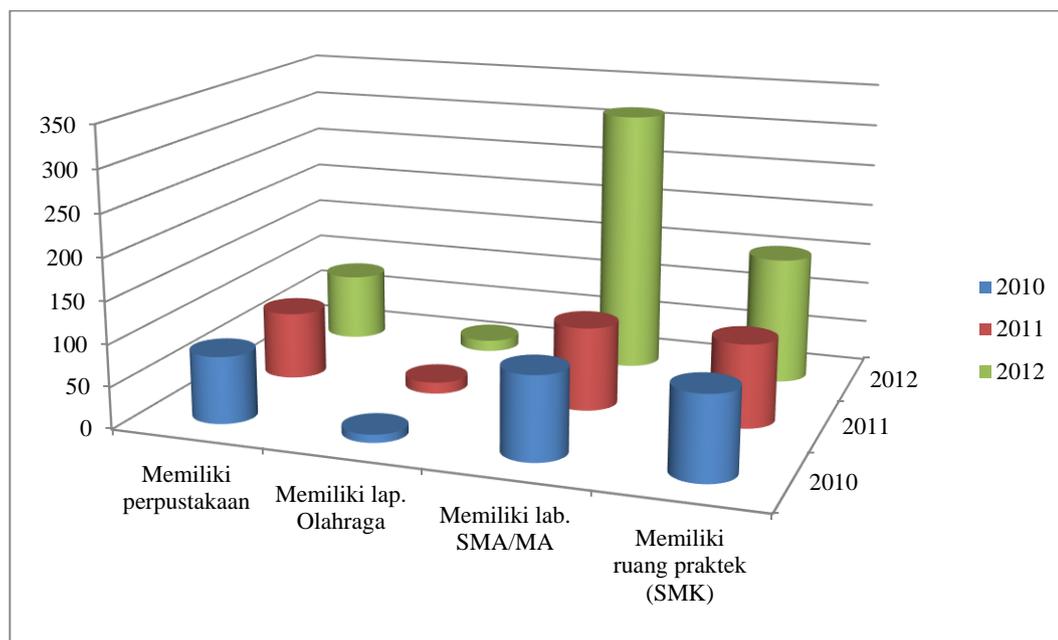
Angka putus sekolah jenjang pendidikan Sekolah Menengah tahun 2012 sebesar 0,51 % atau sebesar 86,27 % dari target 0,44 %. Capaian 0,51%

berarti terdapat 715 siswa putus sekolah dari sebanyak 139.447 siswa Sekolah Menengah. Angka putus sekolah tahun 2012 turun dibandingkan tahun 2011 dan 2010, tetapi dari jumlah siswanya meningkat. Angka putus sekolah tahun 2011 sebesar 0,57% atau terdapat 579 siswa putus sekolah dari 132.896 siswa SM. Masih adanya anak yang putus sekolah pada jenjang SM di DIY pada umumnya disebabkan oleh faktor non ekonomi seperti meninggalkan bangku sekolah karena alasan menempuh kehidupan rumah tangga sendiri, atau hamil di luar nikah.

Angka lulusan Sekolah Menengah (SMA, SMK, MA) tahun 2012 adalah 97,74% dari target 98,35 % atau sebanyak 40.069 siswa lulus dari 43.022 siswa tingkat III SM. Capaian tersebut mengalami penurunan dibanding tahun 2011 sebesar 1,87 %, tetapi dibanding tahun 2010 angka lulusan SM meningkat. Adapun faktor penyebab menurunnya capaian angka kelulusan pada tahun 2012 dibandingkan tahun 2011 antara lain karena beberapa faktor yaitu beban psikologis siswa dalam menghadapi ujian akhir, tingkat kesulitan soal UN yang semakin meningkat serta faktor kompetensi dari siswa itu sendiri. Angka lulusan SM tahun 2011 adalah 99,61% atau sebanyak 41.540 siswa lulus dari 41.701 siswa tingkat III SM. Angka Kelulusan SM tahun 2010 sebesar 88,98% atau sebanyak 37.405 siswa lulus dari total 42.037 siswa tingkat III SM.

Angka Mengulang SM tahun 2012 sebesar 0,25% dari target sebesar 0,22 % atau terdapat 354 siswa mengulang dari sebanyak 139.447 siswa SM. Angka Mengulang SM tahun 2011 sebesar 0,22% atau terdapat 381 siswa mengulang dari sebanyak 174.762 siswa SM. Sementara tahun 2010 angka mengulang sebesar 0,28% atau sebanyak 374 siswa mengulang dari total 132.896 siswa, dan tahun 2009 sebesar 0,38% atau sebanyak 490 siswa mengulang dari total 128.579 siswa SM. Angka mengulang Sekolah Menengah tahun 2012 mengalami kenaikan dibanding tahun 2011. Kemungkinan hal ini disebabkan oleh etos belajar siswa yang menurun, sehingga perlu perhatian yang lebih dari guru dan orangtua serta perbaikan sistem belajar mengajar.

Persentase ruang kelas Sekolah Menengah dalam kondisi baik tahun 2012 sebesar 94,89% dari target yang ditetapkan sebesar 82,78 % atau 114,62 %. Ini berarti terdapat 4.479 ruang kelas dari 4.720 ruang kelas SM. Capaian tersebut lebih tinggi dari capaian tahun 2011 dan 2010. Persentase ruang kelas Sekolah Menengah dalam kondisi baik tahun 2011 sebesar 94,82% atau terdapat 4.411 ruang kelas dari 4.652 ruang kelas SM. Tahun 2010 ruang kelas berkondisi baik terdapat sebesar 93,55% atau sebanyak 4.266 ruang kelas dari total 4.560 ruang kelas SM.



Sumber: Dinas Dikpora DIY

### Gambar 3.7 Ketersediaan Fasilitas Sekolah SM di DIY (Unit), 2010-2012

Ketersediaan fasilitas sekolah jenjang pendidikan Sekolah Menengah tahun 2012 terdiri dari 333 perpustakaan, 56 lapangan olahraga, 824 laboratorium SM/MA, dan 470 ruang praktek dan ketrampilan bagi SMK. Kondisi ketersediaan fasilitas sekolah tahun 2012 untuk perpustakaan dan laboratorium meningkat. Demikian pula ruang praktek. Ketrampilan, dan bengkel semakin meningkat. Ketersediaan fasilitas sekolah jenjang pendidikan Sekolah Menengah tahun 2011 terdiri dari 328 perpustakaan, 56 lapangan olahraga, 805 laboratorium SM/MA, dan 372 ruang praktek SMK. Pada tahun 2010 fasilitas berupa perpustakaan sebanyak 321 unit, lapangan olahraga 39 unit, laboratorium SM/MA 776 unit, dan ruang praktek SMK 362 unit.

Indikator ketersediaan fasilitas sekolah yang membentuk kinerja mutu pendidikan dicerminkan dari persentase jumlah perpustakaan, persentase jumlah lapangan olahraga, persentase jumlah laboratorium SMA/MA, persentase jumlah ruang praktek dan ketrampilan. Persentase perpustakaan SM tahun 2011 sebesar 80,79% naik menjadi 81,02 % tahun 2012. Persentase jumlah lapangan olahraga tahun 2011 sebesar 13,79% turun menjadi 13,63% di tahun 2012. Persentase jumlah laboratorium SMA/MA di tahun 2011 sebesar 100%, naik menjadi 315,84 % pada tahun 2012 dari target 90,64 %. Persentase jumlah ruang praktek tahun 2012 sebesar 152,31 % lebih tinggi dengan capaian di tahun 2011 yang hanya 100,00 %/.

Persentase guru layak mengajar pada jenjang Sekolah Menengah (SMA, Madrasah Aliyah, SMK) tahun 2012 sebesar 92,30% atau terdapat 13.613 guru (lulusan minimal D4/S1, S2, S3) dari total 14.748 guru Sekolah Menengah yang berijasah < SLTA sampai S3. Persentase guru layak mengajar pada jenjang SM tahun 2011 sebesar 90,75% atau terdapat 13.670 guru dari total 15.064 guru SM yang berijasah < SLTA sampai S3. Jumlah guru tahun 2012 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2011, tetapi persentase guru layak mengajar justru berkurang. Kondisi ini dikarenakan banyak guru yang mengalami pensiun, sedangkan rekrutmen guru belum dilakukan pada tahun 2012. Jumlah guru Sekolah Menengah yang bersertifikasi tahun 2012 sebesar 34,45 % atau sebanyak 5.082 guru. Capaian jumlah guru bersertifikasi tahun 2012 tersebut menurun dibandingkan capaian tahun 2011 yang sebesar 34,54 % atau 5.082 guru.

**Tabel 3.10 Jumlah Guru Bersertifikasi SM (SMA/MA/SMK) di DIY, 2011-2012**

Uraian	Satuan	2011	2012
Jumlah Guru	Orang	14.296	14.748
Jumlah Guru Bersertifikasi	Orang	5.082	5.082
Jumlah Guru Bersertifikasi terhadap Jumlah Guru	Persen	35,54	34,45

Sumber: Dinas Dikpora DIY

Pemda DIY berupaya meningkatkan mutu pendidikan agar dapat menghasilkan lulusan pendidikan yang dapat mensejajarkan diri pada persaingan global serta lebih khusus lagi untuk menuju Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Terkemuka di Asia Tenggara. Untuk memberikan jaminan pendidikan yang mempunyai mutu standar nasional maupun bertaraf internasional, maka telah dikembangkan Sekolah Standar Nasional (SSN), Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) serta sekolah berbasis keunggulan lokal di DIY.

**Tabel 3.11 Jumlah Sekolah Standar Nasional (SSN), Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) dan Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal di DIY, 2011-2012**

Indikator	Satuan	Capaian 2011	2012		
			Target	Realisasi	% Realisasi
Jumlah Sekolah Standar Nasional					
a. SD/MI	Sekolah	92	150	92	61,33

<b>b. SMP/MTs</b>	Sekolah	97	125	97	77,60
<b>c. SMA/MA/SMK</b>	Sekolah	275	105	275	261,90
Jumlah Sekolah Bertaraf Internasional					
<b>a. SD/MI</b>	Sekolah	6	7	6	85,71
<b>b. SMP/MTs</b>	Sekolah	12	12	12	100
<b>c. SMA/MA/SMK</b>	Sekolah	26	25	26	104
Jumlah Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal	Sekolah	5	3	5	166,67

Sumber: Dinas Dikpora DIY

Pada tahun 2012 tercatat jumlah SD SSN sebanyak 92 sekolah, jumlah SMP SSN sebanyak 97 sekolah, dan jumlah SMA SSN sebanyak 275 sekolah (negeri dan swasta), sedangkan jumlah SD SBI sebanyak 6 sekolah, jumlah SMP SBI terdiri dari 12 sekolah, dan jumlah SMA SBI sebanyak 26 sekolah. Capaian ini kurang dari target yang ditetapkan. Sebelumnya pada tahun 2011 tercatat jumlah SD SSN sebanyak 92 sekolah, jumlah SMP SSN sebanyak 97 sekolah, dan jumlah SMA SSN sebanyak 275 sekolah (negeri dan swasta), sedangkan jumlah SD SBI sebanyak 6 sekolah, jumlah SMP SBI terdiri dari 12 sekolah, dan jumlah SMA SBI sebanyak 26 sekolah. Sementara itu, jumlah sekolah berbasis keunggulan lokal di DIY tahun 2012 masih tercatat sebanyak 5 sekolah dari target 3 sekolah pada tahun 2012, capaiannya sebesar 166,67 %. Jumlah SMA/MA/SMK 275 sekolah negeri dan swasta. Keberadaan SMK di DIY dari tahun ke tahun meningkat, hal ini menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap sekolah kejuruan semakin tinggi. Pemerintah DIY mengapresiasi minat masyarakat tersebut dengan berupaya mengembangkan SMK yang telah ada. Jika dikaitkan dengan keistimewaan DIY yang menekankan pada aspek kebudayaan, maka juga perlu ditingkatkan SMK-SMK berbasis kearifan lokal.

### Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi serta solusi dalam mewujudkan sasaran peningkatan kualitas lulusan di semua jenjang dan jalur pendidikan antara lain:

1. Belum tercapainya target penurunan angka putus sekolah dari jenjang SD/MI.  
Solusi:
  - a. Peningkatan kesadaran orangtua akan arti pentingnya pendidikan.
  - b. Pemetaan siswa putus sekolah dengan pendekatan by name by address

- c. Siswa putus sekolah diikutkan dalam Kejar Paket A
  - d. Pemberian beasiswa bagi siswa miskin
  - e. Merubah model bantuan operional sekolah ke bantuan yang berbasis kebutuhan siswa.
  - f. Bantuan retrieval untuk anak jalanan
  - g. Peningkatan kerjasama lintas sektoral dalam peningkatan partisipasi pendidikan
2. Belum tercapainya target angka lulusan SD  
Solusi:
- a. Meningkatkan sistem pembelajaran melalui optimalisasi jam belajar siswa di rumah dan di sekolah.
  - b. Pendekatan orangtua melalui sosialisasi untuk anak yang seharusnya masuk ke pendidikan SLB.
3. Anak putus sekolah di jenjang Sekolah Menengah masih ada  
Solusi:
- a. Anak putus sekolah jenjang SM dapat mengikuti Kejar Paket C
  - b. Perlu uji kompetensi khususnya untuk siswa dengan jenjang pendidikan SMK
4. Jumlah perpustakaan yang belum memadai  
Solusi:
- a. Akan diusulkan *block grant* untuk perpustakaan
  - b. Mengubah mindset sekolah untuk meningkatkan fasilitas sekolah termasuk di dalamnya perpustakaan.

### 3.2.2 Sasaran Terwujudnya Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Pendidikan Kepada Seluruh Masyarakat dalam Suasana Lingkungan yang Kondusif



Gambar 3.8 Suasana Belajar dan

Tolok ukur capaian  
sasaran Peningkatan

## Mengajar

Aksesibilitas Pelayanan Pendidikan Kepada Seluruh Masyarakat dalam Suasana Lingkungan yang Kondusif adalah Indikator Persentase Kinerja Pemerataan dan Perluasan Pendidikan di tingkat SD/MI, SMP/MTs, dan Sekolah Menengah (SM). Untuk mengukur sasaran ini digunakan 3 (tiga) indikator yaitu persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan SD/MI, persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan SMP/MTs, dan persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan SM.

Secara keseluruhan capaian indikator kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan hasilnya masih harus dimaksimalkan, dua diantara tiga indikator belum mencapai target yang ditetapkan. Capaian pada tahun 2012 menunjukkan bahwa indikator kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs masih di bawah 100%, tetapi untuk indikator kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan jenjang SM sudah mencapai 100,65% dari target yang ditetapkan. Adapun capaian masing-masing indikator kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan pada semua jenjang pendidikan diuraikan sebagai berikut.

### 3.2.2.1 Persentase Kinerja Pemerataan dan Perluasan Pendidikan SD/MI

Capaian indikator kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan SD/MI tahun 2012 sebesar 79,49 % atau 124,20 % dari target tahun 2012. Capaian tersebut lebih tinggi dari capaian tahun 2011. Capaian indikator kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan SD/MI tahun 2011 sebesar 77,17% atau 96,61% dari target tahun 2011. Target indikator kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan SD/MI pada akhir tahun 2013 sebesar 79%. Perbandingan capaian tahun 2012 terhadap target akhir RPJMD adalah 100,62 %. Angka perbandingan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah DIY masih harus berusaha untuk mempertahankan capaian tahun 2012 pada tahun 2013 agar target akhir RPJMD tercapai.

**Tabel 3.12 Capaian Kinerja Indikator Persentase Kinerja Pemerataan dan Perluasan Pendidikan SD/MI di DIY**

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian 2011	2012			Target Akhir RPJMD (2013)	Capaian s/d. 2012 terhadap 2013 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian 2011	2012			Target Akhir RPJMD (2013)	Capaian s/d. 2012 terhadap 2013 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan SD/MI	persen	77,17	64,00	79,49	124,20	79	100,62

Sumber: Dinas Dikpora DIY

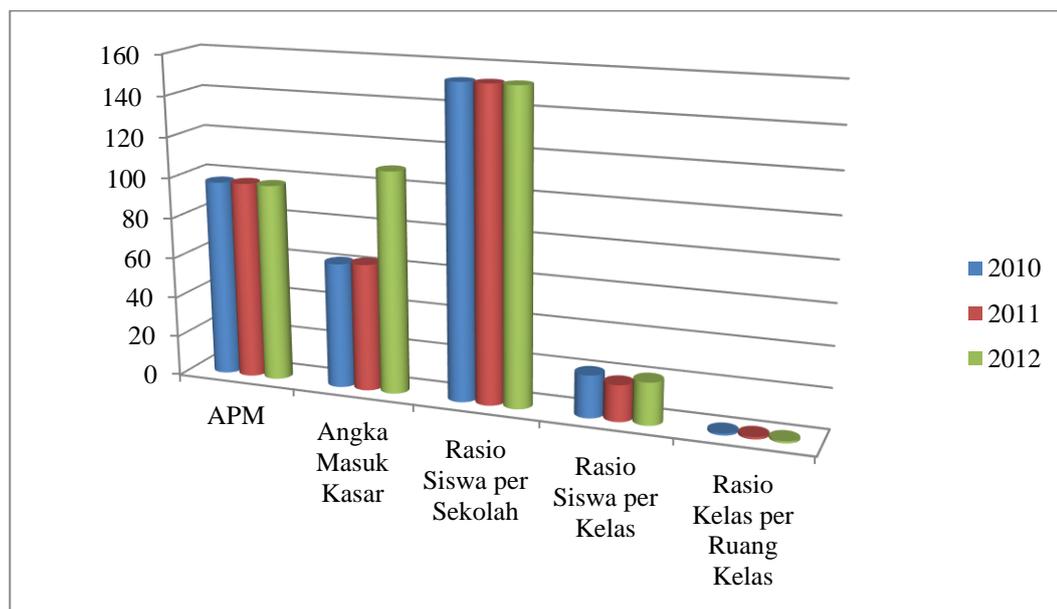
Indikator-indikator yang menentukan capaian indikator kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan pada jenjang SD/MI adalah indikator persentase angka partisipasi murni (APM), Angka Masuk Kasar (AMK), rasio siswa per sekolah, rasio siswa per kelas, dan rasio kelas per ruang kelas. Target indikator persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan SD/MI tahun 2012 sudah tercapai karena dipengaruhi Angka Masuk kasar dan rasio Siswa Per Kelas.

Adapun komponen pembentuk angka capaian indikator kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan pada jenjang SD/MI disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 3.13** Capaian Komponen Indikator Kinerja Pemerataan dan Perluasan Pendidikan SD/MI di DIY, 2010-2012

Indikator	Satuan	2010	2011	2012	
				Target	Realisasi
APM	Persen	97,15	97,53	95,35	97,54
Angka Masuk Kasar	Persen	62,10	63,03	63,03	109,32
Rasio Siswa per Sekolah	Siswa/sekolah	153	153	153	153
Rasio Siswa per Kelas	Siswa/kelas	21	18	20	21
Rasio Kelas per Ruang Kelas	Kelas/ruang kelas	0,98	1,19	1	1,01

Sumber: Dinas Dikpora DIY



**Gambar 3.9** Capaian Komponen Indikator Kinerja Pemerataan dan Perluasan Pendidikan SD/MI di DIY, 2010-2012

APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu dan merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. APM SD/MI adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan SD/MI (7-12 tahun) dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM SD/MI tahun 2012 sebesar 97,54%. Capaian APM SD/MI tahun 2012 tersebut meningkat dari tahun 2011 sebesar 0,01 %. APM SD/MI tahun 2011 sebesar 97,53%.

Angka masuk Kasar pada SD/MI mengalami kenaikan dari tahun 2011 sebesar 63,03 % menjadi 109,32 % tahun 2012 atau 173,44 % dari target yang ditetapkan. Angka Masuk Kasar pada SD/MI mengalami kenaikan pada tahun 2011 sebesar 63,03% dari capaian tahun 2010 sebesar 62,10 %. Rasio siswa per sekolah pada jenjang SD/MI tahun 2012 sebesar 153 siswa/sekolah. Capaian indikator tersebut menunjukkan bahwa setiap 1 unit sekolah SD/MI rata-rata mempunyai 153 siswa. Berarti capaiannya sudah mencapai 100 % dan tidak ada kenaikan dibandingkan tahun 2011.

Capaian indikator rasio siswa per kelas SD/MI tahun 2012 sebesar 21 siswa/kelas, yang artinya setiap 1 kelas rata-rata berisi 21 siswa dari target yang ditentukan sebesar 20, sehingga persentase realisasi sebesar 105 %. Capaian ini meningkat dibandingkan tahun 2011. Capaian indikator rasio siswa per kelas SD/MI tahun 2011 sebesar 18 siswa/kelas, yang artinya setiap 1 kelas rata-rata berisi 18 siswa. Rasio siswa per kelas meningkat pada tahun 2012 karena tingkat partisipasi meningkat.

Indikator rasio kelas per ruang kelas SD/MI tahun 2012 sebesar 1,01 kelas/ruang kelas dari target sebesar 1 kelas/ruang kelas, atau persentase realisasi sebesar 101 %. Hal ini menurun jika dibandingkan persentase realisasi tahun 2011 sebesar 121,43 %. Indikator rasio kelas per ruang kelas adalah perbandingan antara jumlah kelas dan jumlah ruang kelas pada jenjang pendidikan SD. Indikator rasio kelas per ruang kelas SD/MI tahun 2011 sebesar 1,19 kelas/ruang kelas meningkat dari tahun 2010, yaitu 0,98 kelas/ruang kelas.

### 3.2.2.2 Persentase Kinerja Pemerataan dan Perluasan Pendidikan SMP/MTs

Capaian indikator kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan SMP/MTs tahun 2012 sebesar 87,54% atau 113,68 % dari target yang. Capaian tersebut meningkat jika dibandingkan dengan capaian tahun 2011 yang sebesar 84,06 % atau 93,74 % dari target yang ditentukan. Target akhir 2013 yang ditetapkan untuk indikator kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan SMP/MTs adalah sebesar 85%. Perbandingan capaian tahun 2012 terhadap target akhir 2013 adalah 102,98 %. Angka perbandingan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah DIY telah berhasil melakukan pemerataan dan perluasan pendidikan SMP/MTS. Akan tetapi Pemda DIY masih harus berusaha keras untuk mempertahankan capaian tersebut.

**Tabel 3.14** Capaian Kinerja Indikator Persentase Kinerja Pemerataan dan Perluasan Pendidikan SMP/MTs di DIY

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian 2011	2012			Target Akhir RPJMD (2013)	Capaian s/d. 2012 terhadap 2013 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan SMP/MTs	persen	84,06	77,00	87,54	113,68	85	102,98

Sumber: Dinas Dikpora DIY

Indikator-indikator yang menentukan capaian indikator kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan pada jenjang SMP/MTs adalah indikator persentase Angka Melanjutkan (AM), rasio siswa per kelas, dan rasio kelas per ruang kelas.

Adapun indikator-indikator pembentuk angka capaian indikator kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan pada jenjang SMP/MTs tersebut akan disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 3.15 Capaian Komponen Indikator Kinerja Pemerataan dan Perluasan Pendidikan SMP/MTs di DIY, 2011-2012**

Indikator	Satuan	2011	2012	
			Target	Realisasi
APM	Persen	81,08	84,50	81,13
AM	Persen	104,75	104,75	105,63
Rasio Siswa per Sekolah	Siswa/sekolah	284	284	283
Rasio Siswa per Kelas	Siswa/kelas	28	28	29
Rasio Kelas per Ruang Kelas	Kelas/ruang kelas	1,48	1	1,01

Sumber: Dinas Dikpora DIY

Angka Partisipasi Murni SMP/MTs adalah persentase siswa dengan jenjang usia yang 13-15 tahun dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM SMP/MTs tahun 2012 sebesar 81,13% mengalami kenaikan dari tahun 2011 sebesar 81,08 %. Meskipun demikian persentase realisasi capaian sebesar 96,01 % lebih kecil dibandingkan tahun 2011 sebesar 97,69 %. Hal ini disebabkan oleh kriteria umur yang digunakan untuk menghitung APM SMP. APM jenjang pendidikan SMP/MTs dihitung dengan rumus siswa SMP yang berumur 13-15 tahun dibagi jumlah penduduk usia 13-15 tahun. Target tidak tercapai karena ada anak yang berumur kurang dari 13 tahun tapi sudah masuk SMP, sehingga tidak terhitung. Hal ini dimungkinkan sebagai dampak dari program akselerasi.

Angka Melanjutkan adalah perbandingan antara jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan jumlah lulusan pada jenjang yang lebih rendah dan dinyatakan dalam persentase. Angka Melanjutkan pada jenjang pendidikan SMP/MTs tahun 2012 sebesar 105,63% naik dibandingkan tahun 2011 sebesar 104,75 %. Adapun persentase realisasi tahun 2012 sebesar 100,84 %, meningkat dibandingkan tahun 2011 sebesar 96,99%. Capaian AM jenjang SMP/MTs di DIY pada tahun 2012 sebesar 105,63% atau melebihi target sebesar 104,75 %. Hal ini sebenarnya tidak bermasalah, karena AM sudah mencapai 100% yang artinya semua anak yang lulus SD sudah bisa melanjutkan ke jenjang SMP/MTs. Untuk AM yang di atas 100% artinya menghitung anak dari luar DIY yang masuk ke DIY.

Rasio siswa per sekolah pada tahun 2012 sebesar 283 atau kurang dari target sebesar 284 siswa/sekolah sehingga persentase realisasi hanya 99,64 %. Namun demikian secara keseluruhan persentase capaian rasio

siswa per sekolah pada jenjang SMP/MTs tahun 2012 meningkat. Rasio tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2012 setiap 1 unit sekolah mempunyai 283 siswa. Ketidaktercapaian target disebabkan oleh target yang terlalu tinggi.

Capaian indikator rasio siswa per kelas SMP/MTs tahun 2011 sebesar 28 siswa/kelas meningkat tahun 2012 sebesar 29 siswa/kelas atau 103,57 % dari target yang ditetapkan. Rasio tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2012 setiap 1 kelas berisi rata-rata 29 siswa.

Capaian indikator rasio kelas per ruang kelas SMP/MTs tahun 2011 sebesar 1,48 kelas/ruang kelas dari target 1,02 atau sebesar 145,10 %. Capaian 2012 turun dibandingkan tahun tersebut sebesar 1,01 atau 101 % dari target yang ditetapkan.

### 3.2.2.3 Persentase Kinerja Pemerataan dan Perluasan Pendidikan SM (SMA/MA/SMK)

Capaian indikator kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan Sekolah Menengah tahun 2012 sebesar 78,33 % dari target yang ditetapkan sebesar 82 % atau realisasinya sebesar 95,52 %. Capaian tersebut menurun dibandingkan dengan capaian tahun 2011 sebesar 79,07% dari target 78,56 % atau persentase realisasi sebesar 100,65 %. Target akhir yang ditetapkan pada tahun 2013 untuk indikator kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan Sekolah Menengah adalah sebesar 83%. Perbandingan capaian tahun 2012 terhadap target akhir RPJMD tahun 2013 adalah 94,37%. Hal tersebut menunjukkan bahwa capaian tahun 2013 masih perlu ditingkatkan agar target akhir RPJMD tercapai.

**Tabel 3.16** Capaian Kinerja Persentase Kinerja Pemerataan dan Perluasan Pendidikan SM (SMA/MA/SMK) di DIY

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian 2011	2012			Target Akhir RPJMD (2013)	Capaian s/d. 2012 terhadap 2013 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan SM/MA	persen	79,07	82,00	78,33	95,52	83	94,37

Sumber: Dinas Dikpora DIY

Indikator-indikator yang menentukan capaian indikator kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan pada jenjang SM adalah indikator persentase APM, AM, rasio siswa per sekolah, rasio siswa per kelas, dan rasio kelas per ruang kelas. Target indikator persentase kinerja

pemerataan dan perluasan pendidikan SM tahun 2012 belum mencapai target yang ditetapkan karena adanya indikator yang belum terpenuhi, yaitu rasiswo siswa/sekolah yaitu 98,83 %..

Adapun indikator-indikator pembentuk angka capaian indikator kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan pada jenjang SM tersebut disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 3.17 Capaian Komponen Indikator Kinerja Pemerataan dan Perluasan Pendidikan SM (SMA/MA/SMK) di DIY, 2011-2012**

Indikator	Satuan	2011	2012	
			Target	Realisasi
APM	Persen	63,45	63,50	63,65
AM	Persen	104,38	104,38	105,40
Rasio Siswa per Sekolah	Siswa/sekolah	343	343	339
Rasio Siswa per Kelas	Siswa/kelas	28	28	29
Rasio Kelas per Ruang Kelas	Kelas/ruang kelas	1,06	1	1,1

Sumber: Dinas Dikpora DIY

Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah (APM SM) adalah persentase siswa dengan jenjang usia 16-18 tahun dibandingkan semua jumlah penduduk di usia yang sama. APM SM/MA pada tahun 2011 sebesar 63,45% melebihi target sebesar 62 % atau persentase realisasi sebesar 102,34 %. Angka tersebut meningkat pada tahun 2012 menjadi 63,65% dari target 63,50 atau sebesar 100,24%.

Angka Melanjutkan pada jenjang SM naik dari tahun 2011 sebesar 104,38 % menjadi 105,40% di tahun 2012 atau realisasi persentasenya sebesar 100,23 %. Angka Melanjutkan Tahun 2011 tidak mencapai target, dimana persentasenya realisasinya hanya 87,94 %. Persentase realisasi angka melanjutkan tahun 2012 sebesar 100,23, ini berarti melewati target yang ditetapkan sebesar 104,38.

Rasio siswa per sekolah pada jenjang Sekolah Menengah tahun 2012 sebesar 339 siswa/sekolah atau sebesar 98,83 % dari target yang ditetapkan sebesar 343. Rasio siswa per sekolah pada jenjang Sekolah Menengah tahun 2011 sebesar 343 siswa/sekolah atau sebesar 100,29 % dari target yang ditetapkan sebesar 342. Rasio tersebut menunjukkan bahwa tahun 2012 setiap 1 unit sekolah mempunyai rata-rata 339 siswa. Capaian tahun 2012 turun dari tahun 2011 sebesar 1,46 %.

Rasio siswa per Kelas pada jenjang Sekolah Menengah tahun 2012 sebesar 29 siswa/kelas atau sebesar 103,57 % dari target yang ditetapkan sebesar 28. Rasio siswa per sekolah pada jenjang Sekolah Menengah tahun 2011 sebesar 28 siswa/sekolah atau sebesar 96,55 % dari target yang ditetapkan sebesar 29. Rasio tersebut menunjukkan bahwa tahun 2012 setiap 1 kelas mempunyai rata-rata 29 siswa. Capaian tahun 2012 naik dari tahun 2011 sebesar 7,02 %.

Rasio kelas per Ruang Kelas pada jenjang Sekolah Menengah tahun 2012 sebesar 1,1 kelas/ruang kelas atau sebesar 110 % dari target yang ditetapkan sebesar 1 kelas/ruang kelas. Rasio kelas per sekolah pada jenjang Sekolah Menengah tahun 2011 sebesar 1,06 atau sebesar 100,95 % dari target yang ditetapkan sebesar 1,05. Rasio tersebut menunjukkan bahwa tahun 2012 setiap 1 kelas mempunyai rata-rata 29 siswa. Capaian tahun 2012 meningkat dari tahun 2011 sebesar 9,05 %. Rasio kelas per ruang kelas menunjukkan perbandingan antara jumlah kelas dengan jumlah ruang kelas pada jenjang pendidikan sekolah menengah.

### Permasalahan dan Solusi

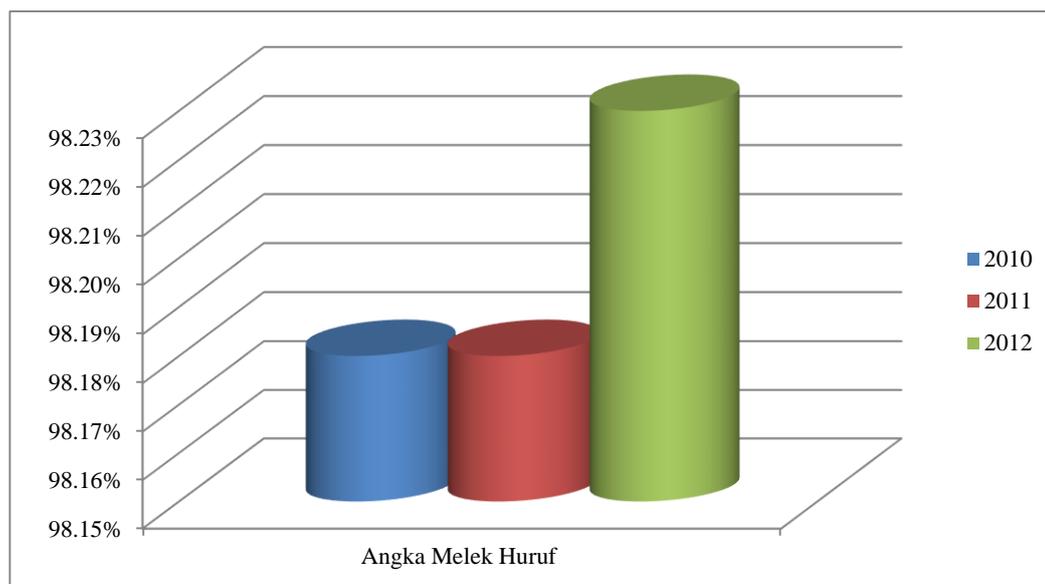
Permasalahan yang dihadapi serta solusi dalam mewujudkan sasaran peningkatan aksesibilitas pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif antara lain:

1. Rasio kelas per ruang kelas di tingkat SD menurun  
Rasio kelas per ruang kelas di tingkat SD menurun karena turunnya jumlah penduduk usia SD yang bersekolah. Hal ini karena keberhasilan program KB.  
Solusi:  
Untuk sekolah SD negeri dengan jumlah murid yang sedikit akan dilakukan penggabungan atau *regrouping*
2. Rasio kelas per ruang kelas jenjang SMP turun tetapi target terpenuhi.  
Solusi:  
Optimalisasi pemanfaatan ruang kelas yang ada.

Selain indikator kinerja utama dan indikator komponen pembentuknya, terdapat indikator angka melek huruf dan angka rata-rata lama sekolah yang menjadi acuan dalam pembangunan manusia di Indonesia. Angka rata-rata lama sekolah di DIY tahun 2011 adalah 8,98 tahun dan tahun 2012 naik menjadi 9,2 tahun. Angka rata-rata lama

sekolah di DIY tahun 2012 tidak mencapai target. Angka rata-rata lama sekolah yang besar menunjukkan tingginya tingkat pendidikan penduduk di suatu wilayah.

Angka melek huruf tahun 2012 sebesar 98,23 % dengan target sebesar 100 %. Angka Melek Huruf tahun 2012 meningkat dari capaian tahun 2011. Peningkatan angka melek huruf sebesar 0,05 %.



Sumber: Dinas Dikpora DIY

**Gambar 3.10 Target dan Capaian Presentase Angka Melek Huruf di DIY, 2010-2012**

Untuk mencapai sasaran peningkatan mutu pendidikan serta pemerataan dan perluasan pendidikan, ditempuh melalui berbagai program/kegiatan. Dari hasil telaah, program-program utama yang mendukung capaian tersebut antara lain:

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini
2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
3. Program Pendidikan Menengah
4. Program Pendidikan Non Formal
5. Program Pendidikan Luar Biasa
6. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidikan
7. Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Pendidikan
8. Program Pendidikan Tinggi
9. Program Akselerasi Pengembangan Pendidikan Terkemuka

### 3.2.3 Sasaran Terwujudnya Peningkatan Budaya Baca Masyarakat

Capaian sasaran peningkatan budaya baca masyarakat tahun 2012 menunjukkan kinerja yang sangat baik. Tolak ukur capaian sasaran terwujudnya peningkatan budaya baca masyarakat terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja utama, yaitu rasio jumlah perpustakaan terhadap jumlah penduduk (120 %), rasio jumlah pemustaka terhadap jumlah penduduk (100%), dan jumlah anggota jaringan *Jogja Library* (155,55%). Capaian ketiga indikator sasaran tersebut tahun 2012 rata-rata mencapai lebih dari 100% terhadap target yang ditetapkan serta lebih baik dari capaian tahun sebelumnya.



Gambar 3.11 Aktivitas Membaca Siswa

Target akhir RPJMD pada tahun 2013, untuk indikator rasio jumlah perpustakaan terhadap jumlah penduduk adalah 1:2.750, rasio jumlah pemustaka terhadap jumlah penduduk adalah 1:750, dan jumlah anggota jaringan *Jogja Library* adalah 20. Perbandingan capaian ketiga indikator sasaran tahun 2012 terhadap target akhir RPJMD (2013) menunjukkan bahwa capaian indikator rasio jumlah perpustakaan terhadap jumlah penduduk sudah 110%; indikator rasio jumlah pemustaka terhadap jumlah penduduk yaitu 1:1000 atau 75% dari target RPJMD; jumlah anggota jaringan *Jogja Library* sudah melebihi target yang diharapkan yaitu 28 PT atau sekitar 140 %. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah DIY sudah berhasil meningkatkan kinerja untuk terwujudnya peningkatan budaya baca masyarakat di DIY, tetapi DIY harus terus berupaya agar terjadi peningkatan untuk akselerasi DIY sebagai pusat pendidikan, kebudayaan dan pariwisata.

Adapun capaian target indikator sasaran terwujudnya peningkatan budaya baca masyarakat disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.18 Capaian Kinerja Sasara Terwujudnya Peningkatan Budaya Baca Masyarakat

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian	2012	Target	Capaian
-------------------	--------	---------	------	--------	---------

Utama		n 2011	Target	Realisasi	% Realisasi	Akhir RPJMD (2013)	s/d. 2012 terhadap 2013 (%)
1. Rasio jumlah perpustakaan terhadap jumlah penduduk	unit/orang	1:2.590	1 : 3000	1 : 2500	120	1:2.750	110%
2. Rasio jumlah pemustaka terhadap jumlah penduduk	orang	1:1.250	1 : 1000	1 : 1000	100	1:750	75
3. Jumlah anggota jaringan <i>Jogja Library</i>	PT	21	18	28	155,55	20	140 %

Sumber: BPAD DIY

Realisasi capaian indikator rasio jumlah perpustakaan terhadap jumlah penduduk pada tahun 2012 adalah 1:2.500 unit/orang atau sebesar 120 % dari target sebesar 1:3.000, capaian tersebut turun apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2011 yang sebesar 1:2.750 unit/orang atau sebesar 133,34% dari target sebesar 1:4.000.

Rasio jumlah perpustakaan terhadap jumlah penduduk adalah perbandingan antara jumlah perpustakaan terhadap jumlah penduduk di DIY. Capaian jumlah perpustakaan terhadap jumlah penduduk tahun 2012 sebesar 2.500 diperoleh dari jumlah penduduk (3.457.491 jiwa) dibagi total perpustakaan 1.382 unit. Rasio capaian 1:2.500 berarti 1 unit perpustakaan di Provinsi DIY minimal melayani 2.500 orang penduduk.

**Tabel 3.19 Jumlah Perpustakaan di DIY Tahun 2011**

No	Uraian	Jumlah (unit)
1	Perpustakaan di Gunungkidul	161
2	Perpustakaan di Sleman	199
3	Perpustakaan di Kulon Progo	263
4	Perpustakaan di Kota Yogyakarta	225
5	Perpustakaan di Bantul	44
6	Perpustakaan PT	59
7	Perpustakaan Umum	6
8	Perpustakaan Desa	299
	Total Perpustakaan	1.382

Sumber: BPAD DIY

Rasio jumlah pemustaka terhadap jumlah penduduk adalah perbandingan antara jumlah pemustaka (masyarakat yang berkunjung ke perpustakaan) terhadap jumlah penduduk secara keseluruhan. Capaian indikator rasio jumlah pemustaka terhadap jumlah penduduk tahun 2012 sebesar 1:1.000 orang atau sebesar 100 % dari target sebesar 1:1.000. Walaupun capaian target tahun 2012 terpenuhi, tetapi persentase realisasi tahun 2012 tersebut menurun dari tahun 2011 yang sebesar 1:1.200 orang atau sebesar 114,29% dari target sebesar 1:1.500.

Capaian realisasi jumlah pemustaka tahun 2012 sebesar 1.000 yang berarti diantara 1.000 orang penduduk di DIY seorang diantaranya adalah pemustaka (pengunjung perpustakaan) diperoleh dari angka jumlah pemustaka (7.899.458 orang) dibagi jumlah penduduk Provinsi DIY (3.457.491 jiwa). Jumlah pemustaka di Provinsi DIY tercatat sebanyak 7.899.458 orang dengan rincian pemustaka BPAD sebanyak 282.458 orang, pemustaka perpum kabupaten/kota sebanyak 75.000 orang, dan pemustaka perpustakaan desa sebanyak 7.542.000 orang.

Jaringan *jogja library* merupakan aplikasi yang dibangun oleh Pemerintah DIY untuk dapat memberikan layanan kepada pemustaka berupa katalog koleksi perpustakaan seluruh anggota jaringan secara *on line* kepada masyarakat. Pada tahun 2012 jumlah anggota jaringan *Jogja Library* sebanyak 28 Perguruan Tinggi (PT) atau sebesar 155,55 % dari target sebanyak 18 PT. Jika dibandingkan dengan tahun 2011, capaian tahun 2012 tersebut mengalami peningkatan.

Penyelenggaraan perpustakaan sebagai salah satu tolak ukur indikator sasaran terwujudnya peningkatan budaya baca masyarakat harus diupayakan agar masyarakat tertarik untuk berkunjung ke perpustakaan karena perpustakaan hanya akan berarti bila koleksi yang dimilikinya dapat dimanfaatkan dengan baik. Perpustakaan merupakan jendela dunia dan simbol peradaban. Upaya yang dilakukan Pemerintah DIY untuk mensukseskan hal tersebut adalah dengan melakukan penambahan koleksi. Penambahan tersebut dilaksanakan untuk koleksi yang digunakan dan dilayankan melalui perpustakaan menetap maupun dilayankan dengan lebih mendekatkan kepada masyarakat melalui paket buku maupun perpustakaan keliling. Lebih jauh lagi, koleksi tersebut juga dilayankan dengan melakukan bantuan penambahan koleksi pada perpustakaan desa, puskesmas, maupun perpustakaan masyarakat.

Pada tahun 2010 Pemerintah DIY memperoleh sertifikat ISO 9001:2008 atas peningkatan layanan perpustakaan pada masyarakat baik dari sisi fisik, fungsi, maupun administrasi. Tahun 2011 merupakan tahun ke-2 Pemerintah DIY memperoleh sertifikat *Surveyance* ISO 9001:2008. Tindak lanjut perolehan sertifikat ISO 9001:2008 adalah diadakannya

survey kepuasan pengunjung terhadap layanan perpustakaan. Hasil survey menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kepuasan pengunjung terhadap layanan perpustakaan sebelum dan sesudah diperolehnya ISO 9001:2008 sebesar 65,15%. Pada tahun 2012 kembali Pemda DIY memperoleh sertifikasi tersebut.

Pemerintah DIY melaksanakan pembangunan Gedung Perpustakaan Terpadu di kompleks *Jogja Expo Centre* (JEC) sebagai upaya peningkatan infrastruktur pelayanan. Pembangunan Gedung Perpustakaan Terpadu telah dimulai pada tahun 2011 dengan pembuatan *Detail Engineering Design* (DED) dan Pembangunan Gedung Tahap Pertama untuk bangunan konstruksi dasarnya. Pada tahun 2012 pembangunan gedung Perpustakaan Terpadu sudah terrealisasi 80,20 %. Diharapkan pada tahun 2013 DIY memiliki gedung perpustakaan yang lebih representatif.

Layanan urusan perpustakaan kepada masyarakat dilengkapi dengan koleksi yang bersifat tematik seperti pustaka tentang kebudayaan Jepang yang dikumpulkan dan dilayanankan dalam bentuk *Kyoto Corner*. Di samping itu juga telah disediakan koleksi buku-buku kuno yang sudah dialihmediakan dalam bentuk digital, dialihaksarakan dalam tulisan latin, dan dialihbahasakan dalam Bahasa Indonesia yang bertujuan akan semakin memudahkan pengunjung perpustakaan. Layanan lain yang tidak kalah penting adalah adanya jaringan perpustakaan dengan perguruan tinggi yang ada di DIY dalam bentuk katalog bersama yang bersifat *on line* yang dapat diakses masyarakat melalui internet.

Program yang mendukung capaian sasaran terwujudnya peningkatan budaya baca masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
2. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perpustakaan

### Permasalahan dan Solusi

Dalam penyelenggaraan pemerintah untuk mendukung tercapainya sasaran terwujudnya peningkatan budaya baca masyarakat, berbagai permasalahan yang dihadapi pemerintah DIY adalah sebagai berikut:

1. Belum tersedianya gedung layanan yang representatif.

Saat ini gedung yang digunakan untuk layanan kurang nyaman, disamping itu daya tampung dan ketahanan gedung/bangunan akibat gempa menjadikan pelayanan kurang memuaskan.

2. Kompetensi dan kuantitas pustakawan yang belum sesuai ketentuan.

Jumlah pustakawan yang ada dan memiliki standar sebagai pustakawan masih kurang secara kuantitas. Masih sedikit generasi muda yang tertarik untuk mendalami dunia keperpustakaan.

3. Budaya membaca dan menulis masyarakat DIY yang tidak sebesar budaya menonton.

Masyarakat DIY lebih menyukai menonton hiburan di media, daripada berkunjung ke perpustakaan untuk membaca buku ataupun menulis suatu karya dalam bentuk tertulis.

4. Pengadaan rumah belajar modern

Pembangunan fisik sedang difokuskan untuk membangun pembangunan gedung perpustakaan yang representatif sehingga pembangunan rumah belajar modern ditunda.

5. Belum hidupnya perpustakaan desa dan tempat ibadah

Acapkali perpustakaan desa dan tempat ibadah tidak memiliki sarana dan prasarana untuk menghidupkan perpustakaannya, dan SDM yang menangani masih sangat terbatas dan sifatnya sukarela.

Solusi yang diupayakan untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Belum tersedianya gedung layanan yang representatif.

Pembangunan Gedung Perpustakaan terpadu di Kompleks *Jogja Expo Centre* (JEC) sudah mencapai 80 % dan direncanakan selesai pada tahun 2013 ini.

2. Kompetensi dan kuantitas pustakawan yang belum sesuai ketentuan.

Kekurangan tenaga Pustakawan diatur dengan memanfaatkan tenaga teknis yang ada di masing-masing bidang dan diusulkan tambahan formasi kebutuhan tenaga fungsional pustakawan. Bimtek-bimtek tentang keperpustakaan akan terus ditingkatkan agar kemampuan SDM Perpustakaan meningkat.

3. Budaya membaca dan menulis masyarakat DIY yang tidak sebesar budaya menonton.

Event-event yang dapat meningkatkan minat baca masyarakat digalakkan, antara lain melalui Raja dan Ratu Buku.

4. Pengadaan rumah belajar modern

Setelah pembangunan fisik Perpustakaan Induk terselesaikan, akan direalisasikan Rumah Belajar Modern.

5. Belum hidupnya perpustakaan desa dan tempat ibadah

Pembinaan melalui bimtek bagi pengelola perpustakaan desa dan tempat ibadah, didukung dengan bantuan paket buku, lomba-lomba perpustakaan, serta stimulan-stimulan lainnya.

### 3.2.4 Sasaran Terwujudnya Peningkatan Prestasi Olahraga

Arah dan kebijakan Pemda DIY dalam urusan pemuda dan olahraga yaitu untuk “Mengembangkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, profesional, humanis dan beretika dalam mendukung terwujudnya budaya yang adiluhung”.



**Gambar 3.12 Pelepasan Kontingen PON**

Olahraga juga sebagai wahana membangun watak sportifitas dan dapat menghargai kelebihan kemampuan lawan sebagai koreksi atas diri sendiri untuk meningkat lebih maju pada tahap selanjutnya yang tidak hanya dibutuhkan oleh manusia yang terlahir sempurna namun juga diperlukan oleh para difabel melalui pembinaan dan kompetisi olahraga penyandang cacat. Pembangunan dan pembinaan olahraga harus didukung dengan kesiapan tenaga kepelatihan, sarana dan prasarana, serta teknologi.

Pembinaan olahraga di DIY dilakukan dengan mengidentifikasi ketersediaan potensi dan bakat bidang olahraga baik bagi pelajar maupun pemuda di DIY yang selanjutnya akan dilakukan pembibitan melalui proses seleksi dan pembinaan berupa kompetisi-kompetisi berjenjang.

Program dan kegiatan bidang olahraga yang dilakukan Pemerintah DIY untuk mewujudkan pembangunan manusia berkualitas adalah membina generasi muda agar berprestasi. Sasaran pembangunan tersebut yaitu terwujudnya peningkatan prestasi olahraga. Adapun tolak ukur untuk mencapai sasaran terwujudnya peningkatan prestasi olahraga adalah indikator prestasi olahraga tingkat nasional.

**Tabel 3.20 Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Peningkatan Prestasi Olahraga**

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian 2011	2012			Target Akhir RPJMD (2013)	Capaian s/d. 2011 terhadap 2013 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Prestasi Olahraga Tingkat Nasional:							
a. POPNAS	peringkat	7	5	-	-	7	-
b. POSPENAS	peringkat	-	3	-	-	3	-
c. PON	peringkat	-	10	14	71,42	10	71,42

Sumber: Dinas Dikpora DIY

Kejuaraan olahraga sebagai capaian indikator prestasi olahraga adalah Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS), Pekan Olahraga dan Seni Antar Pondok Pesantren Nasional (POSPENAS), dan Pekan Olahraga Nasional (PON). Kejuaraan POPNAS dan POSPENAS diselenggarakan 2 (dua) tahun sekali. POSPENAS yang semula dilaksanakan 2 tahun sekali, diubah menjadi 3 tahun sekali (keputusan dari menteri Agama) sehingga penyelenggaraan yang sedianya diselenggarakan pada tahun 2012 dialihkan pada tahun 2013. Sedangkan PON diselenggarakan 5 (lima) tahun sekali, dimana event PON terakhir diselenggarakan pada tahun 2012.

Pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII di Riau, kontingen DIY memperoleh medali: 10 emas, 12 perak, dan 16 perunggu menempati rangking 14. Hal ini berarti untuk indikator capaian peringkat Pekan Olahraga Nasional (PON) tidak memenuhi target yaitu peringkat 10. Tidak terpenuhinya target ini dikarenakan beberapa hal antara lain : (1) atlet dari kontingen dari cabang olahraga favorit medali tidak bisa bertanding karena cabang olahraga yang tidak dipertandingkan, (2) ada beberapa atlet dari cabang olahraga favorit yang cedera.

Capaian indikator sasaran terwujudnya peningkatan prestasi olahraga tahun 2011 menunjukkan kinerja yang sangat baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan capaian prestasi pada kejuaraan POPNAS. Pada POPNAS tahun 2007, DIY menempati urutan 24 dari target ranking 10. Kemudian pada POPNAS X tahun 2009 meraih peringkat 7, capaian ini melebihi target yang ditetapkan yaitu ranking 10. Pada POPNAS tahun 2011 DIY mampu mempertahankan peringkat 7 dari target mendapat peringkat 10. Keberhasilan pada POPNAS tersebut menunjukkan bahwa pembinaan olahraga pelajar di DIY semakin baik. Target akhir RPJMD untuk indikator prestasi olahraga tingkat nasional POPNAS pada tahun 2013 adalah memperoleh peringkat 7 besar. Target ini sudah terpenuhi pada penyelenggaraan POPNAS tahun 2011. Namun demikian, prestasi ini harus tetap dipertahankan dan ditingkatkan untuk tahun-tahun mendatang.

Program yang mendukung capaian sasaran terwujudnya peningkatan prestasi olahraga adalah:

1. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
2. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
3. Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
5. Program Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda
6. Program Pembibitan dan Pembinaan atlet berbakat
7. Program Peningkatan SDM (Peningkatan kualitas tenaga keolahragaan (pelatih, wasit, pengurus))

### Permasalahan dan Solusi

Meskipun demikian, masih banyak hal yang perlu diatasi dan diperbaiki oleh Pemerintah DIY dalam bidang olahraga. Permasalahan yang dihadapi Pemerintah DIY dalam pengembangan dan pembinaan olahraga antara lain:

1. Sarana dan prasarana latihan atlet dirasa masih minim.
2. Pembibitan atlet masih kurang optimal.
3. Sikap mental atlet seperti sportifitas, disiplin, dan semangat juang masih rendah.

Upaya yang dilakukan Pemerintah DIY dalam mengatasi persoalan di atas adalah:

1. Penambahan fasilitas latihan bagi para atlet agar prestasi meningkat.
2. Kebijakan pembinaan dan penghargaan atlet berprestasi sehingga tetap tinggal di DIY.
3. Pengelolaan pembibitan atlet yang berkelanjutan dan berkesinambungan.
4. Pencarian bakat atlet olahraga berprestasi.
5. Pemberian penghargaan berupa beasiswa bagi atlet berprestasi dan harapan masa depan.
6. Pembangunan sarana dan prasarana yang memadai untuk pembinaan generasi muda.
7. Menyelenggarakan program/kegiatan yang memberikan peluang bagi generasi muda agar lebih giat dan kreatif.
8. Pembinaan atlet-atlet berbakat dan klub-klub olahraga prestasi.

### **3.2.5 Sasaran Berkembang Dan Lestarinya Budaya Lokal, Kawasan Budaya, dan Benda Cagar Budaya (BCB)**

Kebudayaan menjadi salah satu pilar pembangunan di DIY di samping pendidikan dan kebudayaan. Pembangunan kebudayaan di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak hanya bertujuan untuk melindungi dan mengembangkan kebudayaan, tetapi juga untuk memanfaatkan kebudayaan yang merupakan aset yang sangat tinggi harganya bagi kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di DIY. Kebudayaan akan menjadi arus utama atau payung bagi sektor lain, karena sumber daya kebudayaan mengandung unsur-unsur universal dalam kehidupan manusia. Pada dasarnya pembangunan dalam segala bidang akan menghasilkan sebuah karya budaya besar yang akan mewakili peradaban pada zamannya.



**Gambar 3.13 Kawasan Benteng Vredeburg**

Keberhasilan sasaran berkembang dan lestarnya budaya lokal, Kawasan Budaya, dan Benda Cagar Budaya (BCB) dapat dilihat dari 5 indikator kinerja yang telah ditetapkan, yaitu persentase kunjungan ke museum terhadap Objek Daya Tarik Wisata (ODTW), jumlah peristiwa budaya, persentase desa budaya berkategori maju, persentase BCB tidak bergerak berkategori kondisi baik, dan persentase organisasi budaya berkategori maju.

Capaian sasaran berkembang dan lestarnya budaya lokal, kawasan budaya, dan BCB tahun 2012 menunjukkan kinerja yang baik, semuanya mencapai target, kecuali pada indikator Persentase Organisasi Budaya Berkategori Maju. Capaian indikator sasaran memenuhi target yang ditetapkan dengan rata-rata capaian lebih dari 100%.

Adapun capaian indikator sasaran berkembang dan lestarnya budaya lokal, kawasan budaya, dan BCB disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 3.21 Capaian Kinerja Sasaran Berkembang dan Lestarnya Budaya Lokal, Kawasan Budaya, dan Benda Cagar Budaya (BCB)**

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian 2011	2012			Target Akhir RPJMD (2013)	Capaian s/d. 2012 terhadap 2013 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1. Persentase Kunjungan ke Museum terhadap Objek Daya Tarik	persen	6,64	13,42	16,66	124,14	13,64	122,14

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian 2011	2012			Target Akhir RPJMD (2013)	Capaian s/d. 2012 terhadap 2013 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Wisata (ODTW)*							
2. Jumlah Peristiwa Budaya	event	920	960	960	100	1.060	90,57
3. Persentase Desa Budaya Berkategori Maju	persen	19,51	29,27	30,23	103	36,59	82,62
4. Persentase BCB Tidak Bergerak Berkategori Kondisi Baik	persen	42,72	43,70	72,73	166,43	44,47	162,65
5. Persentase Organisasi Budaya Berkategori Maju	persen	0,94	0,98	0,93	94,89	1,03	90,29

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY

Ket : \*Angka Sementara

Tahun 2012 jumlah kunjungan museum tercatat sebanyak 1.663.145 orang dan jumlah kunjungan ODTW sebanyak 9.981.673 orang. Dari angka tersebut maka diketahui capaian indikator kunjungan ke museum terhadap ODTW tahun 2012 adalah sebesar 16,66% atau sebesar 124,14% dari target yang ditetapkan yaitu 13,42%. Persentase capaian tahun 2012 tersebut lebih tinggi dibanding dengan capaian tahun 2011 yang sebesar 6,64%.

Realisasi capaian indikator jumlah peristiwa budaya tahun 2012 sebanyak 960 event atau 100% terhadap target yang ditetapkan yang juga 960 event. Jika dibandingkan dengan tahun 2011, capaian 2012 mengalami peningkatan sebesar 40 event.

Desa budaya berkategori maju adalah desa budaya yang melakukan aktivitas budaya yang mengekspresikan tujuh unsur kebudayaan yang universal, mengaktualisasikan kekayaan potensi secara maksimal serta mengkonservasi kekayaan budaya yang dimiliki. Capaian realisasi indikator persentase desa budaya berkategori maju tahun 2012 sebesar 30,23%, sudah mencapai target yang ditetapkan, yaitu 29,27%, meningkat jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yang sebesar 19,51%.

Sementara itu, BCB tidak bergerak berkategori kondisi baik adalah cagar budaya yang direhabilitasi, direkonstruksi, dieskavasi, mendapat penghargaan serta ditetapkan menjadi cagar budaya. Capaian indikator tersebut pada tahun 2012 sebesar 72,73%, lebih besar dari target yang ditetapkan yaitu 43,70%. Angka 72,73% tersebut diperoleh dari 520 cagar budaya dengan kondisi baik dibandingkan dengan jumlah seluruh cagar budaya yang terdata yaitu sejumlah 715. Capaian tahun 2012 tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2011 sebesar 30,01%.

Organisasi budaya berkategori maju adalah organisasi budaya yang memiliki kelengkapan administrasi, peralatan dalam kondisi baik, kegiatan latihan yang dilakukan secara terjadwal, pementasan pada tingkat nasional dan internasional serta mendapatkan penghargaan tingkat provinsi, nasional dan internasional. Indikator persentase organisasi budaya berkategori maju, realisasi tahun 2012 sebesar 0,93%, lebih kecil dibandingkan dengan target yang sebesar 0,98%. Angka 0,93% berasal dari 40 organisasi budaya berkategori maju dibandingkan organisasi budaya yang terdata sejumlah 4308.

Pembangunan kebudayaan di DIY tidak hanya bertujuan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan tetapi juga untuk memanfaatkan budaya yang merupakan salah satu kekayaan DIY. Kekayaan budaya DIY merupakan potensi ekonomi kreatif yang apabila dikelola dengan baik dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta mengentaskan kemiskinan. Keunggulan kompetitif Yogyakarta dalam bidang kebudayaan menjadi komponen unggulan bagi pembangunan ekonomi DIY. Nilai-nilai budaya Yogyakarta mendukung DIY dalam pembentukan karakter dan etika SDM yang sangat dibutuhkan dalam keberhasilan pembangunan.

Program yang mendukung capaian sasaran berkembang dan lestari budaya lokal, kawasan budaya dan Benda Cagar Budaya (BCB) adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Nilai Budaya
2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
4. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
5. Program peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan

### Permasalahan dan Solusi

#### *Permasalahan*

Dalam menyelenggarakan program/kegiatan untuk mewujudkan capaian sasaran Berkembang Dan Lestari Budaya Lokal, Kawasan

Budaya, dan Benda Cagar Budaya (BCB), Permasalahan yang dihadapi Pemerintah DIY diantaranya adalah:

1. Kuantitas dan Kualitas Sumberdaya Manusia Permuseuman belum memadai.  
Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam permuseuman belum memadai, selain jumlahnya terbatas, juga belum sesuai dengan ketentuan yang ada mensyaratkan sumberdaya di museum untuk memiliki kompetensi-kompetensi tertentu baik pendidikan, keahlian, maupun pengalaman di bidang permuseuman.
2. Pengadaan lahan untuk revitalisasi BCB Tugu.  
Kegiatan Revitalisasi BCB Tugu meliputi rehab bangunan Tugu serta pembebasan lahan seluas 293 m<sup>2</sup> di sebelah tenggara bangunan Tugu yang direncanakan untuk pembangunan plasa yang berisi diorama dan penjelasan historis dan kemasyarakatan tentang tugu. Namun dalam proses pelaksanaan kegiatan penghuni lahan di tenggara tugu tidak menerima tawaran pelepasan tanah tersebut dengan nilai 50% dari NJOP dan meminta dengan harga yang tinggi.
3. Pengelolaan dan Pembinaan desa budaya sebagai beteng pertahanan nilai tradisional  
Permasalahan yang timbul dari pengelolaan desa budaya ini adalah belum diperbaruinya regulasi mengenai desa budaya yakni SK Gubernur No 325/KPTS/1995 tanggal 24 November 1995, padahal menurut data terakhir dari pemangku urusan kebudayaan terdapat 43 desa yang berpotensi sebagai benteng budaya Yogyakarta, dan 41 desa budaya di antaranya telah diklasifikasi dalam desa budaya embrional, berkembang, dan maju. Selain itu, sarana dan prasarana seni dan budaya desa budaya masih perlu ditingkatkan.
4. Regenerasi grup kesenian dan seniman tradisional yang berlangsung lambat, bahkan cenderung surut.  
Banyak grup kesenian dan seniman tradisional yang dulu terkenal sudah tidak memiliki ruang untuk tampil, sarana dan prasarana terbatas dan sudah tidak layak tampil, selain juga faktor usia yang sudah tidak memungkinkan untuk menghidupkan seni dan budaya tradisional. Generasi-generasi baru lebih tertarik mengembangkan seni kontemporer.
5. Pelindungan atas kekayaan dan keragaman seni dan budaya.  
Pelindungan ini mencakup pelindungan dari pencurian dan pemalsuan benda seni budaya, maupun segi-segi lainnya, terlebih lagi beberapa tahun terakhir bangsa ini dikejutkan oleh perilaku bangsa lain yang mengakuksi karya budaya bangsa. Oleh karena itu perlu segera dilakukan kegiatan untuk melindungi aset kebudayaan

DIY baik berupa regulasi, hak atas kekayaan intelektual (HAKI), maupun sarana prasarana lainnya.

6. Pemeliharaan terhadap bangunan-bangunan budaya yang sudah dilestarikan

Banyak bangunan-bangunan cagar budaya maupun yang diduga cagar budaya telah direhabilitasi, namun pemeliharaan terhadap bangunan-bangunan tersebut perlu dalam pembinaan. Banyak juga rumah-rumah yang diduga cagar budaya dibiarkan terbengkalai.

### *Solusi*

Beberapa langkah telah diambil oleh Pemerintah DIY untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas. Langkah-langkah yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Kuantitas dan Kualitas Sumberdaya Manusia Permuseuman belum memadai.

Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi berkaitan dengan masalah sumberdaya museum Pemerintah DIY secara rutin mengirimkan pegawai museum untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, selain itu juga menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia di museum dengan mendatangkan pembicara dari pusat maupun dari luar negeri dengan kurikulum yang berstandar nasional maupun internasional.

2. Pengadaan lahan untuk revitalisasi BCB Tugu

Pemda DIY mengupayakan anggaran untuk lahan tenggara Tugu sesuai hasil negosiasi dengan penghuni lahan yang bernilai kurang lebih Rp. 1.491.370.000 dalam APBD perubahan tahun 2013.

3. Pengelolaan dan Pembinaan desa budaya sebagai beteng pertahanan nilai tradisional

Dalam tahun selanjutnya akan diupayakan akselerasi penyusunan regulasi tentang status dan pelestarian desa budaya yang terkini dengan koordinasi antar pemangku. Pemda DIY berupaya untuk meningkatkan sarana prasarana di desa budaya secara bertahap seperti pengadaan balai budaya untuk ekspresi seni dan budaya di desa budaya.

4. Regenerasi organisasi kesenian dan seniman tradisional yang berlangsung lambat, bahkan cenderung surut.

Guna meningkatkan regenerasi organisasi dan seniman tradisional maka dilakukan pemberdayaan organisasi seni budaya dalam bentuk pembinaan kesenian tradisional, festival kesenian tradisional, dan stimulan-stimulan berupa bantuan modal dan barang bercorak kebudayaan.

5. Pelindungan atas kekayaan dan keragaman seni dan budaya.  
Pemda DIY berupaya melindungi aset kebudayaan DIY berupa pendataan secara rutin baik tahunan maupun lima tahunan dan pemberian sarana prasarana pengamanan ke sejumlah tempat yang menyimpan banyak benda karya budaya. Upaya untuk pemberian HAKI akan dilakukan pada tahun mendatang secara bertahap.
6. Pemeliharaan terhadap bangunan-bangunan budaya yang sudah dilestarikan  
Bangunan-bangunan cagar budaya maupun yang diduga cagar budaya telah direhabilitasi tersebut perlu dipelihara melalui pemberdayaan kelompok-kelompok pelestari kawasan cagar budaya dan kelompok keseniannya sehingga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan seni budaya, sarana prasarana wisata homestay, misalnya pendhapa-pendhapa, rumah joglo.

### 3.2.6 Sasaran Terwujudnya Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Hal ini sesuai dengan amanah dari Undang-Undang No. 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial dan Peraturan Pemerintah No 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan berbagai kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui beberapa program dan kegiatan untuk mengatasi permasalahan sosial yang ada.



**Gambar 3.14 PKL Pada Kawasan Malioboro**

Beragam Permasalahan Sosial membutuhkan penanganan yang komperhensif dari berbagai pihak, baik dari Pemerintah (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota), Lembaga Sawadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Sosial (Orsos), tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda maupun unsur masyarakat secara keseluruhan. Pemerintah Daerah DIY berkomitmen untuk menjadi *leading sector* bagi penanganan berbagai masalah sosial di tingkat Provinsi. Sasaran dari bidang sosial adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), yaitu seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan dengan lingkungannya, atau tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kesulitan, hambatan atau gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterbatasan, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan atau kondisi perubahan lingkungan yang kurang mendukung.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta, sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial No. 8 tahun 2012 tentang pedoman pendataan dan pengelolaan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) berjumlah 25 jenis PMKS dari total 26 Jenis PMKS yang ada dalam peraturan tersebut. Seluruh PMKS perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Daerah DIY dan masyarakat.

Pada sasaran terwujudnya peningkatan kualitas kehidupan sosial masyarakat, fokus pencapaian sasaran adalah peningkatan kualitas kehidupan sosial masyarakat. Sebagai tolak ukur untuk mencapai sasaran tersebut, indikator kinerja yang ditetapkan adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.22 Capaian Kinerja Sasara Terwujudnya Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat**

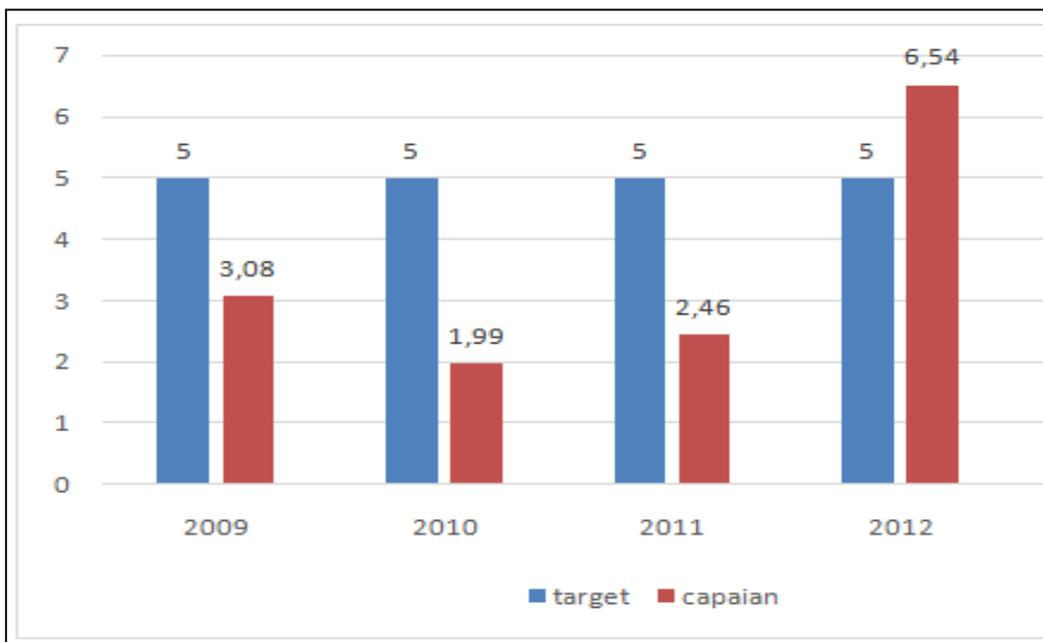
Indikator Kinerja	Satuan	2011	2012			Target Akhir RPJMD (2013)	Capaian s/d 2012 terhadap 2013 (%)
		Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase Cakupan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	persen	2,46	5,00	6,54	130,80	5	56,28
Persentase Cakupan Peningkatan Kapasitas Potensi	persen	55,67	55,67	69,95	125,65	55,67	125,65

Indikator Kinerja	Satuan	2011	2012			Target Akhir RPJMD (2013)	Capaian s/d 2012 terhadap 2013 (%)
		Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi		
Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)							

Capaian sasaran peningkatan kualitas kehidupan sosial masyarakat untuk tahun 2012 menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan tahun 2011. Penjelasan indikator sasaran terwujudnya peningkatan kualitas kehidupan sosial masyarakat diuraikan sebagai berikut:

**a. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)**

Sasaran pelayanan urusan sosial adalah para PMKS yang merupakan seseorang, keluarga, atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, atau keterasingan dan kondisi atau perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan.



Sumber: Dinas Sosial DIY & RPJMD 2009-2013

### Gambar 3.15 Target dan realisasi Cakupan Penanganan PMKS, 2009-2013 dalam Persen (%)

Pada tahun 2012 target cakupan penanganan PMKS ditetapkan sebesar 5%. Adapun indikator tersebut tercapai 6,54% yang terdiri dari capaian APBD sebesar 2,61% dan capaian APBN 3,93%. Dengan demikian capaian tahun 2012 adalah sebesar 130,80% dari target atau terdapat kelebihan pencapaian realisasi sebesar 30,80%. Realisasi tahun 2012 tersebut juga jauh melampaui tahun 2011 yaitu sebesar 2,46%. Hal ini disebabkan penanganan pemerintah untuk mengatasi penyandang masalah kesejahteraan sosial untuk tahun 2012 lebih baik dari tahun 2011.

Persentase capaian cakupan penanganan PMKS sampai dengan 2012 terhadap Akhir RPJMD (2013) sebesar 56,28%.

Tabel 3.23 Tabulasi Data PMKS di DIY, 2011-2012

No	Jenis PMKS		2011	2012
1	Anak balita terlantar	anak	2.842	2.569
2	Anak terlantar	anak	28.204	26.165
3	Anak Yang Berhadapan dengan Hukum	anak		302
4	Anak Jalanan	anak	312	497
5	Anak Dengan Kecacatan	anak		3.910
6	Anak Korban Tindak Kekerasan	anak		919
7	Anak Memerlukan Perlindungan Khusus	anak		275
8	Lanjut usia terlantar	orang	30.953	37.199
9	Penyandang Disabilitas	orang	35.264	29.543
10	Tuna susila	orang	174	166
11	Gelandangan	orang	169	161
12	Pengemis	orang	208	199
13	Pemulung	orang		116
14	Kelompok Minoritas	orang		733
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasarakatan (BWBLP)	orang	3.322	3.658
16	Orang Dengan HIV / AIDS	orang	1.094	1.408
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	orang	1.718	1.627

No	Jenis PMKS		2011	2012
18	Korban Trafficking	orang		9
19	Korban Tindak Kekerasan	orang	5.169	4.325
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	orang		760
21	Korban bencana alam	orang	726	3.749
22	Korban bencana sosial	orang	70	16
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	orang	11.623	12.337
24	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis (KBSP)	kk	3.476	3.356
25	Fakir Miskin	kk	124.805	132.238

Di Daerah Istimewa Yogyakarta , pada tahun 2011 maupun 2012 perhitungannya didasarkan pada 25 jenis PMKS. Berdasarkan data PMKS Dinas Sosial tahun 2011 dan 2012, bahwa jenis PMKS yang mengalami peningkatan jumlah pada tahun 2012 dibandingkan tahun 2011 diantaranya adalah jumlah anak jalanan, lanjut usia terlantar, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan (BWBLP), Orang dengan HIV/AIDS (ODHA), korban bencana alam, perempuan rawan sosial ekonomi, dan fakir miskin . Sementara itu, jenis PMKS yang mengalami penurunan jumlah pada tahun 2012 dibandingkan tahun 2011 adalah anak balita terlantar, anak terlantar, penyandang disabilitas, tuna susila, gelandangan, pengemis, korban penyalahgunaan NAPZA, korban tindak kekerasan, korban bencana sosial, keluarga bermasalah sosial psikologis, dan jenis PMKS merupakan kategori baru berdasarkan Permensos Nomor 8 tahun 2012 sehingga baru diadakan pendataan pada tahun 2012 adalah anak yang berhadapan dengan hukum, anak dengan kecacatan, anak korban tindak kekerasan, anak memerlukan perlindungan khusus, pemulung , kelompok minoritas, korban trafficking, pekerja migran bermasalah sosial.

#### b. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PSKS adalah perseorangan , keluarga, kelompok , dan /atau masyarakat yang dapat berperanserta untuk menjaga, menciptakan, mendukung dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Realisasi indikator persentase cakupan peningkatan PSKS tahun 2012 sebesar 69,95% atau melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 55,67%.

**Tabel 3.24 Realisasi Pemberdayaan PSKS di DIY Tahun 2008-2012**

No	Jenis PSKS	2008	2009	2010	2011	2012
----	------------	------	------	------	------	------

No	Jenis PSKS	2008	2009	2010	2011	2012
1	Pekerja Sosial Profesional	-	-	-	-	41
2	Tenaga kesejahteraan Sosial Masyarakat / PSM	213	78	78	134	121
3	Taruna Siaga Bencana					873
4	LKS / Orsos	53	10	10	88	83
5	Karang Taruna	63	20	10	102	85
6	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)				11	12
7	Keluarga Pioner	-	-	-	-	-
8	Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat	7	5	-	23	25
9	Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS),	-	-	-	-	-
10	Penyuluh Sosial	-	-	-	-	7
11	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK),					78
12	Dunia usaha Yang melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS)	-	130	43	135	100

Sumber: Dinas Sosial DIY

Program yang mendukung pencapaian indikator persentase cakupan penanganan PMKS dan persentase cakupan peningkatan Kapasitas PSKS pada sasaran Terwujudnya Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat antara lain:

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
3. Program Pembinaan Anak Terlantar
4. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
5. Program Pembinaan Panti Asuhan Jompo
6. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PKS, Narkoba dan Penyakit sosial Lainnya
7. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
8. Program Pembinaan Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial (K 3 S).

### Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah DIY dalam mewujudkan Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat diantaranya adalah:

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013

1. Program Pengentasan kemiskinan melalui model Pola Konsentrasi masih belum dapat dilaksanakan secara Optimal karena dukungan dari Kabupaten/Kota maupun SKPD lainya maupun *stakeholder* belum optimal.
2. Hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan, belum terpetakan tingkat perkembangan, keberhasilan atau kegagalannya hal tersebut di sebabkan keterbatasan alokasi anggaran untuk kegiatan monitoring dan evaluasi.

Adapun solusi untuk mengatasi persoalan di atas dengan meningkatkan koordinasi dengan berbagai SKPD dan *stakeholder* untuk mendukung program penanganan kemiskinan dengan pola konsentrasi, melakukan optimalisasi pelaksanaan monev untuk melihat keberhasilan atau kegagalan sebuah kegiatan. Disamping itu untuk mengatasi persoalan tersebut diusulkan solusi sebagai berikut:

1. SKPD yang terkait dalam program pengentasan kemiskinan perlu lebih dioptimalkan untuk mendukung penanganan kemiskinan melalui pola konsentrasi. Bappeda DIY diharapkan menjadi koordinator dalam program tersebut, mengingat program pengentasan kemiskinan melibatkan berbagai SKPD maupun sektor lain yang mendukung terhadap penurunan angka kemiskinan di DIY.
2. Perlu alokasi anggaran yang cukup untuk melakukan monev dan melakukan berbagai kajian agar dapat menggambarkan perkembangan, keberhasilan ataupun kegagalan dari setiap kegiatan penanganan penanganannya PMKS yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial.

### 3.2.7 Sasaran Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Kesehatan bagi Seluruh Masyarakat

Secara umum tujuan pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi pembangunan sumberdaya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi.

Pembangunan kesehatan di DIY dinilai cukup berhasil. Keberhasilan tersebut ditunjukkan dengan didapkannya berbagai penghargaan bidang kesehatan seperti penghargaan Manggala Bhakti Husada Kartika pada tahun 2008 sebagai provinsi dengan derajat kesehatan terbaik nasional dan penghargaan-penghargaan lainnya di bidang kesehatan oleh hampir seluruh kabupaten/kota di DIY.

Indikator kinerja dalam mencapai sasaran terwujudnya peningkatan kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat disajikan pada tabel berikut:



**Gambar 3.16 Kualitas dan akses Kesehatan Masyarakat**

**Tabel 3.25 Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Kesehatan Bagi Seluruh Masyarakat**

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian 2011	2012			Target Akhir RPJMD (2013)	Capaian s/d. 2012 terhadap 2013 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1. Rata-rata umur harapan hidup	Tahun	74	74,4	74	99,46	74,6	99,20
2. Angka Kematian Balita per 1000	per 1.000 KH	19	16	19	84,24	16	84,24

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian 2011	2012			Target Akhir RPJMD (2013)	Capaian s/d. 2012 terhadap 2013 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
kelahiran Hidup							
3. Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran Hidup	per 1.000 KH	17	16	17	94,12	16	94,12
4. Angka Kematian Ibu melahirkan per 100.000 kelahiran Hidup	per 100.000 KH	103	101	103	98,06	100	97,09
5. Prevalensi Gizi Buruk	Persen	0,68	0,81	0,59	137,29	0,79	133,90

Sumber: Dinas Kesehatan DIY, diolah

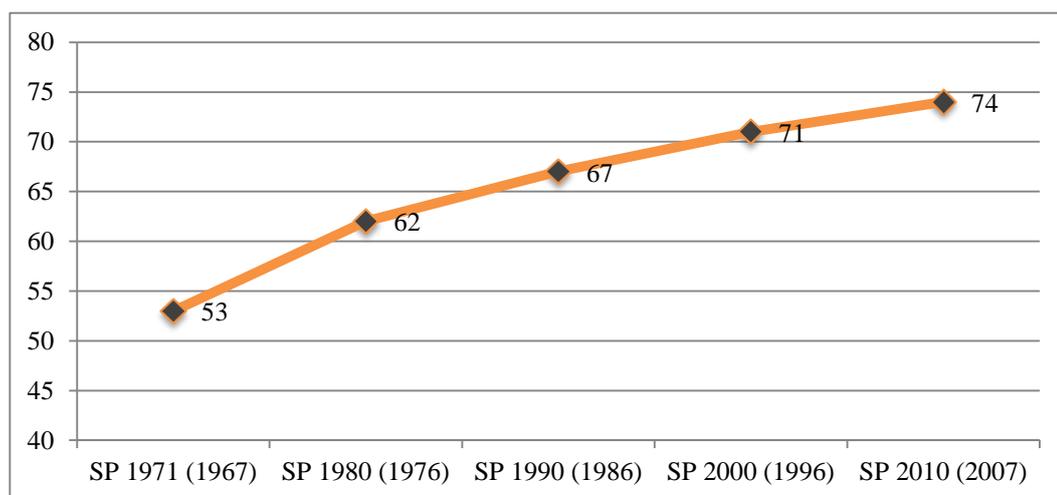
Dilihat dari capaian indikator sasaran terwujudnya peningkatan kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat, secara umum untuk tahun 2012 menunjukkan adanya peningkatan capaian dibandingkan tahun 2011. Adapun penjelasan dari masing-masing capaian indikator tersebut adalah sebagai berikut:

**a. Umur Harapan Hidup (UHH)**

Rata-rata umur harapan hidup penduduk DIY tahun 2012 adalah 74, hampir mencapai angka yang ditargetkan sebesar 74,4 pada tahun tersebut. Capaian tersebut sama dengan tahun 2011. Persentase capaian umur harapan hidup tahun 2012 terhadap target akhir RPJMD (2013) sudah hampir mencapai target yaitu sebesar 99,20%.

Berdasarkan sensus penduduk, rata-rata umur harapan hidup DIY dari tahun 1971 sampai dengan tahun 2010 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 1971 rata-rata umur harapan hidup penduduk DIY mencapai 53. Pada setiap dekade, angka tersebut terus menunjukkan peningkatan. Umur harapan hidup pada tahun 1980 sebesar 62, meningkat pada tahun 1990 menjadi sebesar 67 dan meningkat lagi pada tahun 2000 menjadi 71. Capaian umur harapan hidup DIY tahun 2010 tercatat sebesar 74, angka ini di atas rata-rata nasional sebesar 69.

Selama 30 tahun terakhir, sejak tahun 1971, apabila dirunut telah terjadi peningkatan rata-rata UHH yang cukup signifikan. Pada tahun 1971 rata-rata UHH baru mencapai 53. Angka tersebut setiap dekade menunjukkan peningkatan, UHH pada tahun 1980 mencapai angka 62 pada tahun 1990 menjadi sebesar 67 tahun 2000 mencapai angka 71, dan tahun 2010 tercatat sebesar 74. Capaian angka UHH DIY lebih tinggi dibanding dengan angka UHH Nasional sebesar 69.



Sumber: Dinas Kesehatan DIY

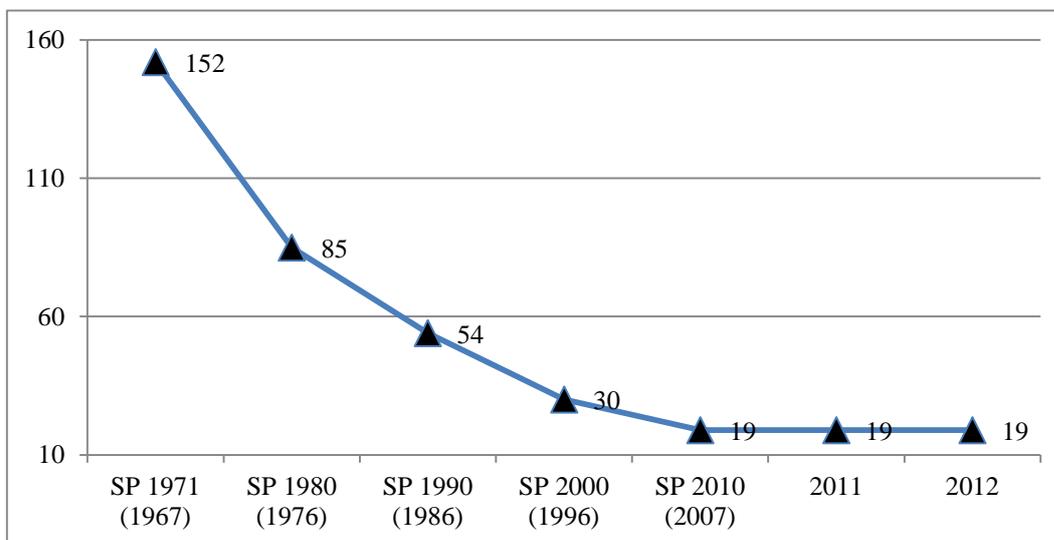
**Gambar 3.17 Grafik Umur Harapan Hidup Penduduk DIY Hasil Sensus Penduduk**

Gambaran perkembangan tersebut memperlihatkan telah terjadinya transisi demografi di Provinsi DIY yang sebenarnya telah dimulai pada masa 90-an yang ditunjukkan dengan semakin meningkatnya penduduk usia lanjut. Hal ini membawa konsekuensi dalam hal peningkatan kualitas hidup penduduk usia lanjut. Peningkatan umur harapan hidup ini dipengaruhi oleh multifaktor yang dalam hal ini kesehatan menjadi salah satu yang berperan penting didalamnya. Beberapa upaya sektor kesehatan dalam peningkatan kualitas penduduk usia lanjut antara lain : Pengembangan pelayanan di sarana kesehatan, peningkatan pelayanan geriatri, Puskesmas Santun Usila, dan Posyandu Usila.

#### **b. Angka Kematian Balita**

Angka kematian balita memiliki kecenderungan penurunan yang cukup baik. Tahun 1971 tercatat tingkat kematian balita yang sangat tinggi

yaitu mencapai 152/1000 kelahiran hidup, angka tersebut secara berangsur turun dan 20 tahun kemudian menjadi 54/1000 kelahiran hidup, tahun 2000 sudah mencapai 30/1000 dan data tahun 2010 telah mencapai angka 19/1000 kelahiran hidup, sama dengan tahun 2011 dan tahun 2012, mencapai 19 per 1000 kelahiran hidup. Persentase capaian indikator angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup tahun 2012 terhadap akhir RPJMD (2013) sudah hampir mencapai target, yaitu sebesar 88,24%.



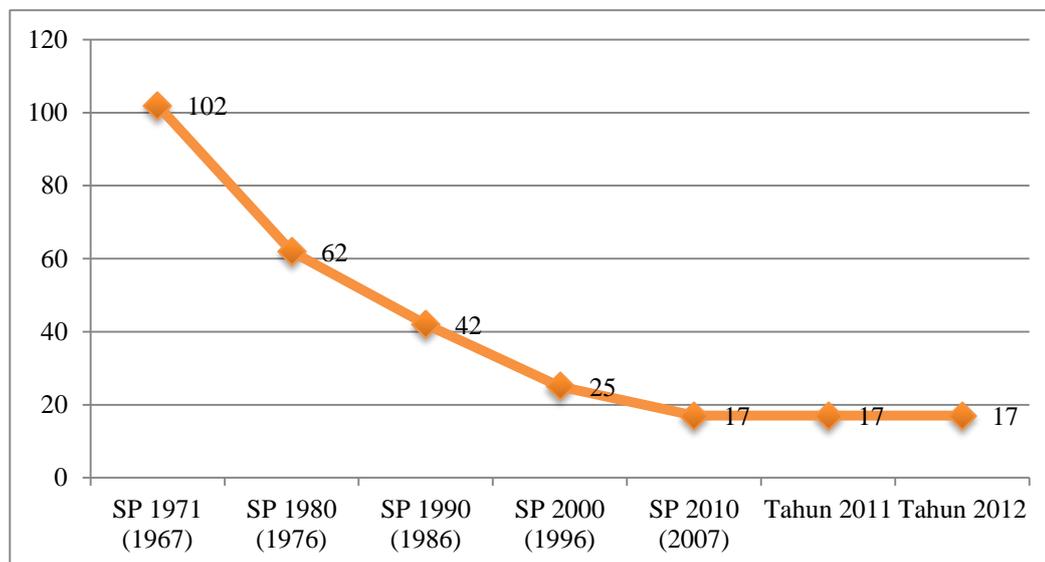
Sumber: Dinas Kesehatan DIY

### Gambar 3.18 Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran

Semakin membaiknya angka kematian balita dari tahun 1971 sampai tahun 2011, menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah DIY dalam menangani kematian balita semakin baik.

#### c. Angka Kematian Bayi

Capaian angka kematian bayi pada tahun 2012 adalah sebesar 17 per 1.000 kelahiran hidup. Capaian ini hampir memenuhi target pada tahun tersebut sebesar 16 per 1.000 kelahiran hidup. Capaian ini sama dengan capaian angka kematian bayi tahun 2011. Capaian ini jauh di bawah angka nasional sebesar 34 per 1.000 kelahiran hidup (SDKI 2007). Apabila dirunut dari sebelum tahun 2010, angka kematian bayi di DIY mengalami penurunan yang cukup signifikan.



Sumber: Dinas Kesehatan DIY

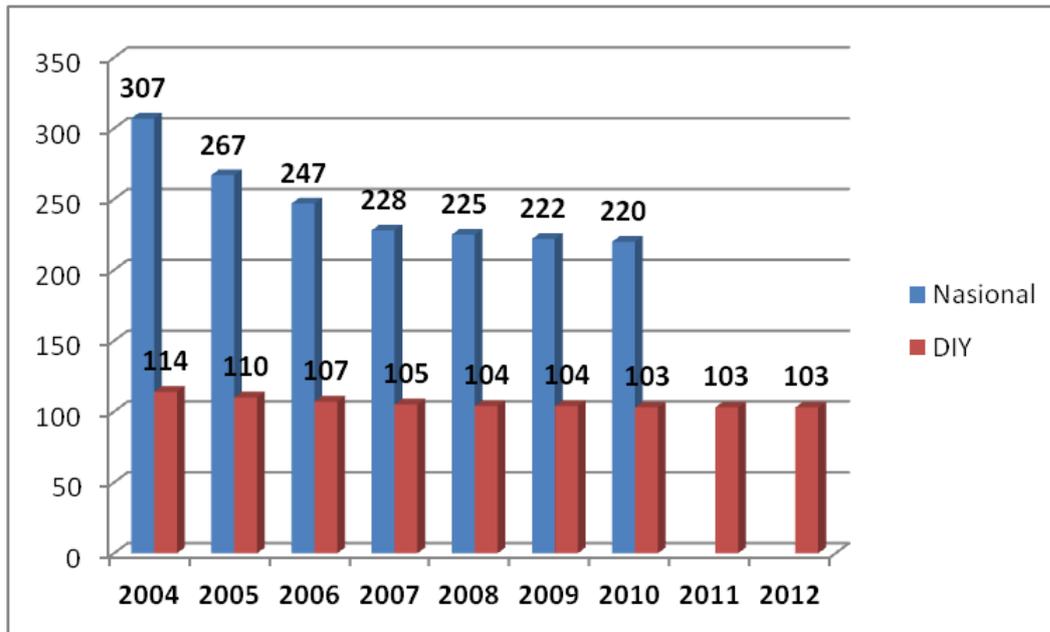
**Gambar 3.19 Angka Kematian Bayi (IMR) per 1000 Kelahiran Hidup di DIY SP 1971 (1967) s/d. 2012**

Persentase capaian indikator angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup tahun 2012 terhadap akhir RPJMD (2013) sudah hampir mencapai target, yaitu sebesar 94,12%. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor antara lain : tingginya persalinan oleh tenaga kesehatan, kemudahan terhadap akses pelayanan kesehatan dan pemahaman masalah kesehatan masyarakat yang semakin meningkat.

#### d. Angka Kematian Ibu (AKI)

Capaian realisasi AKI tahun 2012 sebesar 103/100.000, angka tersebut sama dengan angka tahun 2011. Dari tahun 2004 sampai tahun 2011, tercatat AKI di DIY menunjukkan penurunan yang cukup signifikan. Tahun 2008 angka kematian ibu di DIY berada pada angka 104/100.000 menurun dari 114/100.000 pada tahun 2004. AKI DIY lebih rendah dibandingkan dengan AKI nasional. Pada tahun 2010, AKI DIY menunjukkan angka sebesar 103 lebih rendah dari AKI nasional sebesar 220. AKI di DIY menempati peringkat terbaik secara nasional. Adanya penurunan AKI ini disebabkan banyak faktor, antara lain faktor persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih, kemudahan terhadap akses pelayanan kesehatan, dan kesadaran ibu dalam memeriksakan kandungannya.

Meskipun AKI cenderung menurun, namun jika diamati laju penurunannya selama periode 5 tahun terakhir terlihat melandai/kurang tajam.



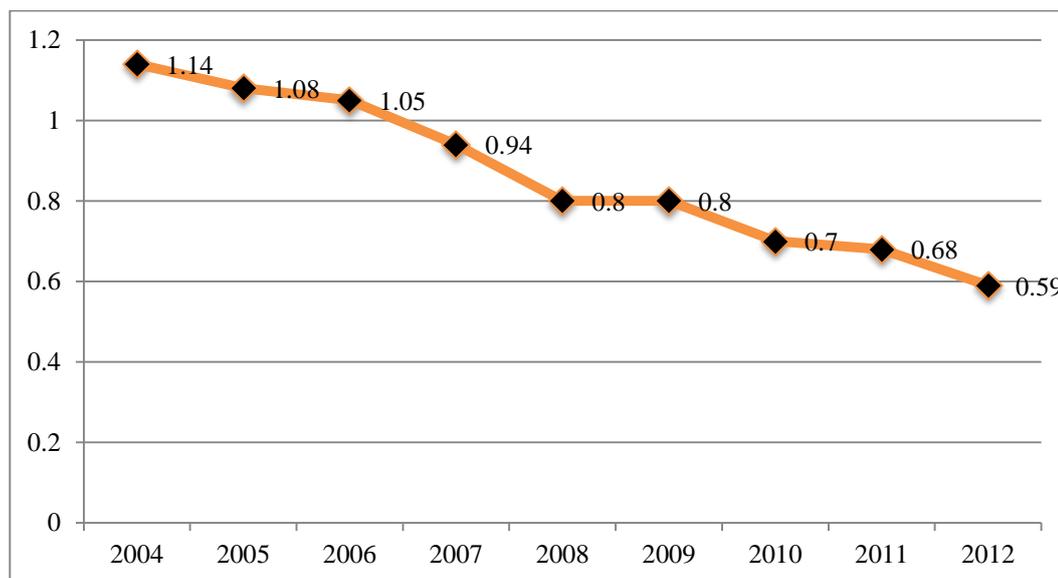
Sumber : Dinas Kesehatan DIY

**Gambar 3.20 Angka Kematian Ibu DIY dan Nasional Tahun 2004-2011**

Persentase capaian indikator AKI melahirkan per 100.000 kelahiran Hidup tahun 2012 terhadap akhir RPJMD (2013) sudah hampir mencapai target, yaitu sebesar 97,09%. Hal ini menunjukkan perbaikan kondisi kesehatan ibu.

**e. Prevalensi Gizi Buruk**

Realisasi prevalensi gizi buruk pada tahun 2012 sebesar 0,59% dari target yang ditetapkan sebesar 0,81%. Capaian realisasi tersebut menunjukkan angka yang membaik dibandingkan tahun 2011 yaitu sebesar 0,68%.



Sumber: Dinas Kesehatan DIY

**Gambar 3.21 Prevalensi Gizi Buruk di DIY Tahun 2004-2012**

Angka gizi buruk di DIY terus mengalami penurunan atau cenderung membaik. Angka tersebut terus menunjukkan kecenderungan penurunan hingga tahun 2012. Persentase capaian indikator prevalensi gizi buruk tahun 2012 terhadap akhir RPJMD (2013) sudah melebihi dari target, yaitu sebesar 133,90%. Hal ini menunjukkan semakin baiknya kondisi pangan, terutama kebutuhan gizi masyarakat. Beberapa upaya sektor kesehatan dalam peningkatan status gizi antara lain dengan penyediaan rumah pemulihan gizi, pemberian makanan tambahan, dan peningkatan peran kader gizi di posyandu dalam deteksi dini balita gizi buruk. Walaupun angka prevalensi gizi buruk di DIY sudah rendah, tidak menutup kemungkinan masih adanya kasus-kasus gizi buruk di DIY. Untuk itu tetap diharapkan seluruh elemen masyarakat, birokrat dan swasta tetap waspada serta dapat bersama-sama meningkatkan komitmennya untuk menurunkan prevalensi gizi buruk, minimal mempertahankan.

Jika dilihat dari capaian indikator-indikator kesehatan tersebut di atas, DIY masih menempati urutan tertinggi. Hasil Riset Kesehatan Dasar Nasional Tahun 2010 menempatkan DIY sebagai provinsi dengan indikator kesehatan terbaik dan paling siap dalam mencapai target *Millenium Development Goals* (MDG's).

Program-program yang mendukung pencapaian indikator pada sasaran terwujudnya peningkatan kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat antara lain:

1. Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat
2. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
3. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
4. Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Manular
5. Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
6. Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
7. Program Sediaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan Dan Pengawasan Makanan
8. Program Penanganan Pembiayaan Kesehatan Penduduk Miskin
9. Program Pelayanan Kesehatan
10. Program Sistem Informasi Kesehatan
11. Program Pendidikan Kesehatan Dan Sumberdaya Kesehatan
12. Program Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan
13. Program Pengembangan Manajemen Kesehatan
14. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD
15. Program Kesehatan Lansia
16. Program Kesehatan Balita
17. Program Kesehatan Bayi
18. Program Kesehatan Ibu
19. Program Kesehatan Anak dan Remaja
20. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD RS Grhasia

### Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah DIY diantaranya adalah:

1. Persoalan pembangunan kesehatan tidak hanya semata-mata dapat diselesaikan sektor kesehatan saja, sehingga perlu dukungan lintas sektor. Hal ini terkait dengan tantangan kesehatan yang semakin variatif dan kompleks dari tahun ke tahun. Dalam hal ini peran sektor swasta dan pemerintah di luar sektor kesehatan dalam pembangunan berwawasan kesehatan dirasa masih belum optimal.
2. Kasus dan kematian akibat penyakit tidak menular khususnya *Cardiovascular disease*, kanker dan obstruksi paru semakin berkembang
3. Masih terdapat prevalensi gizi buruk di DIY. Hal tersebut sejalan dengan realita bahwa kemiskinan di DIY masih cukup tinggi. Selain itu terjadi kecenderungan meningkatnya prevalensi gizi kurang dan gizi lebih.
4. Implementasi Pola Hidup Bersih dan Sehat untuk kesiapsiagaan menghadapi ancaman risiko penyakit masih belum sepenuhnya baik. Termasuk didalamnya adalah pola makan keluarga, kesehatan

lingkungan (sanitasi dan akses air bersih), pencegahan penyakit menular, aktifitas fisik, penggunaan obat, jaminan kesehatan dan lain sebagainya yang perlu ditingkatkan.

5. Jaminan kesehatan penduduk kelas menengah dan hampir miskin masih rendah.
6. Implementasi Jaminan Kesehatan Semesta (Jamkesta) di DIY memerlukan dukungan dari berbagai pihak.
7. Sistem rujukan kesehatan belum berjalan dengan baik. Hal tersebut mengakibatkan kasus rawat jalan dan rawat inap di rumah sakit semakin meningkat.
8. Kemampuan anggaran yang belum merata berpengaruh pencapaian target pembangunan kesehatan.
9. Kurangnya pengetahuan masyarakat umum tentang masalah kesehatan jiwa (kesehatan jiwa bukan hanya psikotik) dan deteksi dini.

Solusi yang diupayakan Pemerintah DIY untuk mengatasi permasalahan di atas adalah:

1. Berbagai upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan di DIY sudah menjadi komitmen bersama seluruh *stakeholders* antara lain dengan menggerakkan dan memberdayakan sektor swasta dan masyarakat.
  - a. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan dan monitoring pembangunan kesehatan di DIY.
  - b. Mendorong masyarakat mandiri dalam pemenuhan kebutuhan dan kesinambungan pelayanan kesehatan
2. Mengurangi risiko terjadinya penyakit tidak menular melalui:
  - a. Peningkatan upaya pemerintah dalam pemberantasan dan pencegahan penyakit.
  - b. Peningkatan peran lembaga pemerintah, non pemerintah dan swasta dalam kegiatan mengurangi faktor risiko.
3. Dalam hal penanggulangan permasalahan gizi dilakukan koordinasi dengan sektor terkait (sektor Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan, PKK dan lain-lain) dan meningkatkan peran swasta serta peningkatan pemberdayaan masyarakat.
4. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan upaya kesehatan berbasis masyarakat melalui: Posyandu, Desa Siaga, Desa Siaga Sehat Jiwa, organisasi keagamaan dan lembaga swadaya masyarakat.
5. Pengembangan sistem jaminan pelayanan kesehatan menuju Jamkesta melalui berbagai strategi diantaranya pembiayaan keluarga miskin, pengembangan sistem premi asuransi bagi

- penduduk non miskin.
6. Meningkatkan upaya koordinasi dan advokasi dengan pemerintah kabupaten/kota serta pihak-pihak terkait.
  7. Menyusun sistem rujukan dengan melibatkan penyelenggara pelayanan kesehatan serta *stakeholders* terkait.
  8. Melakukan advokasi kepada Pemerintah, pemerintah Provinsi serta Kabupaten/kota.
  9. Penyuluhan, promosi, iklan dan pelaksanaan kegiatan DSSJ (Desa Siaga Sehat Jiwa)

### 3.2.8 Sasaran Terwujudnya Kepariwisataan yang Berdaya Saing Tinggi

Pariwisata merupakan salah satu pilar pembangunan DIY selain pendidikan dan budaya. Banyaknya objek dan daya tarik wisata di DIY telah menyerap kunjungan wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara. Bentuk wisata di DIY meliputi wisata MICE (*Meeting, Incentive, Convention and Exhibition*), wisata budaya, wisata alam, wisata minat khusus dan berbagai fasilitas wisata lainnya, seperti *resort*, hotel, dan restoran. Keanekaragaman upacara keagamaan dan budaya dari berbagai agama serta didukung oleh kreativitas seni dan keramahmatan masyarakat, membuat DIY mampu menciptakan produk-produk budaya dan pariwisata yang menjanjikan.



Gambar 3.22 Tamansari Pendukung Pariwisata Yogyakarta

Sektor pariwisata menjadi motor kegiatan perekonomian DIY yang secara umum bertumpu pada sektor jasa-jasa; perdagangan, hotel dan

restoran; serta pertanian karena mampu memberi efek pengganda (*multiplier effect*) dengan meningkatnya kunjungan wisatawan.

Jumlah Obyek Wisata dan Sarana Pendukung Pariwisata lainnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.26 Jumlah Obyek Wisata dan Sarana Pendukung Pariwisata di DIY**

Uraian	Kab. Sleman	Kab. Bantul	Kab. Gunung Kidul	Kab. Kulonprogo	Kota Yogyakarta	Total
Obyek Wisata	43	40	23	17	43	166
Biro Perjalanan Wisata (BPW)	145	11	3	4	161	324
Rumah Makan/Restoran/Cafe	246	13	51	18	424	752

Sumber : Statistik Pariwisata DIY 2012

Seiring membaiknya kondisi perekonomian masyarakat dan meningkatnya citra positif DIY di mata wisatawan maka kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara ke DIY mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Tahun 2011 jumlah wisatawan yang berkunjung ke DIY sejumlah 1.607.194 orang sedangkan pada tahun 2012 meningkat menjadi 2.215.832 orang atau meningkat 37,86% dari tahun 2011.

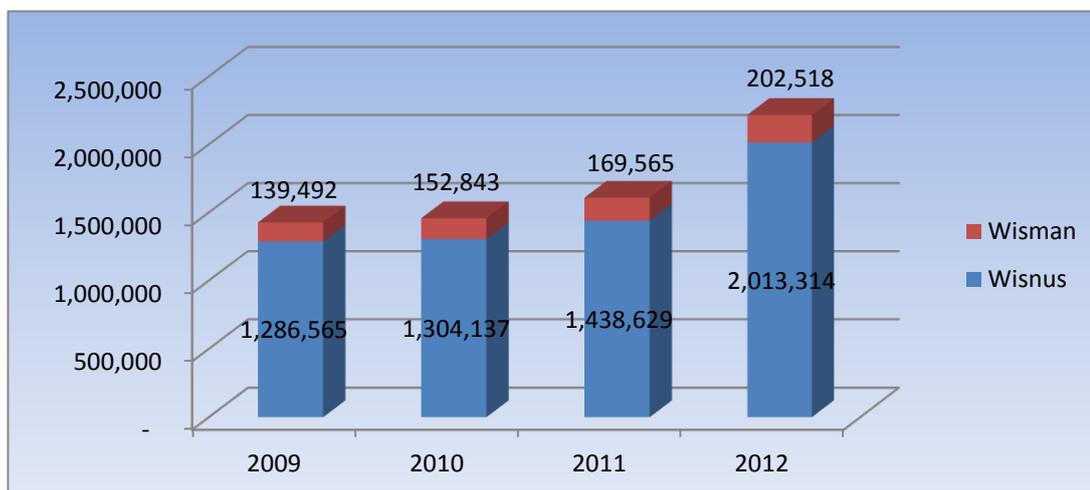
Kebijakan sektor Pariwisata didukung dengan diundangkannya Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No.1 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012 – 2025. Dengan terbitnya Perda ini maka *stakeholder* pariwisata baik instansi pemerintah maupun swasta memiliki payung hukum yang jelas dan dapat mensinergikan program/kegiatan yang terarah dan terukur untuk membangun kepariwisataan DIY. Selain itu, dengan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta semakin menguatkan citra Yogyakarta sebagai Daerah yang Istimewa untuk dikunjungi sehingga indikator capaian kinerja sektor Pariwisata juga mengalami peningkatan. Lama tinggal dan tingkat hunian kamar mengalami peningkatan dibanding tahun 2011. Hal ini juga berdampak pada jumlah penyelenggaraan MICE dan Pendapatan Asli Daerah sektor pariwisata. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.27 Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Kepariwisata yang Berdaya Saing Tinggi, 2011-2012

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian 2011	2012			Target Akhir 2013	% Capaian 2012 terhadap 2013
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Jumlah wisatawan nusantara	orang	1.437.629	1.692.642	2.013.314	118,9	1.861.906	108,13
Jumlah wisatawan mancanegara	orang	169.565	188.369	202.518	107,5	207.205	97,74
Rata-rata lama tinggal wisnus	hari	1,72	2,4	1,90	79,2	1,85	102,70
Rata-rata lama tinggal wisman	hari	1,92	2,8	2,03	72,5	2,2	92,27
Jumlah MICE	kali/thn	8.693	5.990	12.904	215,43	6.588	195,87

Sumber: Dinas Pariwisata DIY, diolah

Tahun 2012 jumlah wisatawan yang berkunjung ke DIY sebanyak 2.215.832 orang dengan rincian Wisman sebanyak 202.518 orang atau naik 19,43% dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan Wisnus sebanyak 2.013.314 orang atau naik 40,04%. Jumlah kenaikan wisatawan baik mancanegara maupun nusantara ini termasuk yang tertinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya selama periode 2009-2011. Meskipun persentase kenaikan pada tahun 2012 lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya apabila dibandingkan dengan target akhir di 2013, khususnya untuk jumlah wisatawan mancanegara belum memenuhi target karena baru pada angka capaian 97,74% dari yang ditargetkan sebesar 207.205 orang. Untuk jumlah kunjungan wisatawan nusantara sudah melebihi dari target akhir RPJMD dengan capaian 108,13%.



Sumber : Statistik Pariwisata DIY 2012

### Gambar 3.23 Jumlah Kunjungan Wisatawan Tahun 2009-2012

Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan (*Length of Stay (LOS)*) untuk Wisman tahun 2012 sebesar 2,03 hari sehingga masih jauh dari yang ditargetkan 2,8 hari atau dengan capaian 72,5%. Angka capaian ini apabila dibandingkan dengan capaian 2011 sebesar 1,92 hari mengalami peningkatan sebesar 5,73%. Capaian sebesar 2,03 hari apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 2,2 hari pada persentase capaian sebesar 92,97%.

Capaian lama tinggal Wisnus 1,90 hari atau dengan capaian 79,2% dari target sebesar 2,4 hari. Capaian 1,90 hari kalau dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebenarnya sudah melebihi target dengan capaian 102,70%.

Untuk mencapai rata-rata lama tinggal wisatawan sebesar 2,60 hari masih diperlukan berbagai upaya antara lain pengembangan destinasi baru khususnya untuk wisata malam yang belum digarap dengan serius. Dengan pengembangan berbagai atraksi wisata pada malam hari, diharapkan dapat memperpanjang lama tinggal wisatawan yang berkunjung ke DIY.

**Tabel 3.28 Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan Tahun 2009-2012**

Akomodasi	Tahun							
	2009		2010		2011		2012	
	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisman	Wisnus
<i>Hotel Melati</i>	1,88	1,76	2,06	1,82	1,74	1,88	1,98	1,96
<i>Hotel Bintang</i>	1,91	1,70	2,24	2,02	1,70	1,91	2,09	1,84

Sumber: Statistik Pariwisata DIY 2012

Tahun 2011 tingkat hunian hotel bintang sebesar 57,43% dan hotel melati sebesar 33,24% (rata-rata 45,33 %), meningkat pada tahun 2012 menjadi 65,27% untuk hotel bintang dan 45,76% untuk hotel melati (rata-rata 55,51%).

Wisata MICE yang semakin berkembang pada beberapa tahun terakhir ini juga menjadi salah satu wisata andalan dalam memberikan kontribusi/pemasukan bagi PAD. Pada tahun 2011 pelaksanaan MICE di DIY sebanyak 8.963 kali sedangkan pada tahun 2012 sebanyak 12.904 kali atau naik 48,44%. Capaian 2012 sudah melebihi dari target akhir sebesar 6.588 atau dengan capaian 195,87%. Pelaksanaan MICE yang jauh melebihi target dikarenakan semakin banyak hotel berbintang maupun non bintang yang menyediakan fasilitas untuk memenuhi permintaan penyelenggaraan MICE sehingga membuat Yogyakarta semakin diminati wisatawan, pebisnis dan pemakai MICE lainnya, baik nasional maupun internasional. Dengan perkembangan pelaksanaan MICE yang luar biasa ini target kedepan perlu ditinjau kembali.



**Gambar 3.24 Penyelenggaraan MICE Tahun 2009-2012**

### Permasalahan dan Solusi

#### *Permasalahan*

Permasalahan bidang Kepariwisata DIY yang dihadapi selama tahun 2012 adalah:

1. Belum memadainya infrastruktur, sarana prasarana wilayah dan aksesibilitas dalam rangka menarik wisatawan untuk berkunjung ke Yogyakarta (masih terbatasnya jumlah penerbangan internasional ke Yogyakarta);
2. Belum optimalnya penyelenggaraan event-event kepariwisataan dalam rangka meningkatkan daya tarik wisata dan lama tinggal wisatawan.
3. Kurangnya pengembangan berbagai daya tarik wisata baru dan pemeliharaan berbagai daya tarik wisata yang sudah ada.
4. Belum gencarnya upaya pemasaran (promosi) pariwisata di dalam negeri maupun luar negeri baik langsung maupun tidak langsung.
5. Belum maksimalnya pelayanan kenyamanan dan keamanan bagi wisatawan baik di tempat umum maupun di Daya Tarik Wisata.
6. Masih kurang intensifnya jejaring, kerjasama dan koordinasi yang sinergis (keterpaduan) antar pelaku pariwisata (stakeholder)
7. Belum optimalnya pemberdayaan/keterlibatan masyarakat di sekitar daya tarik wisata
8. Masih kurangnya pemahaman dan pengamalan tentang Sapta Pesona dan Sadar Wisata

9. Belum memadainya tingkat pemenuhan kualitas SDM Pariwisata yang profesional dan belum optimalnya peran/fungsi kelembagaan kepariwisataan yang ada.

### *Solusi*

Dengan semakin kondusifnya situasi dan kondisi DIY maka dalam pemecahan berbagai permasalahan kepariwisataan DIY tersebut diatas diperlukan berbagai upaya, antara lain:

1. Perlu diupayakan pemenuhan infrastruktur, sarana prasarana wilayah dan aksesibilitas yang memadai dalam rangka menarik wisatawan untuk berkunjung ke Yogyakarta;
2. Perlu ditingkatkan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan event-event kepariwisataan (lokal, nasional maupun internasional) dalam rangka meningkatkan daya tarik wisata dan lama tinggal wisatawan.
3. Perlu ditingkatkan pengembangan berbagai daya tarik wisata baru dan pemeliharaan berbagai daya tarik wisata yang sudah ada.
4. Perlu langkah-langkah baru dalam pemasaran (promosi) pariwisata di dalam negeri maupun luar negeri baik langsung (partisipasi even maupun pameran) maupun tidak langsung (melalui media massa dalam dan luar negeri).
5. Perlu segera diupayakan peningkatan kuantitas penerbangan internasional ke Yogyakarta dan kemampuan dukungan sarpras bandara Internasional Adi Sucipto.
6. Perlu ditingkatkan pelayanan kenyamanan dan keamanan bagi wisatawan baik di tempat umum maupun di Daya Tarik Wisata oleh seluruh stakeholder pariwisata DIY.
7. Perlu diintensifkan jejaring, kerjasama dan koordinasi yang sinergis (keterpaduan) antar pelaku pariwisata (stakeholder) baik antar pelaku di dalam maupun luar DIY
8. Perlu ditingkatkan pemberdayaan masyarakat dengan meningkatkan peran aktif/keterlibatan masyarakat di sekitar daya tarik wisata
9. Perlu ditingkatkan pemahaman dan pengamalan kesadaran akan berwisata dan melaksanakan nilai-nilai sapta pesona (bersih, rapi, indah, sejuk, aman, nyaman dan kenangan) dalam pembangunan/pengembangan pariwisata.
10. Perlu terus ditingkatkan kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata yang profesional dan peningkatan penguatan/pemantapan peran dan fungsi kelembagaan kepariwisataan yang ada.

### 3.2.9 Sasaran Terwujudnya Peningkatan Ketahanan Ekonomi Masyarakat



**Gambar 3.25 Kerajinan Pendukung Pertumbuhan Ekonomi**

Untuk mewujudkan komitmen pemerintah dalam menciptakan iklim yang kondusif dalam memberikan pelayanan dan kepastian berusaha bagi investor dan pencapaian salah satu misi RPJMD, yaitu "Menguatkan fondasi kelembagaan dan memantapkan struktur ekonomi daerah yang berbasis pariwisata dan potensi lokal dengan semangat kerakyatan menuju masyarakat yang sejahtera", dengan sasaran "Terwujudnya peningkatan ketahanan ekonomi

masyarakat", maka dukungan penanaman modal khususnya penanaman modal non-pemerintah/swasta sangat diperlukan.

Dalam upaya mencapai sasaran terwujudnya peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat tersebut, indikator kinerjanya adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.29 Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Peningkatan Ketahanan Ekonomi Masyarakat**

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian 2011	2012			Target Akhir RPJMD (2013)	Capaian s/d. 2012 terhadap 2013 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1. Persentase Pertumbuhan PDRB	persen	5,17	5,2 - 5,7	5,32	102,31%	5,4-5,9	98,52
2. Indeks Ketimpangan	angka indeks	0,314	0,310	0,314	98	0,306	97,45

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian 2011	2012			Target Akhir RPJMD (2013)	Capaian s/d. 2012 terhadap 2013 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Regional							
3. Rata-rata PDRB per kapita							
a) ADH Konstan	juta	6,35	6,56	6,67	101,68	6,88	96,95
b) ADH Berlaku	juta	14,85	14,61	16,31	111,64	16,07	101,49
4. Persentase pertumbuhan investasi PMA	persen	52,46	1,55	3,4	219,35	4,83	70,39
5. Persentase pertumbuhan investasi PMDN	persen	22,72	25,45	21,3	83,69	5,74	371,08

Sumber: BKPM Provinsi DIY 2013, diolah

Ket: \* Angka Sementara

Capaian sasaran peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat menunjukkan kinerja yang baik. Hal tersebut ditunjukkan oleh capaian indikator sasaran yang rata-rata melebihi dari target di tahun 2012. Penjelasan capaian masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

#### a. Persentase Pertumbuhan PDRB

Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat DIY salah satunya ditunjukkan dengan peningkatan pertumbuhan PDRB. Persentase pertumbuhan PDRB pada tahun 2012 realisasinya sebesar 5,32% atau sebesar 105,31% dari target yang ditetapkan, yaitu antara 4,9% sampai 5,4%. Capaian realisasi tahun 2012 tersebut lebih tinggi dibandingkan capaian pada tahun 2011 yang sebesar 5,17%.

Kontribusi sektor pembentuk PDRB tahun 2012 di DIY tidak mengalami perubahan signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2011. Meskipun kontribusi beberapa sektor mengalami perubahan, namun masih didominasi oleh sektor perdagangan, jasa-jasa, pertanian, dan industri pengolahan. Pada tahun 2012 kontribusi sektor jasa-jasa menempati urutan tertinggi dengan nilai kontribusi sebesar 20,23%, kemudian diikuti oleh sektor perdagangan, hotel, dan restoran (20,09%), sektor pertanian (14,65%), sektor industri pengolahan (13,35%), sektor konstruksi (10,85%), sektor keuangan, real estat, dan jasa perusahaan (10,30%), sektor pengangkutan dan komunikasi (8,60%), sektor listrik, gas dan air bersih (1,28%), dan kontribusi paling kecil adalah sektor

pertambahan dan penggalian dengan nilai kontribusi (0,67%). Kontribusi sektoral pada tahun 2012 mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun 2011 kecuali sektor pertanian dan sektor industri pengolahan.

Rata-rata PDRB per kapita Atas Dasar Harga Konstan untuk tahun 2012 sebesar 6,67 juta atau terjadi peningkatan sebesar 0,32 juta dibandingkan tahun 2011. Sementara PDRB per kapita pada tahun 2010 sebesar 6,09 juta. Hal ini menunjukkan bahwa PDRB per kapita DIY terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan tersebut merupakan akumulasi dari peningkatan yang terjadi di sektor pembentuk PDRB. Di sisi lain, rata-rata PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku untuk tahun 2012 sebesar 16,31 juta atau terjadi peningkatan sebesar 1,46 juta dibandingkan tahun 2011. PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku juga terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Persentase capaian indikator persentase pertumbuhan PDRB dan rata-rata PDRB per kapita Atas Dasar Harga Konstan tahun 2012 terhadap akhir RPJMD (2013) hampir mendekati target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 98,52% dan 96,95%. Hal ini berarti kemungkinan besar di akhir RPJMD (2013) dapat tercapai seperti target yang ada. Sementara itu, persentase capaian indikator persentase pertumbuhan PDRB dan rata-rata PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku tahun 2012 telah melampaui sebesar 1,49% terhadap target akhir RPJMD (2013).

#### **b. Indeks Ketimpangan Regional**

Untuk melihat ketimpangan/pemerataan regional, indikator yang dipakai adalah Indeks Wiliamson (IW). Nilai IW ini berkisar antara 0 hingga 1. Semakin mendekati satu, maka distribusi pendapatan semakin tidak merata, sebaliknya semakin mendekati nol berarti distribusi pendapatan semakin merata. Angka indeks ketimpangan regional tahun 2011 menunjukkan penurunan dibandingkan pada tahun 2010. Pada tahun 2010 angka indeks ketimpangan regional mencapai 0,318, sedangkan tahun 2011 sebesar 0,314, yang berarti ada sedikit peningkatan dalam hal distribusi pendapatan yang semakin merata. Angka indeks ketimpangan regional untuk tahun 2011 sesuai dengan target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 0,314. Persentase capaian indikator indeks ketimpangan regional tahun 2011 terhadap akhir RPJMD (2013) hampir mencapai target, yaitu sebesar 99,97%.

#### **c. Persentase pertumbuhan investasi PMA dan PMDN**

Pertumbuhan investasi PMDN pada tahun 2011 mencapai 22,72%, sedangkan pada tahun 2012 pertumbuhannya sedikit mengalami penurunan menjadi 21,3%. Realisasi persentase pertumbuhan investasi PMA pada tahun 2012 walaupun telah melebihi target yang telah

ditetapkan namun mengalami penurunan dari yang semula 52,46% pada tahun 2011 menjadi 3,4% pada tahun 2012.

Jika dilihat dari keseluruhan pertumbuhan investasi PMA dan PMDN di DIY pada tahun 2012, capaiannya adalah sebesar 9,85% dengan total nilai Rp. 7.056.066.141.759,- Capaian pertumbuhan investasi (PMA/PMDN) tahun 2012 tersebut lebih kecil bila dibandingkan dengan capaian tahun 2011 yang sebesar 40,22%, namun secara *time-series* dapat diketahui bahwa nilai realisasi investasi DIY terus mengalami peningkatan. Nilai realisasi dan pertumbuhan investasi PMA/PMDN di DIY selama kurun waktu tahun 2007 sampai dengan tahun 2012, disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.30 Realisasi Investasi PMA/PMDN Provinsi DIY Tahun 2007-2012

Tahun	Investasi PMDN (Rp)	Investasi PMA (Rp)	PMA+PMDN (Rp)	Pertumbuhan (Rp)	Pertumbuhan (%)
2007	1.801.533.851.707	2.278.166.388.062	4.079.700.239.769	55.033.372.075	1,37
2008	1.806.426.455.845	2.415.461.744.857	4.221.888.200.702	142.187.960.933	3,49
2009	1.882.514.536.845	2.508.131.163.857	4.390.645.700.702	168.757.500.000	3,99
2010	1.884.923.869.797	2.696.046.957.447	4.580.970.827.244	190.327.126.542	4,33
2011	2.313.141.695.784	4.110.436.324.224	6.423.578.020.008	1.842.607.192.000	40,22
2012	2.805.944.605.930	4.250.121.535.829	7.056.066.141.759	632.488.121.751	9,85

Sumber: BKPM DIY 2013

Persentase capaian indikator persentase pertumbuhan investasi PMA pada tahun 2012 belum dapat memenuhi target akhir RPJMD pada tahun 2013 karena baru mencapai 70,39%. Sedangkan persentase pertumbuhan investasi PMDN tahun 2012 melebihi target akhir RPJMD (2013), yaitu sebesar 371,08%.

Pemulihan kondisi ekonomi, adanya renovasi, peremajaan dan restrukturisasi pasca erupsi Merapi di Provinsi DIY yang cepat juga memberikan dampak positif bagi peningkatan investasi. Sektor-sektor yang memberikan sumbangan pertumbuhan investasi meliputi sektor sekunder dan tersier yang berkembang cukup signifikan antara lain berupa jasa perhotelan, restoran, industri pengolahan, perdagangan, dan pengangkutan. Rincian perusahaan yang merealisasikan investasinya di DIY sejumlah 233 perusahaan (terdiri dari 122 PMA dan 111 PMDN) dari total 348 perusahaan yang tercatat, dengan serapan tenaga kerja sebanyak 38.916 TKI serta 142 TKA.

Program yang mendukung capaian indikator pada sasaran Terwujudnya Peningkatan Ketahanan Ekonomi Masyarakat antara lain:

1. Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah
2. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
3. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
4. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UKM
5. Program Pengembangan IKM
6. Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial
7. Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Kreatif
8. Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional
9. Program Peningkatan Pengembangan Ekspor
10. Program Perlindungan konsumen dan Pengamanan Perdagangan
11. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
12. Program Persaingan Usaha
13. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
14. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian
15. Program Peningkatan Produksi Pertanian
16. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
17. Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan
18. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
19. Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi
20. Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi
21. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

22. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
23. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
24. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
25. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Laut, Air Payau dan Air Tawar

### Permasalahan dan Solusi

Adapun permasalahan mendasar yang dihadapi dalam bidang penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi potensi investasi sektor unggulan di DIY masih memerlukan telaah lebih lanjut.
2. Peluang-peluang investasi yang sudah ada belum dipaparkan secara detail dan jelas.
3. Permasalahan lahan, di mana umumnya masalah klasik yang dihadapi oleh investor adalah minimnya ketersediaan tanah/lahan terkait dengan luas wilayah DIY yang sempit dan harga tanah di Yogyakarta yang cenderung semakin mahal.
4. Belum adanya aturan khusus terkait peningkatan iklim investasi di DIY.
5. Kurangnya koordinasi antar *stakeholders* penanaman modal di DIY dalam melaksanakan perencanaan investasi (sebagai contoh: program pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kulon progo yang belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan)
6. Perubahan jadwal dan tempat pelaksanaan pameran investasi yang dikoordinir oleh BKPM RI.
7. Belum semua perusahaan (investor) yang terdaftar, merealisasikan investasinya di DIY.
8. Aliran listrik yang tidak stabil (sering padam secara mendadak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu), menyebabkan beberapa perusahaan mengalami kerugian karena gangguan proses produksi dan komunikasi.

Untuk mengatasi beberapa permasalahan tersebut diatas, ditempuh cara-cara:

1. Dilakukan kajian dan pemetaan terkait potensi investasi sektor unggulan yang ada di DIY.

2. Dilaksanakan kajian pra *feasibility study* (pra FS) dan FS untuk peluang-peluang investasi yang akan ditawarkan.
3. Koordinasi dengan pihak terkait penyediaan lahan dan upaya melalui forum/kajian *landbanking*.
4. Pelaksanaan kajian dan ditindaklanjuti dengan penyusunan regulasi terkait peningkatan iklim investasi di DIY.
5. Pelaksanaan koordinasi secara lebih intensif antar semua *stakeholder* investasi baik pusat maupun daerah dengan tujuan sinkronisasi perencanaan investasi (terkait KEK Kulon progo, telah dilaksanakan Forum Koordinasi dan Perencanaan Peluang Investasi 2011 dengan tema: Perencanaan Penanaman Modal di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)).
6. Koordinasi intensif dengan BKPM RI terkait waktu dan jadwal pelaksanaan pameran investasi yang diikuti Provinsi DIY agar perencanaan anggaran dapat sesuai.
7. Perlunya kegiatan pembinaan dan pemantauan perusahaan secara lebih intensif untuk memfasilitasi kesulitan terkait realisasi investasinya (pembentukan *Task Force/Advokasi/Desk* atau dengan jalan memfasilitasi pertemuan antara BKPM RI dengan perusahaan dan dengan PDKPM (Perangkat Daerah Kab/Kota Penanaman Modal)).
8. Melaksanakan forum bersama perusahaan dan instansi terkait, sebagai upaya mengatasi hambatan dan permasalahan yang dialami perusahaan-perusahaan penanaman modal di DIY.

### 3.2.10 Sasaran Terwujudnya Ketersediaan dan Kecukupan Konsumsi Pangan yang meliputi Energi dan Protein untuk Masyarakat

Ketahanan pangan merupakan agenda penting di dalam pembangunan ekonomi. Keberhasilan ketahanan pangan di Provinsi DIY sebagai wilayah yang secara agregat surplus pangan telah menjadi tolok ukur keberhasilan ketahanan pangan dan gizi nasional. Oleh karena itu pemerintah DIY terus berupaya memacu pembangunan ketahanan pangan melalui program dan kegiatan yang benar-benar mampu memperkokoh perwujudan ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, pengaturan tentang pangan sesuai Undang-undang No.18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang menyatakan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap rakyat. Pemenuhan hak atas pangan dicerminkan pada definisi ketahanan pangan yaitu: "kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun

mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan”.



**Gambar 3.26 Panen Inpari di Gunungkidul**

Target dan capaian kinerja dalam rangka mewujudkan sasaran terwujudnya ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi energi dan protein untuk masyarakat di DIY disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 3.31 Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Ketersediaan dan Kecukupan Konsumsi Pangan yang Meliputi Energi dan Protein untuk Masyarakat**

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian 2011	2012			Target Akhir RPJMD (2013)	Capaian s/d. 2012 terhadap 2013 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1. Ketersediaan energi dan protein:							
a. Ketersediaan energi	Kkal/Kap/hr	3.736	3.664	3.689	100,68	3.664	100,68
b. Ketersediaan protein	Gr/Kap/hr	92,88	94,59	100,63	106,38	94,59	106,38
2. Konsumsi energi dan protein:							
a. Konsumsi energi	Kkal/Kap/hr	1.626,90	2.000	1.938	96,9	2.000	96,9
b. Konsumsi protein	Gr/Kap/hr	49	52	49,7	95,57	52,00	95,57

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian 2011	2012			Target Akhir RPJMD (2013)	Capaian s/d. 2012 terhadap 2013 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
c. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	persen	85,6	88,60	78,7	88,82	89,10	88,33

Sumber: Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi DIY, 2013, diolah

Jika dilihat dari pencapaian pada tahun 2012, indikator ketersediaan energi dan protein telah melampaui target 2011, bahkan melampaui target yang ditetapkan akhir tahun 2013 yang merupakan akhir tahun periode RPJMD DIY tahun 2009-2013. Namun realisasi indikator lainnya yaitu konsumsi energi dan konsumsi protein serta skor PPH pada tahun 2012 masih di bawah target. Jika dibandingkan dengan target 2013, indikator-indikator tersebut masih di bawah target juga, namun demikian dengan sisa waktu 1 tahun anggaran dan akselerasi diharapkan target 2013 dapat tercapai.

Dari sisi ketersediaan energi, capaian pada tahun 2012 lebih kecil dibandingkan dengan capaian tahun 2011. Sementara di sisi lain, ketersediaan protein pada tahun 2012 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2011. Berdasarkan perhitungan Neraca Bahan Makanan (NBM), kebutuhan pangan di DIY memang hampir dapat dipenuhi semua dari potensi domestik. Kelompok pangan seperti beras, jagung, kacang tanah, ubi kayu dan buah-buahan (didominasi oleh pisang, salak, nangka dan jambu) ketersediaannya dapat dipenuhi dari produksi daerah, walaupun masih ada pasokan dari luar daerah. Sedangkan kelompok pangan seperti sayur-sayuran, gula, kedelai, daging sapi, susu, dan ikan ketergantungan ketersediaan masih tinggi dari luar daerah. Komoditas sayur lebih dari 50% atau sekitar 25-30 ribu ton didatangkan dari luar daerah, demikian juga untuk komoditas ikan dan susu sapi lebih dari 50% atau 1.000-2.000 ton dimasukkan dari luar Provinsi DIY.

Tingkat konsumsi energi dan protein penduduk DIY pada tahun 2012 meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2011. Namun demikian masih berada di bawah tingkat konsumsi energi dan protein yang direkomendasikan yaitu masing-masing sebesar 2.000 Kkal/kap/hari dan 52 gram/kap/hari.

**Tabel 3.32 Hasil Survei Pola Pangan Harapan Tahun 2012**

No	Wilayah	Konsumsi Energi (kkal/kap/hari)	% AKE	Konsumsi Protein (gram/kap/hari)	% AKP	Skor PPH
1	Kota Yogyakarta	1.542,2	77,3	45,8	88,1	88,9
2	Kabupaten Kulon Progo	1.755,5	87,8	48,8	93,8	88,8
3	Kabupaten Bantul	1.717,5	85,9	49,1	94,4	91,8
4	Kabupaten Gunungkidul	1.724,2	86,2	54,4	104,7	75,4
5	Kabupaten Sleman	2.093,4	104,7	56,6	108,8	78,1

Sumber: Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY

Ket: AKE (Angka Kecukupan Energi)

AKP (Angka Kecukupan Protein)

Tingkat dan kualitas konsumsi pangan tercermin dari skor Pola Pangan Harapan (PPH). Skor PPH DIY pada tahun 2011 adalah 85,6, namun kemudian pada tahun 2012 mengalami penurunan menjadi 78,7. Meskipun kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap kualitas konsumsi pangan semakin meningkat, namun masih terdapat asupan gizi dari beberapa kelompok bahan makanan berada dibawah rekomendasi Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VIII tahun 2004. Tingkat asupan konsumsi pangan masyarakat DIY masih didominasi konsumsi pangan kelompok padi-padian terutama beras. Di sisi lain konsumsi pangan lainnya kurang dari yang dianjurkan. Hal ini merupakan tantangan yang harus menjadi fokus penanganan secara sistematis dan berkesinambungan dalam upaya percepatan penganeekaragaman pangan di DIY.

Kebutuhan masyarakat terhadap bahan pangan dari bulan ke bulan pada tahun 2012 relatif tetap sesuai perkembangan jumlah penduduk, sehingga ketika panen raya pada bulan Januari s/d Juli kondisi bahan pangan berlebih, tetapi pada masa paceklik (Agustus s/d Desember) bahan pangan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Untuk itu upaya pengaturan yang telah dilakukan, dalam bentuk simpanan cadangan pangan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan pada saat tidak panen/musim paceklik dan memberikan jaminan harga wajar di saat panen raya sehingga harga minimal sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP)/Harga Referensi Daerah (HRD). Penyerapan produksi hasil panen di saat panen raya diupayakan dapat disimpan secara baik oleh pemerintah melalui inisiasi penumbuhan cadangan pangan pemerintah provinsi, kabupaten, lumbung pangan masyarakat, dan cadangan pangan gapoktan selain yang telah dilakukan oleh Perum

Bulog. Selanjutnya simpanan cadangan pangan dimaksud dapat disalurkan kembali di saat paceklik sehingga harga di tingkat konsumen tidak mengalami gejolak harga yang sangat tinggi. Untuk mengatur pasokan bahan pangan ke dalam suatu daerah/wilayah agar dapat berjalan normal, fungsi distribusi, transportasi dan efisiensi distribusi perlu dikendalikan sehingga mobilitas pasokan baik keluar maupun masuk ke suatu daerah/wilayah dapat berjalan normal dan terjadi keseimbangan antara produksi setempat dan pasokan bahan pangan dari luar.

Kejadian rawan pangan terutama pada daerah rawan pangan kronis menjadi masalah yang sangat sensitif dalam dinamika kehidupan sosial politik. Menjadi sangat penting bagi DIY untuk mampu mewujudkan ketahanan pangan wilayah, rumah tangga dan individu yang berbasis kemandirian pangan. Berdasarkan hasil identifikasi daerah rawan pangan berdasarkan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) di DIY pada tahun 2012 masih terdapat 80 desa rawan pangan dari 438 desa (18,26%). Hal ini berarti terjadi penurunan bila dibandingkan dengan daerah rawan pangan yang teridentifikasi pada tahun 2011 sejumlah 94 desa rawan pangan. Penentuan desa rawan pangan berdasarkan pada tiga indikator yaitu kurang energi dan protein, kemiskinan, dan produksi pertanian/pangan.

Menyangkut keamanan pangan, keberadaan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) DIY secara bertahap diupayakan mampu menjalankan pengawasan keamanan pangan khususnya produk pangan segar. OKKPD adalah lembaga yang diakreditasi oleh OKKP Pusat dan dibentuk tahun 2006 dengan mengacu pada ketentuan Badan Standarisasi Nasional. Lembaga ini merupakan salah satu unit kerja teknis yang diberikan otorisasi untuk melakukan pengawasan terhadap masalah keamanan dan mutu pangan segar. Hingga tahun 2012 telah dikeluarkan sertifikat Prima 3 dan 2 untuk komoditas salak, cabai besar, bawang merah. Untuk tetap menjaga mutu produk juga telah dilakukan surveilen terhadap pemilik sertifikat Prima 3 dan 2. Hingga tahun 2012 telah dilakukan sertifikasi terhadap 28 kelompok tani. Untuk menjaga keberlanjutan penjaminan mutu dan keamanan produk terhadap kelompok penerima sertifikat. Disamping itu, OKKPD telah pula memberikan penomoran (tanda pendaftaran) produk aman dan bermutu dalam bentuk Nomor Register Pangan Segar Asal Tumbuhan dengan kode Produk Domestik (PD) terhadap produk hasil pertanian dari DIY. Hingga tahun 2012 telah diberikan Register PD pada 6 jenis produk antara lain tepung *cassava*, *mocaf*, dan beras.

Pembangunan ketahanan pangan membutuhkan kelembagaan yang mantap dengan didukung oleh sumber daya manusia yang handal. Sumber daya manusia mempunyai peran yang penting dan menentukan dalam pengelolaan dan dukungan program/kegiatan kelembagaan ketahanan pangan. Oleh karena itu, upaya pengembangan sumber daya manusia perlu lebih dioptimalkan. Keragaan sumber daya manusia dan aktivitas penyelenggaraan penyuluhan dapat dilihat dari jumlah Petugas Penyuluh Pertanian (PPL) di DIY sebanyak 18 orang. Sementara itu di beberapa kabupaten juga memiliki petugas PPL diantaranya sejumlah 79 orang di Kabupaten Sleman, 88 di kabupaten Gunungkidul, 55 di Kabupaten Kulonprogo, 59 di Kabupaten Bantul dan 8 orang di Kota Yogyakarta. Disamping dukungan Tenaga Harian Lepas/Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) di seluruh DIY sejumlah 242 orang.

Pencapaian sasaran terwujudnya ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi energi dan protein untuk masyarakat di DIY selama ini ditempuh melalui program-program sebagai berikut:

1. Program pemberdayaan penyuluhan
2. Program pemberdayaan dan pengembangan ketahanan pangan
3. Program peningkatan ketahanan pangan
4. Program peningkatan kesejahteraan petani
5. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

Berdasarkan evaluasi, terdapat program utama yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan sasaran ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yaitu:

1. Program pemberdayaan penyuluhan
2. Program pemberdayaan dan pengembangan ketahanan pangan

### Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan tahun 2012 diantaranya adalah:

1. Perlunya pemantapan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas dengan para pemangku kepentingan.
2. Masih munculnya kesulitan dalam pendataan keluar masuk bahan pangan dari dan ke DIY karena data yang diperoleh dari jembatan timbang masih sangat terbatas baik komoditas maupun keakuratan datanya.
3. Pola konsumsi pangan di tingkat rumah tangga belum sepenuhnya sesuai dengan kaidah-kaidah makanan yang beragam, bergizi, berimbang, dan aman (3BA).

4. Masih sangat tergantungnya pola konsumsi rumah tangga hanya pada satu jenis bahan pangan yaitu beras dan/atau tepung terigu.
5. Perkembangan usaha/industri pangan berbasis sumberdaya lokal berjalan lambat, sebagai dampak dari keterbatasan sumber daya manusia, permodalan, pemasaran dan promosi dari pelaku usaha yang bersangkutan.
6. Semakin maraknya peredaran pangan yang kurang aman di masyarakat, terutama makanan yang berada di lingkungan sekolah, pinggir jalan dan pasar tradisional sebagai dampak dari masih rendahnya kesadaran masyarakat/konsumen dan pelaku usaha dalam mengkonsumsi dan memproduksi pangan yang aman.
7. Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan melalui Sistem Keamanan Pangan Terpadu (SKPT) masih belum optimal, karena belum adanya dasar hukum yang kuat untuk mendukung operasionalnya serta fasilitasi anggaran yang masih terbatas.

Solusi terhadap permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Pemantapan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas dengan para pemangku kepentingan.
2. Pendataan diantaranya dilakukan melalui distributor, supermarket, dan Tempat Pendaratan Ikan (TPI). Selanjutnya diperlukan kajian tentang distribusi bahan pangan di wilayah DIY. Selain itu, untuk kepentingan pendataan di masa mendatang, sebaiknya ada lembaga/institusi khusus yang menangani.
3. Sosialisasi dan edukasi pola makan 3BA kepada masyarakat khususnya kelompok wanita tentang pola makan 3BA melalui pertemuan, lomba cipta menu, promosi, apresiasi, gerakan makan 3BA dan optimalisasi pemanfaatan pekarangan serta fasilitasi dan pengembangan produk antara (tepung-tepungan) berbasis sumberdaya lokal dengan melibatkan stakeholder.
4. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya konsumsi pangan spesifik lokasi (pangan lokal), sehingga dapat menekan atau mengurangi konsumsi beras dan/atau terigu, melalui sosialisasi terutama kepada kelompok wanita dengan didukung peningkatan nilai pangan spesifik lokasi (pangan lokal) menjadi olahan pangan yang menarik bagi konsumen.
5. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan/keterampilan para pelaku usaha agroindustri pangan berbasis sumber daya lokal dalam teknologi pengolahan pangan yang disertai dengan mengintensifkan promosi kepada masyarakat guna memperluas

jaringan pemasaran produk pangan berbasis sumberdaya lokal melalui berbagai kegiatan seperti pertemuan, sosialisasi, dan pameran.

6. Sosialisasi dan edukasi kepada konsumen (masyarakat) dan para pelaku usaha pengolahan tentang pangan yang bermutu, aman, dan proses pengolahan pangan yang benar dan aman, melalui pertemuan/apresiasi dengan melibatkan institusi terkait.
7. Fasilitasi terbitnya landasan hukum untuk mendukung operasional Sistem Keamanan Pangan Terpadu (SKPT) dalam pengawasan keamanan pangan berupa peraturan gubernur atau peraturan daerah disertai fasilitasi anggaran yang memadai.

### 3.2.11 Sasaran Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pengelolaan Ketenagakerjaan

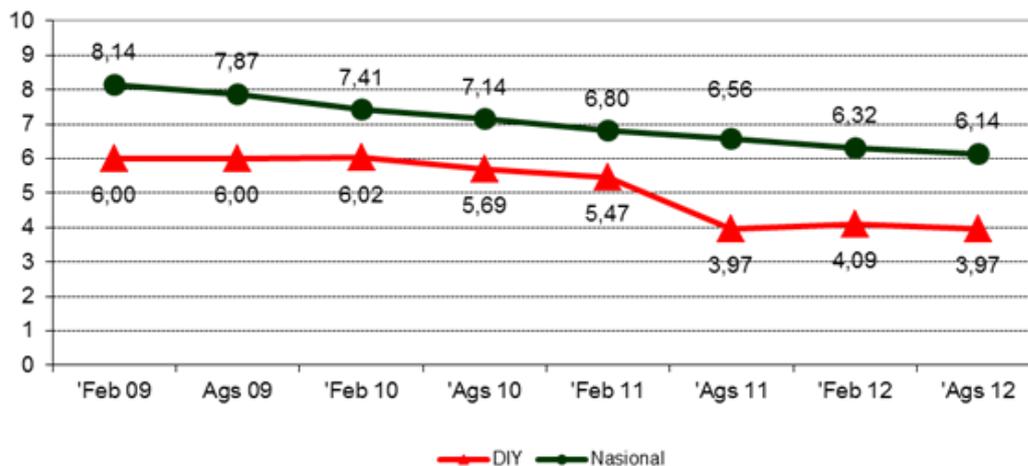
Masalah pokok ketenagakerjaan yang kita hadapi saat ini antara lain adalah rendahnya pendayagunaan angkatan kerja yang tersedia, yang mengakibatkan banyaknya pengangguran terbuka, masih rendahnya kualitas angkatan kerja yang ditandai oleh tingkat pendidikan formal di DIY didominasi oleh tamatan Sekolah Dasar termasuk didalamnya mereka yang belum tamat dan yang tidak pernah sekolah, serta rendahnya produktivitas, perlindungan, dan kesejahteraan pekerja.



**Gambar 3.27 Pembatik DIY Pendukung Penyediaan Lapangan Kerja Untuk Sektor Strategis Berbasis Budaya**

Jumlah angkatan kerja di Pemda DIY selama tahun 2009-2012 cenderung dinamis. Jumlah angkatan kerja pada tahun 2012 sebanyak 1.944.858 orang, sementara itu data pada tahun 2011 sebanyak 1.872.912 orang, tahun 2010 sebesar 1.882.296 orang, dan pada tahun 2009 sebanyak 2.016.694 orang. Untuk tahun 2013 diprediksi jumlah angkatan kerja sebanyak 1.917.051. Selanjutnya, jumlah pengangguran terbuka di DIY selama kurun waktu 2009-2012 juga menunjukkan angka dinamis, tahun 2009 sebesar 121.046 orang, tahun 2010 mengalami penurunan menjadi 107.148 orang dan tahun 2011 turun menjadi 74.317 dan pada tahun 2012 naik menjadi 77.150 orang. Sedangkan perkiraan jumlah pengangguran terbuka untuk tahun 2013 turun menjadi 69.882 orang.

Tingkat penganggur terbuka di DIY selama tahun 2009-2012 mengalami penurunan, tahun 2009 sebesar 6,00%, tahun 2010 sebesar 5,69%, tahun 2011 sebesar 3,97% dan tahun 2012 sebesar 3,97%. Sedangkan tahun 2013 diprediksi Tingkat Penganggur Terbuka sebesar 3.65%.



Sumber :BRS November 2012, BPS Provinsi DIY

### Gambar 3.28 Tingkat Pengangguran Terbuka di DIY, 2009-2012

Selain indikator tingkat pengangguran terbuka, indikator lain yang digunakan adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK di DIY selama kurun waktu 2009-2012 menunjukkan angka yang fluktuatif. Data pada tahun 2009 menunjukkan TPAK sebesar 70,23%, pada tahun 2010 turun menjadi 69,76% , pada tahun 2011 mengalami penurunan menjadi 68,77%, pada tahun 2012 TPAK mengalami kenaikan menjadi 70,85% dan pada tahun 2013 TPAK diproyeksikan mengalami penurunan menjadi 68,99%.

Jumlah kesempatan kerja pada tahun 2011 sebanyak 1.798.595 orang dan pada tahun 2012 sebanyak 1.867.708 Sedangkan indikator

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

elastisitas kesempatan kerja pada tahun 2011 menunjukkan angka 23,20 dan pada tahun 2012 menunjukkan angka 0,73.

Tabel 3.33 Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pengelolaan Ketenagakerjaan

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian 2011	2012			Target Akhir RPJMD (2013)	Capaian s/d. 2011 terhadap 2013 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1. Jumlah Angkatan Kerja	orang	1.872.912	2.006.337	1.944.858	96,94	2.047.422	94,99
2. Jumlah Kesempatan Kerja	orang	1.798.595	2.038.278	1.867.708	91,63	2.115.830	88,27
3. Jumlah Penempatan Tenaga Kerja	orang	1.900	2.000	2.000	100	17.900	88,82

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, 2013, diolah

Dari ketiga indikator di atas, dua indikator yaitu jumlah angkatan kerja dan jumlah kesempatan kerja realisasinya pada tahun 2012 masih di bawah target. Indikator jumlah angkatan kerja tidak tercapai karena terjadi perubahan target. Target sebesar 2.006.337 merupakan target kinerja tahun 2012, sedangkan dalam Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi tahun 2012-2016 target jumlah angkatan kerja adalah 1.894.924, sehingga jumlah angkatan kerja naik sebesar 2,64% dari target. Kondisi lain yang mempengaruhi antara lain banyaknya tenaga kerja muda lulusan sekolah yang masuk ke pasar kerja.

Sedangkan indikator jumlah kesempatan kerja tidak tercapai diantaranya karena Target sebesar 2.038.278 merupakan target kinerja tahun 2012, sedangkan dalam Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi tahun 2012-2016 target jumlah kesempatan kerja adalah 1.822.360, sehingga peningkatan jumlah kesempatan kerja tahun 2012 sebesar 2,49% dari target. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi cukup tinggi sebesar 5,16% pada tahun 2011 dan 5,26% pada triwulan III tahun 2012, sehingga berdampak pada peningkatan jumlah kesempatan kerja .

Untuk jumlah penempatan tenaga kerja pada tahun 2012 realisasinya sesuai dengan target yaitu 100%, dimana target dan realisasinya sebanyak 2.000 orang. Jumlah penempatan tenaga kerja tahun 2012 lebih banyak jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Perbandingan dengan target akhir periode RPJMD Tahun 2009-2013, maka capaian kinerja sampai dengan 2012 masih di bawah target, namun diharapkan sampai dengan akhir periode 2013 seluruh indikator dapat mencapai target yang diharapkan.

Berdasarkan hasil evaluasi, pencapaian sasaran terwujudnya peningkatan kualitas pengelolaan ketenagakerjaan didukung oleh program-program sebagai berikut:

1. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
2. Program peningkatan kesempatan kerja
3. Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan
4. Program pengembangan wilayah transmigrasi
5. Program pelatihan transmigrasi regional

### Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi:

1. Rendahnya keterampilan dan keahlian pencari kerja menyebabkan terjadinya kesenjangan antara kualitas pencari kerja dengan

kualifikasi kebutuhan di pasar kerja, sehingga sulit bersaing di pasar kerja, baik di tingkat lokal, daerah, maupun luar negeri, dan menyebabkan sulitnya penempatan. Kondisi ini diperparah dengan belum maksimalnya persiapan diberlakukannya ACFTA (Asean Cina Free Trade Area) pada tahun 2015. Disamping itu berkurangnya SDM/tenaga instruktur karena pensiun.

2. Jumlah kesempatan kerja tidak sebanding dengan jumlah angkatan. Pertumbuhan kesempatan kerja mengalami peningkatan dari 1.798.585 pada tahun 2011 menjadi 1.867.708 pada tahun 2012. Akan tetapi seiring dengan peningkatan kesempatan kerja, angkatan kerja yang ada juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan yakni 1.872.912 pada tahun 2011 menjadi 1.944.858 pada tahun 2012 sehingga kesempatan kerja yang ada tidak mampu menampung angkatan kerja yang ada.
3. Produktivitas tenaga kerja yang relatif masih rendah membuat banyak kesempatan kerja lokal justru diisi tenaga kerja luar daerah.
4. Masih adanya pengusaha dan pekerja yang kurang bisa memahami hak dan kewajibannya masing-masing sehingga masih sering terjadi pemutusan hubungan kerja secara sepihak.
5. Kurangnya fungsi pemberdayaan masyarakat (*community development*) maupun tanggung jawab sosial (*social responsibility*) dari perusahaan, sehingga penerimaan magang di perusahaan belum dapat maksimal.

Solusi terhadap permasalahan tersebut:

1. Mengupayakan peningkatan kualitas/kompetensi melalui pelatihan-pelatihan di lembaga pelatihan kerja Pemerintah (BLK) dan swasta (LPKS), melalui perbaikan kualitas BLKPP dan BLK sehingga perlu untuk direvitalisasi dengan sungguh sungguh agar lulusan pelatihan BLKPP dan BLK lebih berdaya saing. Selain itu pemberdayaan LPK termasuk akreditasi LPK secara berkelanjutan dilakukan agar terjadi sinergi antara pemerintah dan swasta dalam penanganan pengangguran, khususnya dalam hal peningkatan kualitas ketrampilan pencari kerja. Dalam rangka menyiapkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai yang dibutuhkan pasar kerja, maka telah ditempuh beberapa upaya yaitu Pelatihan Berbasis Kompetensi, Sertifikasi Uji Kompetensi dan penyiapan Tempat Uji Kompetensi (TUK). Untuk menghadapi ACFTA tahun 2015 perlu dilakukan Sosialisasi Sertifikasi Uji Kompetensi bagi asosiasi profesi dan perusahaan, hal ini untuk mendorong lahirnya Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) baru di Yogyakarta. Karena saat ini baru terbentuk 2 (dua) LSP yaitu LSP Pariwisata dan LSP Otomotif. Untuk memenuhi

kebutuhan SDM di lembaga pelatihan kerja secara berkesinambungan perlu adanya kaderisasi secara dini.

2. Secara berkelanjutan melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat membuka perluasan kesempatan kerja, serta pelatihan-pelatihan kewirausahaan.
3. Memantau atau mengukur produktivitas kerja dan terus mengupayakan pelatihan peningkatan produktivitas.
4. Perlu sosialisasi, implementasi dan penegakan hukum bidang ketenagakerjaan.
5. Mengembangkan jejaring pemagangan agar semakin banyak perusahaan dapat menerima peserta magang yang nantinya dapat berlanjut pada ikatan kerja permanen atau setidaknya para peserta magang dapat memperoleh pengalaman kerja yang sangat berharga yang dapat dipergunakan untuk memasuki pasar kerja.

### **3.2.12 Sasaran Terwujudnya Pemerintahan yang Responsif, Transparan, dan Akuntabel**

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan dan akuntabel salah satu usaha Pemda DIY adalah mengembangkan pemerintahan yang berbasis elektronik (*e-government*). Melalui pengembangan *e-government*, diharapkan dapat melakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemda DIY dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya dengan konsep *e-gov* tersebut, masyarakat dapat ikut terlibat dan berperan aktif dalam mendukung dan memberikan partisipasi dalam kegiatan pembangunan.



**Gambar 3.29 Peresmian Gerai Pelayanan Perizinan**

Sementara itu untuk menindaklanjuti Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Berbasis Elektronik (*e-government*), Pemda DIY melalui Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2006, telah menetapkan *Blueprint Jogja Cyber Province* yang dititikberatkan pada program *Digital Government Services (DGS)* sebagai panduan strategis implementasi dan pengembangan *e-government* di lingkungan Pemda DIY.

Melalui Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2006, Pemda DIY telah mencanangkan konsep *e-government* sebagai wujud penerapan *Jogja Cyber Province* dengan pendekatan DGS dan menetapkan 6 sektor unggulan sebagai *pilot project* dalam pelayanan digital aparatur pemerintah. Sejak tahun 2010, sektor unggulan layanan DGS ditambah menjadi 9 sektor unggulan, dengan rincian :

- Dinas Pendidikan dengan “Jogja Belajar”
- Dinas Pertanian dengan “Agri Centre”
- Dinas Perikanan dan Kelautan dengan “Fishery Bussiness Centre”
- Dinas Perindagkop dengan “Jogja Bisnis”
- Dinas Pariwisata dengan “Visiting Jogja”
- Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dengan “Plaza Informasi”
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan “Bursa Kerja Online”
- Dinas Kesehatan dengan “Jogja Sehat”, dan
- BKPM dengan “Jogja Invest”.

Beberapa program pendukung pelaksanaan DGS di Pemda DIY untuk pelayanan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi, antara lain:

- CPNS *On-line* (Penerimaan CPNS Secara *On line*)
- LPSE (Pengadaan Barang Secara Elektronik)
- DIBI (Data dan Informasi Bencana)

Dalam hal pengadaan barang dan jasa pemerintah, operasionalisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Sejak tahun 2010, seluruh Kabupaten/Kota di Pemda DIY memiliki unit pelayanan lelang secara elektronik. Peningkatan jumlah lelang paket secara elektronik ini menunjukkan komitmen kuat pemdaDIY dalam mewujudkan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang efektif, efisien dan akuntabel. Hal lain yang diperoleh Pemda DIY dalam pelaksanaan lelang secara elektronik adalah pemberian LKPP *Award* bagi LPSE DIY untuk nominasi Penghargaan LPSE Motivator atas upaya mendorong implementasi total *e-procurement* di DIY.

Untuk mengukur mewujudkan pemerintahan yang transparan, responsif dan akuntabel, maka digunakan indikator Jumlah lembaga yang memberikan layanan berbasis *citizen centris*. Kelembagaan yang melaksanakan pelayanan *government centris* menuju *citizen centris* adalah konsep pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah yang diarahkan untuk dilaksanakan oleh masyarakat dengan metode kerjasama, dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pada tahun 2011, terdapat tambahan 2 lembaga yang telah melaksanakan pelayanan *government centris* menuju *citizen centris* yaitu Gerai Pelayanan Perijinan Terpadu dan Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial.

**Tabel 3.34 Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Pemerintahan yang Responsif, Transparan, dan Akuntabel, 2011-2012**

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian 2011	2012			Target Akhir 2013	Capaian 2012 terhadap 2013
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Jumlah lembaga yang memberikan layanan berbasis <i>citizen centris</i>	Unit	12	15	15	100	20	75

Sumber: Biro Organisasi Setda DIY

Capaian Tahun 2012 sebesar 15 dari target 15, sehingga persen realisasinya telah 100%. Adapun tambahan lembaga yang telah berorientasi ke kebutuhan pelanggan pada tahun 2012 adalah Balai

Metrologi dan Bapeljamkesos. Upaya tersebut dilakukan dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Upaya meningkatkan pencapaian sasaran terwujudnya pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel, ditempuh melalui berbagai program/kegiatan diantaranya:

1. Program peningkatan kapasitas kelembagaan daerah
2. Program analisis kebijakan pembangunan
3. Program optimalisasi Pemanfaatan teknologi informasi
4. Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah
5. Program pembinaan dan pengembangan aparatur
6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

### Permasalahan dan Solusi

#### *Permasalahan*

1. Belum adanya peraturan daerah yang mengatur pelayanan publik sebagai tindak lanjut Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Pelaksanaan Program DGS belum sesuai dengan harapan, yakni belum terintegrasinya Program DGS di setiap SKPD.
3. SDM yang memiliki kemampuan TI relatif sedikit.

#### *Solusi*

1. Penyusunan Raperda tentang pelayanan publik sebagai tindak lanjut Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Diperlukan komitmen dan persamaan persepsi semua pihak di lingkup Pemda DIY dalam rangka pengembangan program DGS sesuai dengan *Blueprint* yang sudah ada.
3. Perlu peningkatan kemampuan SDM.

### 3.2.13 Sasaran Terwujudnya Kesetaraan Gender

Meningkatnya partisipasi perempuan dapat dilihat dari peningkatan jumlah anggota legislatif perempuan, jumlah pejabat struktural perempuan, jumlah pengusaha perempuan pengusaha mikro dan kecil, jumlah pejabat publik dan profesi perempuan di segala bidang. Namun demikian masih perlu ditingkatkan baik jumlah dan kompetensinya.



Gambar 3.30 Anak Bantul Sadar Gender

Indikator pencapaian sasaran terwujudnya kesetaraan gender di DIY dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (GEM). Adapun capaian indikator IPG dan GEM di DIY disajikan pada tabel berikut:

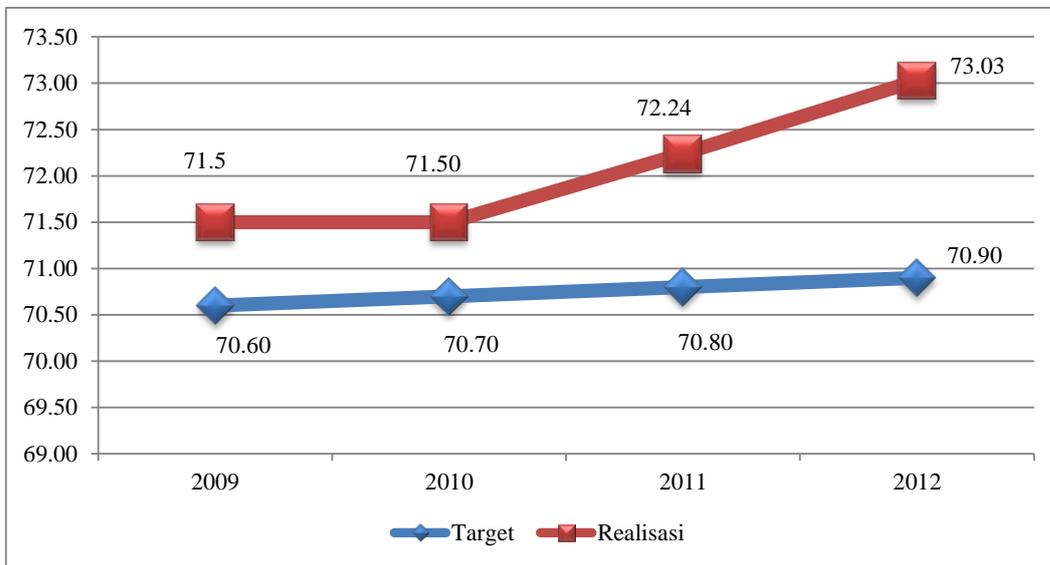
Tabel 3.35 Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Kesetaraan Gender Tahun 2011-2012

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian 2011	2012			Target Akhir RPJMD (2013)	Capaian s/d. 2011 terhadap 2013 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1. Persentase Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Persen	72,24	70,90	73,03	103,00	71,00	102,86
2. Persentase Indeks Pemberdayaan Gender (GEM)	Persen	63,32	62,50	77,84	124,54	77,84	100,00

Sumber: Kementerian PP-PA & BPS, diolah

Pada tahun 2010 Daerah Istimewa Yogyakarta menempati ranking ke 2 dari seluruh provinsi di Indonesia dengan capaian IPG sebesar 72,51. Pada tahun 2011 IPG DIY meningkat menjadi 72,24 dan pada tahun 2012 meningkat lagi menjadi 73,03. Hal ini menunjukkan tingkat pencapaian pembangunan pemberdayaan perempuan di DIY sudah sangat bagus. Jika

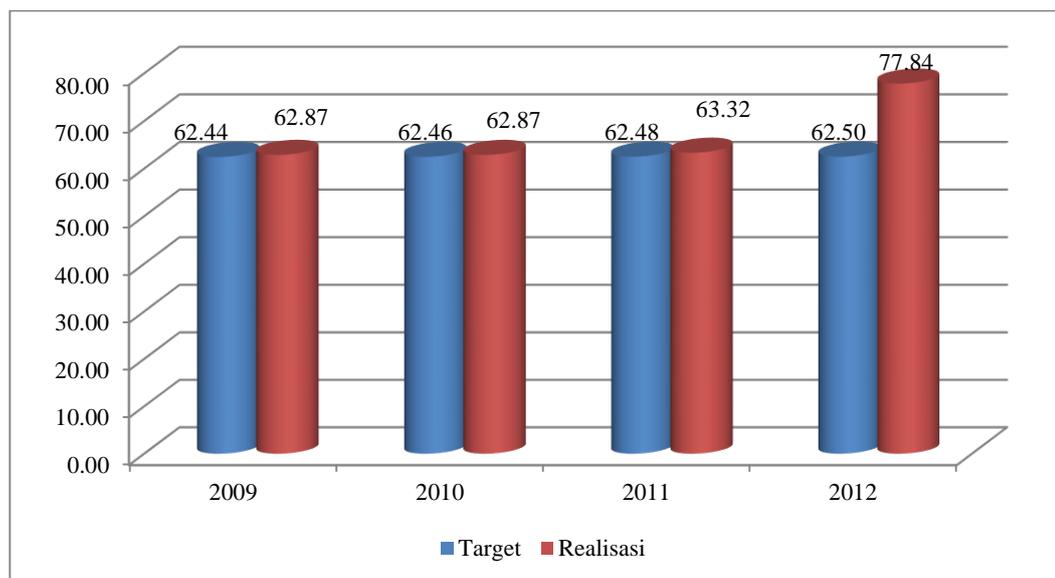
dibandingkan dengan target pada akhir tahun 2013, maka posisi capaian sampai dengan tahun 2011 telah melebihi target yang telah ditetapkan.



Sumber: Kementerian PP-PA & BPS, diolah

### Gambar 3.31 Perkembangan Target dan Realisasi IPG DIY, 2009-2012

Capaian indikator GEM DIY pada tahun 2009-2012 menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Dari angka 62,87 pada tahun 2009, nilai capaian GEM meningkat cukup signifikan selama 4 tahun menjadi 77,84 pada tahun 2012. Jika dibandingkan dengan target pada akhir RPJMD tahun 2013, maka posisi capaian sampai dengan tahun 2012 telah mencapai target yang telah ditetapkan.



Sumber: Kementerian PP-PA & BPS, diolah

### Gambar 3.32 Perkembangan Target dan Realisasi GEM DIY, 2009-2012

Melihat hasil capaian pada sasaran terwujudnya kesetaraan gender di DIY yang angkanya meningkat cukup signifikan pada tahun 2012 dibanding tahun-tahun sebelumnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa tingkat pengarusutamaan gender di semakin baik.

Keberhasilan kinerja pembangunan kesetaraan gender tidak terlepas kontribusi berbagai pihak dalam pembangunan gender di DIY. Pemerintah Daerah DIY telah melaksanakan beberapa program/kegiatan dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender di DIY. Dengan melihat capaian kinerja pembangunan gender di DIY yang sudah sangat baik, maka dapat dikatakan bahwa program/kegiatan yang selama ini dilaksanakan telah berhasil mewujudkan target kinerja dalam mewujudkan kesetaraan gender. Berikut adalah program-program dalam pencapaian sasaran mewujudkan kesetaraan gender yaitu:

1. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
2. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
3. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
4. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

## Permasalahan dan Solusi

### *Permasalahan*

1. Implementasi PUG dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dalam rangka menuju keadilan dan kesetaraan gender masih belum optimal.
2. Pemahaman aparat tentang penyelenggaraan Data Pilah Gender dan Anak sebagai data pembuka wawasan dalam penyusunan PPRG masih rendah.
3. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin meningkat dengan jenis kekerasan yang semakin beragam serta bersifat lintas daerah.
4. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan perundang-undangan terkait perlindungan perempuan dan anak (UUPA, UUPKDRT, UUPTPO)

### *Solusi*

Alternatif solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah:

1. Perlu dilakukan sosialisasi dan advokasi secara terus menerus tentang implementasi PUG kepada semua pihak dan perlu disusun peraturan gubernur tentang pedoman PPRG.
2. Perlu dilakukan sosialisasi dan advokasi tentang manfaat ketersediaan data pilah gender dan anak sebagai data pembuka wawasan dalam penyusunan PPRG dan pembentukan forum jejaring data pilah gender dan anak.
3. Perlu dilakukan koordinasi lintas sektor untuk menangani korban kekerasan dan upaya-upaya pemberdayaan perempuan dalam rangka mencegah KDRT.
4. Perlu dilakukan sosialisasi dan pemahaman kepada semua pihak tentang peraturan perundang-undangan terkait perlindungan perempuan dan anak secara rutin dan berkesinambungan.

### 3.2.14 Sasaran Terwujudnya Ketersediaan Infrastruktur yang Memadai baik Kuantitas dan Kualitas

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan. Infrastruktur memegang peranan yang penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Tersedianya kondisi infrastruktur yang baik mempunyai peran strategis dalam mendukung DIY sebagai daerah tujuan wisata. Beberapa capaian sasaran terwujudnya infrastruktur yang memadai baik secara kuantitas dan kualitas selama tahun 2012 disajikan pada tabel berikut.



Gambar 3.33 Transjogja Sebagai Icon DIY

Tabel 3.36 Capaian Kinerja Sasaran Ketersediaan Infrastruktur yang Memadai Baik Secara Kuantitas dan Kualitas

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian 2011	2012			Target Akhir RPJMD (2013)	Capaian s/d. 2012 terhadap 2013 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1. Persentase proporsi jaringan jalan berkondisi mantap (baik dan sedang)	Persen	83,89	80	84,32	105,4	85	99,20
2. Persentase luasan Daerah Irigasi (DI) yang terlayani air irigasi	Persen	70,09	75	75,06	100,08	80	93,83
3. Persentase peningkatan penanganan banjir terhadap daerah potensi banjir	Persen	65	70	70,06	100,08	75	93,41

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian 2011	2012			Target Akhir RPJMD (2013)	Capaian s/d. 2012 terhadap 2013 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
4. Persentase penduduk berakses air minum	Persen	65,29	70	70,38	100,54	75	93,84
5. Persentase penurunan alih fungsi lahan terhadap total luas lahan	Persen	7	8	8	100	9	112,5
6. Persentase ketersediaan rumah layak huni	Persen	67,78	68,89	91,22	132,41	70,11	130,11
7. Persentase fasilitas keselamatan lalulintas	Persen	70	75	75	100	80	93,75

Sumber: DPUP-ESDM DIY dan Dishubkominfo DIY

**a. Persentase Proporsi Jaringan Jalan Berkondisi Mantap (baik dan sedang)**

Kondisi jalan yang baik sangat mendukung kelancaran mobilitas barang dan jasa. Pembangunan jalan di DIY, sesuai target RPJMD untuk mewujudkan jaringan jalan dalam kondisi mantap. Menurut kriteria Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, jalan dalam kondisi mantap adalah jalan dalam kondisi baik dan kondisi sedang. Target Tahun 2012 persentase proporsi jaringan jalan berkondisi mantap (baik dan sedang) sebesar 80%.

Total jalan yang mempunyai status sebagai Jalan Provinsi adalah 690,25 Km, dengan panjang jembatan 5.033,6 m. Melalui program pemeliharaan jalan maupun pembangunan jalan dapat diwujudkan jalan kondisi mantap (kondisi baik dan sedang) sepanjang 582,02 Km atau 84,32%.

Secara umum capaian presentase proporsi jaringan jalan berkondisi mantap (baik dan sedang) pada tahun 2012 sebesar 84,32% atau dengan persentase capaian 105,4% . Capaian tahun 2012 apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2013 sebesar 99,20%.

**b. Persentase luasan Daerah Irigasi (DI) yang Terlayani Air**

Dalam kegiatan budidaya pertanian, ketersediaan air irigasi merupakan faktor yang sangat strategis. Tanpa adanya dukungan ketersediaan air yang sesuai dengan kebutuhan baik dalam dimensi jumlah, mutu, ruang maupun waktu, maka dapat dipastikan kegiatan budidaya tersebut akan berjalan dengan tidak optimal. Air permukaan dan air tanah merupakan sumber air utama yang digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pertanian, industri, rumah tangga dan kebutuhan lainnya. Oleh karena itu sumber air permukaan perlu dikelola dengan baik sehingga mampu memberikan manfaat bagi pengembangan sektor pertanian.

Pembangunan irigasi merupakan salah satu hal yang penting untuk dilakukan mengingat sebagian penduduk DIY (26,91%) bekerja di sektor pertanian. Berdasarkan hasil evaluasi, diperoleh hasil Daerah Irigasi yang terlayani air meningkat sebesar 4,97% dari 70,09% pada tahun 2011 menjadi 75,06% pada tahun 2012 atau melebihi dari target sebesar 75%. Capaian tahun 2012 apabila dibandingkan dengan target RPJMD Tahun 2013 sebesar 93,83%.

Pada tahun 2012 total luas Daerah Irigasi di DIY 17.112,87 Ha. Hingga akhir 2012 Daerah Irigasi yang terlayani air irigasi melalui kegiatan rehabilitasi dan O&P jaringan irigasi adalah 12.844,54 Ha (75,06%).

**Tabel 3.37 Luas Daerah Irigasi yang Terlayani Air Tahun 2011-2012**

Jumlah Daerah Irigasi	Luas (Ha)	Luas DI yang terlayani air 2011	Luas DI yang terlayani air 2012
44 Daerah Irigasi	17.112,87	11.995,04 Ha	12.844,54 Ha
<b>Prosentase luas D.I yang terlayani air</b>		70,09 %	75,06%

*Sumber: DPUP-ESDM DIY*

### c. Penanganan Banjir Terhadap Daerah Potensi

Penanganan banjir akan menjadi efektif ketika dipahami menjadi tanggung jawab bersama. Penanganan banjir terhadap daerah potensi di DIY dicapai melalui berbagai program yang bersifat civil teknis, dan peningkatan partisipasi masyarakat.

Penanganan terhadap potensi banjir juga dilaksanakan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak meliputi pengerukan sedimen dan

normalisasi sungai, terutama di sungai-sungai yang berhulu di Merapi. Di Wilayah DIY terdapat daerah potensi banjir seluas 12.437 Ha. Sampai tahun 2012 telah dilakukan penanganan banjir seluas 8.73 Ha atau 70,06%. Target persentase penanganan banjir terhadap daerah potensi sampai dengan tahun 2012 sebesar 70% dan dapat direalisasikan sebesar 70,06% sehingga prosentase capaian sebesar 100,08%. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2013 sebesar 75% maka persentase capaian sampai dengan Tahun 2012 sebesar 93,41%.

**d. Persentase Penduduk Berakses Air Minum**

Air bersih dengan standar air minum layak merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Pertumbuhan jumlah penduduk dan keragaman kegiatan masyarakat akan meningkatkan kebutuhan air minum di kawasan perkotaan dan juga perdesaan.

Target cakupan pelayanan persentase penduduk terlayani air minum layak, dihitung berdasar persentase perbandingan antara jumlah penduduk yang terlayani air minum dibanding dengan keseluruhan penduduk DIY. Sehingga perhitungan persentase penduduk berakses air minum tahun 2012 adalah sebesar 3.496.100 jiwa dibagi dengan jumlah penduduk DIY sebesar 3.467.200 jiwa atau sebesar 70,38 % berada diatas target RPJMD yang sebesar 70%. Apabila dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2013 maka persentase capaian tahun 2012 sebesar 93,84%.

Penyediaan air minum untuk masyarakat di DIY antara lain terkendala karena keterbatasan sumber air baku air minum di DIY, khususnya yang selama ini menggantungkan pada sumber mata air di wilayah terdampak erupsi Merapi. Solusi yang ditempuh untuk mengatasi keterbatasan ketersediaan sumber air baku untuk air minum dan untuk mengamankan terget RPJMD tahun 2013 dengan melakukan identifikasi dan pengembangan terhadap potensi sumber air baku untuk air minum di DIY.

**e. Persentase Penurunan Alih Fungsi Lahan Terhadap Total Luas Lahan**

Total luas lahan wilayah DIY sebesar 318.580 Ha. Pada tahun 2011 terjadi alih fungsi lahan seluas 22.300,60 Ha atau 7% dan pada tahun 2012 terjadi alih fungsi lahan seluas 25.486,40 Ha atau 8% dari luas lahan.

**f. Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni**

Rumah merupakan salah satu hak dasar rakyat, oleh karena itu setiap warga negara berhak untuk bertempat tinggal serta mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain itu, rumah juga merupakan kebutuhan dasar manusia dalam meningkatkan harkat, martabat, mutu kehidupan dan penghidupan, serta sebagai pencerminan diri pribadi dalam upaya peningkatan taraf hidup, serta pembentukan watak, karakter dan kepribadian bangsa.

Pembangunan perumahan dan permukiman jika dilakukan secara benar akan memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan. Hal tersebut disebabkan karena pembangunan perumahan dapat mendorong pertumbuhan wilayah dan ekonomi daerah, mendukung pembangunan sosial budaya dan memberikan efek multiplier terhadap sektor lain seperti penciptaan lapangan kerja baik yang langsung maupun yang tidak langsung.

Sejalan dengan kebijakan nasional, pembangunan perumahan dan permukiman lebih diarahkan pada pemenuhan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya, dan secara lebih khusus meningkatkan aksesibilitas masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak dan terjangkau, baik melalui penyediaan Rumah Susun atau pemberian bantuan stimulan untuk menuju rumah layak huni, dan perbaikan sarana dan prasarana umum lingkungan agar tidak mewujudkan permukiman kumuh.

Pada tahun 2012 kebutuhan rumah di DIY adalah sejumlah 1.038.233 unit. Adapun jumlah rumah layak huni yang tersedia sejumlah 947.033 unit atau sebesar 91,22%. Secara umum capaian indikator persentase ketersediaan rumah layak huni sebesar 91,22% atau mencapai 132,41% dari target yang ditetapkan sebesar 68,89%. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2013 sebesar 70,11% maka posisi capaian tahun 2012 terhadap target tahun 2013 sebesar 130,11%.

#### **g. Persentase Fasilitas Keselamatan Lalu lintas Jalan**

Pengadaan fasilitas keselamatan lalu lintas mempunyai tujuan utama untuk menurunkan angka kecelakaan beserta seluruh akibatnya. Dengan bertambahnya fasilitas keselamatan lalulintas diharapkan pengguna jalan dapat berkendara dengan lebih aman dan nyaman. Peningkatan persentase fasilitas keselamatan lalulintas dicapai melalui Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas.

Memperhatikan kebutuhan akan fasilitas keselamatan lalulintas jalan serta kondisi yang telah terpasang, maka sampai dengan TA 2012, fasilitas keselamatan lalulintas jalan yang telah terpasang sudah menjadi 75% dari kebutuhan atau sudah sesuai dengan target atau dengan kata

lain persentase capaian sebesar 100%. Capaian tahun 2012 apabila dibandingkan dengan target 2013 sebesar 80% maka persentase capaiannya sebesar 93,75%.

Secara umum capaian indikator pada sasaran Ketersediaan infrastruktur yang memadai dapat direalisasikan sesuai dengan target. Keberhasilan pencapaian indikator pada sasaran ini tidak terlepas dari dukungan berbagai program yang dilaksanakan yang antara lain adalah :

1. Program Peningkatan Jalan dan Jembatan
2. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
3. Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
4. Program Pengadaan Tanah Untuk Infrastruktur
5. Program Pengembangan Kawasan Pedesaan
6. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau & SDA Lainnya
7. Program Pengembangan Perumahan
8. Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial
9. Program pengembangan Pengelolaan Air Minum
10. Program Pengembangan Kawasan Perkotaan
11. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
12. Program Pengendalian Banjir
13. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
14. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
15. Program Penataan Kawasan Padat Penduduk dan Kumuh

Melalui program utama yang dilaksanakan mempunyai kontribusi yang besar dalam pencapaian indikator kinerja. Capaian akhir tahun 2013 optimis dapat diwujudkan dengan melanjutkan program-program utama tersebut untuk tahun yang akan datang.

### **Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan yang dihadapi Pemda DIY antara lain sebagai berikut:

1. Adanya keterbatasan sumber air baku air minum di DIY, khususnya yang selama ini menggantungkan pada sumber mata air di wilayah terdampak erupsi Merapi
2. Kontribusi pemerintah kabupaten/kota sebagai pemegang tanggung jawab utama penanganan drainase belum maksimal
3. Belum optimalnya penyediaan data dan updating terbaru terkait informasi permukiman dan bahan bangunan.

4. Belum maksimalnya peran aktif dari pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang perumahan.
5. Adanya kebutuhan masyarakat akan perumahan yang semakin meningkat terutama di perkotaan, mengakibatkan alih fungsi lahan tidak terbendung.
6. Keterbatasan akses masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah terhadap lahan untuk perumahan serta terbatasnya anggaran pemerintah dalam memfasilitasi penyediaan perumahan yang layak huni, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Solusi yang diupayakan Pemda DIY untuk mengatasi permasalahan di atas adalah:

1. Perlu dilakukan identifikasi dan pengembangan terhadap potensi sumber air baku untuk air minum di DIY
2. Sosialisasi kepada masyarakat yang intensif tentang pemahaman fungsi drainase dan melakukan penanganan yang lebih fokus daerah potensi dan meningkatkan kontribusi kabupaten/kota dalam penanganan banjir
3. Pembinaan intensif kepada SDM yang menangani updating data dan pemikiran akan kerjasama saling menguntungkan dengan para suplier bahan bangunan.
4. Peningkatan peran kapasitas pemangku kepentingan termasuk komunitas masyarakat di bidang perumahan, bersama-sama dengan pemerintah mengatasi permasalahan penyediaan perumahan, terutama penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
5. Peningkatan koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang dan peningkatan pengawasan terhadap alih fungsi lahan.
6. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mengatasi permasalahan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

### **3.2.15 Sasaran Terwujudnya Pemerataan Sarana dan Prasarana Publik**

Secara umum, capaian sasaran terwujudnya pemerataan sarana dan prasarana publik pada tahun 2012 cukup baik. Hal ini ditunjukkan oleh capaian indikator-indikator pada sasaran tersebut yang sebagian besar mencapai target. Capaian sasaran terwujudnya pemerataan sarana dan prasarana publik secara keseluruhan disajikan pada tabel berikut.



**Gambar 3.34 Kereta Api Pendukung Aksesibilitas Antar Wilayah**

Tabel 3.38 Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Pemerataan Sarana dan Prasarana Publik

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian 2011	2012			Target Akhir RPJMD (2013)	Capaian s/d. 2012 terhadap 2013 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1. Persentase pengembangan kawasan strategis	persen	10,53	10,53	10,53	100	64,93	63
2. Persentase layanan jaringan air limbah terpusat (APY)	persen	55	40	53,3	133	50	106,60
3. Persentase penduduk yang terlayani pengelolaan sampah	persen	66,4	70	71,40	102	75	95,20
4. Jumlah TPA sampah menggunakan sistem <i>sanitary landfill</i>	unit	2	2	2	100,00	2	100,00
5. V/C rasio kendaraan yang melintas di perkotaan	rasio	0,70	0,65	0,69	94,20	0,6	86,95
6. <i>Load factor</i> penumpang angkutan umum	persen	28,42	35	30,66	87,60	40	76,65
7. Persentase peningkatan penumpang angkutan KA jarak pendek	persen	-1,5%	5	-26,73	-267,3	5	-
8. Persentase Peningkatan rasio elektrifikasi	persen	0,018	0,015	0,587	3.913,33	0,09	655,56
9. Persentase peningkatan kapasitas energi listrik	persen	1,33	0,3	1,33	443,30	1,5	131,33

Sumber: DPUP-ESDM DIY dan Dishubkominfo DIY



**a. Persentase Pengembangan Kawasan Strategis**

Sesuai Peraturan Daerah DIY Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DIY ada 19 kawasan strategis yang akan dikembangkan. Secara umum, kawasan strategis adalah wilayah di dalam kewenangan daerah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup daerah terhadap ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan. Kawasan strategis yang akan dikembangkan tersebut adalah :

1. Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi yaitu :
  - a. Kawasan Perkotaan Yogyakarta
  - b. Kawasan Koridor Yogyakarta-Piyungan- Wonosari-Rongkop-Sadeng
  - c. Kawasan Koridor Temon-Wates-Yogyakarta-Prambanan
  - d. Kawasan Koridor Tempel-Parangtritis
  - e. Kawasan Peruntukan Industri Sentolo
2. Kawasan Strategis Pelestarian Sosial Budaya
  - a. Kraton Yogyakarta
  - b. Kotalama Kotagede
  - c. Makam Imogiri
  - d. Puropakualaman
  - e. Kawasan Malioboro
  - f. Candi-candi di Kabupaten Sleman dan Bantul
3. Kawasan Strategis Pendayagunaan SDA dan Teknologi Tinggi
  - a. Kawasan Pansela untuk pembangkit Listrik tenaga angin dan Gelombang laut
  - b. Kawasan Teknologi Tinggi di Gunung Merapi Kabupaten Sleman
4. Kawasan Strategis Lindung dan Budidaya
  - a. Kawasan Ekogeowisata Karst di Kabupaten Gunungkidul
  - b. Kawasan Parangtritis dan Gumuk Pasir di Kabupaten Bantul
  - c. Kawasan Wedi Ombo di Kabupaten Gunungkidul
5. Kawasan Strategis Pengembangan Pesisir & Pengelolaan Hasil Laut
  - a. Pantai Depok, Samas, Kwaru, Pandansimo, di Kabupaten Bantul

- b. Pantai Trisik, Karangwuni, Glagah, Congot di Kabupaten Kulon Progo
- c. Pantai Sadeng, Sundak, Baron Ngrehenan, Gesing di Kabupaten Gunungkidul

Jumlah kawasan yang dikembangkan di DIY sejumlah 19 Kawasan. Pada tahun 2012, telah dikembangkan 3 kawasan atau sebesar 10,53% melalui penyusunan konsep regulasi pengembangan kawasan pada :

- a. Kawasan Perkotaan Yogyakarta
- b. Kawasan Pantai Selatan
- c. Kawasan koridor Yogyakarta – Sadeng.

Pencapaian indikator persentase pengembangan kawasan strategis tahun 2012 sebesar 10,53% tersebut telah mencapai 100% dari target yang ditetapkan sebesar 10,53%. Dari 19 kawasan strategis yang akan dikembangkan sampai dengan tahun 2012 telah dikembangkan 11 kawasan strategis. Capaian sampai akhir 2012 bila dibandingkan dengan keseluruhan capaian maka persentase capaian 57,89%.

#### **b. Persentase Layanan Jaringan Air Limbah Terpusat (APY)**

Air limbah dan sanitasi adalah bagian kunci dari kesehatan lingkungan. Kondisi pengelolaan prasarana dan sarana sanitasi di 5 kabupaten/kota di DIY berbeda-beda sesuai kondisi kawasan. Pada prinsipnya pengelolaan pelayanan sanitasi/air limbah dibagi menjadi tiga yaitu (i) sistem setempat atau individual, (ii) sistem komunal dan (iii) sistem terpusat. Yang dimaksud dengan pembuangan air limbah terpusat adalah sistem pengumpulan air limbah melalui jaringan pengumpul dan diolah serta dibuang secara terpusat.

Cakupan pelayanan jaringan Air Limbah Terpusat di APY dihitung berdasar persentase perbandingan antara jumlah sambungan rumah terpasang dengan kapasitas IPAL Sewon. Kemampuan layanan jaringan alir limbah terpusat (APY) di IPAL Sewon sebesar 25.000 Sambungan Rumah (SR). Sampai dengan tahun 2012 telah dibangun layanan jaringan air limbah sebesar 13.329 SR atau sebesar 53,3% lebih besar dari target kinerja yang ditetapkan sebesar 40% atau dengan persentase capaian sebesar 133%. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2013 sebesar 50% maka capaian tahun 2012 sudah melampaui target atau dengan persentase capaian sebesar 106,60%.

#### **c. Persentase Penduduk yang Terlayani Pengelolaan Sampah**

Pengelolaan persampahan menjadi kunci utama bagi kesehatan lingkungan. Pelayanan minimal pengelolaan persampahan dilakukan

melalui pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Untuk mengatur pengelolaan sampah tersebut, saat ini telah ditetapkan dengan Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Undang-undang ini mengamanatkan tentang hak dan kewajiban masyarakat serta wewenang pemerintah, pemerintah daerah untuk melaksanakan pelayanan publik di bidang pengelolaan sampah. Pengaturan hukum pengelolaan sampah didasarkan asas keadilan, asas kesadaran, asas kesadarn, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan dan asas nilai ekonomi, sehingga skenario pengelolaan persampahan dengan pendekatan 3 R (*Reduse, Reuse, Recycle*), TPA yang ada sekarang kedepan diharapkan dapat menjadi Tempat Pemrosesan Akhir. Pengelolaan sampah di DIY dilakukan oleh pemerintah daerah dan oleh masyarakat secara mandiri. Untuk pengelolaan sampah di Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY) yang meliputi Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul dilakukan dengan penyediaan sistem pengelolaan sampah terpadu TPA Piyungan.

Pada tahun 2012 pengelolaan sampah melalui penyediaan sistem pengelolaan sampah di TPA, telah terlayani 1.081.679 jiwa atau 71,40 % dari jumlah penduduk perkotaan di DIY sejumlah 1.514.957 Jiwa . Hal ini telah melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 70% atau dengan persentase capaian sebesar 102%. Capaian tahun 2012 apabila dibandingkan dengan target 2013 sebesar 75% maka persentase capaiannya sebesar 95,20%.

**d. Jumlah TPA Sampah menggunakan Sistem Sanitary Landfill**

Pengelolaan sampah di TPA diarahkan menggunakan sistem *sanitary landfill*. Pada tahun 2012 telah dibangun 2 TPA sampah dengan sistem *sanitary landfill* yang berada di Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulon Progo. Dengan terbangunnya 2 unit TPA ini maka target tahun 2013 sebanyak 2 unit sudah tercapai.

**e. V/C Ratio Kendaraan yang Melintas di Perkotaan**

Pengertian tentang V/C rasio yang dipahami sebagai derajat kejenuhan lalu-lintas adalah perbandingan antara volume lalu lintas dibagi dengan kapasitas jalan. Usaha yang dilakukan untuk mencapai target V/C Ratio Kendaraan yang melintas di perkotaan sebesar 0,65 dicapai melalui beberapa program. Melalui Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum diharapkan secara perlahan-lahan pengguna angkutan pribadi akan beralih ke angkutan umum, karena angkutan umum memiliki kelebihan yaitu kapasitas angkut yang jauh lebih besar dibanding kendaraan pribadi, sehingga pemakaian ruang jalan lebih

efisien. Dengan demikian diharapkan dapat mengurangi jumlah kendaraan yang beroperasi di jalan.

Berdasarkan survei yang dilakukan dengan mengambil sampel pada 7 ruas jalan saat jam sibuk pagi, V/C ratio untuk ruas jalan masuk Yogyakarta adalah 0,69.

Capaian V/C Ratio pada tahun 2012 sebesar 0,69 bila dibandingkan dengan target sebesar 0,65, persentase capaian sebesar 94,20%. Capaian ini apabila dibandingkan dengan target tahun 2013 sebesar 0,6 atau dengan persentase capaian 86,95% maka perlu upaya yang keras mengingat meningkatnya jumlah kendaraan di DIY yaitu mengalami kenaikan 8,7% (sumber data Polda DIY). Peningkatan jumlah kendaraan akan terus terjadi pada masa yang akan datang sedangkan panjang jalan relatif tetap. Dengan kondisi yang demikian maka penting untuk dilakukan usaha-usaha mengatasi kemacetan. Sebagai langkahantisipasi perlu diterapkan 3 strategi manajemen lalu lintas yaitu manajemen kapasitas, manajemen prioritas dan manajemen permintaan.

#### **f. Persentase Load Faktor Penumpang Angkutan Umum**

Load Faktor dapat diartikan sebagai tingkat keterisian kursi. Load Faktor sangat dipengaruhi oleh pilihan masyarakat dalam memilih sarana transportasi yang digunakan untuk melakukan berbagai aktivitasnya. Secara umum, kondisi transportasi umum di DIY masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Masyarakat masih lebih mengandalkan untuk menggunakan sepeda motor dan kendaraan pribadi sebagai sarana transportasi utama. Pilihan ini tercermin dari bertambahnya kendaraan bermotor yang luar biasa dari tahun ke tahun di DIY. Upaya untuk meningkatkan load faktor angkutan umum antara lain dilakukan melalui Program Pelayanan Angkutan.

Berdasarkan data yang ada, *load factor* angkutan umum secara rata-rata adalah sebesar 30,66% belum memenuhi target sebesar 35% , dengan perincian masing-masing layanan:

- Angkutan AKDP 28%,
- Angkutan Perkotaan 22% dan
- Angkutan Trans Jogja 42%.

Capaian load faktor tahun 2012 sebesar 30,66% apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada tahun 2013 sebesar 40% maka persentasenya baru tercapai sebesar 76,65%. Untuk mencapai target *load factor* tahun 2013 bukan hal yang mudah dilakukan. Untuk mewujudkan target tersebut perlu adanya pembenahan terus-menerus

pada pelayanan dan operasional angkutan perkotaan dan AKDP serta meningkatkan pelayanan angkutan Trans Jogja.

**g. Persentase Peningkatan Jumlah Penumpang Angkutan Kereta Api Jarak Pendek**

Jumlah penumpang Kereta Api jarak pendek yang menggunakan jasa Kereta Api Prambanan Ekspres (Prameks) pada tahun 2012 mengalami penurunan. Untuk penumpang Kereta Api Prameks mengalami penurunan dari 1.346.961 penumpang di tahun 2011 menjadi 986.894 penumpang di tahun 2012 atau mengalami penurunan sebesar 26,73%. Penurunan jumlah penumpang KA karena adanya kebijakan operator PT KAI yang menerapkan okupansi penumpang 100% mulai bulan Agustus 2012 sehingga tidak ada penumpang yang berdiri. Selain itu juga adanya pengurangan frekuensi pengoperasian KA Prameks mulai Bulan November 2012 dari 16 kali dalam sehari menjadi 6 kali dalam sehari karena salah satu rangkaian kereta Prameks sedang dalam perbaikan akibat kecelakaan.

**h. Peningkatan Rasio Elektrifikasi**

Rasio elektrifikasi menandakan tingkat perbandingan jumlah penduduk yang menikmati listrik dengan jumlah total penduduk di suatu wilayah. Pada tahun 2012, jumlah RT tercatat 1.037.976 rumah tangga, dan melalui pelaksanaan program dan kegiatan APBD pada tahun 2012, dapat dilaksanakan penambahan RT berlistrik sebanyak 225 RT sehingga terdapat peningkatan ratio elektrifikasi sebesar 0,023% dan melalui dana APBN jumlah RT berlistrik meningkat sebanyak 5.851 RT atau terjadi peningkatan ratio elektrifikasi sebesar 0,564% sehingga total meningkat sebesar 0,587% atau capaian kinerja tahun 2012 sebesar 3.913,33% dibandingkan dari target 0,015%. Capaian ini dimaknai bahwa total ratio elektrifikasi pada tahun 2011 tercapai 76,21% dan tahun 2012 tercapai 76,80%.

Capaian peningkatan rasio elektrifikasi sampai dengan tahun 2012 apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2013 sebesar 0,09%, maka persentase capaiannya sebesar 655,56%.

Pembangunan bidang ketenagalistrikan diprogramkan untuk dapat mendorong kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan daerah. Disisi lain ketenagalistrikan berperan sebagai infrastruktur yang harus ada untuk mendukung kegiatan pembangunan masyarakat. Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan diprioritaskan baik untuk meningkatkan keandalan penyediaan tenaga listrik maupun memberikan akses penyediaan tenaga listrik. Penyediaan tenaga listrik yang memadai dan

berkualitas merupakan parameter penting untuk mendukung kemajuan sektor lainnya antara lain sektor industri, perdagangan, telekomunikasi dan sektor-sektor penggerak ekonomi lainnya. Sehingga ketersediaan energi listrik yang cukup akan menentukan pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Dalam upaya pemenuhan Peningkatan Rasio Elektrifikasi, APBD tahun 2012 diarahkan pada peningkatan penyediaan listrik melalui kegiatan :

- 1) Perencanaan pembangunan jaringan listrik pedesaan di 10 Dusun yang berada di Kabupaten Bantul, Kulonprogo dan Gunungkidul.
- 2) Pembangunan jaringan listrik pedesaan di 6 dusun yang berada di Dusun Tegalawas Desa Jatimulyo, Dlingo, dan Dusun Kayen, Desa Sendangsari, Pajangan Kabupaten Bantul; Dusun Sangon, Desa Kalirejo, Kokap dan Dusun Wonotawang, Samigaluh Kabupaten Kulonprogo; dan Dusun Manggul dan Dusun Karangasem, Desa Karangasem, Paliyan Kabupaten Gunungkidul.
- 3) Pengadaan dan Pemasangan PLTS sebanyak 25 unit di Desa Kalirejo, Kokap Kabupaten Kulonprogo.

**Tabel 3.39 Rasio Elektrifikasi di DIY**

No	Uraian	Lokasi	Jumlah Rumah Tangga (RT)		Ratio Elektrifikasi (%)
			Total	Sudah Berlistrik	
I.	Capaian s.d Tahun 2011	DIY	1.037.976	791.074	76,21
II.	Pelaksanaan APBN 2012 :	DIY	1.037.976	5.851	0,564
1.	Pembangunan PLTS Terpusat	Gunungkidul		30	
2.	Pembangunan Jaringan Listrik Pedesaan	DIY		5.821	
III.	Pelaksanaan APBD 2012 :		1.037.976	225	0,023
1.	Pembangunan Jaringan Listrik Perdesaan	Kulonprogo, Bantul, dan Gunungkidul		200	
2.	Pengadaan dan Pemasangan PLTS	Kulonprogo		25	

No	Uraian	Lokasi	Jumlah Rumah Tangga (RT)		Ratio Elektrifikasi (%)
			Total	Sudah Berlistrik	
	Ratio Elektrifikasi (berdasarkan jumlah RT 2012)		1.037.976	797.150	76,8

Sumber: DPUP-ESDM DIY

#### i. Peningkatan Kapasitas Energi Listrik

Pembangunan energi daerah yang berkelanjutan diarahkan pada pengembangan potensi sumber daya dan kemampuan daerah yang sejalan dengan peningkatan kemandirian, daya saing dan nilai tambah daerah. Kebijakan diversifikasi energi atau penganekaragaman energi melalui pengembangan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan yang telah dilakukan di daerah, antara lain dengan pemanfaatan tenaga air, angin, surya dan biogas.

Keseluruhan potensi energi baru dan terbarukan di DIY kurang lebih sebesar 20 MW yang meliputi tenaga air 0,750 MW, tenaga surya 0,5 MW, tenaga angin 16 MW dan biomassa 2,75 MW. Sedangkan yang layak dibangkitkan menjadi tenaga listrik kurang lebih 10 MW.

Dalam rangka upaya pemenuhan Peningkatan Kapasitas Energi Listrik, dilakukan upaya melalui kegiatan :

- 1) Pembangunan 1 Unit Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat yang dibangun di Dusun Rejosari, Desa Serut, Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul dengan kapasitas 15 kW
- 2) Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Desa Kalirejo, Kokap, Kabupaten Kulon Progo.
- 3) Peningkatan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Dusun Kedungrong, Purwoharjo, Samigaluh, Kulon Progo
- 4) Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLT Biogas) di Dusun Cangkring, Desa Sumberagung, Jetis Kabupaten Bantul; Dusun Duwet, Desa Banjarharjo, Kalibawang, Kabupaten Kulonprogo; Dusun Karangduwet, Desa Karangrejek, Wonosari, Kabupaten Gunungkidul; dan Dusun Glagahombo, Desa Pondokrejo, Tempel, Kabupaten Sleman.

Sampai dengan tahun 2011, total jumlah energi terbarukan yang dapat dibangkitkan sebesar 582,35 kW dari total potensi 10.000 kW (10 MW). Kapasitas energi listrik yang telah dibangkitkan melalui program dan

kegiatan APBD serta APBN di DIY pada tahun 2012 sebesar 47 kW, sehingga meningkat 0,47% dari target sebesar 0,30%.

**Tabel 3.40 Kapasitas Energi Listrik di DIY Tahun 2011-2012**

No	Uraian	Lokasi	Kapasitas Energi Listrik		
			Potensi Total (kW)	Terbangkitkan	
				kW	%
I.	Capaian s.d Tahun 2011	Tersebar di DIY	10.000	582,35	5,82
II.	Pelaksanaan 2012			47	0,47
A	APBN				
	Pembangunan 1 unit Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat	Gunungkidul		15	
B	APBD				
1.	Pemasangan PLTS	Kulonprogo		5	-
2.	Pembangunan PLTMH	Kulonprogo		15	
3.	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas	Sleman, Kulonprogo, Bantul, Gunungkidul		12	
Kapasitas Energi Listrik yang dapat dibangkitkan s.d. 2012 (dari total potensi 10.000 kW)				629,35	6,29

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran terwujudnya pemerataan sarana dan prasarana publik dapat dicapai sesuai dengan target. Keberhasilan ini tidak terlepas dari dilaksanakan berbagai program utama antara lain adalah :

1. Program Pengembangan Pengelolaan Air Limbah
2. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Ketenagalistrikan
3. Program Pengelolaan Air Tanah Berwawasan Konservasi
4. Program Pengelolaan Persampahan
5. Program Pembinaan, Pengawasan Dan Pengembangan Energi
6. Program Pembinaan, Pengawasan Dan Pengembangan Bahan Bakar
7. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
8. Program Manajemen Dan Rekayasa Lalulintas
9. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Beberapa program utama tersebut dinilai mempunyai kontribusi yang besar dalam upaya pencapaian target indikator yang sudah ditetapkan. Untuk mendukung pencapaian target tahun 2013, berbagai

program utama yang dapat mencapai target dari indikator yang telah ditetapkan layak untuk diteruskan. Sementara bagi beberapa yang masih belum dapat mencapai target perlu upaya lebih fokus dalam pelaksanaan kegiatan yang akan mendukung program tersebut.

### Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi Pemda DIY diantaranya adalah:

1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan air limbah serta keterbatasan kapasitas keuangan Pemda DIY dan Kabupaten/Kota dalam pengembangan cakupan pelayanan air limbah terpusat.
2. *Load factor* angkutan umum belum dapat dicapai melalui 3 jenis moda pelayanan angkutan umum yang ada (AKDP, Perkotaan dan Trans Jogja). Layanan Trans Jogja diharapkan dapat meningkatkan *load factor* penggunaan angkutan umum secara keseluruhan.
3. Masih terdapat kurang lebih 244 dusun yang sebagian besar KK nya belum menggunakan jaringan listrik terutama di berbagai wilayah terpencil yang pada umumnya belum berkembang, karena pembangunan jaringan listrik di wilayah-wilayah tersebut memerlukan investasi yang cukup besar.

Solusi yang diupayakan Pemda DIY untuk mengatasi permasalahan di atas adalah:

1. Peningkatan sosialisasi untuk meningkatkan komitmen Sambungan Rumah (SR), serta penyusunan regulasi yang mewajibkan masyarakat di kawasan APY untuk memanfaatkan jaringan air limbah terpusat
2. Pelaksanaan dan pengoperasian manajemen angkutan umum harus didukung oleh semua *stakeholders* yang terkait sehingga akan dapat tercapai pelayanan angkutan umum yang aman, cepat, nyaman, terjadwal dan berkelanjutan.

Dalam rangka pemenuhan jaringan listrik di perdesaan, perlu dilakukan koordinasi secara terpadu antara pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun kabupaten dengan PT. PLN (Persero) khususnya pada wilayah-wilayah yang secara teknis dan ekonomis tidak layak dibangun jaringan.

### 3.2.16 Sasaran Terwujudnya Ketahanan Masyarakat terhadap Bencana



**Gambar 3.35 Ketahanan Masyarakat Terhadap Bencana**

kebakaran dan angin ribut.

Berdasarkan data kejadian bencana Tahun 2012, dapat diambil kesimpulan bahwa status bencana adalah lokal, sedangkan ancaman bencana tertinggi wilayah DIY adalah tanah longsor dan ancaman bencana tertinggi kedua adalah kebakaran dan angin ribut dengan titik rawan bencana meliputi wilayah Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Bantul. Bencana tanah longsor tercatat paling banyak terjadi pada Bulan Oktober, November dan Desember saat curah hujan mencapai titik tertinggi. Di wilayah Kabupaten Kulon Progo bencana tanah longsor menempati urutan pertama dengan cakupan titik rawan terbanyak yakni meliputi Kulon Progo bagian utara. Topografi bagian utara merupakan dataran tinggi/perbukitan Menoreh dengan ketinggian antara 500-1.000 meter di atas permukaan laut meliputi Kecamatan Girimulyo, Kokap, Kalibawang, Samigaluh dan sebagian Kecamatan Pengasih. Sedangkan untuk Gunungkidul titik rawan bencana tanah longsor 10 Kecamatan yakni Purwosari, Semin, Gedangsari, Panggang, Nglipar, Ngawen, Playen, Ponjong, Patuk dan Girisubo.

Pemerintah Daerah DIY sudah mengantisipasi timbulnya bencana sesuai dengan sistem manajemen bencana melalui pengembangan regulasi yang memadai, perencanaan dan penganggaran, pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia. Paradigma penanggulangan bencana sudah dikembangkan dari pola responsif-tanggap darurat menjadi upaya pencegahan dan pengurangan resiko bencana. Melihat wilayah DIY sebagai wilayah rawan bencana maka salah satu upaya yang harus dikedepankan adalah meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana.

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan wilayah rawan bencana dengan intensitas yang cukup tinggi dan dengan jenis bencana yang beragam. Sejarah bencana yang pernah terjadi di DIY merupakan bencana alam dan non alam serta bencana sosial akibat ulah manusia antara lain banjir, epidemi dan wabah penyakit, gelombang ekstrem dan abrasi, gempa bumi, kekeringan, letusan gunung api, cuaca ekstrim, tanah longsor,

Pada Tahun 2012 Pemda DIY bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjadi penyelenggara pertemuan tingkat menteri se ASEAN tentang kebencanaan atau AMC DRR 2012 (*Asian Ministry Conference of Disaster Risk Reduction*) yang berlangsung dari tanggal 25 - 28 Oktober 2012 dan dibuka langsung oleh Presiden RI.

Indikator terwujudnya ketahanan masyarakat terhadap bencana terdiri Jumlah lembaga penanggulangan bencana dalam masyarakat dan Jumlah regulasi tentang pengurangan resiko bencana. Jumlah lembaga penanggulangan bencana dalam masyarakat yang terealisasi sebanyak 2 dari yang ditargetkan sebanyak 2 unit atau dengan persentase capaian 100%. Jumlah lembaga penanggulangan bencana pada tahun 2012 yang terbentuk adalah :

1. BPBD Kota Yogyakarta
2. BPBD Kabupaten Sleman

Regulasi tentang pengurangan resiko bencana yang dapat direalisasi pada tahun 2012 ada 3 buah atau dengan persentase capaian sebesar 150% dari yang ditargetkan sebanyak 2 buah yaitu:

1. Penyusunan Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana.
2. Penyusunan Rencana Kontijensi Banjir.
3. Penyusunan Pedoman Kebijakan Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Akibat Bencana.

Ada 2 draft yang sedang dibuat, dan rencananya akan diselesaikan pada Tahun 2013, yaitu:

1. Penyusunan Draft Peraturan Gubernur tentang Penanganan Kedaruratan
2. Penyusunan Draft Peraturan Gubernur tentang Evakuasi

Sasaran Terwujudnya Ketahanan Masyarakat terhadap Bencana diwujudkan melalui program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam. Capaian indikator pada tahun 2012 sudah sesuai dengan target yang ditetapkan. Untuk mendukung capaian tahun 2013 dengan program yang sudah ada diharapkan dapat direalisasikan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan.

**Tabel 3.41 Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Ketahanan Masyarakat Terhadap Bencana**

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian 2011	2012			Target Akhir RPJMD (2013)	Capaian s/d. 2012 terhadap 2013 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian 2011	2012			Target Akhir RPJMD (2013)	Capaian s/d. 2012 terhadap 2013 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1. Jumlah lembaga penanggulangan bencana dalam masyarakat	unit	3	2	2	100	6	83,33%
2. Jumlah regulasi tentang pengurangan resiko bencana	buah	3	2	3	150	9	288,89%

Sumber: BPBD DIY

Sampai dengan Tahun 2011 telah disusun 23 regulasi tentang pengurangan resiko bencana, sedangkan pada Tahun 2012 telah disusun 3 buah regulasi, sehingga sampai dengan Tahun 2012 telah disusun 26 regulasi, yang berarti telah melampaui dari target RPJMD.

### Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi Pemda DIY adalah :

1. Masih kurang lancarnya pelaporan data berkala dari Pusdalops Kabupaten/Kota.
2. Regulasi terkait rencana kontigensi terhadap jenis ancaman bencana selalu berubah setiap tahun.
3. Perlunya kajian risiko untuk masing-masing ancaman bencana di DIY.
4. Masih banyaknya desa rawan bencana yang belum mengembangkan kesiapsiagaan menghadapi bencana (desa siaga bencana).
5. Perlunya peningkatan kapasitas dalam pengelolaan komando tanggap darurat.

Solusi yang diupayakan Pemda DIY untuk mengatasi permasalahan di atas pada tahun 2012 telah dianggarkan untuk kegiatan :

1. Penguatan kelembagaan Pusdalops Penanggulangan Bencana (PB) DIY.
2. Regulasi yang ada perlu dilakukan secara periodik dengan melaksanakan review dan penyempurnaan regulasi yang terkait dengan rencana kontigensi terhadap berbagai macam ancaman bencana.
3. Menyusun kajian risiko bencana berdasar prioritas.
4. Pengembangan desa dan sekolah siaga bencana.

5. Penyiapan aparatur dan stakeholder dalam sistem komando darurat bencana.

### 3.2.17 Sasaran Terwujudnya Pembangunan Daerah yang Berwawasan Lingkungan

Sasaran terwujudnya pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan diwujudkan melalui 2 pengelompokan indikator kinerja utama yaitu kualitas udara dan kualitas air tanah/sungai. Capaian kinerja sasaran terwujudnya pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan pada tahun 2012 disajikan sebagai berikut.



**Gambar 3.36 Kondisi Sungai Code Yogyakarta**

Tabel 3.42 Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Pembangunan Daerah yang Berwawasan Lingkungan

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian 2011	2012			Target Akhir RPJMD (2013)	Capaian s/d. 2011 terhadap 2013 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1. Kualitas Udara:							
a. Konsentrasi CO	ppm	6,29	< 14	7,00	100,00	<13	100,00
b. Konsentrasi HC	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	100,34	< 145	64,31	100,00	<140	100,00
c. Konsentrasi Pb	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	0,94	< 2	0,28	100,00	< 2	100,00
d. Konsentrasi NOx	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	51,20	< 400	27,82	100,00	< 400	100,00
e. Konsentrasi partikulat	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	31,14	< 150	29,50	100,00	<150	100,00
2. Kualitas Air:							
a. Konsentrasi BOD	mg/lt	6,63	< 9	6,935	100,00	<8	100,00
b. Konsentrasi COD	mg/lt	20,21	< 45	15,599	100,00	<40	100,00
c. Konsentrasi Bakteri Coli (air sungai)	MPN/100 ml	91.681	< 75.000	626.689,8	-835,59%	<75.000	Tidak tercapai
d. Fluktuasi muka air tanah	cm	197	253	186,5	123,60	248	135,66

Sumber: BLH DIY

### 3.2.17.1 Kualitas Udara

Perwujudan kualitas lingkungan yang sehat merupakan bagian pokok di bidang kesehatan. Udara sebagai komponen lingkungan yang penting dalam kehidupan perlu dipelihara dan ditingkatkan kualitasnya sehingga dapat memberikan daya dukung bagi makhluk hidup untuk hidup secara optimal. Pencemaran udara dewasa ini semakin menampakkan kondisi yang sangat memprihatinkan. Sumber pencemaran udara dapat berasal dari berbagai kegiatan antara lain industri, transportasi, perkantoran, dan perumahan. Berbagai kegiatan tersebut merupakan kontribusi terbesar dari pencemar udara yang dibuang ke udara bebas. Sumber pencemaran udara juga dapat disebabkan oleh berbagai kegiatan alam, seperti kebakaran hutan, gunung meletus, gas alam beracun.

Dampak dari pencemaran udara tersebut adalah menyebabkan penurunan kualitas udara, yang berdampak negatif terhadap kesehatan manusia. Udara merupakan media lingkungan yang merupakan kebutuhan dasar manusia perlu mendapatkan perhatian serius. Pertumbuhan pembangunan seperti industri, transportasi dan lain-lain disamping memberikan dampak positif namun disisi lain akan memberikan dampak negatif dimana salah satunya berupa pencemaran udara dan kebisingan yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan terjadinya penularan penyakit.

Indikator yang digunakan untuk mengetahui kualitas udara antara lain konsentrasi karbon monoksida (CO), konsentrasi Hidro Carbon (HC), konsentrasi timbal (Pb), konsentrasi Nitrogen Oksida (NO<sub>x</sub>) dan konsentrasi partikulat. Target kinerja capaian pencemaran udara tahun 2011 yang ditetapkan untuk konsentrasi CO udara ambien adalah kurang dari 14 ppm dan HC kurang dari 145 µg/m<sup>3</sup>. Target kinerja konsentrasi Pb kurang dari 2 µg/m<sup>3</sup>, konsentrasi NO<sub>x</sub> kurang dari 400 µg/m<sup>3</sup> dan konsentrasi Partikulat kurang dari 150 µg/m<sup>3</sup>.

Untuk kualitas udara ambien digunakan parameter utama yaitu konsentrasi *Carbon Monoksida (CO)*, *Hidro Carbon (HC)*, *Plumbum (Pb)*, *Nitrogen Oksida (NO<sub>x</sub>)*, dan konsentrasi partikulat. Target parameter tersebut telah tercapai, bahkan telah terjadi peningkatan kualitas udara ambien berdasarkan konsentrasi parameter tersebut di atas, meskipun demikian ada sedikit penurunan kualitas untuk konsentrasi CO dimana pada tahun 2011 sebesar 6,29 ppm dan pada tahun 2012 sebesar 7,00 ppm. Walaupun terjadi peningkatan konsentrasi CO, namun realisasi kinerja tersebut telah memenuhi target karena target konsentrasi CO untuk tahun 2012 adalah <14 ppm.

Realisasi yang dapat dicapai untuk parameter CO konsentrasi rerata adalah 6,29 ppm, sedangkan untuk parameter HC konsentrasi rerata adalah 100,34  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ , sehingga persentasenya dalam hal ini untuk kedua parameter tersebut masing-masing 100%. Realisasi Data kualitas udara ambien untuk kedua parameter tersebut didasarkan pada hasil pemantauan yang dilakukan pada 12 lokasi titik pantau di jalan-jalan protokol, tersebar di 4 kabupaten/kota se-DIY yakni Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Bantul, dan Kulon Progo. Realisasi untuk parameter konsentrasi Pb 0,94  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ , konsentrasi  $\text{NO}_x$  51,20  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  dan konsentrasi Partikulat 31,14  $\mu\text{g}/\text{m}^3$

Keberhasilan penurunan pencemaran udara antara lain didukung oleh semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dalam merawat mesin kendaraan seiring lebih efektifnya upaya penyadaran masyarakat tentang penataan baku mutu emisi kendaraan bermotor, peningkatan efektifitas penerapan Peraturan Daerah Nomor : 5 Tahun 2007 Provinsi DIY tentang Pengendalian Pencemaran Udara serta Peningkatan Dan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

### 3.2.17.2 Kualitas Air Tanah/Sungai

Kualitas sumber air dari umumnya tercemar oleh limbah organik yang berasal dari limbah penduduk dan limbah dari aktivitas industri. Sungai mempunyai fungsi yang strategis dalam menunjang pengembangan suatu daerah memiliki peran yang penting, diantaranya sebagai sumber air minum, industri dan pertanian.

Indikator yang digunakan untuk mengetahui peningkatan atau penurunan kualitas air adalah parameter *Biological Oxygen Demand* (BOD) dan *Chemical Oxygen Demand* (COD) air sungai. Parameter utama yang digunakan untuk menilai kualitas air sungai adalah *Biological Oxygen Demand* (BOD) dan *Chemical Oxygen Demand* (COD). Data realisasi kinerja menunjukkan kualitas air sungai pada tahun 2012 masih bagus karena nilai BOD dan COD sudah memenuhi target yakni untuk BOD sebesar 6,935 mg/l, adapun target yang harus dicapai sebesar < 9 mg/l. Meskipun demikian ada sedikit penurunan kualitas bila dibandingkan dengan nilai BOD yang dicapai pada tahun 2011 yakni 6,63 mg/l. Nilai COD pada tahun 2012 sebesar 15,599 mg/l, adapun targetnya sebesar < 45 mg/l. Pada tahun 2011 nilai COD diperoleh sebesar 20,21 mg/l, berarti berdasarkan parameter COD menunjukkan kualitas air sungai semakin membaik dengan kata lain terjadi penurunan pencemaran kualitas air sungai. Parameter utama berupa bakteri coli di tahun 2012 sebesar 626.689,8 MPN/100 ml, meningkat dibandingkan pada tahun 2011 sebesar 91.681 MPN/100 ml. Dengan demikian target realisasi kinerja sebesar < 75.000 MPN/100 ml belum dapat dicapai. Angka tersebut menunjukkan

telah terjadi penurunan kualitas air sungai atau peningkatan pencemaran air sungai oleh bakteri coli. Belum tercapainya penurunan jumlah bakteri coli disebabkan masih banyak rumah tangga yang mengalirkan limbahnya ke sungai tanpa pengolahan terlebih dahulu, serta sumber-sumber pencemar lain yang ilegal. Untuk mempercepat tercapainya target akan terus diupayakan untuk peningkatan kesadaran masyarakat serta fasilitasi yang diperlukan.

Data kualitas air sungai ini didasarkan pada hasil pemantauan kualitas air sungai Tahun 2012, dari 11 sungai utama (Sungai Code, Sungai Gadjahwong, Sungai Winongo, Sungai Oyo, Sungai Tambak Bayan, Sungai Bedok, Sungai kuning dan Sungai konteng, Sungai Progo, Sungai Opak dan Sungai Serang) di DIY, pada 33 titik pantau yang masing-masing titik dianalisis kualitas airnya sebanyak 3-5 kali dalam 1 tahun.

Perbaikan kualitas air sungai tersebut dikarenakan peningkatan ketaatan para pelaku usaha dalam mengoptimalkan penggunaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) dan pemenuhan baku mutu limbah sebelum dibuang ke badan air. Disamping itu adanya peningkatan kesadaran para pelaku usaha terutama yang tergabung dalam Program *waste water minimize* (W2M) dan menerapkan metode *reduce, recycle* dan *reuse* dalam penggunaan air. Dari data hasil pemantauan *outlet* Instalasi Pengolah Limbah Cair (IPLC) kegiatan usaha pada tahun 2012 secara umum menunjukkan kualitas buangan limbahnya semakin membaik. Peningkatan kualitas air sungai juga disebabkan pula oleh efektifnya fungsi *riool* kota dalam memberikan pelayanan pembuangan limbah rumah tangga ke saluran IPAL Sewon Bantul, terutama bagi rumah tangga yang berada di daerah aglomerasi Kota Yogyakarta.

Penurunan fluktuasi muka air tanah didasarkan pada perbedaan kedalaman dari hasil pengukuran muka air tanah (sumur) dari permukaan tanah pada saat musim kemarau dibandingkan dengan pada saat musim penghujan. Capaian kinerja penurunan fluktuasi muka air tanah dari tahun ke tahun menunjukkan hasil yang semakin baik dan memenuhi target yang ditetapkan. Pada Tahun 2008 Fluktuasi muka air tanah terukur 273 cm. Pada tahun 2009 Realisasi capaian tersebut adalah 188 cm, adapun target kinerja yang ditetapkan sebesar 268 cm. Ini berarti terjadi peningkatan kuantitas air tanah sebesar 30 % dari yang telah ditargetkan. Angka penurunan fluktuasi muka air tanah untuk tahun 2010 relatif kecil yakni 76 cm, terutama disebabkan oleh pendeknya musim kemarau, disamping karena keberhasilan dalam pelaksanaan konservasi air melalui kegiatan pembuatan SPAH, lubang biopori maupun penghijauan. Pada tahun 2011 target kinerja fluktuasi muka air tanah yang

ditetapkan adalah sebesar 258 cm, sedangkan realisasi capaiannya sebesar 197 cm, sehingga realisasi atau capaiannya mencapai 123,6 persen. Realisasi kinerja penurunan fluktuasi muka air tanah pada tahun 2012 adalah 186,5 cm dengan target kinerja sebesar 253 cm, dengan demikian realisasinya telah memenuhi target bahkan lebih bagus dari target yang ditetapkan, hal ini ditunjukkan oleh persentase realisasinya yang mencapai 135,66 %. Semakin kecil selisih kedalaman air tanah pada saat musim kemarau dan musim penghujan berarti ketersediaan air tanah secara kuantitatif semakin stabil (membaik). Kondisi tersebut menggambarkan peningkatan kuantitas air tanah yang cukup signifikan. Data perhitungan ini berdasarkan hasil pemantauan muka air tanah pada 33 titik lokasi pemantauan, yang tersebar di Kabupaten Sleman, Bantul, dan Kota Yogyakarta, terutama di sekitar Sungai Code, Sungai Winongo, dan Sungai Gadjahwong. Untuk meningkatkan kuantitas muka air tanah ini dilakukan dengan melaksanakan kegiatan konservasi air (di daerah tangkapan air), melalui pembuatan Sumur Peresapan Air Hujan (SPA), gerakan pembuatan lubang sejuta biopori serta penghijauan. Disamping disebabkan hasil dari pelaksanaan kegiatan tersebut, penurunan fluktuasi muka air tanah secara alami pada tahun 2011 dan 2012 didukung oleh intensitas curah hujan yang cukup tinggi.

Secara umum capaian indikator pada sasaran Terwujudnya Pembangunan Daerah yang Berwawasan Lingkungan dapat dicapai sesuai target. Keberhasilan ini tidak terlepas dari dilaksanakan berbagai program utama antara lain:

1. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
2. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
4. Program Peningkatan Pengendalian Polusi
5. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
6. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Melalui pelaksanaan beberapa program di atas, kualitas udara dan kualitas air tanah/sungai dapat diwujudkan sesuai dengan target yang ditentukan. Satu indikator yang capaiannya di bawah target yaitu konsentrasi bakteri coli perlu mendapat perhatian lebih di masa yang akan datang. Keberadaan bakteri coli menjadi salah satu indikator untuk menentukan tingkat kualitas air. Keberadaan bakteri coli dapat dijadikan indikator terjadinya pencemaran yang berasal dari *feces* baik yang berasal dari manusia maupun hewan. Untuk mencapai indikator konsentrasi bakteri coli sesuai dengan target yang sudah ditetapkan maka melalui

beberapa program yang sudah dirancang perlu diperkuat peran serta masyarakat karena sumber bakteri coli berasal dari aktivitas masyarakat yang bersumber dari rumah tangga dan aktivitas pertanian dengan pupuk organik.

### Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi Pemda DIY diantaranya adalah:

1. Keberadaan kawasan pesisir di DIY, merupakan sebuah potensi bagi pengembangan wilayah yang sampai saat ini belum optimal dan komprehensif yang terpadu dengan Pansela (Pantai Selatan).
2. Bagi sebagian besar para pelaku usaha, masyarakat dan para pengambil kebijakan masih beranggapan bahwa melakukan proses produksi yang ramah lingkungan memerlukan biaya yang mahal dan memperbesar ongkos produksi sehingga memperkecil keuntungan atau menghambat investasi. Pemahaman yang seperti ini merupakan tantangan dalam upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan.
3. Masih kurangnya keterlibatan aktif dan keterpaduan secara luas dari berbagai pihak, maka tingkat keberhasilannya relatif kecil. Keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup memerlukan kesadaran dan keterlibatan berbagai pihak, lintas pelaku, lintas wilayah administrasi serta lintas kepentingan. Pola pikir, sikap dan prilaku sebagian besar warga kita yang masih belum berorientasi kuat dan mengedepankan aspek lingkungan. Kondisi ini menyebabkan program pengelolaan lingkungan hidup tidak cepat mendapat respon positif dan berkembang di masyarakat.
4. Penurunan kualitas udara di DIY merupakan masalah dan tantangan yang harus dihadapi pada masa mendatang. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor menjadi salah satu penyebab memburuknya kualitas udara pada ruas-ruas jalan terutama pada saat padat kendaraan di lokasi simpang, titik-titik kemacetan dan pusat-pusat aktifitas penduduk. Di sisi lain, salah satu sumber utama pendapatan daerah adalah dari pemasukan pajak kendaraan bermotor.

Solusi yang diupayakan Pemerintah Daerah DIY untuk mengatasi permasalahan di atas adalah:

1. Pengembangan kawasan Pansela memerlukan sebuah kearifan sekaligus penanganan yang spesifik terkait dengan kondisi eksisting kawasan pesisir dibanding kawasan lain di wilayah DIY. Pada tahun 2012 telah dilakukan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kawasan Pesisir dan perlu disusun

- rencana detail tata ruang kawasan Pantai Selatan. Kajian tersebut dimaksudkan untuk melihat sinergisitas perencanaan kawasan pesisir dengan melihat daya dukung dan daya tampung kawasan pesisir DIY.
2. Melakukan pendekatan dalam pengelolaan lingkungan hidup dengan menggunakan paradigma baru bahwa sampah dan limbah adalah merupakan sumberdaya yang masih potensial untuk dimanfaatkan dan mempunyai nilai ekonomis serta penekanan pendekatan nilai manfaat ekonomis dan sosial yang akan diperoleh bagi berbagai pihak baik jangka pendek, menengah dan panjang
  3. Memperbesar sinergisitas dan kerjasama seluas-luasnya dengan berbagai pihak, mendorong terbentuknya jejaring pengelolaan lingkungan hidup lintas wilayah administrasi, lintas pelaku serta memperbanyak mitra kerja terutama dari dunia usaha melalui *Corporate Social Responsibility*-nya, lembaga swadaya masyarakat dan perguruan tinggi.
  4. Menindaklanjuti Perda 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pencemaran Udara dengan melakukan uji emisi kendaraan bermotor serta mendorong kepada para pemilik kendaraan terutama kendaraan umum untuk menjaga kualitas mesin dan memperhatikan emisi knalpot, kerjasama dengan instansi terkait untuk melaksanakan upaya perbaikan sistem transportasi.
  5. Mengembangkan pola pengelolaan lingkungan hidup berbasis masyarakat dengan banyak melakukan fasilitasi untuk menumbuhkan dan mengembangkan inisiatif serta partisipasi lokal masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.

### 3.3 AKUNTABILITAS ANGGARAN

---

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2012 sebesar 83,56% dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 83,35%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 84,187%. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran Terwujudnya kesetaraan gender (98,19%). Sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan di sasaran Terwujudnya ketahanan masyarakat terhadap bencana (41,47%).

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2012 telah mencukupi.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2012 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.43 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2012**

No	Sasaran	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
1	Terwujudnya peningkatan kualitas lulusan di semua jenjang dan jalur pendidikan	93.731.276.591	78.039.857.527	83,26
2	Terwujudnya peningkatan aksesibilitas pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif			
3	Terwujudnya peningkatan budaya baca masyarakat	57.310.050.350	50.555.915.799	88,21
4	Terwujudnya peningkatan prestasi olahraga	11.945.687.000	9.271.734.002	77,62
5	Berkembang dan lestarnya budaya lokal, kawasan budaya dan Benda Cagar Budaya (BCB)	31.424.893.575	30.178.170.738	96,03
6	Terwujudnya peningkatan kualitas kehidupan sosial masyarakat	11.253.687.235	10.437.371.433	92,75
7	Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Kesehatan bagi Seluruh Masyarakat	88.996.538.667	54.078.109.391	60,76

No	Sasaran	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
8	Terwujudnya Kepariwisataaan yang Berdaya Saing Tinggi	6.789.579.377	6.358.447.948	93,65
9	Terwujudnya Peningkatan Ketahanan Ekonomi Masyarakat	31.550.566.930	29.364.524.064	93,07
10	Terwujudnya Ketersediaan dan Kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat	2.577.968.400	2.479.618.174	96,18
11	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pengelolaan Ketenagakerjaan	14.710.619.025	13.517.541.152	91,89
12	Terwujudnya Pemerintahan yang Responsif, Transparan dan Akuntabel	74.243.999.490	59.217.637.424	79,76
13	Terwujudnya kesetaraan gender	2.323.681.600	2.281.640.508	98,19
14	Terwujudnya ketersediaan infrastruktur yang memadai baik kuantitas dan kualitas	214.395.020.641	184.866.522.237	86,23
15	Terwujudnya pemerataan sarana dan prasarana public	71.041.948.103	63.852.637.067	89,88
16	Terwujudnya ketahanan masyarakat terhadap bencana	3.594.088.690	1.490.472.710	41,47
17	Terwujudnya pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan	5.682.372.850	5.417.338.549	95,34
<b>Jumlah</b>		<b>721.571.978.524</b>	<b>601.407.538.722</b>	<b>83,35</b>
<b>Belanja Langsung Pendukung</b>		<b>253.383.814.223</b>	<b>213.304.045.250</b>	<b>84,18</b>
<b>Total Belanja Langsung</b>		<b>974.955.792.747</b>	<b>814.711.583.972</b>	<b>83,56</b>

# BAB 4

## PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2012, serta Penetapan Kinerja Tahun 2012 sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan *good governance*.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 17 sasaran, ditetapkan indikator kinerja sasaran sebanyak 112 indikator

Penyelenggaraan Pemerintahan di DIY pada Tahun Anggaran 2012 merupakan tahun IV dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY Tahun 2009-2013. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua komponen Pemerintah Daerah dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan, sehingga target tahun 2013 yang merupakan tahun terakhir RPJMD DIY Tahun 2009-2013 dapat terwujud. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan akuntabilitas kinerja Pemerintah DIY tahun 2012 dapat disimpulkan sebagai berikut:

### 4.1 KESIMPULAN

---

1. Keberhasilan capaian kinerja sasaran pembangunan yang dicerminkan dari capaian indikator kinerja utama ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain SDM (pemerintah, masyarakat, dan pelaku pembangunan lainnya), anggaran, faktor alam, dan sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota.

2. Dari analisis 17 sasaran pembangunan, terdapat 112 indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolak ukur. Pada tahun 2012, 76 indikator yang telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar 67,86% dari total indikator. Sementara itu, sebanyak 36 indikator atau sebesar 32,14% belum memenuhi target. Tidak tercapainya target disebabkan oleh berbagai faktor kendala. Selanjutnya, ada 2 indikator di tahun 2012 tidak ada realisasinya yaitu:

- a. Indikator peringkat pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS);
- b. Indikator peringkat pada Pekan Olahraga dan Seni Antar Pondok Pesantren Nasional (POSPENAS);

pada indikator a dan b tersebut di atas penyelenggaraan yang sedianya diselenggarakan pada tahun 2012 dialihkan pada tahun 2013, karena yang semula dilaksanakan 2 tahun sekali, diubah menjadi 3 tahun sekali.

## 4.2 SARAN

---

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan peningkatan kualitas penerapan SAKIP di Pemda DIY dirumuskan saran-saran sebagai berikut:

1. Dibutuhkan komitmen seluruh jajaran Pemda DIY akan pentingnya penerapan SAKIP agar pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dilakukan dengan efektif dan efisiensi serta berhasil guna;
2. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan kapasitas SDM tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta kemampuan teknis di jajaran Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang akuntabel;
3. Perlu adanya kebijakan yang memudahhi penerapan SAKIP di instansi pemerintah agar tercipta kejelasan arah dalam penerapan SAKIP yang baik dan benar di jajaran instansi pemerintah, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian Penetapan Kinerja (PK).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemda DIY tahun 2012 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen

perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

## LAMPIRAN

### KINERJA MUTU SD PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2012/2013

No.	Kabupaten /Kota	INDIKATOR						KINERJA MUTU SD						
		%Guru Layak	Angka Lulusan	%RK b	% Perpus	Angka Putus Sekola h	Angka Mengulan g	% Guru Layak	Angka Lulusa n	% RKb	% Perpus	Angka Putus Sekolah	Angka Mengulang	Jumla h
								0,4	0,2	0,1	0,2	0,05	0,05	1,0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Bantul	74,39	98,74	85,71	87,96	0,08	4,09	29,76	19,75	8,57	17,59	0,00	0,20	75,46
2	Sleman	67,40	96,60	74,22	63,17	0,04	3,43	26,96	19,32	7,42	12,63	0,00	0,17	66,16
3	Gunungkidul	40,26	99,20	73,51	65,06	0,11	3,58	16,10	19,84	7,35	13,01	0,01	0,18	56,12
4	Kulon Progo	61,05	99,91	78,26	74,05	0,09	4,85	24,42	19,98	7,83	14,81	0,00	0,24	66,79
5	Yogyakarta	78,92	99,35	92,70	108,72	0,03	2,46	31,57	19,87	9,27	20,00	0,00	0,12	80,58
	<b>Rata-rata</b>	<b>62,67</b>	<b>98,45</b>	<b>79,34</b>	<b>74,32</b>	<b>0,07</b>	<b>3,64</b>	<b>25,07</b>	<b>19,69</b>	<b>7,93</b>	<b>14,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,18</b>	<b>67,37</b>

### KINERJA MUTU SMP PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2012/2013

No.	Kabupaten /Kota	INDIKATOR						KINERJA MUTU SMP						
		%Guru Layak	Angka Lulusan	%RKB	% Perpus	Angka Putus Sekolah	Angka Mengulang	% Guru Layak	Angka Lulusan	% RKB	% Perpus	Angka Putus Sekolah	Angka Mengulang	Jumlah
								0,4	0,2	0,1	0,2	0,05	0,05	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Bantul	87,91	98,65	91,87	82,73	0,11	0,41	35,17	19,73	9,19	16,55	0,01	0,02	80,60
2	Sleman	84,52	94,27	91,33	78,29	0,11	0,40	33,81	18,85	9,13	15,66	0,01	0,02	77,43
3	Gunungkidul	80,82	105,50	79,02	63,70	0,36	0,14	32,33	20,00	7,90	12,74	0,02	0,01	72,95
4	Kulon Progo	82,11	89,67	88,94	83,12	0,21	0,20	32,84	17,93	8,89	16,62	0,01	0,01	76,27
5	Yogyakarta	90,21	93,49	96,13	80,30	0,05	0,56	36,08	18,70	9,61	16,06	0,00	0,03	80,42
	<b>Rata-rata</b>	<b>85,08</b>	<b>96,83</b>	<b>89,49</b>	<b>76,40</b>	<b>0,16</b>	<b>0,35</b>	<b>34,03</b>	<b>19,37</b>	<b>8,95</b>	<b>15,28</b>	<b>0,01</b>	<b>0,02</b>	<b>77,60</b>

### KINERJA MUTU SM PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2012/2013

No.	Kabupaten /Kota	INDIKATOR						KINERJA MUTU SM						
		%Guru Layak	Angka Lulusan	% RKB	% Perpus	Angka Putus Sekolah	Angka Mengulang	% Guru Layak	Angka Lulusan	% RKB	% Perpus	Angka Putus Sekolah	Angka Mengulang	Jumlah
								0,4	0,2	0,1	0,2	0,05	0,05	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Bantul	93,58	98,33	95,60	76,40	0,79	0,30	37,43	19,67	9,56	15,28	0,04	0,02	81,88

2	Sleman	90,33	96,73	91,52	86,61	0,25	0,26	36,13	19,35	9,15	17,32	0,01	0,01	81,93
3	Gunungkidul	89,06	99,76	95,49	74,29	0,84	0,12	35,62	19,95	9,55	14,86	0,04	0,01	79,93
4	Kulon Progo	93,66	96,78	90,72	74,07	0,33	0,13	37,46	19,36	9,07	14,81	0,02	0,01	80,68
5	Yogyakarta	94,82	97,37	99,41	88,37	0,43	0,35	37,93	19,47	9,94	17,67	0,02	0,02	84,98
	<b>Rata-rata</b>	<b>92,30</b>	<b>97,74</b>	<b>94,89</b>	<b>81,02</b>	<b>0,51</b>	<b>0,25</b>	<b>36,92</b>	<b>19,55</b>	<b>9,49</b>	<b>16,20</b>	<b>0,03</b>	<b>0,01</b>	<b>82,12</b>

### KINERJA PEMERATAAN SD PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2012/2013

No.	Kabupaten /Kota	INDIKATOR					KINERJA PEMERATAAN SD					JUMLAH
		APM SD	AMK SD	RASIO SISWA PER SEK	RASIO SISWA PER KLS	RASIO KELAS PER RUANG KLS	APM SD	AMK SD	RASIO SISWA PER SEK	RASIO SISWA PER KLS	RASIO KELAS PER RUANG KLS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							0,4	0,3	0,1	0,1	0,1	1,0
1	Bantul	92,54	63,08	195,43	22,83	1,02	37,02	18,92	8,14	5,71	9,76	79,55
2	Sleman	101,59	92,27	173,32	24,49	1,00	40,00	27,68	7,22	6,12	10,00	91,02
3	Gunungkidul	88,45	50,18	108,73	16,77	0,98	35,38	15,05	4,53	4,19	9,84	68,99
4	Kulon Progo	90,92	44,63	96,61	15,27	1,05	36,37	13,39	4,03	3,82	9,57	67,17
5	Yogyakarta	122,93	62,84	262,91	26,20	1,02	40,00	18,85	10,00	6,55	9,84	85,25
	<b>Rata-rata</b>	<b>97,54</b>	<b>62,90</b>	<b>153</b>	<b>21</b>	<b>1,01</b>	<b>39,02</b>	<b>18,87</b>	<b>6,38</b>	<b>5,23</b>	<b>9,90</b>	<b>79,40</b>

### KINERJA PEMERATAAN SMP PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2012/2013

No.	Kabupaten	INDIKATOR	KINERJA PEMERATAAN SMP
-----	-----------	-----------	------------------------

	/Kota	APM SMP	AM SMP	RASIO SISWA PER SEK	RASIO SISWA PER KLS	RASIO KELAS PER RUANG KLS	APM SMP	AM SMP	RASIO SISWA PER SEK	RASIO SISWA PER KLS	RASIO KELAS PER RUANG KLS	JUMLAH
							0,4	0,3	0,1	0,1	0,1	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Bantul	75,78	105,90	317,97	28,34	1,01	30,31	30,00	8,83	7,09	9,87	86,10
2	Sleman	81,85	106,39	317,46	30,25	1,01	32,74	30,00	8,82	7,56	9,88	89,00
3	Gunungkidul	71,47	95,23	206,43	28,09	1,01	28,59	28,57	5,73	7,02	9,90	79,81
4	Kulon Progo	82,55	108,31	234,96	27,62	0,98	33,02	30,00	6,53	6,91	9,79	86,24
5	Yogyakarta	105,99	114,62	372,20	30,71	1,00	40,00	30,00	10,00	7,68	10,00	97,68
	<b>Rata-rata</b>	<b>81,13</b>	<b>105,62</b>	<b>283</b>	<b>29</b>	<b>1,01</b>	<b>32,45</b>	<b>30,00</b>	<b>7,87</b>	<b>7,27</b>	<b>9,94</b>	<b>87,54</b>

**KINERJA PEMERATAAN SM PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TAHUN 2012/2013**

No	Kabupaten /Kota	INDIKATOR					KINERJA PEMERATAAN SM					
		APK SM	AM SM	RASIO SISWA PER SEK	RASIO SISWA PER KLS	RASIO KELAS PER RUANG KLS	APK SM	AM SM	RASIO SISWA PER SEK	RASIO SISWA PER KLS	RASIO KELAS PER RUANG KLS	JUMLAH
		0,4	0,3	0,1	0,1	0,1	1,0					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Bantul	63,04	96,38	338,99	26,23	1,13	25,21	28,91	7,06	6,56	8,89	76,64
2	Sleman	55,06	98,58	308,86	26,39	1,04	22,02	29,57	6,43	6,60	9,63	74,25
3	Gunungkidul	51,99	78,19	320,36	27,18	1,16	20,79	23,46	6,67	6,80	8,61	66,33
4	Kulon Progo	66,99	101,89	305,19	25,59	1,19	26,80	30,00	6,36	6,40	8,37	77,92
5	Yogyakarta	88,65	171,74	417,01	28,33	1,07	35,46	30,00	8,69	7,08	9,38	90,61
	<b>Rata-rata</b>	<b>63,65</b>	<b>105,55</b>	<b>339</b>	<b>27</b>	<b>1,10</b>	<b>25,46</b>	<b>30,00</b>	<b>7,07</b>	<b>6,71</b>	<b>9,08</b>	<b>78,33</b>

